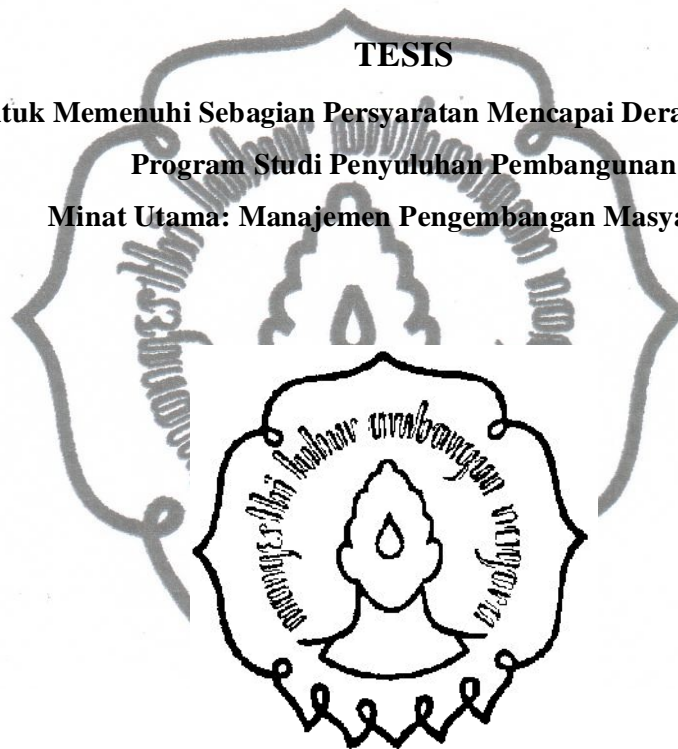


**ANALISIS PENDIDIKAN KRITIS DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
STUDI KASUS
PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI
PERKOTAAN (P2KP) KELURAHAN TEGALREJO, KECAMATAN
ARGOMULYO KOTA SALATIGA**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister
Program Studi Penyuluhan Pembangunan
Minat Utama: Manajemen Pengembangan Masyarakat**



**Diajukan oleh :
Rudi Santosa
S630306010**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

commit to user
2011

ANALISIS PENDIDIKAN KRITIS DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
STUDI KASUS
PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI
PERKOTAAN (P2KP) KELURAHAN TEGALREJO, KECAMATAN
ARGOMULYO KOTA SALATIGA

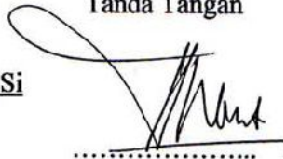

Disusun oleh :

Rudi Santosa

S630306010


Telah disetujui oleh Tim Pembimbing

Dewan Pembimbing :

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Pembimbing I	<u>Dr. Sapja Anantanyu, SP. M.Si</u> NIP. 196812271994031002		16 / 2011 / 8
Pembimbing II	<u>Dr. Ir. Mohd. Harisudin. M.Si</u> NIP. 196710121993021001		16 / 2011 / 8

Mengetahui

Ketua Program Studi Penyuluhan Pembangunan


Prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto, MS
NIP. 194707131981031001



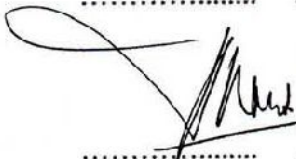

ANALISIS PENDIDIKAN KRITIS DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
STUDI KASUS
PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI
PERKOTAAN (P2KP) KELURAHAN TEGALREJO, KECAMATAN
ARGOMULYO KOTA SALATIGA

Disusun oleh :

Rudi Santosa

S630306010

Telah disetujui oleh Tim Penguji :

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua	<u>Prof. Dr. Ir. Suprpti Supardi, MP</u> NIP. 194808081976122001		22/8/2011
Sekretaris	<u>Dr. Ir. Suwanto, M.Si</u> NIP. 195611191983031002		22/8/2011
Anggota Penguji:	<u>Dr. Sapja Anantanyu, SP, M.Si</u> NIP. 196812271994031002		22/8/2011
	<u>Dr. Ir. Mohd. Harisudin, M.Si</u> NIP. 196710121993021001		22/8/2011

Mengetahui :

Ketua Program
Studi Penyuluhan
Pembangunan

Prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto, MS
NIP. 194707131981031001

Direktur Program
Pascasarjana

Prof. Drs. Suranto, M.Sc, Ph.D
NIP. 195708201985031004



23/8/2011

11/10/2011

PERNYATAAN

Nama : Rudi Santosa

NIM : S630306010

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis berjudul **ANALISIS PENDIDIKAN KRITIS DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN, STUDI KASUS PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP) KELURAHAN TEGALREJO, KECAMATAN ARGOMULYO KOTA SALATIGA** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam tesis tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut

Surakarta, 15 Agustus 2011

Yang Membuat Pernyataan



Rudi Santosa



Motto

Hakikat ilmu bukan sekedar **kenggablehan intelektual**,
Tetapi bagaimana kita mampu merubah dunia.

Ilmu hanya akan **menjadi candu** dan penyakit

Ketika hanya dihafal tanpa kemampuan aksi

commit to user

PERSEMBAHAN

Untuk :

1. Ayahanda Alm. H. Siswoyo Siswoharsono dan Ibunda Hj. Hartati.
2. Bapak dan Ibu Mertua Yoso Sukarno dan Waryani.
3. Istri dan anak-anaku (Syafa Zeghy Ardiansyah & Diva Raihan Ardiansyah) tercinta.
4. Saudara-saudaraku keluarga besar BANI SUWAD ATMOSUMARTO & SUKINI.
5. Rekan-rekan konsultan PNPM-P2KP KMW 5 Provinsi Jawa Tengah.
6. Warga Masyarakat Kelurahan Tegalrejo.

commit to user

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke Hadirat Alloh SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, maka pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **ANALISIS PENDIDIKAN KRITIS DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN STUDI KASUS PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP) KELURAHAN TEGALREJO, KECAMATAN ARGOMULYO KOTA SALATIGA.**

Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai derajat magister pada Program Studi Penyuluhan Pembangunan, Minat Utama Manajemen Pengembangan Masyarakat, Program Pascasarjana di Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam penulisan tesis ini, penulis mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Prof. Drs. Suranto, M.Sc, Ph.D selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Prof. Dr. Totok Mardikanto, MS selaku Ketua Program Studi Penyuluhan Pembangunan Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

commit to user

4. Alm. Prof. HB. Sutopo. MSc. Ph.D selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi dalam penyusunan tesis ini sebelum beliau berpulang kepada Sang pencipta.
5. Dr. Sapja Anantanyu, SP, M.Si selaku pembimbing I (pengganti) yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi dalam penyusunan tesis ini.
6. Dr. Ir. Mohd. Harisudin, M.Si selaku pembimbing II yang juga telah banyak memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi dalam penyusunan tesis ini.
7. Prof. Dr. Ir. Suprpti Supardi, MP selaku Ketua Penguji yang telah banyak memberikan kritik dan saran sehingga membuka wawasan penulis untuk menyempurnakan tesis ini.
8. Dr. Ir. Suwarto, M.Si selaku Sekretaris Penguji yang telah banyak memberikan saran perbaikan tesis ini.
9. Seluruh Dosen Program Studi Penyuluhan Pembangunan dan Civitas Akademika Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
10. Pemerintah Kota Salatiga dan Pemerintah Kecamatan Argomulyo.
11. Bapak Agung Pitoyo, AP selaku Kepala Kelurahan, dan seluruh perangkat pemerintahan kelurahan dan warga kelurahan Tegalrejo yang telah membantu penulis dalam proses pengumpulan data untuk penyusunan tesis ini.
12. Seluruh Anggota Pimpinan Kolektif BKM "Wijayakusuma" kelurahan Tegalrejo, kecamatan Argomulyo, kota Salatiga beserta dengan Unit-Unit Pengelolanya.

13. Ayahanda Alm. H. Siswoyo Siswoharsono, Ibunda Hj. Hartati, Istri Tercinta Sukarni, SE.Par, anak-anaku yang manis, dan saudara-saudaraku yang senantiasa memberikan dorongan, motivasi dan perhatian kepada penulis.

14. Teman-teman Program Studi Penyuluhan Pembangunan program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret : Pak Urip, Pak Yos, Mas Imam, Mas Djalil, Mas Sigit, Mba Emy Farida, Michael, dan Arvian.

15. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Akhirnya penulis juga berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi upaya-upaya pengembangan masyarakat di negeri tercinta Indonesia.

Surakarta, 15 Agustus 2011



Rudi Santosa
Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman judul	i
Halaman Pengesahan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan Tesis	iii
Pernyataan	iv
Motto	v
Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xv
Daftar Bagan	xvii
Daftar Lampiran	xviii
Summary	xix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A Latar Belakang Penelitian	1
B Rumusan Masalah	9
C Tujuan Penelitian	11
D Manfaat Penelitian	12
 BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR	 14
A Kajian Teori	14

1	Pengertian Pembangunan	14
2	Definisi dan Dimensi Kemiskinan	16
3	Pendidikan dan Pendidikan Kritis	23
4	Pemberdayaan	37
	a. Pemberdayaan Masyarakat	37
	b. Partisipasi Masyarakat	44
	c. Pengembangan Kapasitas (<i>Capacity Building</i>)	51
	d. Pengembangan Kelembagaan (<i>Institutional Development</i>)	54
5	Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).....	56
B	Kerangka Pikir	87
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	91
A	Pemilihan Lokasi Penelitian	91
B	Strategi dan Bentuk Penelitian	91
C	Jenis Data dan Sumber Data	94
D	Teknik Sampling	98
E	Teknik Pengumpulan Data	99
F	Pengembangan Validitas	104
G	Teknik Analisis	107
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	112
A	Hasil Penelitian	112
1	Latar Belakang Kebutuhan Masyarakat (<i>Faktor Context</i>)	112

a. Karakteristik Geografis	112
b. Sejarah Kelurahan Tegalrejo	113
c. Kondisi Sosial Ekonomi	124
d. Kondisi Sosial Budaya	127
e. Potensi Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum	130
2 Jenis dan Kualitas Input Pendidikan Kritis dalam Pelaksanaan	
P2KP (<i>Faktor Input</i>)	134
a. Pengembangan Kapasitas Masyarakat	134
b. Pendanaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) P2KP	152
c. Pendamping Masyarakat (Fasilitator P2KP)	155
c. Sarana dan Prasarana yang Mendukung Pelaksanaan Program.	162
3 Pelaksanaan Kegiatan P2KP (<i>Faktor Process</i>)	164
1. Tahap Persiapan P2KP di Tingkat Pusat dan Daerah	165
2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan P2KP di Tingkat Masyarakat	166
a. Persiapan Masyarakat	167
b. Identifikasi Masalah dan Kebutuhan	174
c. Perencanaan Kegiatan	188
d. Pelaksanaan Kegiatan	201
e. Pengawasan Kegiatan (Monitoring dan Evaluasi)	206
4 Capaian Pelaksanaan P2KP (<i>Faktor Product</i>)	210
a. Output	211
b. Outcome	218

B	Pembahasan	219
1	Pokok-Pokok Temuan	219
2	Pembahasan kesesuaian antar faktor dalam pelaksanaan Siklus P2KP	225
1)	Kesesuaian antara latar belakang dan kebutuhan masyarakat (<i>Faktor Context</i>) dengan Pelaksanaan Kegiatan P2KP (<i>Faktor Process</i>)	226
2)	Kesesuaian antara jenis dan kualitas input pelaksanaan P2KP (<i>Faktor Input</i>) dengan Pelaksanaan Kegiatan P2KP (<i>Faktor Process</i>).....	231
3)	Kesesuaian antara Pelaksanaan Kegiatan P2KP (<i>Faktor Process</i>) dengan hasil pelaksanaan P2KP (<i>Product</i>).....	235
4)	Kesesuaian antara latar belakang masyarakat dan kebutuhan masyarakat, jenis dan kualitas input, pelaksanaan P2KP dengan hasil pelaksanaan kegiatan P2KP (<i>Product</i>)	239
3	Kekuatan dan kelemahan pelaksanaan P2KP sebagai proses pendidikan kritis di Kelurahan Tegalrejo	249
4	Keterbatasan penelitian	252
BAB V	PENUTUP	254
A	Simpulan	254
B	Implikasi	258
1	Implikasi Teoritis	258

2	Implikasi Praktis	261
C	Rekomendasi	263
DAFTAR PUSTAKA		268



DAFTAR TABEL

Tabel : 2.1	Kontinum Partisipasi	49
Tabel : 2.2	Matrik Pembelajaran Kritis dalam P2KP	83
Tabel : 3.1	Profil Informan dalam Wawancara Penelitian	100
Tabel : 3.2	Profil Peserta FGD Kelompok Umum	102
Tabel : 3.3	Profil Peserta FGD Anggota BKM	102
Tabel : 4.1	Silsilah Kepala Kelurahan Tegalrejo	116
Tabel : 4.2	Susunan Pengurus LPMK Kelurahan Tegalrejo	118
Tabel : 4.3	Susunan Pengurus PKK Kelurahan Tegalrejo	120
Tabel : 4.4	Perangkat Kelurahan Tegalrejo	122
Tabel : 4.5	Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian Tahun 2004	125
Tabel : 4.6	Uraian Topik-Topik Pelatihan Relawan	135
Tabel : 4.7	Uraian Topik-topik Pelatihan Anggota BKM	139
Tabel : 4.8	Uraian Topik-Topik Pelatihan Sekretaris dan Unit-Unit Pengelola BKM	143
Tabel : 4.9	Topik-topik materi Pelatihan Lanjutan UPL	145
Tabel : 4.10	Topik-topik materi Pelatihan Lanjutan UPS	146
Tabel : 4.11	Topik-topik materi Pelatihan Lanjutan UPK	146
Tabel : 4.12	Tabel Siklus P2KP dan Capaian Hasil	147
Tabel : 4.13	Jenis <i>Coaching</i> , Pelaksanaan dan Peserta dalam P2KP	150
Tabel : 4.14	Ketentuan dan Sifat Penggunaan Dana BLM	154
Tabel : 4.15	Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi	173

Tabel : 4.16	Keterlibatan Masyarakat dalam Siklus Refleksi Kemiskinan	175
Tabel : 4.17	Keterlibatan Masyarakat dalam Siklus Pemetaan Swadaya	186
Tabel : 4.18	Hasil Pemilihan Anggota BKM Wijayakusuma	194
Tabel : 4.19	Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan PJM Pronangkis	197
Tabel : 4.20	Pemanfaatan BLM P2KP Termin I	202
Tabel : 4.21	Pemanfaatan BLM P2KP Termin II	204
Tabel : 4.22	Pemanfaatan BLM P2KP Termin III	204
Tabel : 4.23	Perkembangan Modal Pinjaman Bergulir BKM Wijayakusuma	216
Tabel : 4.24	Chaneling dan Kemitraan BKM Wijayakusuma	218
Tabel : 4.25	Matrik Hubungan antar Faktor <i>Context, Input, Process</i> dan <i>Product</i>	246
Tabel : 4.26	Matriks Kekuatan dan Kelemahan Faktor <i>Context, Input, Process</i> dan <i>Product</i>	250

DAFTAR BAGAN

Bagan : 2.1	Konsep P2KP mengenai Akar Penyebab Kemiskinan dan Cara Penyelesaiannya	58
Bagan : 2.2	Siklus P2KP di Tingkat Kelurahan/Desa	64
Bagan : 2.3	Siklus P2KP Sebagai Aktualisasi Daur Pembangunan Partisipatif ...	65
Bagan : 2.4	Struktur Organisasi BKM	78
Bagan : 2.5	Skema Kerangka Pikir	90
Bagan : 3.1	Model Analisis Interaktif	109
Bagan : 4.1	Struktur Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Tegalrejo	117
Bagan : 4.2	Struktur Organisasi PKK Kelurahan Tegalrejo	120
Bagan : 4.3	Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Tegalrejo	122

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : 1	Matrik Metodologi Penelitian	272
Lampiran : 2	Pendidikan Kritis dalam Siklus P2KP	273
Lampiran : 3	Panduan Pengumpulan Data	281
Lampiran : 4	Panduan dan Hasil Observasi	293
Lampiran : 5	Hasil FGD Refleksi Kemiskinan Tingkat Kelurahan Tegalrejo Tahun 2006	298
Lampiran : 6	Data Pelaksanaan Pemilu BKM Wijayakusuma Tahun 2006	299
Lampiran : 7	Perencanaan Jangka Mengah Program Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan Tegalrejo Periode 2006 – 2009	300
Lampiran : 8	Foto Kegiatan	305
Lampiran : 9	Gambar Peta Kelurahan Tegalrejo	307
Lampiran : 10	Gambar Peta Kecamatan Argomulyo	308
Lampiran : 11	Gambar Peta Kota Salatiga	309
Lampiran : 12	Surat Permohonan Ijin Penelitian dari Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta	310
Lampiran : 13	Surat Ijin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	311

SUMMARY

Kemiskinan adalah persoalan struktural dan multidimensional, mencakup politik, ekonomi, asset dan lain-lain yang saling terkait dan saling mengunci, dan akhirnya secara akumulasi memperlemah masyarakat miskin (lemahnya etos kerja dan rendahnya perlawanan terhadap berbagai persoalan hidup yang dihadapi, cepat putus asa). Depa Naryan dkk (Dalam Kumpulan Modul Dasar Pelatihan Fasilitator PNPM-P2KP, 2007: 2). Berdasarkan data BPS tahun 2009 dikota Salatiga jumlah penduduk miskin sebanyak 14.100 jiwa atau sekitar 8,47% walaupun terjadi penurunan dari tahun ke tahun mulai dari tahun 2005 namun masih tetap menjadi perhatian pemerintah kota Salatiga untuk menanggulangnya.

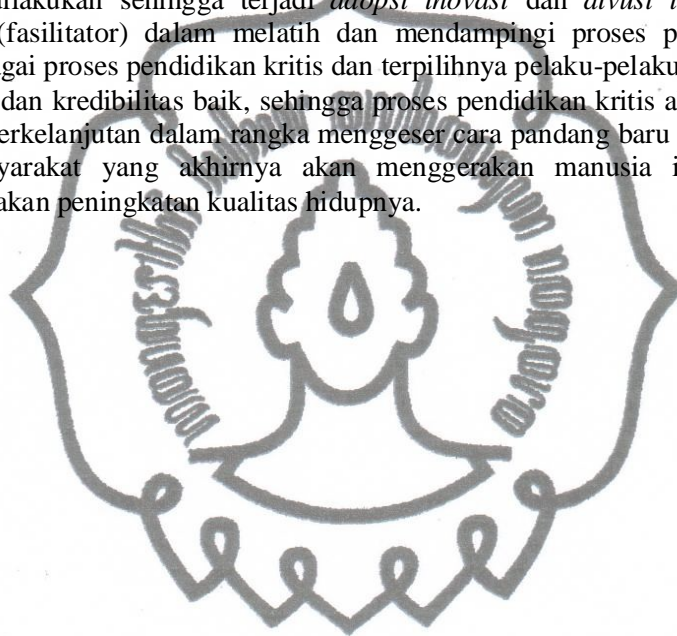
Program Penanggulangan Kemiskinan yang telah banyak dilaksanakan dengan berbagai metode dan pendekatan, realita menunjukan tidak terjadi perubahan yang cukup signifikan bahkan banyak program kemiskinan yang mengakibatkan ketergantungan dan menghancurkan *capital social yang ada* di masyarakat. Desain dari program yang seringkali menempatkan masyarakat hanya sebagai *object* dan tidak memberikan peran yang cukup untuk melakukan telaah yang kritis terhadap penyebab kemiskinan, kurangnya rangsangan kepada masyarakat untuk semakin peduli terhadap sesama, mengakomodasi potensi yang dimiliki, serta secara bersama-sama menanggulangi permasalahan yang dihadapi.

Model pembangunan yang selama ini berjalan jauh dari apa yang disebut pembangunan partisipatif, tidak pernah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dan belajar kritis dalam proses pembangunan itu sendiri. P2KP adalah sebuah program yang mencoba melakukan terobosan dengan pemikiran bahwa masalah kemiskinan lebih di akibatkan karena hancurnya modal sosial dan sendi-sendi kemasyarakatan yang ditandai dengan lunturnya nilai universal kemanusiaan sehingga penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui kegiatan-kegiatan penyadaran "Pendidikan Kritis" sebagai proses penyadaran dan pembangkitan nilai-nilai kemanusiaan tersebut, dengan demikian membangun manusia menjadi penting dalam pembangunan atau penyelesaian permasalahan kemiskinan, karena hal ini akan menggeser cara pandang baru yang akhirnya akan menggerakkan manusia itu sendiri untuk mengupayakan peningkatan kualitas hidupnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa proses pendidikan kritis yang dilakukan sebagai model pendekatan dalam penanggulangan kemiskinan pada pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di kelurahan Tegalrejo, kecamatan Argomulyo kota Salatiga. Penelitian ini termasuk penelitian studi kasus (*kualitatif*), pendekatan model yang digunakan adalah CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Pengambilan sampelnya dengan menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*), diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*),

observasi berperan penuh dan mencatat dokumen (*content analysis*). Teknik analisisnya menggunakan model analisis interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pendidikan kritis sangat dipengaruhi oleh latarbelakang sosial budaya masyarakat (*context*), masukan-masukan yang mendukung kelancaran proses pendidikan kritis (*input*), dan pelaksanaan proses pendidikan kritis itu sendiri (*process*) yang membutuhkan komitmen dan terus menerus dilakukan sehingga terjadi *adopsi inovasi* dan *divusi inovasi*. Kapasitas pemandu (fasilitator) dalam melatih dan mendampingi proses pelaksanaan siklus P2KP sebagai proses pendidikan kritis dan terpilihnya pelaku-pelaku yang mempunyai komitmen dan kredibilitas baik, sehingga proses pendidikan kritis akan berjalan lebih baik dan berkelanjutan dalam rangka menggeser cara pandang baru dan merubah pola pikir masyarakat yang akhirnya akan menggerakkan manusia itu sendiri untuk mengupayakan peningkatan kualitas hidupnya.



SUMMARY

Poverty is a structural and multidimensional problem, covering political, economic, and other assets are interrelated and interlocking, and finally the accumulation weakens the poor (lack of work ethic and low resistance to various life problems encountered, quickly discouraged). Depa Naryan et al (In the Collection of Basic Training Modules Facilitator PNPM-P2KP, 2007: 2). According to the BPS in 2009 in the town of Salatiga number of poor people as much as 14 100 inhabitants or approximately 8.47% despite a decline from year to year starting from 2005 but still remains a concern of Salatiga city's government to mitigate them.

Poverty reduction programs which have been widely implemented by various methods and approaches, reality shows no significant changes occur even many poverty programs that lead to dependency and destroy existing social capital in communities. The design of the programs that often puts people only as objects and not give a considerable role to perform a critical study of the causes of poverty, lack of stimulation to the community for more care for others, to accommodate potential, and jointly tackle the problems faced.

Development model that had been running away from what is called participatory development, never allowing the public to get involved and learn critical in the development process itself. P2KP is a program that tries to make a breakthrough in thinking that the problem of poverty arises because the destruction of social capital and civic joints characterized by the erosion of universal humanity so that poverty reduction is done through awareness-raising activities "Critical Education" as the process of raising awareness and generating value-humanitarian values, thereby building a man to be important in the development or problem solving of poverty, as this would shift the new way of thinking will ultimately drive the man himself to work on improving the quality of life.

This study aims to assess and analyze critical educational processes conducted as a model approach in poverty reduction on the implementation of the Urban Poverty Program (P2KP) in the village Tegalrejo, Argomulyo district town of Salatiga. This research includes case study research (qualitative), the approach used is the CIPP model (Context, Input, Process, Product). Taking the sample using purposive sampling. Technique of data collection used is *wawancara mendalam* (in-depth interviews), *diskusi kelompok terarah* (Focus Group Discussion), observations into full play and record the document (content analysis). Analysis techniques using the interactive analysis model.

The results showed that the process of critical education is strongly influenced by social and cultural background (context), the inputs that support the smooth process of critical education (input), and the implementation of critical educational process itself (process) that needs commitments and continue to be done so occurs innovation adoption and diffusion of innovation. Guide capacity (facilitator) to train and assist the implementation process P2KP cycle as a process

commit to user

of critical education and the election of actors who have the commitment and good credibility, so that critical educational process will run better and sustainable in order to shift the way of new and changing the mindset of society which will ultimately drive the man himself to work on improving the quality of life.



BB**BHUN**

A. Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan masih menjadi isu utama dalam pembangunan sosial ekonomi di Indonesia. Upaya mengatasi kemiskinan telah dilakukan antara lain dengan menyediakan beberapa kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, perluasan kesempatan kerja dan pembangunan pertanian. Bahkan pemberian bantuan langsung tunai juga telah ditempuh sehubungan dengan kenaikan harga BBM tahun 2005 sebagai bagian dari tanggap darurat kondisi kemiskinan di Indonesia.

Di Provinsi Jawa Tengah jumlah penduduk miskin telah mengalami penurunan dari 5,72 juta jiwa (17,72 %) pada tahun 2009 menjadi sebanyak 5,37 juta jiwa (16,56 %) pada tahun 2010. Meskipun jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah telah mengalami penurunan namun pada hakekatnya jumlahnya masih relatif tinggi, hal ini mengharuskan upaya penanggulangan kemiskinan memerlukan kerja keras dan serius dari seluruh pemangku kepentingan baik, pemerintah Pusat, Daerah maupun seluruh komponen (Masyarakat, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, LSM dan lain-lain) (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2010).

Kemiskinan merupakan persoalan struktural dan multidimensional, mencakup politik, sosial, ekonomi, asset dan lain-lain dengan akar permasalahan terletak pada sistem ekonomi politik bangsa yang bersangkutan

commit to user

di mana masyarakat menjadi miskin, oleh karena adanya kebijakan ekonomi dan politik yang kurang menguntungkan mereka, sehingga mereka tidak mempunyai akses yang memadai ke sumberdaya - sumberdaya kunci yang dibutuhkan, untuk menyelenggarakan hidup mereka secara layak, akibatnya mereka hidup di bawah standar yang tidak lagi dianggap manusiawi baik dari aspek ekonomi, aspek pemenuhan kebutuhan fisik, aspek sosial dan secara politik mereka juga tidak memiliki sarana untuk ikut dalam pengambilan keputusan penting yang menyangkut hidup mereka (Parwoto, 2007)

Aspek-aspek tersebut diatas berlangsung timbal balik saling terkait dan saling mengunci dan akhirnya secara akumulatif memperlemah masyarakat miskin. Situasi seperti ini bila tidak segera ditanggulangi akan memperparah kondisi masyarakat miskin yang ditandai dengan lemahnya etos kerja dan rendahnya perlawanan terhadap berbagai persoalan hidup yang dihadapi. Persoalan hidup dipandang sebagai sesuatu hal yang harus terjadi dan manusia hanya bisa menerima nasib (bukan pasrah tetapi putus asa), selain itu juga memasrahkan semua apa yang terjadi adalah tugas dari pemerintah padahal mereka sendiri sebagai masyarakat juga ikut bertanggungjawab dengan apa yang terjadi pada diri mereka sendiri. Kebiasaan buruk yang terpaksa mereka lakukan dalam rangka jalan pintas untuk mempertahankan hidup mereka yang bila berlarut-larut akan menghasilkan budaya kemiskinan yang sulit diberantas.

Di sisi lain selama ini banyak pihak lebih melihat persoalan kemiskinan hanya pada tataran gejala-gejala yang tampak terlihat dari luar

atau di tataran permukaan saja, yang mencakup multidimensi, baik dimensi politik, sosial, ekonomi, aset dan lain-lain. Orientasi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang hanya menitikberatkan pada salah satu dimensi dari gejala-gejala kemiskinan misalnya hanya diarahkan pada meningkatkan penghasilan masyarakat miskin melalui berbagai program ekonomi untuk meningkatkan penghasilan masyarakat miskin seperti pelatihan ketrampilan, bantuan hewan ternak, pemberian kredit lunak dan penambahan modal usaha dengan harapan akan meningkatkan penghasilan. Semua ini tidak dapat disangkal akan meningkatkan penghasilan masyarakat miskin tetapi tidak serta merta menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Semua ini pada dasarnya mencerminkan pendekatan program yang bersifat *parsial*, sektoral, *charity* dan tidak menyentuh akar penyebab kemiskinan itu sendiri. Akibatnya program-program yang dimaksud tidak mampu menumbuhkan kemandirian masyarakat yang pada akhirnya tidak akan mampu mewujudkan aspek keberlanjutan (*sustainability*) dari program-program penanggulangan kemiskinan tersebut.

Kesalahan mendasar saat ini adalah melihat kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang disebabkan oleh rendahnya penghasilan (aspek ekonomi) mereka, sehingga pemecahan yang logis adalah dengan meningkatkan penghasilan. Peningkatan penghasilan di sini seolah-olah menjadi obat yang mujarab terhadap semua persoalan kemiskinan, tetapi apa yang terjadi selama ini ternyata upaya penanggulangan kemiskinan hanya melihat pada penyelesaian ciri fisik

kemiskinan yang terlihat dari luar saja, tidak sampai kepada akar permasalahan kemiskinannya yang berupa nilai-nilai baik dari manusia (kejujuran, keadilan, keikhlasan, dapat dipercaya, kesetaraan dan kesatuan dalam keragaman), sehingga program penanggulangan kemiskinan tidak akan pernah menyelesaikan permasalahan kemiskinan itu sendiri, karena sebetulnya akar dari kemiskinan bukan pada penghasilan (gejala-gejala kemiskinan) tetapi pada pola pikir dan karakter manusianya (Anonim, 2007).

Tinggi rendahnya penghasilan seseorang erat kaitannya dengan berbagai peluang yang dapat diraihnya. Jadi lebih merupakan akibat dari suatu situasi yang disebabkan oleh kebijakan politik yang tidak adil yang diterapkan sehingga menyebabkan sebagian masyarakat tersingkir dari sumberdaya kunci yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan hidup mereka secara layak. Permasalahan tersebut sudah banyak dupayakan, mulai dari membicarakan, mengidentifikasi dan merumuskan bahkan sudah sampai kepada melakukan upaya-upaya penanggulangannya tetapi juga masih pada tataran gejala-gejala kemiskinan saja. Diskusi mengenai akar permasalahan atau penyebab kemiskinan hampir selalu dihindari atau malah sering ditabukan karena akar penyebab kemiskinan adalah justru **"tidak adanya keadilan"** di masyarakat (Anonim, 2007).

Berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terdahulu dalam kenyataannya sering menghadapi kondisi yang kurang menguntungkan, misalnya salah sasaran, terciptanya benih-benih fragmentasi sosial, dan melemahkan nilai-nilai kapital sosial yang ada di masyarakat (gotong royong,

musyawarah, keswadayaan dll). Lemahnya nilai-nilai kapital sosial pada gilirannya juga mendorong pergeseran perubahan perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara bersama. Kondisi kapital sosial serta perilaku masyarakat yang melemah serta memudar tersebut salah satunya disebabkan oleh keputusan, kebijakan dan tindakan dari pengelola program kemiskinan dan pemimpin-pemimpin masyarakat yang selama ini cenderung tidak adil, tidak transparan dan tidak tanggung gugat (tidak *pro poor* dan *good governance oriented*). Sehingga menimbulkan kecurigaan, *stereotype* dan *skeptisme* di masyarakat (Anonim, 2007).

Keputusan, kebijakan dan tindakan yang tidak adil ini biasanya terjadi pada situasi tatanan masyarakat yang belum madani, dengan salah satu indikasinya dapat dilihat dari kondisi kelembagaan masyarakat yang belum berdaya, yang tidak berorientasi pada keadilan, tidak dikelola dengan jujur dan tidak ikhlas berjuang bagi kepentingan masyarakat. Kelembagaan masyarakat yang belum berdaya pada dasarnya disebabkan oleh karakteristik lembaga masyarakat tersebut yang cenderung tidak mengakar, dan tidak representatif.

Di samping itu, diindikasikan juga bahwa berbagai lembaga masyarakat yang ada saat ini, dalam beberapa hal, lebih berorientasi pada kepentingan pihak luar masyarakat atau bahkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu, sehingga mereka kurang memiliki komitmen dan kepedulian pada masyarakat di wilayahnya, terutama masyarakat miskin.

Dalam kondisi ini akan semakin mendalam krisis kepercayaan masyarakat terhadap berbagai lembaga masyarakat yang ada di wilayahnya.

Kondisi kelembagaan masyarakat yang tidak mengakar, tidak representatif dan tidak dapat dipercaya tersebut pada umumnya tumbuh subur dalam situasi perilaku/sikap masyarakat yang belum berdaya. Ketidakberdayaan masyarakat dalam menyikapi dan menghadapi situasi yang ada di lingkungannya, yang pada akhirnya mendorong sikap masa bodoh, tidak peduli, tidak percaya diri, mengandalkan bantuan pihak luar untuk mengatasi masalahnya, tidak mandiri, serta memudarnya orientasi moral dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, yakni terutama keikhlasan, keadilan dan kejujuran. Kondisi seperti ini hampir terjadi di seluruh wilayah di negara kita terutama wilayah perkotaan seperti kota Salatiga.

Salatiga adalah kota kecil yang berada di wilayah propinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk 146.392 jiwa. Jumlah KK yang ada sebanyak 31.781 sedangkan jumlah KK miskin 9.128 yang tersebar di 4 kecamatan dan 22 kelurahan. Kurang lebih sekitar 20% KK miskin adalah jumlah yang cukup besar untuk menjadi perhatian baik oleh pemerintah kota Salatiga maupun pemerintah pusat untuk dilakukan upaya-upaya dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan tersebut di antaranya adalah kelurahan Tegalrejo.

Kelurahan Tegalrejo merupakan salah satu kelurahan di kecamatan Argomulyo, wilayahnya termasuk dalam perkotaan karena berjarak sekitar 5 km dari kantor walikota Salatiga. Luas kelurahan Tegalrejo 188.430 Ha yang

terdiri dari wilayah lahan kering 178.424 Ha dan lahan lainnya 10.006 Ha. Topografi kelurahan ini bergelombang dan berbukit dengan struktur tanah didominasi tanah kering yang berupa tegalan dan sebagian perumahan. Melihat dari kondisi wilayah yang demikian maka sebagian besar warganya tidak bergantung pada pertanian, lahan kering atau yang disebut dengan tegalan hanya ditanami dengan tanaman keras kayu-kayuan dan ubi-ubian. Mata pencaharian masyarakat kelurahan Tegalrejo adalah buruh, swasta, berdagang dan sebagian pegawai negeri dan pensiunan. Permasalahan kemiskinan di kelurahan Tegalrejo juga menjadi perhatian bagi masyarakat sendiri dan pemerintah, di antaranya pemerintah pusat yang meluncurkan program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) pada tahun 2002.

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) memiliki konsep bahwa akar penyebab dari persoalan kemiskinan yang sebenarnya adalah karena kondisi masyarakat yang belum berdaya dengan indikasi kuat yang dicerminkan oleh perilaku/sikap/cara pandang masyarakat yang tidak dilandasi pada nilai-nilai universal kemanusiaan (jujur, dapat dipercaya, ikhlas, dll) dan tidak bertumpu pada prinsip-prinsip universal kemasyarakatan (transparansi, akuntabilitas, partisipasi, demokrasi, dll). Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan tersebut adalah melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat di mana masyarakat diajak untuk ikut serta dalam proses menanggulangi kemiskinan di wilayahnya mulai dari pengambilan keputusan menyusun perencanaan melaksanakan dan mengevaluasi serta

memonitor yang sekaligus menjadi proses pembelajaran kritis bagi masyarakat (Anonim, 2007).

Pendidikan dan kemanusiaan, adalah dua entitas yang saling tali temali. Pendidikan selalu (seharusnya) berhubungan dengan tema-tema dan problem kemanusiaan. Artinya, pendidikan diselenggarakan dalam rangka untuk memberikan peluang dari pengakuan derajat kemanusiaan. Minimal, manusia dihargai sebagai manusia. Pendidikan kritis diselenggarakan dalam rangka membebaskan manusia dari berbagai persoalan hidup yang melingkupinya seperti kemiskinan (Mangunwijaya, 2004). Membangun manusia menjadi penting dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan karena ini akan menggeser cara pandang baru yang akhirnya akan menggerakkan manusia itu sendiri untuk mengupayakan peningkatan kualitas hidupnya.

Selama ini yang terjadi adalah betapa proses pembangunan selalu tidak memberikan peluang kepada masyarakat untuk ikut terlibat dalam kegiatannya, mulai dari pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring dan evaluasi. Masyarakat tidak dianggap sebagai manusia yang seutuhnya, yaitu manusia yang punya perasaan, pikiran dan kemampuan. Model pembangunan yang selama ini berjalan jauh dari apa yang disebut pembangunan partisipatif, semua berasal dari pemerintah/penguasa dengan model *top down*, yang tidak pernah memberikan kesempatan masyarakat untuk terlibat dan belajar dalam proses pembangunan itu sendiri. Untuk itu pemerintah mengubah model pembangunannya dengan

pendekatan *bottom up planing* yaitu model pembangunan yang partisipatif yang memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut terlibat dalam setiap tahapan prosesnya. Salah satu dari program tersebut adalah Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di mana program ini selain menggunakan pendekatan ekonomi juga salah satu di antaranya adalah dengan menggunakan model pendidikan kritis. Setiap tahapan kegiatan P2KP memberikan peluang kepada seluruh masyarakat untuk ikut terlibat dan belajar dalam rangka mengupayakan penyelesaian persoalan kemiskinan di wilayah kelurahannya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini mengambil judul : **Analisis Pendidikan Kritis Dalam Penanggulangan Kemiskinan, (Studi Kasus Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diutarakan di atas , permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi dan karakteristik (*context*) kelurahan Tegalrejo khususnya dalam memahami model-model pelaksanaan program/pembangunan?
2. Bagaimana (*input*), apa sajakah dukungan yang disampaikan dalam pelaksanaan pendidikan kritis (siklus P2KP) di kelurahan Tegalrejo?

3. Bagaimana kegiatan atau implementasi (*process*) siklus P2KP sebagai proses pendidikan kritis dilaksanakan di kelurahan Tegalrejo?
4. Bagaimana hasil yang dicapai (*product*) dari siklus P2KP melalui proses pendidikan kritis di kelurahan Tegalrejo?
5. Bagaimana kesesuaian antarfaktor dalam pelaksanaan siklus P2KP sebagai proses pendidikan kritis yang dilaksanakan di kelurahan Tegalrejo yang meliputi :
 - a) Kesesuaian antara latar belakang dan kebutuhan masyarakat (*Faktor Context*) dengan Pelaksanaan Kegiatan P2KP (*Faktor Process*).
 - b) Kesesuaian antara jenis dan kualitas input pelaksanaan P2KP (*Faktor Input*) dengan Pelaksanaan Kegiatan P2KP (*Faktor Process*).
 - c) Kesesuaian antara Pelaksanaan Kegiatan P2KP (*Faktor Process*) dengan hasil pelaksanaan P2KP (*Product*).
 - d) Kesesuaian antara latar belakang masyarakat dan kebutuhan masyarakat (*Context*), jenis dan kualitas input, pelaksanaan P2KP (*Process*) dengan hasil pelaksanaan kegiatan P2KP (*Product*).
6. Bagaimana kekuatan dan kelemahan *factor context, input, process, dan product* dalam pelaksanaan siklus P2KP sebagai proses pendidikan kritis di kelurahan Tegalrejo sebagai dasar pengembangan saran (rekomendasi) bagi perbaikan pelaksanaan program selanjutnya?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini akan mengarahkan kajiannya secara teliti dengan tujuan :

1. Memahami dan mendeskripsikan kondisi, karakteristik dan kebutuhan masyarakat (*context*) kelurahan Tegalrejo khususnya dalam memahami model-model pelaksanaan program/pembangunan?
2. Memahami dan mendeskripsikan Masukan (*input*) apa sajakah dukungan yang disampaikan dalam pelaksanaan pendidikan kritis (siklus P2KP) di kelurahan Tegalrejo?
3. Memahami dan mendeskripsikan kegiatan atau implementasi (*process*) siklus P2KP sebagai proses pendidikan kritis dilaksanakan di kelurahan Tegalrejo?
4. Memahami dan mendeskripsikan hasil yang dicapai (*product*) dari siklus P2KP melalui proses pendidikan kritis di kelurahan Tegalrejo?
5. Memahami dan mendeskripsikan kesesuaian antarfaktor dalam pelaksanaan siklus P2KP sebagai proses pendidikan kritis yang dilaksanakan di kelurahan Tegalrejo yang meliputi :
 - a) Kesesuaian antara latar belakang dan kebutuhan masyarakat (*faktor context*) dengan Pelaksanaan Kegiatan P2KP (*faktor process*).
 - b) Kesesuaian antara jenis dan kualitas input pelaksanaan P2KP (*faktor input*) dengan Pelaksanaan Kegiatan P2KP (*faktor process*).
 - c) Kesesuaian antara Pelaksanaan Kegiatan P2KP (*faktor process*) dengan hasil pelaksanaan P2KP (*product*).

- d) Kesesuaian antara latar belakang masyarakat dan kebutuhan masyarakat (*context*), jenis dan kualitas input, pelaksanaan P2KP (*process*) dengan hasil pelaksanaan kegiatan P2KP (*product*).
6. Merumuskan kekuatan dan kelemahan *factor context, input, process, dan product* dalam pelaksanaan siklus P2KP sebagai proses pendidikan kritis di kelurahan Tegalrejo sebagai dasar pengembangan saran (rekomendasi) bagi perbaikan pelaksanaan program selanjutnya.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang berupa pengertian mendalam tentang pendidikan kritis dalam upaya penanggulangan kemiskinan pada kegiatan P2KP khususnya tentang kedudukan/posisi masyarakat dalam pembangunan/ penanggulangan kemiskinan, di kelurahan Tegalrejo bisa memberikan manfaat, baik manfaat teoretis maupun manfaat praktis bagi upaya-upaya perbaikan program pengembangan masyarakat.

1. Manfaat Teoretis

- a. Memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pengembangan masyarakat secara umum.
- b. Memberikan masukan yang berguna dalam merumuskan pendekatan dan strategi intervensi yang lebih tepat dalam pelaksanaan kegiatan program pengembangan masyarakat, khususnya P2KP.

2. Manfaat Paraktis

a. Bagi Lembaga

Bisa digunakan sebagai motivasi dan dasar dalam penyusunan rencana kegiatan dan strategi pengembangan lembaga BKM Wijayakusuma.

Bisa digunakan untuk memberikan sumbangan kepada pemerintah khususnya pemerintah kota Salatiga dan pemerintah kota/kabupaten lain dalam usaha pengembangan masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Bisa dimanfaatkan untuk memberikan sumbangan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat bahwa pendidikan kritis banyak memberikan kontribusi dalam upaya menyelesaikan permasalahan dan mengembangkan dirinya menjadi lebih sejahtera.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

1. Pengertian Pembangunan

Sejak era pasca dunia kedua, hampir semua Negara di dunia menghadapi sebuah tantangan utama, yaitu merumuskan model masyarakat yang ingin diwujudkan dan menentukan langkah-langkah strategis untuk mewujudkannya. Atau dengan kata lain Negara-negara tersebut tengah bekerja keras untuk melaksanakan pembangunan, yang menurut Misra dalam Tjokrowinoto (2002 : 1) adalah upaya yang sadar dan melembaga untuk mewujudkan keinginan yang lebih baik. Sebagai upaya yang sadar dan melembaga, pembangunan tidak boleh tidak, akan bermuatan nilai ; artinya pembangunan ingin mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik dalam sebuah bangsa. Citra atau image masyarakat yang ingin diwujudkan bersifat *culture-specific* dan *time-specific*, berbeda dari satu kultur atau Negara ke kultur atau Negara yang lain, dari satu waktu ke waktu yang lain, dipengaruhi oleh pengalaman historis dan konteks pembangunan itu sendiri.

Dalam perjalanannya, konsep pembangunan mengalami pergeseran paradigma seiring dengan perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh pembangunan itu sendiri. Pada dasawarsa 1950 dan 1960-an, pembangunan semata-mata dipandang sebagai fenomena ekonomi saja.

Paradigma ini berasumsi bahwa tingginya agregat pertumbuhan ekonomi akan mendorong terciptanya lapangan kerja dan peluang ekonomi sehingga menumbuhkan kondisi yang diperlukan demi terciptanya distribusi distribusi hasil-hasil pembangunan secara lebih merata, yang selanjutnya dikenal dengan prinsip *trickle down effect*. Argumen tersebut selanjutnya mulai diragukan ketika pada kenyataannya paradigma pertumbuhan ekonomi tidak mampu menjawab persoalan-persoalan yang terjadi seperti meningkatnya jumlah pengangguran, kesenjangan pendapatan dan kemiskinan (Anonim, 2007).

Kemajuan ekonomi memang menjadi komponen utama dalam pembangunan, akan tetapi bukan satu-satunya. Pembangunan bukan semata-mata fenomena ekonomi karena pembangunan adalah sebuah proses mengenai kualitas hidup masyarakat ditingkatkan baik material maupun sepiritual. Sebagaimana pernyataan yang dilontarkan oleh Bank Dunia dalam *World Development Report* tahun 1991, bahwa tantangan utama pembangunan adalah memperbaiki kualitas kehidupan. Kualitas yang lebih baik memang mensyaratkan adanya pendapatan yang lebih tinggi namun yang dibutuhkan bukan hanya itu. Banyak hal yang lain yang tidak kalah penting untuk diperjuangkan, mulai dari pendidikan yang lebih baik, peningkatan standar kesehatan dan nutrisi, pemberantasan kemiskinan, perbaikan lingkungan hidup, pemerataan kesempatan, pemerataan kebebasan individu, dan penyegaran kehidupan budaya.

2. Definisi dan Dimensi Kemiskinan

Depa Narayan, dkk dalam bukunya *Voices Of The Poor* (Anonim, 2007: 2), menulis bahwa yang menyulitkan atau membuat kemiskinan sulit ditangani adalah sifatnya yang multidimensional tetapi juga saling mengunci; dinamik, kompleks, sarat dengan sistem institusi (*consensus social*), gender dan peristiwa yang khas per lokasi. Pola kemiskinan sangat berbeda antar kelompok sosial, umur, budaya, lokasi dan negara juga dalam konteks ekonomi yang berbeda.

Lebih lanjut mereka juga memberikan 4 dimensi utama dari definisi kemiskinan yang dirumuskan oleh masyarakat miskin sendiri, sebagai berikut :

- a. Dimensi 1 : Dimensi material kekurangan pangan, lapangan kerja dengan muaranya adalah kelaparan atau kekurangan makan.
- b. Dimensi 2 : Dimensi psikologi, seperti antara lain ketidakberdayaan (*powerlessness*), tidak mampu berpendapat (*voicelessness*), ketergantungan (*dependency*), rasa malu (*shame*), rasa hina (*humiliation*).
- c. Dimensi 3 : Dimensi akses ke pelayanan prasarana yang praktis tidak dimiliki.
- d. Dimensi 4 : dimensi aset/milik, praktis tidak memiliki aset sebagai modal untuk menyelenggarakan hidup mereka secara layak seperti antara lain.

- Kapital fisik (*physical capital*), antara lain mencakup tanah, ternak, peralatan kerja, hunian, perhiasan, dan sebagainya.

Pada dasarnya masyarakat miskin memang praktis tidak memiliki benda-benda fisik yang diperlukan sebagai modal hidup mereka, seperti antara lain : tanah yang memadai, rumah atau tempat tinggal yang layak, perabotan rumah tangga, kendaraan, peralatan kerja, dan benda-benda fisik lainnya.

- Kapital manusia (*human capital*), antara lain menyangkut kesehatan, pendidikan dan pekerjaan.

Pada dasarnya masyarakat miskin tidak memiliki kualitas sumber daya manusia yang cukup baik yang dapat menjamin keberhasilan hidup mereka, mencakup tingkat kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, dan sebagainya belum lagi kualitas yang lain seperti etos kerja yang ulet, jiwa kewirausahaan, kepemimpinan dan sebagainya.

- Aset sosial (*social capital*), atau sering diartikan dalam hal ini sebagai sitem kekerabatan, yang mendukung kaum miskin tidak masuk jaringan formal pengamanan seperti asuransi yang mampu melindungi mereka dari berbagai krisis seperti musibah, keuangan dan lain-lain.

Masyarakat miskin memang selalu tersisih dari pranata sosial yang ada termasuk dari sistem asuransi sehingga mereka harus membangun sendiri institusi mereka agar mendapatkan jaminan

sosial (*social security*) yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidup mereka (*survival*) melalui kekerabatan antarmereka, asosiasi penghuni, yang seringkali menjadi sangat kuat oleh sebab rasa senasib sepenanggungan dan sebagainya

- Aset lingkungan (*evironmental asset*), antara lain mencakup iklim dan musim yang sangat berpengaruh pada petani, nelayan, dan sebagai pekerja lapangan.

Pada umumnya masyarakat miskin di perkotaan memang kurang atau malah tidak memiliki sumber-sumber lingkungan sebagai modal hidup mereka seperti air baku, udara bersih, tanaman, lapangan hijau, pohon-pohon dan sanitasi yang memadai, sementara para petani dan nelayan sangat tergantung kepada aset lingkungan dalam bentuk iklim dan musim.

Lebih lanjut ke empat dimensi tersebut sangat dipengaruhi oleh konteks yang lebih luas yaitu tatanan ekonomi makro dan sistem politik yang berlaku di negara tersebut.

Beberapa pendapat lain melihat kemiskinan dari sudut pandang yang sangat berbeda dan menyimpulkan kemiskinan sebagai berikut :

- a. Kemiskinan absolut, yaitu apabila penghasilan seseorang di bawah garis kemiskinan absolut, yaitu suatu ukuran tertentu yang telah ditetapkan di mana kebutuhan minimum masih dapat dipenuhi, dengan kata lain penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum yang ditetapkan dalam garis kemiskinan tersebut.

- b. Kemiskinan relatif, yaitu suatu kondisi perbandingan antara kelompok penghasilan dalam masyarakat.

Dari pola waktunya kemiskinan juga sering dibedakan sebagai berikut :

- a. Kemiskinan menaun (*peristent poverty*), yaitu kemiskinan yang kronis atau sudah lama terjadi, turun temurun, misalnya masyarakat di lokasi-lokasi kritis atau terisolasi.
- b. Kemiskinan sikliks (*cyclical poverty*), yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan.
- c. Kemiskinan musiman (*seasonal poverty*) yaitu kemiskinan yang terjadi secara khusus sesuai dengan musim seperti yang sering terjadi pada nelayan atau petani tanaman pangan.
- d. Kemiskinan mendadak (*accidental poverty*), yaitu kemiskinan yang terjadi oleh sebab bencana atau dampak oleh suatu kebijakan yang tidak adil.

Meskipun berbagai pihak melihat kemiskinan dari sudut pandang yang berbeda dan merumuskan kemiskinan juga berbeda, tetapi semua sepakat bahwa pada dasarnya kemiskinan mengandung arti majemuk yang sering kali sulit untuk dipahami dari satu sudut pandang saja.

Secara umum kemiskinan seringkali diartikan sebagai keterbelakangan, ketidakberdayaan, atau ketidakmampuan seseorang untuk mnyelenggarakan hidupnya sampai pada suatu taraf yang dianggap layak/manusiawi.

Dari berbagai pandangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keterbelakangan/ ketidakberdayaan/ ketidakmampuan ini mencakup beberapa beberapa dimensi sebagai berikut :

a. Dimensi politik

Tinjauan dari aspek politik ini, kemampuan seseorang diterjemahkan dalam bentuk rendahnya tingkat kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan politik yang penting yang langsung menyangkut hidupnya, tidak dimilikinya sarana-sarana yang memadai termasuk kelembagaan untuk terlibat secara langsung dalam proses politik. Akibatnya kaum miskin tidak memiliki akses ke berbagai sumberdaya kunci yang dibutuhkannya untuk menyelenggarakan hidupnya secara layak. Termasuk dalam hal ini adalah sumberdaya finansial dan sumberdaya alam. Oleh sebab tidak dimilikinya pranata sosial yang menjamin partisipasi masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan maka seringkali masyarakat miskin dianggap tidak memiliki kekuatan politik sehingga menduduki struktur sosial yang paling bawah, malah seringkali masyarakat miskin secara yuridis tidak diakui sebagai warga negara. Kemiskinan politik seringkali disebut juga sebagai kemiskinan struktural.

b. Dimensi Ekonomi

Tinjauan kemiskinan dari dimensi ekonomi ini diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk mendapatkan mata pencaharian yang mapan dan memberikan penghasilan yang layak untuk

menunjang hidupnya secara berkesinambungan yang terlihat dari rendahnya gizi makanan, tingkat kesehatan yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah, pakaian yang tidak layak dan sebagainya.

Pandangan ini banyak digunakan oleh berbagai pihak untuk menetapkan garis kemiskinan.

Berbagai lembaga memiliki ukuran masing-masing dalam menetapkan kemiskinan antara lain sebagai berikut :

- ◆ Prof Sayogyo (dalam Kumpulan Modul Dasar Pelatihan Fasilitator PNPM-P2KP, 2007: 5) menggambarkan tingkat penghasilan dengan mengukur pengeluaran setara beras per tahun untuk kategori :
 - Miskin di perkotaan 480 kg dan di perdesaan 320 kg.
 - Miskin sekali di perkotaan 360 kg dan di perdesaan 240 kg
 - Paling miskin di perkotaan 270 kg dan di perdesaan 180 kg
- ◆ BPS menggunakan tingkat pengeluaran per kapita per hari untuk memenuhi kebutuhan pokok yang dihitung sebagai kebutuhan kalori 2100 kalori per kapita per hari dan kebutuhan dasar bukan makanan dan menetapkan pada tahun 1999 Rp 93.896/kapita/bulan di perkotaan dan Rp 73.878/kapita/bulan di perdesaan.

c. Dimensi Aset

Tinjauan kemiskinan dari dimensi aset ini dirumuskan sebagai ketidakmampuan seseorang yang diterjemahkan sebagai rendahnya tingkat penguasaan seseorang terhadap hal-hal yang mampu menjadi

modal dasar seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya (*basic human needs*) seperti kapital manusia (pengetahuan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya), kapital fisik (tanah, perumahan yang layak, peralatan kerja, sarana produksi, kendaraan, dan sebagainya), kapital alam (udara, pohon, hewan dan sebagainya), kapital sosial (jaringan sosial, tradisi, dan sebagainya), kapital dana (tabungan, pinjaman dan sebagainya).

d. Dimensi budaya dan psikologi

Dari dimensi budaya, kemiskinan diterjemahkan sebagai terinternalisasikannya budaya kemiskinan baik di tingkat komunitas, keluarga maupun individu.

Di tingkat komunitas dicirikan dengan kurang terintegrasinya penduduk miskin dalam lembaga-lembaga formal masyarakat, ditingkat keluarga dicirikan dengan singkatnya masa kanak-kanak, longgarnya ikatan keluarga dan sebagainya sedangkan di tingkat individu terlihat seperti antara lain sifat tidak percaya diri, rendah diri, kurang mau berpikir jangka panjang oleh sebab kegagalan-kegagalan yang sering dihadapinya, fatalisme, apatis, tidak berdaya, ketergantungan yang tinggi, dan sebagainya.

Semua dimensi tersebut di atas bagi masyarakat miskin memiliki tingkat kerentanan yang tinggi karena sifatnya yang tidak mantap, seperti misalnya dimensi ekonomi bagi masyarakat miskin akan sangat berbeda dengan masyarakat kaya karena kebanyakan masyarakat miskin dan

masyarakat yang sedikit di atas garis kemiskinan memiliki mata pencaharian yang sangat labil sehingga guncangan sedikit saja (krisis) akan menyebabkan mereka terpuruk.

3. Pendidikan dan Pendidikan Kritis

Pendidikan pada dasarnya diselenggarakan dalam rangka membebaskan manusia dari berbagai persoalan hidup yang dilingkupinya. Pendidikan bagi Freire merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan fungsi manusia menjadi manusia agar terhindar dari berbagai bentuk penindasan, kebodohan sampai pada ketertinggalan (Freire, 2002:12-13) atau yang kemudian kita kenal dengan pendidikan kritis.

Pendidikan kritis sangat berhutang pada Paulo Freire sebagai peletak dasar filosofinya. Freire tokoh pendidikan kritis yang meletakkan dasar “pendidikan bagi kaum tertindas” asal Brazil memberikan makna pembebasan lebih ditekankan pada kebangkitan kesadaran kritis masyarakat. Freire lahir dan tampil dengan suara lantang menyatakan sikapnya terhadap kenyataan sosial yang carut marut.

Kekuatan Freire terletak pada kekuatan pemikiran yang mampu menukik langsung pada pokok-pokok persoalan dengan bahasa ungkap yang sangat sederhana. Freire bukan hanya mengembangkan pemikiran dalam kerangka teoretis akan tetapi juga langsung menerapkan gagasan-gagasannya dalam suatu rangkaian program aksi yang cukup luas terutama di Chili dan Brazil.

Pembicaraan tentang kebebasan menjadi tidak relevan apabila tidak ada korelasinya dengan kehidupan bersama. Mangunwijaya dalam Firdaus M. Yunus (2007 : 1) mengatakan semua negara yang beradab dan demokratis mengakui hak primer pendidikan. Maka pendidikan sebagai hak primer harus menjadi proses dialektis antarmanusia, karena sejak lahir manusia sudah diberikan bekal pendidikan oleh orang tua di rumah, kemudian mendapatkan pendidikan dalam lingkungan sekolah, dan pada akhirnya manusia menemukan pendidikan dari proses interaksi sosial dengan lingkungan masyarakat.

a. Manusia dan Dunia menjadi Pusat Masalah

Filsafat Freire bertolak dari kehidupan nyata, bahwa di dunia ini sebagian besar manusia menderita sedemikian rupa—sementara sebagian lainnya menikmati jerih payah orang lain dengan cara-cara yang tidak adil, dan kelompok yang menikmati ini justru bagian minoritas umat manusia. Persoalan itu yang disebut Freire sebagai “situasi penindasan”.

Bagi Freire, penindasan, apapun nama dan apapun alasannya, adalah tidak manusiawi, sesuatu yang merendahkan harkat kemanusiaan (*dehumanisasi*). Dehumanisasi bersifat mendua, dalam pengertian terjadi atas diri mayoritas kaum tertindas dan juga atas diri minoritas kaum penindas. Keduanya menyalahi kodrat manusia sejati. Mayoritas kaum tertindas menjadi tidak manusiawi karena hak-hak asasi mereka tidak dihargai, dibuat tidak berdaya dan dibenamkan

dalam “kebudayaan bisu” (*submerged in the culture of silence*). Adapun kaum penindas menjadi tidak manusiawi karena telah mendustai hakekat keberadaan hati nurani sendiri dengan memaksakan penindasan bagi kaum manusia sesamanya.

Maka dari itu tidak ada pilihan lain, ikhtiar memanusiakan kembali manusia (*humanisasi*) adalah merupakan pilihan mutlak. *Humanisasi* satu-satunya pilihan bagi kemanusiaan, karena walaupun *dehumanisasi* adalah kenyataan yang terjadi sepanjang sejarah peradaban manusia, namun ia bukanlah suatu keharusan sejarah. Suatu kenyataan tidaklah menjadi keharusan, jika kenyataan menyimpang dari keharusan, maka menjadi tugas manusia untuk mengubahnya agar sesuai dengan apa yang seharusnya. Itulah fitrah manusia sejati.

Bagi Freire, fitrah manusia sejati adalah menjadi pelaku atau subyek, bukan penderita atau obyek. Panggilan manusia sejati adalah menjadi pelaku yang sadar, yang bertindak mengatasi dunia serta realitas yang menindas. Dunia dan realitas atau realitas dunia ini bukan “sesuatu yang ada dengan sendirinya”, dan karena itu “harus diterima menurut apa adanya” sebagai suatu takdir atau nasib yang tidak terelakkan, semacam mitos. Manusia harus menggeluti dunia dan realitas dengan penuh sikap kritis dan daya-cipta, berarti perlu sikap orientatif pengembangan bahasa pikiran (*thought of language*), yakni bahwa pada hakekatnya manusia mampu memahami keberadaan dirinya dan lingkungannya dengan bekal pikiran dan tindakan

“*praxis*”nya ia mengubah dunia dan realitas. Maka dari itu manusia berbeda dengan binatang yang hanya digerakkan oleh naluri. Manusia juga memiliki naluri, tetapi juga mempunyai kesadaran (*consciousness*). Manusia memiliki kepribadian, eksistensi. Hal ini tidak berarti bahwa manusia tidak memiliki keterbatasan, tetapi dengan fitrah kemanusiaannya seseorang harus mampu mengatasi situasi-situasi batas (*limit situations*) yang mengekangnya. Jika seseorang pasrah, menyerah pada situasi batas tersebut, apalagi tanpa ikhtiar dan kesadaran sama sekali, maka sesungguhnya ia sedang tidak manusiawi.

Manusia adalah penguasa atas dirinya dan arena itu, fitrah manusia adalah menjadi merdeka, menjadi bebas, ini menjadi tujuan akhir dari upaya humanisasinya Freire. Humanisasi, karenanya juga berarti pemerdekaan atau pembebasan manusia dari situasi – situasi batas yang menindas di luar kehendaknya. Kaum tertindas harus memerdekakan dan membebaskan diri mereka sendiri dari penindasan yang tidak manusiawi sekaligus membebaskan kaum penindas mereka dari penjara hati nurani yang tidak jujur melakukan penindasan. Jika masih ada perkecualian, maka kemerdekaan dan kebebasan sejati tidak akan pernah tercapai secara penuh dan bermakna.

b. Pembebasan Menjadi Hakekat Tujuan

Bertolak dari pandangan filsafat tentang manusia dan dunia tersebut, Freire kemudian merumuskan gagasan-gagasannya tentang

hakekat pendidikan dalam suatu dimensi yang sifatnya sama sekali baru dan pembaru.

Bagi Freire, pendidikan haruslah berorientasi kepada pengenalan realitas diri manusia dan dirinya sendiri. Pengenalan ini tidak cukup hanya bersifat obyektif atau subyektif, tapi harus keduanya. Kebutuhan obyektif untuk mengubah keadaan yang tidak manusiawi selalu memerlukan kemampuan subyektif untuk mengenali terlebih dahulu keadaan yang tidak manusiawi, yang terjadi senyatanya, yang obyektif. *Obyektivitas* dan *subyektivitas* dalam pengertian ini menjadi dua hal yang tidak saling bertentangan, bukan suatu dikotomi dalam pengertian psikologis.

Kesadaran subyektif dan kemampuan obyektif adalah suatu fungsi dialektis yang ajeg (*constant*) dalam diri manusia dalam hubungannya dengan kenyataan yang saling bertentangan yang harus dipahaminya. Memandang kedua fungsi ini tanpa dialektika semacam itu, bias menjebak kita ke dalam kerancuan berfikir. Obyektivitas pada pengertian si-penindas bisa saja berarti subyektivitas pada pengertian si-tertindas, dan sebaliknya. Jadi hubungan dialek tersebut tidak berarti persoalan mana yang lebih benar atau yang lebih salah. Oleh karena itu, pendidikan harus melibatkan tiga unsur sekaligus dalam hubungan dialektisnya yang ajeg, yakni:

- ♦ Pengajar
- ♦ Pelajar atau anak didik

◆ Realitas dunia

Yang pertama dan kedua adalah subyek yang sadar (*cognitive*), sementara yang ketiga adalah obyek yang disadari (*cognizable*). Hubungan dialektis semacam inilah yang tidak terdapat pada sistem pendidikan mapan selama ini.

Sistem pendidikan yang pernah ada dan mapan selama ini dapat diandalkan sebagai sebuah “bank” (*banking concept of education*) dimana pelajar diberikan ilmu pengetahuan agar ia kelak dapat mendatangkan hasil dengan lipat ganda. Jadi anak didik adalah obyek investasi dan sumber deposito potensial. Mereka tidak berbeda dengan komoditi ekonomis lainnya yang lazim dikenal. Deposito atau investornya adalah para guru yang mewakili lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mapan dan berkuasa, sementara depositonya adalah berupa ilmu pengetahuan yang diajarkan pada peserta didik. Anak didik lantas diperlakukan seperti ‘bejana kosong’ yang akan diisi, sebagai sarana tabungan atau penanaman modal ilmu pengetahuan yang akan dipetik hasilnya kelak. Jadi guru adalah subyek aktif, sedang anak didik adalah obyek pasif yang penurut, dan diperlakukan tidak berbeda atau menjadi bagian dari realitas dunia yang diajarkan kepada mereka, sebagai obyek ilmu pengetahuan teoretis yang tidak berkesadaran.

Dalam pandangan seperti tadi, pendidikan akhirnya bersifat negatif di mana guru memberi informasi yang harus ditelan oleh

murid, yang wajib diingat dan dihapalkan. Secara sederhana Freire menyusun daftar antagonisme pendidikan ‘gaya bank’ itu sebagai berikut :

- ◆ Guru mengajar, murid belajar
- ◆ Guru tahu segalanya, murid tidak tahu apa – apa
- ◆ Guru berpikir, murid dipikirkan
- ◆ Guru bicara, murid mendengarkan
- ◆ Guru mengatur, murid diatur
- ◆ Guru memilih dan memaksakan pilihannya, murid menuruti
- ◆ Guru bertindak, murid membayangkan bagaimana bertindak sesuai dengan tindakan gurunya.
- ◆ Guru memilih apa yang akan diajarkan, murid menyesuaikan diri.
- ◆ Guru mengacaukan wewenang ilmu pengetahuan dengan wewenang profesionalismenya, dan mempertentangkannya dengan kebebasan murid – murid.
- ◆ Guru adalah subyek proses belajar, murid obyeknya.

Oleh karena itu guru yang menjadi pusat segalanya, maka merupakan hal yang lumrah saja jika murid-murid kemudian mengidentifikasikan diri seperti gurunya sebagai prototipe manusia ideal yang harus ditiru dan digugu, harus diteladani dalam semua hal. Freire menyebut pendidikan seperti itu menciptakan ‘*nekrofil*’ dan bukannya menghasilkan ‘*biofil*’. Implikasi lebih jauh adalah bahwa pada saatnya nanti murid-murid akan benar-benar menjadikan diri

mereka sebagai duplikasi guru mereka dulu, dan pada saat itulah akan lahir lagi generasi baru manusia-manusia penindas. Jika di antara mereka ada yang menjadi guru atau pendidik, maka daur penindasan segera dimulai dalam dunia pendidikan, dan demikian terjadi seterusnya. Karena itu, sistem pendidikan menjadi sarana terbaik untuk memelihara keberlangsungan *status-quo* sepanjang masa, bukan menjadi kekuatan penggugah ke arah perubahan dan pembaharuan.

Pola pendidikan seperti itu paling jauh hanya akan mampu mengubah 'penafsiran' seseorang terhadap situasi yang dihadapinya, namun tidak akan mampu mengubah 'realitas' dirinya sendiri. Manusia menjadi penonton dan peniru, bukan pencipta.

Akhirnya Freire sampai pada formulasi filsafat pendidikannya sendiri, yang dinamakannya sebagai '*pendidikan kaum tertindas*', sebuah sistem pendidikan yang ditempa dan dibangun kembali bersama dengan, dan bukan diperuntukkan bagi, kaum tertindas. Sistem pendidikan pembaharu ini, kata Feire adalah, pendidikan untuk pembebasan – bukan untuk penguasaan (*dominasi*). Pendidikan harus menjadi proses pemerdekaan, bukan penjinakan sosial budaya (*social and cultural domestication*). Pendidikan bertujuan menggarap realitas manusia, dan karena itu secara metodologis bertumpu di atas prinsip-prinsip aksi dan refleksi total – yakni prinsip bertindak untuk mengubah kenyataan yang menindas dan pada sisi simultan lainnya secara terus menerus menumbuhkan kesadaran akan realitas dan hasrat

untuk mengubah kenyataan yang menindas tersebut. Inilah makna dari *praxis*.

Dengan kata lain *praxis* adalah manunggal dari karsa, kata dan karya, karena manusia pada dasarnya adalah kesatuan dari fungsi berpikir, berbicara dan berbuat. Prinsip '*praxis*' inilah yang menjadi kerangka dasar sistem dan metodologi pendidikan tertindasnya Paulo Freire. Setiap waktu dalam prosesnya, pendidikan ini merangsang ke arah diambilnya suatu tindakan, kemudian tindakan tersebut direfleksikan kembali, dan dari refleksi itu diambil tindakan baru yang lebih baik. Dengan demikian seterusnya, sehingga proses pendidikan merupakan suatu daur bertindak dan berpikir yang berlangsung terus-menerus sepanjang hidup seseorang.

Pada saat bertindak dan berpikir itulah, seseorang menyatakan hasil tindakan dan buah pikirannya melalui kata-kata. Dengan daur belajar ini, maka setiap anak didik secara langsung dilibatkan dalam permasalahan-permasalahan realitas dunia dan keberadaan diri mereka di dalamnya. Karena itu, Freire juga menyebut model pendidikannya sebagai '**pendidikan hadap masalah**' (*problem posing education*). Anak didik menjadi subyek yang belajar, subyek yang bertindak dan berpikir, dan pada saat bersamaan berbicara menyatakan hasil tindakan dan buah pikirannya. Begitu juga sang guru.

Jadi keduanya (murid dan guru) saling belajar satu sama lain, saling memanusiakan. Dalam proses ini, guru mengajukan bahan untuk

dipertimbangkan oleh murid dan pertimbangan sang guru sendiri diuji kembali setelah dipertemukan dengan pertimbangan murid-murid, dan sebaliknya. Hubungan keduanya menjadi subyek-subyek, bukan subyek-obyek. Obyek mereka, adalah realita. Maka terciptalah suasana dialogis yang bersifat intersubjektif untuk memahami suatu obyek bersama.

c. **Penyadaran Merupakan Inti Proses**

Dengan aktif bertindak dan berfikir sebagai pelaku, dengan terlibat langsung dalam permasalahan yang nyata, dan dalam suasana yang dialogis, maka pendidikan kaum tertindasnya Freire dengan segera menumbuhkan kesadaran yang menjauhkan seseorang dari 'rasa takut akan kemerdekaan' (*fear of freedom*). Dengan cara menolak penguasaan, penjinakan dan penindasan, maka pendidikan kaum tertindasnya Freire secara langsung dan gamblang tiba pada pengakuan akan peran proses penyadaran. Pembebasan dan pemanusiaan manusia, hanya bisa dilakukan dalam artian yang sesungguhnya jika seseorang memang benar-benar telah menyadari realitas dirinya sendiri dan dunia sekitarnya, tidak pernah mampu mengenali apa sesungguhnya yang ingin ia lakukan, tidak akan pernah dapat memahami apa sesungguhnya yang ingin ia capai. Jadi sangatlah mustahil memahami seseorang bahwa ia harus mampu, dan pada hakekatnya memang mampu, memahami realitas dirinya dan dunia sekitarnya sebelum ia sendiri benar-benar sadar bahwa kemampuan itu adalah

fitrah kemanusiaan dan bahwa pemahaman itu sendiri adalah penting dan memang mungkin baginya.

Dengan kata lain, langkah awal yang paling menentukan dalam upaya pendidikan pembebasannya Freire, yakni suatu proses yang terus menerus, suatu '*commencement*', yang selalu 'mulai dan mulai lagi', maka proses penyadaran akan selalu ada dan merupakan proses yang sehati (*inherent*) dalam keseluruhan proses pendidikan itu sendiri. Maka, proses penyadaran merupakan proses inti atau hakikat dari proses pendidikan itu sendiri. Dunia kesadaran seseorang memang tidak boleh berhenti, mandeg, ia senantiasa harus tetap berproses, berkembang dan meluas, dari suatu tahap ke tahap berikutnya dari tingkat 'kesadaran naif' sampai ke tingkat 'kesadaran kritis', sampai akhirnya mencapai tingkat kesadaran tertinggi dan terdalam, yakni 'kesadarannya kesadaran'

Jika seseorang sudah mampu mencapai tingkat kesadaran kritis terhadap realitas, maka orang itupun mulai masuk ke dalam proses pengertian dan bukan proses menghafal semata-mata. Orang yang mengerti bukanlah orang yang menghafal, karena ia menyatakan diri atau sesuatu berdasarkan suatu 'sistem kesadaran', sedangkan orang yang menghafal hanya menyatakan diri atau sesuatu secara mekanis tanpa (perlu) sadar apa yang dikatakannya, dari mana ia telah menerima hafalan yang dinyatakannya itu, dan untuk apa ia menyatakannya kembali pada saat tersebut.

Di situlah letak berikut arti penting dari kata-kata, karena kata-kata yang dinyatakan seseorang sekaligus mewakili dunia kesadarannya, fungsi interaksi antara tindakan dan pikirannya. Menyatakan kata-kata benar, dengan cara benar, adalah menyatakan kata-kata yang memang disadari atau disadari maknanya, di situlah arti memahami realitas, berarti telah melakukan '*praxis*' dari situlah ia berperan, andil mengubah dunia. Tetapi kata-kata yang dinyatakan sebagai bentuk pengucapan dari dunia kesadaran yang kritis, bukanlah kata-kata yang diinternalisasikan dari luar tanpa refleksi, bukan slogan-slogan, namun berasal dari perbendaharaan kata-kata orang itu sendiri untuk menanamkan dunia yang dihayatinya sehari-hari, betapapun sederhananya.

Maka, pendidikan harus memberi keleluasaan bagi setiap orang untuk mengatakan kata – katanya sendiri, bukan kata-kata orang lain murid harus diberi kesempatan untuk mengatakan dengan kata-katanya sendiri, bukan kata-kata sang guru. Atas dasar itulah, Freire menyatakan bahwa proses pengaksaraan dan keterbacaan (*alfabetisasi dan literasi*) pada tingkat yang paling awal sekali dari proses pendidikan haruslah benar-benar merupakan suatu proses yang fungsional, bukan sekedar suatu kegiatan teknis mengajarkan huruf-huruf dan angka-angka serta merangkainya menjadi kata-kata dalam kalimat-kalimat yang telah tersusun secara mekanis. Berdasarkan pengalaman dan dialognya dengan kaum petani miskin dan buta huruf

(terutama di Brazil dan Chili), Freire kemudian menyusun suatu konsep pendidikan melek-huruf fungsional menggunakan perbendaharaan kata-kata yang digali dari berbagai 'tema pokok' (*generative themes*) pembicaraan sehari-hari masyarakat petani itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, konsep pendidikan melek huruf fungsional Freire ini terdiri dari tiga tahapan utama :

- ◆ Tahap *kodifikasi* dan *dekodifikasi*: merupakan tahap pendidikan melek huruf elementer dalam 'konteks konkrit' dan 'konteks teoretis' (melalui gambar-gambar, cerita rakyat, dan sebagainya).
- ◆ Tahap diskusi kultural : merupakan tahap lanjutan dalam suatu kelompok-kelompok kerja kecil yang sifatnya problematis dengan menggunakan 'kata-kata kunci' (*generative words*).
- ◆ Tahap aksi kultural : merupakan tahap '*praxis*' yang sesungguhnya dimana tindakan setiap orang atau kelompok menjadi bagian langsung dari realitas.

d. Freire dan Belajar dari Pengalaman

Ikhtisar singkat tentang filsafat pendidikannya Paulo Freire mungkin tidaklah sampai mampu menggambarkan kelengkapan dari kedalaman gagasannya, mungkin justru mengesankan bahwa gagasan Freire bukanlah gagasan yang benar-benar baru (Freire sendiri dengan rendah hati mengakui bahwa gagasannya adalah akumulasi dari gagasan – gagasan pemikir pendahulunya: Sartre, Althusser, Ortega Y Gasset, Martin Luther King, jr, Fromm, dan sebagainya). Namun satu

hal yang pasti adalah, bahwa Freire telah menampilkan semua gagasan besar tersebut secara unik dan membaharu, dengan rangkaian penerapan yang luas, dalam sector yang paling dikuasanya sebagai seorang ahli, seorang mahaguru, sejarah dan filsafat pendidikan di Universitas Recife, Brazilia.

Freire juga lahir di kota ini pada tahun 1912, meraih gelar doktor pendidikan juga pada Universitas Recife pada tahun 1959, dan antara tahun 1964 – 1969 ia bekerja sebagai konsultan UNESCO di Chili sambil menjalani masa pembuangan dan pengasingan politiknya oleh pemerintah militer Brazil saat itu. Freire kemudian menjadi guru besar tamu di Universitas Ilmu Pendidikan Universitas Harvard, Amerika Serikat, lalu menjabat sebagai Penasehat Pendidikan Dewan Gereja Sedunia di Jenewa.

Jika latar belakang akademis dan intelektual Freire bisa menjelaskan kompetensinya di bidang pendidikan, maka latar belakang kehidupan pribadinya akan lebih menjelaskan mengapa ia kemudian mencurahkan keahliannya itu khusus bagi masyarakat tertindas. Keluarga Freire adalah keluarga golongan menengah yang kemudian bangkrut dan menderita kemiskinan bersama mayoritas penduduk Recife yang memang miskin.

Pada usia 8 tahun, Freire malah dengan tegas bersumpah bahwa seluruh hidupnya nanti akan diabdikannya bagi kaum miskin dan tertindas di seluruh dunia. Ia benar-benar mentaati 'sumpah kanak-

kanak'nya. Ia memang mengenal benar dunia kaum yang dibelanya itu, karena ia sendiri memang berasal dari sana. Ia belajar dari pengalamannya, realitas dirinya dan dunianya, dan merumuskan sebuah falsafah, konsep, gagasan sampai metodologi pengetahuan dan penerapannya dengan cara yang sangat memukau.

Pernyataan-pernyataannya memang sering kontroversial, amat meletup-letup, dan memancing banyak pertanyaan, bahkan juga kritik. Namun fakta yang diajukan adalah realitas tak terbantahkan di hampir semua Negara dunia ketiga. Atas dasar itulah, konsep pendidikan Freire sampai sekarang tetap bernisbah untuk dikaji terus dan dikembangkan. Ia memang sebuah gagasan yang menantang, meskipun diungkapkan dalam gaya bahasa yang sederhana, dan tetap terbuka untuk diuji keabsahannya menurut realitas waktu, tempat, dan orang-orang di mana ia diterapkan.

4. Pemberdayaan

a. Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan berasal dari kata "*empowerment*". Menurut Merriem Webster dan oxford English Dictionary kata *empower* mengandung dua arti yaitu: 1) *to give power or authority to* (memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain), 2) *to give ability to or enable* (upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh (Purwodarminto, 2002),

pemberdayaan berasal dari kata daya, yang mengandung arti: 1) kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak, 2) kekuatan = tenaga, 3) muslihat dan 4) akal; ikhtiar; upaya. Pemberdayaan sendiri diartikan sebagai proses, cara, perbuatan, memberdayakan.

Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya, (Kartasmita, 1995; Mubyarto, 2000) Sedangkan (Mas'ood, 1990) mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau kekuatan (*strengthening*) kepada masyarakat.

Definisi lain lagi dikemukakan (Mardikanto, 2002 ; 83) yang mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice*). Memberdayakan masyarakat berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat (Mubyarto, 2000). Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan (*survive*) dan dalam

pengertian yang dinamis mempertahankan diri dan mencapai kemajuan.

Pemberdayaan tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat, tetapi juga meningkatkan harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Pemberdayaan sebagai konsep sosial budaya yang implementatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomis, tetapi juga nilai tambah sosial dan budaya (Hikmat, 2001: 99).

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan (Hikmat, 2001;3). Dengan kata lain memberdayakan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat (Mardikanto, 2002 : 83). Menurut Payne, dalam Hikmat, 2001 : 6), secara konservatif, pengertian pemberdayaan dibatasi oleh situasi mandiri. Menurut pandangan ini pemberdayaan memerlukan langkah-langkah secara menyeluruh dengan intervensi minimal pihak luar. Langkah-langkah itu sebagai berikut :

- Identifikasi kebutuhan
- Identifikasi pilihan atau strategis
- Keputusan atau pilihan tindakan
- Mobilisasi sumber-sumber
- Tindakan itu sendiri

Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan Craig Mayo dalam Hikmat, (2001 : 4) Proses pemberdayaan berakar kuat pada proses kemandirian tiap individu, yang kemudian meluas ke keluarga, serta kelompok masyarakat baik di tingkat lokal maupun nasional. Konsep pemberdayaan menempatkan manusia sebagai subyek.

Menurut Pranarka dan Vidhyandika dalam Harry Hikmat (2004), proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, yaitu :

- 1) Proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian melalui organisasi. Ini disebut dengan kecenderungan primer dari makna pemberdayaan.
- 2) Proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog/konsientisasi.

Kesadaran kritis dalam diri seseorang akan dapat dicapai dengan cara “melihat ke dalam diri sendiri”, serta mendengar apa yang didengar, dilihat dan dialami untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya. Konsientisasi merupakan suatu proses pemahaman situasi yang sedang terjadi sehubungan dengan hubungan-hubungan politik, ekonomi dan sosial. Seseorang menganalisis sendiri

masalah mereka, mengidentifikasi sebab-sebabnya, menetapkan prioritas dan memperoleh pengetahuan baru (Pranarka dan Vidhyandika, 1996 : 37).

Konsientisasi merupakan sesuatu yang terjadi pada diri seseorang, yang tidak dapat dipaksakan dari luar. Orang harus memutuskan sendiri apa kebutuhan dan pengalaman yang penting baginya, bukan diputuskan orang lain. Melalui analisis semacam itu orang mampu mengambil tindakan sendiri dan memecahkan masalah, untuk kemudian esensi partisipasi yang sungguh-sungguh (Pranarka dan Vindhyaandika, 1996 : 37).

Ada lima strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga Bina Swadaya yaitu :

- 1) Program pengembangan sumber daya manusia yang meliputi berbagai macam pendidikan dan latihan baik untuk anggota maupun pengurus kelompok, mencakup pendidikan dan latihan ketrampilan pengelolaan kelembagaan kelompok, teknis produksi dan usaha.
- 2) Program pengembangan kelembagaan kelompok, yang antara lain meliputi bantuan penyusunan mekanisme organisasi, kepengurusan, administrasi dan peraturan rumah tangga.
- 3) Program pemupukan modal swadaya dengan system tabungan dan kredit anggota, serta menghubungkan kelompok dengan lembaga

keuangan setempat untuk mendapatkan manfaat bagi pemupukan modal lebih lanjut.

- 4) Program pengembangan usaha produktif antara lain meliputi peningkatan usaha produksi dan jasa, pemasaran, yang disertai dengan kegiatan studi kelayakan usaha dan informasi pasar.
- 5) Program informasi tepat guna yang sesuai dengan tingkat pengembangan kelompok, berupa buku-buku yang dapat memberikan masukan yang dapat mendorong inspirasi ke arah inovasi usaha lebih lanjut.
- 6) Untuk menyelenggarakan program itu dibutuhkan motivator yang dilatih secara khusus dan berfungsi sebagai pendamping masyarakat (Priyono, 1996 : 107).

Kartasasmita dalam Anonim, 2007) mengemukakan bahwa upaya memberdayakan rakyat harus dilakukan melalui tiga cara :

- 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan.
- 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sarana fisik (irigasi, jalan, jembatan dan listrik) maupun social (sekolah dan pelayanan

fasilitas kesehatan) yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah.

- 3) Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau semakin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat.

Menurut (Suparjan dan Hempry Suyatno, 2003) ada empat hal yang perlu dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat agar pemberdayaan dapat berhasil, yaitu :

- 1) Meningkatkan kesadaran kritis atas posisi masyarakat dalam struktur sosial politik, hal ini berangkat dari asumsi bahwa sumber kemiskinan berasal dari konstruksi sosial (*social construction*) yang ada dalam masyarakat itu sendiri.
- 2) Kesadaran kritis yang muncul diharapkan masyarakat mampu membuat argumentasi terhadap berbagai macam eksploitasi serta sekaligus membuat keputusan terhadap hal tersebut.
- 3) Peningkatan kapasitas masyarakat, dalam hal ini perlu juga dipahami bahwa masalah kemiskinan bukan hanya sekedar kesejahteraan sosial, akan tetapi juga berkaitan dengan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan.
- 4) Pemberdayaan juga harus mengkaitkan dengan pembangunan sosial dan budaya masyarakat setempat, nilai-nilai yang ada pada tradisi budaya masyarakat lokal seperti gotongroyong, arisan,

sumbangan, dapat dipandang sebagai modal sosial (*social capital*) dalam mewujudkan kemajuan pembangunan masyarakat.

b. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menurut (Hetifah Sj dan Soemarto, 2003 : 17) adalah proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. (UNCHS, 1991) berpendapat bahwa partisipasi adalah pelibatan secara sukarela oleh masyarakat dalam pengambilan dan pelaksanaan keputusan yang langsung menyangkut hidup mereka. (Deepa Narayan, 1995), mengartikan partisipasi sebagai suatu proses yang wajar dimana masyarakat termasuk yang kurang beruntung (penghasilan, gender, suku, pendidikan) mempengaruhi atau mengendalikan pengambilan keputusan yang langsung menyangkut hidup mereka.

Conyers (1991 : 154-155) menyebutkan 3 alasan mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting, Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat, tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Alasan kedua, yaitu bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka

commit to user

kan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Alasan ketiga yang mendorong adanya partisipasi umum dibanyak Negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Hal ini selaras dengan *man-centered development* yaitu pembangunan yang diarahkan demi perbaikan nasib manusia.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam suatu program mutlak diperlukan, karena pada akhirnya masyarakatlah yang akan melaksanakan dan menikmati hasil program tersebut. Oleh karena itu, menurut (Suparjan dan Suyanto, 2003:59), masyarakat hendaknya perlu dilibatkan dalam tiap proses pembangunan, yaitu (1) identifikasi permasalahan, dimana masyarakat bersama para perencana atau pemegang otoritas kebijakan mengidentifikasi persoalan, (2) proses perencanaan, dimana masyarakat dilibatkan dalam penyusunan rencana strategi dengan berdasarkan pada hasil identifikasi; (3) Pelaksanaan proyek pembangunan; (4) evaluasi, yaitu masyarakat dilibatkan untuk menilai hasil pembangunan yang telah dilakukan; (5) mitigasi, yaitu sekelompok masyarakat dapat terlibat dalam mengukur sekaligus mengurangi dampak negative pembangunan; dan (6) monitoring, tahap yang dilakukan agar proses pembangunan yang dilakukan dapat berkelanjutan. Dalam tahap ini, juga dimungkinkan adanya

penyesuaian-penyesuaian berkaitan dengan situasi dan informasi terakhir dari program pembangunan yang telah dilaksanakan.

Senada dengan pendapat tersebut (Suharto, 2005 : 75) juga mengemukakan adanya 5 tahapan dalam sebuah program yaitu : (1) Identifikasi masalah; (2) penentuan tujuan; (3) penyusunan dan pengembangan; (4) pelaksanaan program; dan (5) evaluasi program. Lippit dalam Isbandi Rukminto Adi, (2001 : 179) juga mengemukakan bahwa tahapan untuk menumbuhkan kemandirian masyarakat meliputi persiapan, assessment, perencanaan alternative, program atau kegiatan, pemorfulasian rencana aksi, pelaksanaan program atau kegiatan, evaluasi dan terminasi. Lebih lanjut Lippit menyampaikan bahwa tahap tersebut adalah tahapan siklikal (*ciclycal*) yang dapat berputar guna mencapai perubahan yang lebih baik, terutama setelah dilakukan evaluasi proses terhadap pelaksanaan kegiatan yang ada.

Konsep partisipasi kemudian bergeser maknanya, bukan sekedar sebagai kata keadaan (keterlibatan masyarakat dalam pembangunan) tetapi juga menjadi kata kerja (pendekatan untuk mengantar masyarakat menjadi pelaku pembangunan). Pendekatan partisipatoris (*participatory approach*) menjadi jargon yang populer dibalik pergeseran makna ini. Menurut Isa Wahyudi (2006 : 33), peran pihak luar baik pemerintah maupun LSM dalam pendekatan partisipatoris mencakup tiga hal yaitu : penyadaran (*conscientization*), pengorganisasian masyarakat

(*community organizing*) dan penghantaran sumberdaya (*resources delivery*).

Emrich dalam Inayatullah, (1979 : 354) menyatakan bahwa untuk meningkatkan partisipasi ada beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain, partisipasi tersebut harus dimulai dari tingkat paling bawah yaitu mengikutsertakan kelompok marginal dan terpinggirkan misalnya wara miskin, partisipasi harus terjadi pada semua tahap proses pembangunan dan suatu dukungan semata-mata bukanlah partisipasi. Terkait dengan hal tersebut, bentuk-bentuk partisipasi setiap warga masyarakat dapat berupa : (1) menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat (2) melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakan partisipasi masyarakat yang lain (3) menggerakan sumberdaya masyarakat (4) mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan; dan (5) memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari hasil kegiatan Dusseldorp dalam Totok Mardikanto, (2003 : 88).

Dalam implementasinya, menurut Hetifah Sj dan Soemarto (2003 : 35), ada tiga hambatan utama menuju partisipasi yang baik yaitu, pertama, hambatan structural yang membuat iklim atau lingkungan menjadi kurang kondusif untuk terjadinya partisipasi. Kedua, hambatan internal masyarakat sendiri, diantaranya kurang inisiatif, tidak terorganisir dan tidak memiliki kapasitas memadai untuk terlibat secara produktif dalam pengambilan keputusan. Ketiga,

commit to user

hambatan akibat kurang terkuasainya metode dan teknik-teknik partisipasi.

Conyers (1991 : 201-202) berpendapat bahwa salah satu factor yang kadang-kadang membuat pendekatan partisipatif menjadi mundur adalah bahwa : pendekatan-pendekatan tersebut biasanya bukan merupakan cara yang efisien, bila efisien diukur dengan menggunakan waktu, uang serta usaha guna memenuhi suatu tujuan. Melibatkan masyarakat setempat dalam proses perencanaan membutuhkan waktu, uang dan tenaga manusia yang tidak sedikit, khususnya bila proses perencanaan tersebut ingin dilaksanakan dengan benar. Akhirnya sering sekali terjadi bahwa partisipasi masyarakat justru membuat proses perencanaan menjadi lebih rumit. Hal ini menimbulkan berbagai isu yang harus dipikirkan, tuntutan tuntutan yang harus dipenuhi, dan bahkan akan mengancam eksistensi program atau proyek yang diusulkan. Kondisi ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Verhagen (1996 : 10-12), bahwa terlalu sulit untuk memadukan pendekatan pendekatan proyek dan pendekatan proses pertumbuhan organik. Dalam konsep pertumbuhan organik terkandung makna menghargai atribut tertentu suatu masyarakat, mengikuti dan menggalinya agar berkembang menurut keunikannya melalui pemahaman hubungan yang kompleks antara masyarakat dan lingkungannya Ife, (1995 : 188-189). Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan diharapkan dapat tumbuh dari dalam. Pertumbuhan *organic* merupakan

konsep yang bertentangan dengan pembangunan yang bersifat mekanis yang memandang masyarakat dapat diatur sesuai dengan keinginan kita.

Dengan adanya hambatan-hambatan tersebut, partisipasi masyarakat disuatu wilayah akan berbeda dengan wilayah lain. Prety dalam Allen, (2002 : 28-29) mengelompokkan partisipasi menjadi 7 tingkatan table 2.1, pada pembangunan yang berkelanjutan, partisipasi masyarakat harus mencapai partisipasi interaktif (*co-learning*) dan tindakan kolektif mandiri (*self-mobilization*).

Tabel : 2.1
Kontinum Partisipasi

No	Level Partisipasi	Uraian
1	Partisipasi Manipulatif (<i>Cooption</i>)	Partisipasi masyarakat hanya sekedar hadir dalam pertemuan dan tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat, peserta juga sebatas orang-orang tertentu saja.
2	Partisipasi Pasif (<i>Compliance</i>)	Partisipasi masyarakat hanya sebatas menerima informasi dari manajemen proyek mengenai hal-hal yang diputuskan atau terlaksana. Informasi hanya milik agen dari luar.
3	Partisipasi Konsultatif	Masyarakat berpartisipasi melalui konsultasi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan. Masalah, proses pengumpulan informasi serta analisis ditentukan oleh agen luar. Proses konsultasi tidak melibatkan pengambilan keputusan.
4	Partisipasi Insentif	Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan sumber daya (misal tenaga) untuk memperoleh

No	Level Partisipasi	Uraian
		imbalan. Masyarakat tidak menjamin keberlanjutan kegiatan ketika insentif dihentikan.
5	Partisipasi Fungsional (<i>Cooperation</i>)	Partisipasi masyarakat dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan proyek oleh agen luar. Masyarakat berpartisipasi dengan membentuk kelompok untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan; mereka juga ikut dilibatkan dalam pengambilan keputusan tetapi setelah keputusan utama diambil oleh agen luar.
6	Partisipasi Interaktif (<i>Co-Learning</i>)	Masyarakat berpartisipasi dalam analisis, pengembangan rencana aksi dan informasi atau penguatan institusi lokal. Prosesnya melibatkan metodologi interdisipliner yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis. Masyarakat memiliki peran mengontrol keputusan-keputusan mereka dan menentukan sumberdaya yang digunakan sehingga mereka ikut andil dalam memelihara keberlanjutan program.
7	Tindakan Kolektif Mandiri (<i>Self-mobilisation atau Colective Action and Empowerment</i>)	Masyarakat mengambil inisiatif sendiri (bebas dari pengaruh luar) untuk mengubah sistem. Mereka membangun hubungan dengan lembaga luar untuk memperoleh sumberdaya dan bantuan teknis yang diperlukan, tetapi tetap mengontrol sumberdaya yang digunakan. Partisipasi ini dapat dikembangkan jika pemerintah/NGO menyediakan kerangka kerja yang mendukung.

Sumber : Kilvington Allen, et. al, 2002. Using Participatory ang Learning Based Approach for Environmental Management to Help Achieve Constructive Behaviour Changes. Landcare Research Contract Report 2002, hal 28-29.

Ide mengenai partisipasi masyarakat membentuk landasan prinsipoperasional kebijakan dan program pembangunan keberlanjutan. Bagaimanapun, partisipasi merupakan proses yang kompleks sehingga tidak ada pendekatan atau metodologi tunggal untuk mewujudkannya. Partisipasi adalah bukan peristiwa yang terjadi sekali dan selesai, partisipasi adalah proses yang berlangsung terus-menerus (*ongoing process*). Proses tersebut memerlukan waktu, sumberdaya, pemahaman dan ketekunan, tetapi tujuannya adalah proses pembangunan yang melibatkan masyarakat dari berbagai unsur yang berbeda-beda.

c. Pengembangan Kapasitas (*Capacity Building*)

Hakikatnya, pemberdayaan merupakan proses pembelajaran manusia untuk terlepas dari segala bentuk yang membelenggu manusia itu sendiri. Suparjan dan Hempry Suyanto (2003 : 64) mengungkapkan bahwa antara partisipasi masyarakat dengan kemampuannya untuk berkembang secara mandiri terdapat hubungan yang berkaitan satu dengan yang lainnya dimana didalamnya tercipta proses pemberdayaan. Di satu sisi kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri akan berpengaruh terhadap kemampuannya untuk berpartisipasi dan juga kemampuannya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Sementara disisi lain, kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri di tumbuhkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan di daerahnya. Oleh karena itu Isa Wahyudi (2006 : 33) berpendapat bahwa, hakekat dari pembangunan partisipatoris adalah

pengembangan kapasitas (*capacity development*) dan pengembangan kelembagaan (*institutional development*) komunitas lokal melalui ”proses belajar berdasarkan pengalaman” (*experience based learning process*) sehingga pada gilirannya masyarakat akan tampil sebagai pelaku pembangunan yang mandiri.

UNDP mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan peran dan fungsinya secara efektif, efisien dan berkelanjutan (Millen, 2001 : 4). Sedangkan pengembangan kapasitas adalah proses peningkatan kemampuan individu, kelompok, organisasi dan kelembagaan untuk memahami dan melaksanakan pembangunan dalam arti luas secara berkelanjutan (Totok Mardikanto, 1993 : 83, Millen, 2001 : 5). Beberapa upaya pengembangan kapasitas dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia menurut Isa Wahyudi (2006 : 34) bisa melalui pemberian modal untuk memenuhi kebutuhan dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi, penyuluhan teknologi tepat guna untuk peningkatan ketrampilan yang relevan, pelatihan manajerial untuk peningkatan kinerja pengelolaan usaha, dan pelibatan tenaga ahli untuk mendampingi komunitas bagi akses pengetahuan dan ketrampilan teknis.

Terkait dengan pelaksanaan P2KP di kelurahan Tegalrejo kota Salatiga upaya pengembangan kapasitas diantaranya dilakukan melalui pelatihan, coaching dan pelaksanaan tahapan siklus P2KP. Menurut Hickerson (1975 : 4) pelatihan adalah pembelajaran yang dirancang untuk

mengubah kinerja seseorang dalam melakukan pekerjaan. Selanjutnya, Hickerson (1975 : 12) menyatakan bahwa ada 6 fase yang harus dilakukan dalam pelatihan yaitu : analisis jabatan (*job analysis*), pengambilan keputusan (*decision to train*), menetapkan tujuan pelatihan (*setting training objective*), mendisain pelatihan (*designing training*), pelaksanaan (*implementation*), serta dukungan dan evaluasi sumatif (*suport and sumative evaluation*). Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh Suparjan dan Hempry Suyato (2003 : 87-88) yang menyebutkan langkah-langkah pelatihan bagi masyarakat meliputi beberapa rangkaian yaitu : (1) perencanaan kelembagaan, (2) peluang-peluang ekonomi dan identifikasi kebutuhan pelatihan, (3) persiapan pelatihan dan pengorganisasian, (4) pemberian pelatihan, (5) bantuan pasca pelatihan, (6) pemantauan dan evaluasi.

Coaching adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan seseorang melalui proses pemberian tugas tertentu (Donal Clark, 2000, Big Dog's Performance Coaching Page, <http://www.nwlink.com/donclarck/perform/coach.html>, 14 April 2002), *Coaching* menciptakan lingkungan yang mendukung untuk mengembangkan ketrampilan berpikir, ide dan perilaku kritis mengenai masalah tertentu. Meskipun pengertiannya hampir mirip dengan pelatihan, namun *coaching* pendekatannya lebih bersifat perorangan dan mendalam.

Keterlibatan langsung dalam tahapan siklus P2KP adalah suatu proses dimana masyarakat meningkatkan kapasitas pengetahuan dan

ketrampilannya dengan cara melihat, mengamati, mendengarkan dan mengalami langsung dengan cara ikut terlibat dalam pelaksanaan tahapan siklus P2KP sehingga akan terjadi perubahan perilaku kritis. Pendekatan yang digunakan dalam pengembangan kapasitas disini adalah belajar sambil bekerja (*learning by doing*).

d. Pengembangan Kelembagaan (*Institutional Development*)

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa hakekat dari pendekatan partisipatoris adalah pengembangan kapasitas (*capacity development*) dan pengembangan kelembagaan (*institutional development*), Esman dalam Moeljarto Tjokrowinoto, (2002 : 134-135) membatasi *institutional development* sebagai

"... the planning, structuring, and guidance of new reconstituted organization which (a) embody changes in values, function, physical, and/or social technologies, (b) establish, foster, and protect, new normative realitionships and actions patterns, and (c) obtain support and complementarity in the evironment"

Sedangkan Brinkerhoff (1986 : 11) berpendapat bahwa pengembangan institutional merupakan suatu proses pembentukan pola aktivitas dan perilaku baru yang berlangsung terus menerus karena proses ini didukung oleh norma-norma standart, dan nilai-nilai yang murni. Dalam hal ini institusi menggunakan kekuatannya untuk membentuk perilaku masyarakat menjadi pola yang berlangsung terus-menerus karena institusi mewujudkan pandangan bersama. Dengan demikian, esensi pengembangan institusional adalah memperkenalkan pembentukan dan

pemeliharaan model tindakan baru yang didukung oleh norma-norma dan nilai-nilai yang telah ada dan memelihara perubahan.

Pengembangan institusional sangat relevan diterapkan karena menurut Geertz dalam Bambang Ismawan, 1985 : 9), kelembagaan yang ada di desa/kelurahan sifatnya *normles* dan *structureles* sehingga tidak permanen dan tidak mampu berkembang. Contoh kelembagaan yang digambarkan oleh Geertz misalnya sinoman dan arisan. Oleh karena itu, agar pembangunan masyarakat melalui pemberdayaan dapat berjalan efektif maka perlu upaya mengembangkan potensi masyarakat itu sendiri untuk mengorganisir diri serta membangun sesuai dengan tujuan mereka. Bambang Ismawan dalam Hagul, 1985 : 10) mengemukakan bahwa upaya pengembangan potensi tersebut perlu dilakukan dalam wadah kelompok kecil atau disebut dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang hidup sedemikian rupa sehingga interaksi di antara individu merupakan proses saling "asah", "asih", dan "asuh", artinya dalam *self organisation* dan *self management*, suatu KSM akan mampu merumuskan masalah-masalah yang mereka hadapi, merumuskan strategi dan memilih alternatif-alternatif yang diperlukan dalam mengatasi masalah-masalah tersebut.

Selanjutnya Bambang Ismawan (1985 : 12-14) juga menjelaskan bahwa pengembangan kelompok-kelompok masyarakat semacam ini dapat dilakukan melalui proses dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- 1) Penggalan minat dan proses penyadaran kelompok

- 2) Pembentukan organisasi dan pemahaman prinsip-prinsip swadaya serta prinsip-prinsip kerja sama.
- 3) Tahap konsolidasi dan stabilisasi organisasi melalui penerapan prinsip manajemen organisasi dalam pemantapan kepemimpinan, administrasi dan pembukuan keuangan serta peraturan-peraturan lainnya.
- 4) Tahap lepas landas, yaitu : kemampuan kelompok dalam menjaga kontinuitas hidupnya (dengan kader), mampu membiayai pelayanan-pelayanan pendidikan pengembangan kelompok, dan mampu berpartisipasi dalam usaha-usaha pengembangan yang lebih luas.

5. Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)

a. Latar Belakang

Berangkat dari permasalahan kemiskinan yang masih tinggi dan menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia maka Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah sebagai bagian dari Komite Penanggulangan Kemiskinan Nasional juga ikut mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dengan melaksanakan Program penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dilaksanakan tahun 1999.

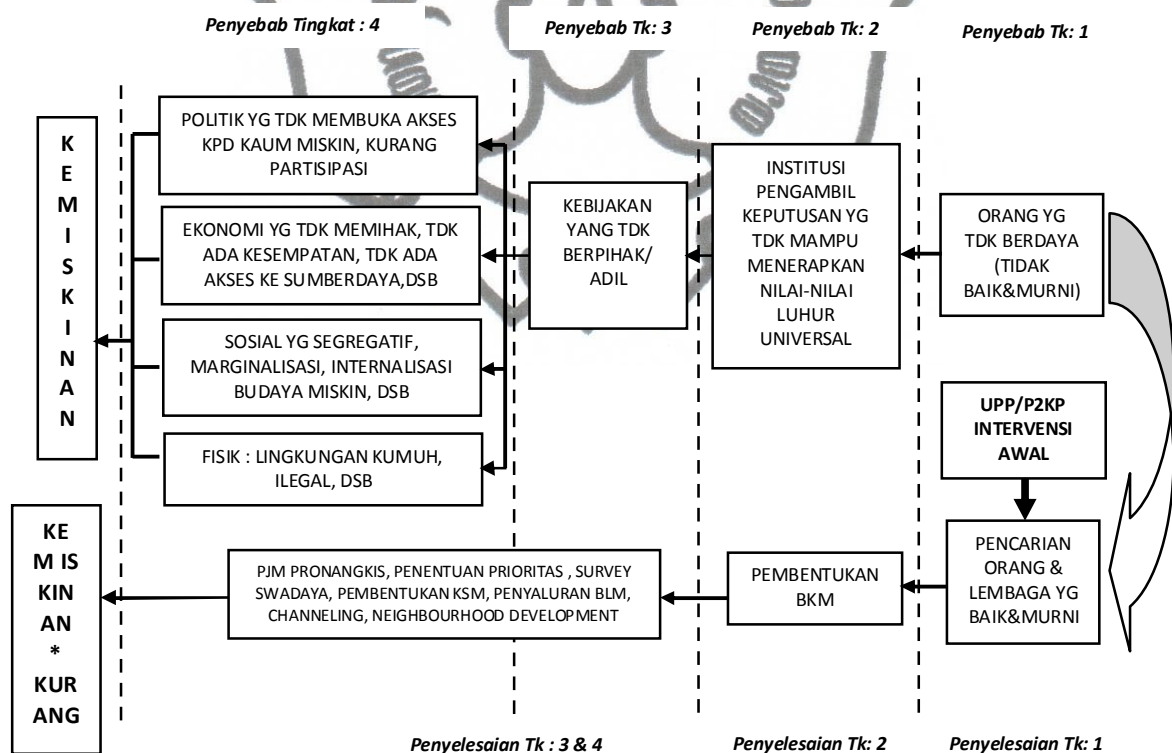
Pada awalnya P2KP dilaksanakan dalam rangka menanggulangi kemiskinan struktural maupun kemiskinan yang diakibatkan krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997. Namun demikian upaya

penanggulangan kemiskinan melalui P2KP tidak hanya bersifat reaktif terhadap keadaan darurat akibat dari krisis ekonomi yang terjadi tetapi juga bersifat strategis, karena dalam hal ini disiapkan landasan untuk keberlanjutan berupa institusi masyarakat yang kuat dan representatif bagi perkembangan masyarakat di masa mendatang.

Program Penanggulangan Kemiskinan di perkotaan (P2KP) memiliki konsep bahwa akar persoalan kemiskinan yang sesungguhnya adalah karena kondisi masyarakat yang "belum berdaya", yaitu masyarakat yang masih berada pada situasi kerentanan, keterisolasian dan ketidakmampuan untuk melepaskan diri dari kemiskinan. Kondisi ini terutama disebabkan oleh keputusan, kebijakan dan tindakan dari para pemimpin yang tidak dilandasi pada nilai-nilai universal kemanusiaan (jujur, adil, ikhlas dan dapat dipercaya) dan tidak bertumpu pada nilai-nilai universal kemasyarakatan (demokrasi, partisipasi, transparansi, desentralisasi dan akuntabilitas)

Oleh karena itu, pendekatan dan cara yang dipilih dalam penanggulangan kemiskinan selama ini perlu diperbaiki atau tidak diarahkan pada gejalanya saja tetapi lebih ditekankan pada akar persoalan itu sendiri (Gambar : 2.1). Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yang mengarah pada perubahan perilaku dan cara pandang masyarakat agar mampu menerapkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan perilaku dan cara pandang

masyarakat merupakan pondasi yang kokoh bagi terbangunnya lembaga masyarakat yang mandiri. Kemandirian lembaga itu sendiri dibutuhkan untuk membangun lembaga yang mampu menjadi wadah perjuangan masyarakat, terutama masyarakat miskin, dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal agar lebih pro poor dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).



Sumber : Modul Pelatihan Fasilitator P2KP, 2007

Bagan 2.1
Cara Pandaang/ Konsep P2KP mengenai
Akar Penyebab Kemiskinan dan Cara Penyelesaiannya

commit to user

Selanjutnya, penanggulangan kemiskinan dilanjutkan secara holistik melalui pemberdayaan sumberdaya manusia dengan pendekatan TRIDAYA yaitu : pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan lingkungan dan pemberdayaan sosial. Ketiga pilar tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat, yang sebenarnya merupakan aktualisasi dari prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

b. Visi Misi P2KP

- Visi P2KP :

Terwujudnya masyarakat Madani yang maju, mandiri dan sejahtera dalam lingkungan permukiman yang sehat, produktif dan lestari.

- Misi P2KP:

Membangun masyarakat mandiri yang mampu menjalin kebersamaan dan sinergi dengan pemerintah maupun kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan secara efektif dan mampu mewujudkan terciptanya lingkungan permukiman yang tertata, sehat, produktif dan berkelanjutan.

c. Nilai-Nilai dan Prinsip-Prinsip yang Melandasi Pelaksanaan P2KP

- Nilai-nilai Universal Kemanusiaan

- a) Jujur
- b) Dapat dipercaya
- c) Ikhlas/ Kerelawanan
- d) Adil
- e) Kesetaraan

f) Kesatuan dalam keragaman

- Prinsip-prinsip Universal Kemasyarakatan (Good Governance)

a) Demokrasi

b) Partisipasi

c) Transparansi

d) Akuntabilitas

e) Desentralisasi

- Prinsip-prinsip Universal Pembangunan Berkelanjutan (Tridaya) :

a) Perlindungan Lingkungan (*environmental protection*)

b) Pengembangan Sosial (*social development*)

c) Pengembangan Ekonomi (*economic development*)

d. Tujuan P2KP

Tujuan yang hendak dicapai melalui pelaksanaan P2KP adalah :

- Mewujudkan masyarakat Berdaya dan Mandiri, yang mampu mengatasi berbagai persoalan kemiskinan di wilayahnya, sejalan dengan kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM);
- Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam menerapkan model pembangunan partisipatif yang berbasis kemitraan dengan masyarakat dan kelompok peduli setempat;
- Mewujudkan harmonisasi dan sinergi berbagai program pemberdayaan masyarakat untuk optimalisasi penanggulangan kemiskinan;

commit to user

- Meningkatkan capaian manfaat bagi masyarakat miskin untuk mendorong peningkatan IPM dan pencapaian sasaran MDG's.

e. Sasaran P2KP

Sasaran Pelaksanaan PNPM-P2KP adalah sebagai berikut:

- Terbangunnya kelembagaan masyarakat (BKM) yang aspiratif, representatif, dan akuntabel untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi serta kemandirian masyarakat;
- Tersedianya PJM Pronangkis sebagai wadah untuk mewujudkan sinergi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dalam rangka pengembangan lingkungan permukiman yang sehat, serasi, berjati diri dan berkelanjutan;
- Meningkatnya akses terhadap pelayanan kebutuhan dasar bagi warga miskin dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian sasaran MDGs

f. Strategi P2KP

Agar terwujud tujuan yang hendak dicapai, maka strategi yang dilaksanakan dalam P2KP adalah :

- Mendorong Proses Transformasi Sosial dari Masyarakat Tidak Berdaya/Miskin menuju Masyarakat Berdaya, melalui intervensi :

- a) Internalisasi nilai-nilai universal kemanusiaan, prinsip-prinsip universal kemasyarakatan dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (tridaya).
- b) Penguatan lembaga masyarakat melalui pendekatan pembangunan yang bertumpu pada kelompok (*community based developmnt*).
- c) Pembelajaran konsep tridaya dalam penanggulangan kemiskinan
- d) Penguatan akuntabilitas masyarakat.
- Mendorong Proses Transformasi Sosial dari Masyarakat Berdaya menuju Masyarakat Mandiri, melalui intervensi :
 - a) Pembelajaran kemitraan antar stakeholders strategis
 - b) Penguatan jaringan antar pelaku pembangunan
- Mendorong Proses Transformasi Sosial dari Masyarakat Mandiri menuju Masyarakat Madani, intervensi yang dilakukan dalam tahapan ini dengan menitikberatkan pada proses penyiapan landasan yang kokoh melalui penciptaan situasi dan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh berkembangnya masyarakat madani, melalui intervensi komponen pembangunan lingkungan kelurahan terpadu (*neighbourhood development*) menuju tata pemerintahan dan pelayanan publik yang baik (*good governance*).

g. Langkah-Langkah P2KP

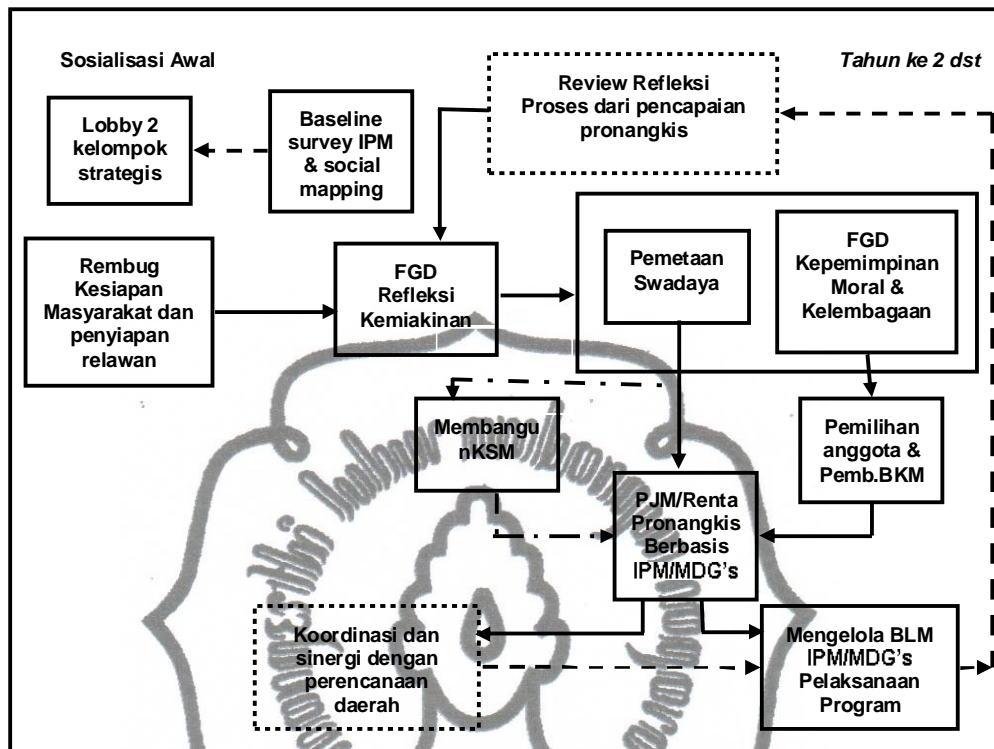
Uraian kegiatan P2KP bisa dibagi menjadi 2 yaitu: pertama tahap persiapan di tingkat pusat dan daerah dan yang kedua tahap pelaksanaan P2KP di masyarakat.

a) Tahap persiapan P2KP di Tingkat Pusat dan Daerah

Tahap ini adalah persiapan yang dilakukan agar para pelaku yang terkait baik di tingkat pusat dan daerah untuk memahami substansi, tata cara dan peran masing-masing dalam kegiatan P2KP. Selain itu juga agar terjadi integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan antara pusat dan daerah. Kegiatan persiapan ini berupa Loklatih Orientasi P2KP untuk internal Ditjen Perumahan dan Permukiman Departemen Kimpraswil, Pelatihan Dasar P2KP bagi KMP dan KMW, Lokakarya Orientasi P2KP di tingkat Nasional, Lokakarya Orientasi di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota.

b) Tahap Pelaksanaan Kegiatan P2KP di Tingkat Masyarakat

Gambaran umum mengenai proses pelaksanaan kegiatan pengembangan masyarakat di kelurahan/desa dijabarkan dalam serangkaian siklus atau tahapan P2KP. Kegiatan P2KP ini yang merupakan serangkaian kegiatan dimana masyarakat diberikan peluang untuk ikut terlibat secara aktif sebagai proses pendidikan kritis di masyarakat.

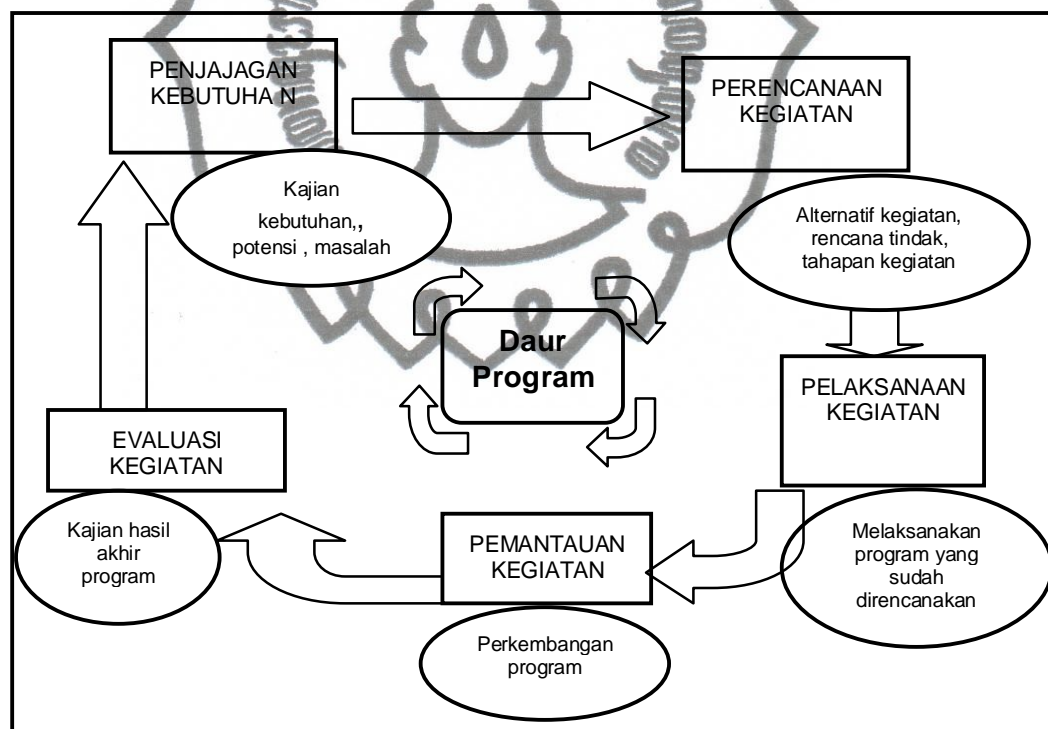


Sumber : Anonim 2004 b hal 18 : Modul Pelatihan Dasar P2KP,

Bagan : 2.2
Siklus P2KP di Tingkat Kelurahan/Desa

Kegiatan yang paling awal dilakukan di tingkat kelurahan adalah Lokakarya Orientasi P2KP. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan P2KP disesuaikan dengan strategi P2KP yang akan dicapai yaitu mendorong proses transformasi sosial dari masyarakat tidak berdaya (miskin), menuju masyarakat berdaya pada strategi ini intervensi yang dilakukan meliputi; 1). Internalisasi nilai-nilai universal dan prinsip-prinsip kemasyarakatan, 2). Penguatan lembaga masyarakat melalui pendekatan pembangunan bertumpu pada kelompok (*community based development*), 3). Pembelajaran penerapan konsep TRIDAYA dalam

penanggulangan kemiskinan dan 4). Penguatan akuntabilitas masyarakat. Keempat bentuk intervensi tersebut diimplematisasikan melalui serangkaian siklus P2KP sebagai proses pembelajaran kritis masyarakat yang merupakan aktualisasi dari daur pembangunan partisipatif. Tahap pelaksanaan kegiatan P2KP di masyarakat terdiri dari Persiapan Masyarakat, Identifikasi Masalah dan Kebutuhan, Perencanaan Kegiatan, pelaksanaan Kegiatan, dan Pengawasan Kegiatan.



Sumber : Anonim, 2004 b hal 32 : Modul Pelatihan Dasar Fasilitator P2KP.

Bagan : 2.3
Siklus P2KP Sebagai Aktualisasi Daer Pembangunan Partisipatif.

a). Persiapan Masyarakat

Persiapan di masyarakat meliputi kegiatan sosialisasi, Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM) dan Pendaftaran Relawan Masyarakat.

- **Sosialisasi Awal dan Lobby-lobby Kelompok Strategis.**

Setelah pelaksanaan Lokakarya Orientasi P2KP tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan, maka Tim Fasilitator melakukan kegiatan Pemetaan Sosial atau sering disebut dengan *Sosial Mapping*. Pemetaan Sosial merupakan kegiatan dari Tim Fasilitator untuk mengetahui kondisi awal suatu wilayah kelurahan berdasarkan karakteristik geografis, demografis dan psikografis.

Karakteristik geografis menggambarkan tentang kondisi wilayah (permukiman, sawah, ladang dan tempat-tempat penting). Karakteristik demografis menggambarkan tentang populasi penduduk (Jumlah penduduk laki-laki, jumlah penduduk perempuan, mata pencaharian, tingkat pendidikan, KK miskin, dan lainnya), Sedangkan karakteristik psikografis memberikan informasi tentang pola kehidupan sehari-hari yang tampak pada kegiatan rutin masyarakat, keyakinan yang dianut, gaya hidup, adat istiadat yang masih berjalan serta sejarah/ kejadian-kejadian penting.

Selain itu melalui kegiatan ini juga dilakukan analisis dengan metode sosiometri dan *matrik afinity* yaitu untuk mengetahui siapa tokoh-tokoh berpengaruh dan bagaimana hubungan maupun pengaruhnya terhadap masyarakat. Metode yang diterapkan dalam

pemetaan sosial ini antara lain: wawancara, *Daily Routine*, *Focus Group Discussion* (FGD), *Diagram Venn*, Alur Sejarah, *Sosiometri*, Pemetaan, dan *observasi*.

Dengan data-data yang didapatkan melalui kegiatan Pemetaan Sosial ini diharapkan Tim Fasilitator bisa menyusun strategi-strategi dalam sebuah format yang akan bisa membantu, mempermudah dan memperlancar kegiatan Sosialisasi awal, misal (media sosialisasi yang akan digunakan, bahasa yang mudah diterima oleh warga, serta kapan sosialisasi itu harus dilakukan). Hasil pemetaan sosial ini juga digunakan sebagai acuan untuk membuat strategi pendampingan selanjutnya.

- **Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM).**

RKM adalah serangkaian rembug/rapat warga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan perangkat desa/kelurahan bekerjasama dengan Tim Fasilitator mulai dari tingkat RT/RW sampai dengan tingkat desa/kelurahan dengan mengundang sebanyak mungkin warga secara terbuka. Rembug warga merupakan proses partisipatif dalam rangka membangun kesepakatan masyarakat, dimana pada saat masyarakat telah mengetahui apa P2KP secara utuh, masyarakat mengetahui tata cara dan manfaat P2KP, selanjutnya masyarakat diberikan ruang untuk belajar kritis yang pertama kali yaitu mengambil keputusan secara sadar untuk menerima atau menolak P2KP dengan segala konsekuensinya.

- **Sosialisasi Intensif dan Pendaftaran Relawan Warga.**

Sosialisasi intensif atau sosialisasi lanjutan dimaksudkan agar masyarakat lebih memahami substansi P2KP sebagai proses pembelajaran kritis dan pelebagaan prinsip dan nilai-nilai universal. Media sosialisasi juga menggunakan media media poster, leaflet dan vcd yang memang divasilitasi oleh program untuk bisa dipergunakan sebaga alat dalam sosialisasi kepada masyarakat agar lebih mudah dan lebih menarik bagi masyarakat.

Salah satu konsekuensi yang paling awal bagi masyarakat adalah keberadaan relawan masyarakat yang akan membantu memfasilitasi pelaksanaan siklus P2KP. Relawan masyarakat adalah warga setempat yang bersedia secara ikhlas tanpa pamrih, tiak digaji dan diberi imbalan. Perubahan perilaku masyarakat melalui proses pendidikan kritis akan sangat ditentukan relawan-relawan setempat sebagai motor penggerak yang memiliki moral baik dan diakui kualitas sifat kemanusiaannya.

b). Identifikasi Masalah dan Kebutuhan

Proses selanjutnya setelah masyarakat menyatakan kesiapan untuk melaksanakan kegiatan P2KP dalam RKM dan munculnya relawan-relawan yang telah direkrut dan dilatih adalah identifikasi masalah dan kebutuhan melalui siklus Refleksi Kemiskinan (RK) dan Pemetaan Swadaya (PS).

- **Refleksi Kemiskinan (RK)**

Siklus Refleksi Kemiskinan ini adalah bertujuan untuk menemu-kenali ciri-ciri, penyebab dan akibat kemiskinan sampai hal-hal yang paling mendalam sehingga dapat ditemukan akar dari persoalan kemiskinan di wilayahnya. Selain itu kegiatan Refleksi juga bertujuan untuk belajar secara kritis melihat, mengetahui dan bahkan mengalami sekaligus mengungkapkan persoalan baik penyebab maupun ciri-ciri dari kemiskinan. Metode yang digunakan adalah Diskusi Kelompok Terarah (DKT) atau *Focus Group Discussion* (FGD). Refleksi ini dilakukan di tingkat RW dengan mekanisme masing-masing RW membentuk 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari 10 – 12 orang yaitu kelompok non miskin (biasanya terdiri dari tokoh masyarakat dan perangkat kelurahan), kelompok orang miskin, kelompok pemuda, dan kelompok perempuan.

Hasil FGD RK dari masing-masing RW selanjutnya di musyawarahkan di tingkat kelurahan dimana dari masing-masing RW mengirimkan wakilnya sebagai utusan. Dalam FGD tingkat kelurahan ini utusan dari masing-masing RW menyampaikan hasil FGD RK di wilayahnya yang kemudian didiskusikan bersama tentang persamaan dan perbedaan. Selain itu juga mendiskusikan dan mengevaluasi program-program penanggulangan kemiskinan sebelum P2KP yang kemudian ditemukan kelemahan dan kelebihan sebagai rekomendasi

dan harapan terhadap pelaksanaan P2KP lebih baik dari program sebelumnya.

- **Pemetaan Swadaya (PS)**

Pemetaan Swadaya atau *Community Self Survey (CSS)* merupakan kegiatan tindak lanjut setelah masyarakat mengenali tentang dirinya dan lingkungannya terkait dengan persoalan kemiskinan di wilayahnya melalui kegiatan Refleksi Kemiskinan. Sebelum melakukan kegiatan PS, masyarakat membentuk Tim PS yang terdiri dari relawan yang sudah dilatih dan unsur masyarakat lainnya melalui rembug warga. Tim PS kemudian mendapatkan pembekalan (*coaching*) tentang Pemetaan Swadaya.

Dalam siklus ini masyarakat melakukan kurang lebih sekitar 7 kajian yang sudah ditargetkan dalam *Standart Operasional Prosedur (SOP)* pelaksanaan kegiatan Pemetaan Swadaya (PS). Kajian tersebut meliputi :

- Kajian Kepemimpinan,
- Kajian Kelembagaan dan Kebijakan Lokal,
- Kajian Pendidikan, Kajian Kesehatan,
- Kajian Penggunaan Air Bersih,
- Kajian Mata Pencaharian
- Kajian Profil Masyarakat miskin dan penyebarannya,
- Kajian sarana dan prasarana lingkungan,

- Kajian lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi lokal kelurahan

Pemetaan Swadaya dilaksanakan melalui sekumpulan kegiatan dimana masyarakat belajar mengidentifikasi permasalahan, potensi dan kebutuhan bersama secara kritis berdasarkan pada kekayaan informasi lokal. Tujuannya agar masyarakat :

- Masyarakat memahami masalah-masalah kemiskinan dan potensi secara utuh.
- Belajar menyusun gambaran kondisi masyarakat dan wilayahnya saat ini serta ambaran yang diharapkan.
- Belajar menggali potensi sendiri dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia untuk mengatasi masalah-masalah kemiskinan di wilayahnya.
- Belajar untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki dan mengurangi ketergantungan pada bantuan atau sumberdaya dari luar.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui *Focus Group Discussion* (FGD), kegiatan PS juga dilaksanakan dari tingkat basis yaitu RW/ Dusun. Setelah kegiatan PS tingkat RW selesai dilaksanakan, selanjutnya dilakukan pembahasan PS di tingkat kelurahan. Pada kegiatan ini masing-masing peserta tim PS dari RW mempresentasikan dan menempelkan hasilnya, yang

kemudian diolah dan dikompilasi menjadi data Pemetaan Swadaya tingkat kelurahan.

c). Perencanaan Kegiatan

- **Pemabangunan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)**

Sesuai dengan asumsi dasar dan cara pandang/konsep P2KP terhadap kemiskinan bahwa akar dari kemiskinan adalah karena kebijakan yang tidak berpihak kepada orang miskin (*pro poor*) dan kebijakan tersebut dihasilkan oleh lembaga atau institusi yang tidak *pro poor* juga, maka dalam upaya penanggulangan kemiskinan, masyarakat mutlak untuk dilibatkan dan diperlukan sebuah lembaga yang *pro poor* dimana didalamnya berkumpul orang-orang yang kaya dengan nilai kebaikan. Sehingga masyarakat dalam hal ini sepakat untuk membangun organisasi masyarakat warga atau yang sering disebut dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Keberdaan BKM berfungsi sebagai lembaga pengambil kebijakan dan keputusan yang menyangkut masalah penanggulangan kemiskinan diwilayahnya. Kepemimpinan BKM bersifat kolektif dimana pengambilan keputusan dilakukan secara bersama melalui mekanisme rapat anggota BKM dengan musyawarah mufakat menjadi norma utama dalam seluruh pengambilan keputusan.

BKM juga sebagai lembaga kepercayaan (*board of trustee*), anggota-anggota BKM terdiri dari orang-orang yang dipercaya warga,

berdasarkan kriteria kemanusiaan yang disepakati bersama dan dapat mewakili masyarakat dalam berbagai kepentingan.

1). Kajian kelembagaan dan Kepemimpinan Moral

Kajian ini sebenarnya merupakan penguatan dan penguasaan kembali terhadap kegiatan yang telah dilakukan dalam kajian kepemimpinan, kelembagaan dan kebijakan lokal dalam membangun wadah guna melakukan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam kegiatan ini lebih jauh lagi masyarakat bersepakat untuk mengambil sebuah keputusan apakah bisa memampukan lembaga yang sudah ada di masyarakat sebagai BKM ataukah harus membangun lembaga baru.

Beberapa hal yang dikaji adalah meliputi : proses pembentukan, tingkat pengakaran lembaga di masyarakat, tingkat aspiratifnya, tingkat reperesentatifnya, tingkat kepercayaan masyarakat, tugas fungsinya, tingkat kemanfaatan khususnya bagi masyarakat miskin, cara pengambilan keputusan, tingkat transparansinya, secara lebih rinci, berdasarkan buku Petunjuk pelaksanaan BKM 2 Tahap 1, lembaga-lembaga yang layak menjadi BKM harus memenuhi kriteria-kriteria :

- Bukan lembaga yang dibentuk karena perundang-undangan dan peraturan pemerintah.
- Kekuasaan/kewenangan dan legitimasinya berasal dari warga masyarakat setempat.

- Berkedudukan sebagai lembaga kepemimpinan kolektif, demokratis, partisipatif, transparan dan akuntabel.
- Diterima dan mengakar keberadaannya di seluruh lapisan masyarakat (inklusif).
- Keanggotaan BKM merupakan perwujudan dari nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan yang disepakati masyarakat setempat.
- Mekanisme pemilihan anggota BKM melalui proses pemilihan secara langsung oleh warga masyarakat, tertulis, rahasia, tanpa pencalonan, dan tanpa kampanye maupun rekayasa dari siapapun.
- Dibentuk secara bertingkat mulai dari tingkat RT/RW sampai ke tingkat kelurahan secara partisipatif dan demokratis.
- Bekerja secara kolektif, transparan, partisipatif, demokratis dan akuntabel.
- Mampu mempertahankan sifat independen dan otonom terhadap institusi pemerintah, militer, agama, usaha dan keluarga.

Setelah dilakukan kajian dan penilaian sesuai dengan kriteria tersebut kemudian masyarakat memutuskan untuk memampukan lembaga yang sudah ada atau membentuk lembaga baru sebagai BKM yang dituangkan dalam sebuah berita acara rembug warga.

2). Pemilihan Anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Setelah masyarakat mengambil keputusan untuk membentuk lembaga baru sebagai BKM maka proses selanjutnya adalah

pembentukan BKM yang diawali dengan membentuk Panitia Pembentukan BKM. Panitia berasal dari relawan atau masyarakat lain yang dibentuk melalui suatu rembug warga. Panitia kemudian dibagi menjadi 3 kelompok kerja (Pokja) yaitu:

Pokja Anggaran Dasar (AD) BKM, Pokja Pemilihan Anggota BKM, dan Pokja Pemantau Partisipatif. Tugas Pokja Anggaran Dasar adalah mempersiapkan dan menyusun draft Anggaran Dasar BKM, draft secara umum sudah dikonsepskan dari program sehingga pembahasan sudah lebih fokus terhadap diskusi-diskusi yang dianggap penting dan hal-hal yang bersifat lokal sesuai dengan kondisi setempat.

Pokja Pemilihan Anggota BKM bertugas mempersiapkan proses pemilihan mulai dari mempersiapkan Tata Tertib Pemilihan, kartu suara, kotak suara, papan penghitungan perolehan suara, dan tempat pemilihan baik pemilihan di tingkat basis/RT maupun pemilihan di tingkat kelurahan.

Pokja Pemantauan Partisipatif bertugas mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembentukan BKM agar semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SOP pembangunan BKM. Hasil pengawasan ditulis dalam format yang telah disediakan dan ditentukan dalam pedoman.

Proses pemilihan BKM dilakukan berjenjang mulai dari tingkat RT/RW untuk memilih utusan/ calon anggota BKM di wilayahnya yang akan mengikuti pemilihan di tingkat kelurahan. Cara ini

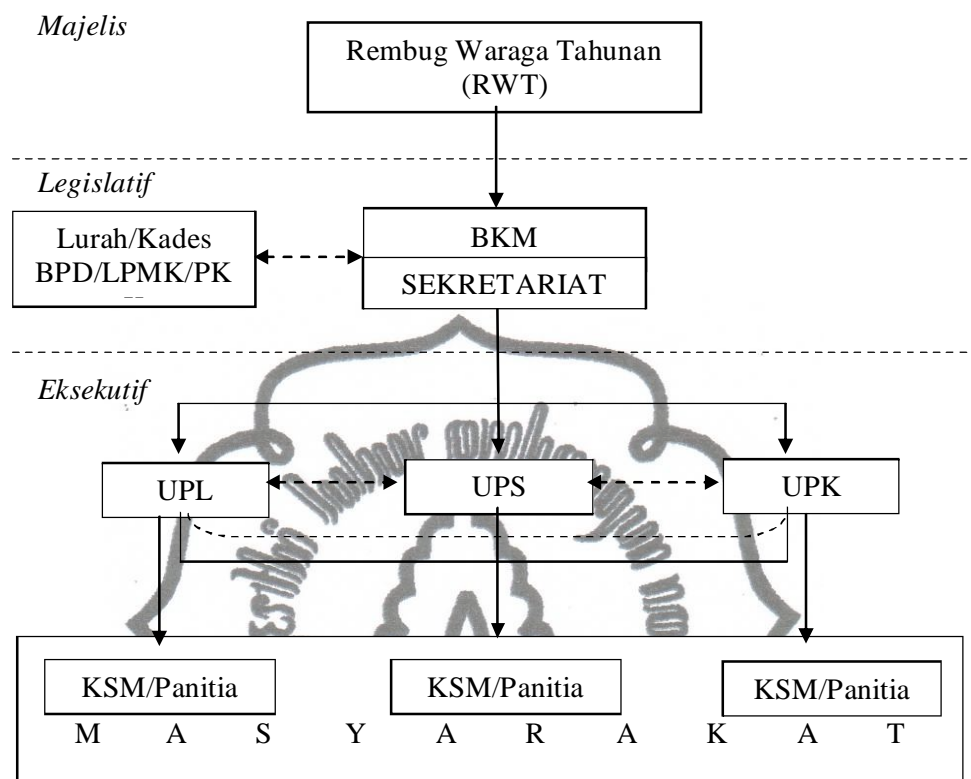
dilakukan dengan pertimbangan bahwa untuk memilih itu tidak ada calon, sedangkan calonnya adalah seluruh warga dewasa dan syaratnya adalah orang baik sehingga sehingga orang memilih didasarkan atas *trackrecord* (rekam jejak) sehari-hari bukan kampanye dan janji-janji sesaat. Jumlah utusan ditetapkan melalui 2% dari jumlah penduduk dewasa dibagi dengan jumlah RT sehingga ketemu jumlah orang yang harus dipilih menjadi utusan dari masing-masing RT.

Pemilihan dilakukan secara bebas dan rahasia, Dalam hal ini masyarakat masih memegang nilai-nilai lokal yang sering disebut "*bener, pinter, kober*" artinya memilih pemimpin itu yang pertama harus *bener* yaitu syarat utama karena menyangkut tentang perilaku kebaikan, kejujuran, kedailan dan yang lainnya, yang kedua carilah yang punya kemampuan atau *pinter* karena kalau pinter nanti akan bisa memimpin dengan baik dan membawa ke kondisi yang lebih baik, yang ketiga, *kober* karena menjadi anggota BKM adalah relawan untuk melaksanakan kegiatan sosial di masyarakat, bukan pekerjaan yang akan menghasilkan honor atau gaji sehingga walaupun *bener* dan *pinter* tetapi tidak punya waktu luang maka dipastikan kegiatan BKM tidak akan berjalan dengan baik.

Untuk mendukung dan memperlancar kegiatan-kegiatan BKM maka selanjutnya organisasi BKM membentuk unit-unit pengelola BKM sebagai gugus tugas dari lembaga BKM yang akan melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan bidangnya yang terdiri dari

Unit Pengelola Lingkungan (UPL), Unit Pengelola Sosial, (UPS), dan Unit Pengelola Keuangan (UPK). Selain itu BKM juga membentuk kesekretariatan BKM dengan mengangkat 1 orang sebagai sekretaris BKM.

Proses perekrutan sekretaris dan UP-UP BKM dilakukan dengan cara terbuka melalui lowongan kerja dan BKM melakukan penilaian berdasarkan bidang kemampuan dimasing-masing UP, selain itu juga latar belakang tentang kerelawanan karena pada prinsipnya kegiatan ini untuk mengabdikan kepada masyarakat walaupun diperkenankan UP-UP BKM ini diberi honor sesuai dengan kemampuan keuangan BKM. UP-UP BKM yang telah terpilih dan lolos seleksi kemudian diberi pelatihan selama 3 hari yang dilakukan bersama-sama dengan UP-UP BKM dari kelurahan lain di tingkat kecamatan. Struktur organisasi secara utuh dapat dilihat pada Gambar : 2.4 sebagai berikut.



Sumber : Anonim, 2004 hal 32 : Modul Pelatihan Dasar Fasilitator P2KP.

Bagan : 2.4

Struktur Organisasi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

- **Penyusunan PJM Pronangkis (Perencanaan Jangka Menengah Program penanggulangan Kemiskinan).**

Kegiatan penyusunan PJM Pronangkis merupakan kegiatan awal BKM bersama Relawan Masyarakat serta pemerintah kelurahan/desa untuk merencanakan langkah-langkah penanggulangan kemiskinan dalam bentuk Perencanaan Jangka Menengah dan rencana Tahunan (PJM dan Renta Pronangkis). Bahan/data yang dipergunakan untuk menyusun PJM Pronangkis adalah hasil rumusan Refleksi Kemiskinan (RK) dan Pemetaan Swadaya (PS) yang telah disepakati

commit to user

oleh warga. Tahapan dari proses penyusunan dokumen PJM Pronangkis ini adalah:

- 1) Rembug warga pembentukan Tim Perencanaan Partisipatif yang terdiri dari anggota BKM, Tim PS, dan relawan.
- 2) Pembekalan atau coaching Penyusunan PJM pronangkis.
- 3) Proses penyusunan PJM pronangkis yang berisi : latar belakang masalah, gambaran geografis kelurahan dengan berbagai macam potensi dan permasalahannya, kemudian disepakati Visi dan Misi PJM Pronangkis. Pada Bab IV berisi tentang bagaimana strategi dan mekanisme dalam melakukan upaya-upaya penanggulangan kemsikinan serta susunan berbagai macam program/kegiatan yang akan dilaksanakan selama 3 tahun, dan penutup serta lampiran-pampiran yang dianggap perlu untuk mendukung dokumen PJM pronangkis tersebut.

Dokumen selanjutnya diuji publikan untuk mendapat masukan dari seluruh masyarakat yang kemudian disyahkan menjadi dokumen resmi kelurahan dan ditandatangani oleh seluruh lembaga kelurahan yang ada, dengan demikian dokumen PJM Pronangkis tersebut adalah milik masyarakat kelurahan dan semua pihak mempunyai tanggungjawab yang sama untuk mensukseskan terlaksananya kegiatan yang telah direncanakan guna mencapai visi dan misi yang telah disepakati. Untuk bisa mempercepat proses penanggulangan

kemiskinan, dokumen PJM pronagkis disosialisasikan dalam acara “Bazar Program dan Lelang Amal”.

Setelah satu tahun program berjalan, dilakukan evaluasi tahunan yang dikemas dalam kegiatan Tinjauan Partisipatif. Tinjauan Partisipatif merupakan kegiatan untuk melihat dan mengkaji kembali apakah program yang dikembangkan berjalan dengan optimal atau belum. Ada 3 hal yang dilakukan dalam kegiatan Tinjauan Partisipatif yaitu : a). Tinjauan Kelembagaan, 2) Tinjauan Program dan 3) Tinjauan Keuangan, ketiga tinjauan tersebut dilaksanakan secara partisipatif. Berdasarkan hasil dari Tinjauan Partisipatif kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan baik dari sisi kelembagaan, program maupun pengelolaan keuangannya.

- **Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)**

KSM atau Kelompok Swadaya Masyarakat adalah kumpulan warga yang mempunyai minat serta tujuan yang sama dalam menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Hal ini adalah merupakan salah satu intervensi dalam pemberdayaan masyarakat yaitu pendekatan pembangunan bertumpu pada kelompok. Pendekatan ini diyakini sebagai sarana yang sangat efektif untuk mempercepat pengembangan dan penguatan masyarakat daripada pendekatan individual.

KSM tidak selalu harus dibentuk baru tetapi memanfaatkan kelompok-kelompok masyarakat yang sudah ada di masing-masing RT

atau RW, tetapi juga bisa dibentuk baru karena biasanya kelompok yang sudah ada tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Selain itu juga banyak kelompok yang tidak mau di jadikan sebagai KSM yang dimaksud oleh P2KP karena dianggap akan merubah tatanan dan keberadaan kelompoknya yang selama ini dianggap sudah berjalan baik dan lancar.

KSM dibentuk berdasarkan pada hasil identifikasi kelompok sosial hubungan sosial, modal sosial dan hasil kajian ekonomi dan lingkungan pada kegiatan siklus pemetaan Swadaya (PS). Warga yang dilibatkan dalam KSM adalah mereka yang masuk ke dalam data warga miskin (PS-2), sementara masing-masing kelompok bisa dilibatkan warga non miskin sebagai pendamping kelompok tanpa harus mendapatkan fasilitas pemanfaatan BLM P2KP. KSM dibentuk berdasarkan jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu : KSM Lingkungan (Panitia Kegiatan), KSM Sosial dan KSM ekonomi bergulir.

d). Pelaksanaan Kegiatan

Setelah melalui identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan, selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan dengan dukungan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) P2KP. Proses pembelajaran masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan dilakukan melalui praktek langsung dilapangan oleh masyarakat sendiri dengan dengan melakukan apa yang telah direncanakan (PJM dan Renta

Pronangkis) dengan dukungan BLM sebagai dana stimulan bagi masyarakat untuk terus membangun kapital sosial dan melembagakan nilai-nilai universal dan prinsip-prinsip kemasyarakatan secara berkelanjutan sehingga secara bertahap akan mampu menyelesaikan persoalan sosial, ekonomi dan lingkungan mereka.

Penyusunan proposal merupakan pembelajaran masyarakat dalam membuat usulan kegiatan Tridaya berdasarkan kebutuhan mereka melalui KSM atau panitia. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara demokrasi, partisipasi, transparan dan akuntabel sebagai proses internalisasi nilai-nilai kemasyarakatan. Selain dana BLM yang dikucurkan oleh pemerintah sebagai wujud komitmen masyarakat, maka masyarakat juga mengeluarkan dana swadaya masyarakat.

e). Pengawasan Kegiatan (Monitoring dan Evaluasi)

Tahap monitoring dan evaluasi pelaksanaan P2KP dilakukan melalui serangkaian kegiatan, baik sebagai bagian dari siklus P2KP maupun kegiatan khusus yang dilaksanakan secara berkala dan secara terus menerus atau berkelanjutan selama pendampingan. Monitoring dan evaluasi itu sendiri dilakukan secara bertahap dan berjenjang. Pada tataran KSM pengawasan dilakukan oleh UP-UP, pada tataran UP-UP pengawasan dilakukan oleh BKM, sedangkan BKM dikontrol oleh masyarakat, pemerintah desa sampai dengan pemerintah pusat dan konsultan.

Monitoring juga dikembangkan dan dikelola melalui Sistem Informasi Manajemen (SIM) P2KP. Data-data perkembangan P2KP di lapangan bisa diketahui oleh KMW, KMP dan pihak lain dengan cepat dan akurat. Data SIM ini diharapkan mampu menyajikan informasi secara cepat dan akurat sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan keputusan stakeholders P2KP dalam rangka perbaikan atau tindakan korektif secara cepat terhadap peningkatan kualitas P2KP.

Tabel : 2.2
Matrik Pembelajaran Kritis dalam P2KP

Siklus	Apa yang dipelajari?		
	Prinsip Kemasyarakatan	Nilai-nilai	Pola pikir
Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM)	Partisipasi: masyarakat belajar memutuskan secara sadar upaya pemecahan masalah yang mereka butuhkan	Keadilan dan kesetaraan: semua lapisan masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi dan mengambil keputusan	Masyarakat merupakan subyek pembangunan dan berhak untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa paksaan dari pihak luar, tetapi berdasarkan kesadaran kritis mereka
Refleksi Kemiskinan	Partisipasi, terlibat untuk menentukan masalah utama kemiskinan secara transparan dan demokratis.	Keadilan dan kesetaraan, saling memahami, dan saling perduli terhadap permasalahan orang lain. Kejujuran untuk mengakui permasalahan.	Penyebab utama kemiskinan: lunturnya nilai-nilai kemanusiaan. Semua pihak bertanggungjawab dalam pemecahan masalah kemiskinan. Masyarakat mampu melakukan analisa sebab akibat permasalahan kemiskinan
Pemetaan Swadaya	Partisipasi, transparansi	Perduli terhadap permasalahan orang	Masyarakat mampu melakukan kajian dan

Siklus	Apa yang dipelajari?		
	Prinsip Kemasyarakatan	Nilai-nilai	Pola pikir
	informasi dalam menggali potensi dan permasalahan bersama.	<p>miskin, saling menghargai, saling memahami, kesetaraan dalam kegiatan,</p> <p>Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, yang diperlakukan adil dan setara dengan memberi kesempatan yang sama untuk terlibat.</p> <p>Saling berbagi pengetahuan dan informasi (saling memberi)</p>	<p>penelitian sederhana mengenai permasalahan di wilayahnya, karena masyarakatlah yang mempunyai pengetahuan terhadap permasalahan diri dan lingkungannya bukan 'orang luar'.</p> <p>Masyarakat mempunyai potensi untuk memecahkan masalah tanpa harus selalu tergantung kepada bantuan pihak luar.</p> <p>Semua permasalahan kemiskinan baik itu masalah sosial, ekonomi maupun lingkungan bersumber dari sikap dan perilaku para pelaku pembangunan.</p> <p>Kemiskinan merupakan masalah bersama</p>
Pembangunan BKM/LKM	Demokrasi, Partisipasi, Desentralisasi di dalam membangun kelembagaan milik warga masyarakat yang representatif	Kejujuran, keadilan, kesetaraan, kerelawanan menjadi komitmen semua warga masyarakat.	<p>Masyarakat mampu untuk mengorganisir diri dalam menentukan siapa yang harus memimpin.</p> <p>Pemimpin yang dipilih adalah yang mempunyai kemampuan menggunakan potensinya untuk kesejahteraan orang lain, pemimpin yang mempunyai sikap mental positif artinya merupakan manusia yang berdaya (sejati).</p>
PJM Pronangkis (perencanaan)	Partisipasi, transparansi, demokrasi dalam proses belajar	Keadilan, kejujuran, dan kebersamaan dalam upaya memenuhi	<p>Masyarakat mampu untuk merencanakan program .</p> <p>Masyarakat mempunyai</p>

Siklus	Apa yang dipelajari?		
	Prinsip Kemasyarakatan	Nilai-nilai	Pola pikir
partisipatif)	menyusun rencana – rencana untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat sesuai dengan persoalan – persoalan yang dihadapi.	kebutuhan agar persoalan kemiskinan dapat ditanggulangi.	tanggungjawab untuk perencanaan. Adil bukan berarti bagi rata, tetapi memberikan bantuan bagi yang paling membutuhkan. Pengembangan program tidak hanya bertumpu pada bantuan luar akan tetapi bisa mengoptimalkan potensi yang ada di masyarakat.
Pengorganisasian KSM	Partisipasi, demokrasi, akuntabilitas, di dalam proses berhimpun/berkelompok sebagai bagian ‘modal sosial’.	Kejujuran, keadilan, kesetaraan, saling peduli di antara anggota kelompok, saling memahami, saling menghargai, saling percaya	Masyarakat mampu mengorganisasikan dirinya dalam kelompok Masyarakat miskin dapat dipercaya.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pembangunan adalah bukan semata-mata fenomena ekonomi tetapi sebuah proses mengenai kualitas hidup masyarakat ditingkatkan baik material dan spiritual yang meliputi bukan hanya pendapatan yang tinggi tetapi juga pendidikan, kesehatan, perbaikan lingkungan, pemerataan kesempatan, pemerataan kebebasan individu, penyegaran kehidupan budaya dan penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan adalah bagian dari proses pembangunan, sedangkan kemiskinan adalah keterbelakangan, ketidakberdayaan, atau ketidakmampuan seseorang untuk

menyelenggarakan hidupnya sampai pada suatu taraf yang dianggap layak/manusiawi. Dalam penelitian ini peneliti tidak akan menyajikan data tentang penurunan/kenaikan jumlah warga miskin di lokasi penelitian setelah mendapatkan program P2KP karena turun dan naiknya jumlah warga miskin dipengaruhi oleh banyak faktor baik mikro maupun makro. Peneliti hanya akan menyampaikan hasil atau data munculnya prasyarat agar penanggulangan kemiskinan berjalan secara sistematis dan berkelanjutan yang akhirnya akan mengarah pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti : munculnya relwan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan, tersusunnya data masalah dan potensi (data Pemetaan Swadaya) di lokasi penelitian, terbentuknya lembaga BKM sebagai motor penggerak penanggulangan kemiskinan, terbentuknya UPL, UPS, UPK dan dan Sekretariat BKM sebagai gugus tugas BKM dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tersusunnya dokumen PJM Pronangkis dan implementasi kegiatan yang sudah direncanakan, terbentuknya panitia dan KSM, dan berkembangnya dana perguliran di masyarakat.

Pendidikan kritis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu proses penyadaran dan pembelajaran oleh masyarakat melalui kegiatan siklus P2KP yang merupakan pengejawantahan dari daur program pembangunan partisipatif. Siklus P2KP ini menjadi media pembelajaran yang berjalan berulang secara ajeg (*aksi-refleksi-aksi*) sehingga masyarakat akan sadar terhadap hak dan kewajibannya sebagai manusia dalam menentukan masa depannya.

Pelaksanaan siklus P2KP ini adalah proses pemberdayaan yang mensyaratkan adanya partisipasi masyarakat sebagai tindakan nyata dalam pengembangan kapasitas.

B. Kerangka Pikir

Dalam penelitian kuantitatif kerangka pikir merupakan dasar untuk menyusun suatu hipotesis, yang memprediksi bahwa suatu variabel yang ada memiliki hubungan saja (korelasi) atau memiliki hubungan sebab akibat (kausal), dengan memperhatikan bahwa suatu variabel tertentu merupakan variabel bebas (*independent variabel*) atau variabel tergantung (*dependent variabel*). Sedangkan dalam penelitian kualitatif, karena tidak ada prediksi (tidak mengajukan hipotesis), maka kerangka pikir ini hanya merupakan gambaran bagaimana setiap variabelnya dengan posisinya yang khusus dikaji dan dipahami keberkaitannya dengan variabel yang lain (Sutopo, 2002). Karakteristik penelitian kualitatif menyatakan bahwa desain penelitian bersifat lentur dan terbuka, maka penggambaran kerangka pikir ini bersifat lentur artinya bisa saja dalam kenyataan pelaksanaan penelitiannya nanti terjadi perubahan atas dasar kenyataan di lapangan, karena penelitian ini lebih mementingkan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, dan sama sekali bukan mementingkan apa yang ada menurut pemikiran peneliti.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam tentang pendidikan kritis dalam upaya penanggulangan kemiskinan pada kegiatan siklus P2KP

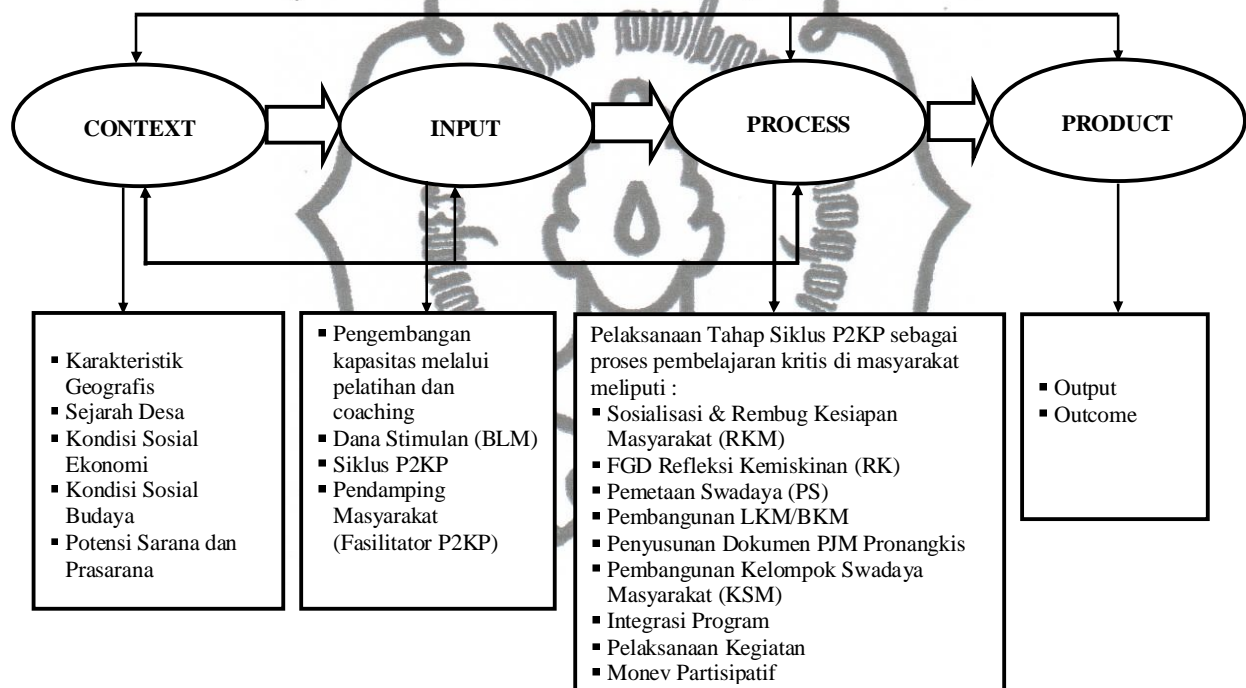
khususnya tentang kedudukan/posisi masyarakat dalam pelaksanaan program/pembangunan, memilih pemimpin, dan membangun lembaga masyarakat, sehingga dapat dirumuskan alternative penyelesaian masalah, secara umum terdapat empat faktor yang saling terkait dalam pelaksanaan suatu program yaitu.:

1. *Context*, Letak Geografis, Kondisi/Karakteristik Masyarakat, khususnya dalam memahami model-model pelaksanaan program/pembangunan? (upaya penanggulangan kemiskinan).
2. *Input* adalah masukan yang diberikan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program misalnya : pengembangan kapasitas berupa pelatihan dan coaching, pendamping (fasilitator P2KP), dana BLM, dan konsep program P2KP.
3. *Process*, yaitu kegiatan atau implementasi program itu sendiri yang meliputi : kajian masyarakat/warga, kajian kepemimpinan, Kajian Kelembagaan, pengambilan keputusan, pembangunan lembaga masyarakat,
4. *Product* atau hasil yang akan dicapai meliputi :
 - *Output*, yaitu terselenggaranya model penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kehendak masyarakat, terpilihnya pemimpin sesuai dengan kehendak masyarakat. Terbangunnya lembaga masyarakat atas dasar kebutuhan.
 - *Outcome*, adalah manfaat yang diperoleh dari berkembangnya persepsi positif yang berupa kesadaran kritis dalam memahami dan

mengimplementasikan hak dan kewajiban masyarakat/warga, sehingga akan memiliki kemampuan untuk memilih pemimpin yang baik sesuai dengan kehendak masyarakat dan terbangun lembaga masyarakat yang bisa dipercaya, representative yang mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat secara partisipatif.

Keberhasilan atau efektivitas suatu program ditentukan oleh sejauh mana hasil yang dicapai (*product*) mengarah pada tujuan (*objective*). Jika hasil yang dicapai tidak mengarah pada tujuan, maka perlu dianalisis apakah hasil (*product*) tersebut telah sesuai dengan kualitas pelaksanaan/ implementasi program (*process*), apakah karakteristik masyarakat (*context*) dan masukan (input) sesuai dan mendukung kualitas pelaksanaan/ implementasi program (*process*). Karena penelitian ini titik beratnya pada proses/ implementasi pelaksanaan program maka semua factor peneliti menghubungkan semua faktor yang ada dengan faktor proses.

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan secara singkat dengan skema sebagai berikut :



Bagan : 2.5

Skema Kerangka Pikir dengan Pendekatan CIPP (*Context, Input, Process, Product*)

BAB III

METODE PENELITIAN

Berbagai hal berkaitan dengan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Pemilihan Lokasi Penelitian

Kelurahan Tegalrejo, kecamatan Argomulyo, kota Salatiga, provinsi Jawa Tengah dipilih sebagai lokasi kajian dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Siklus Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai proses pembelajaran kritis bagi masyarakat di kelurahan Tegalrejo, masih berjalan sampai sekarang.
2. Kelurahan kajian menjadi salah satu lembaga BKM yang dianggap berhasil di kota Salatiga karena pernah menjadi nominasi BKM Award pada tahun 2005 dan tahun 2007.
3. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan siklus P2KP cukup baik dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah kelurahan sehingga berpotensi terhadap keberlanjutan program.

B. Strategi dan Bentuk Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang muncul penelitian ini lebih menekankan pada proses dan makna dari pelaksanaan suatu program pengembangan masyarakat, maka bentuk penelitian ini adalah penelitian

kualitatif. Kirk dan Miller dalam Moleong (2006 : 4), mendefinisikan bahwa Penelitian Kualitatif (*qualitative research*) adalah ; “Tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya”.

Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2006 : 4) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang sering disebut dengan penelitian terapan atau penelitian terpakai (*applied research*). Karena penelitian ini diselenggarakan dalam rangka mengatasi masalah nyata dalam kehidupan, berupa usaha untuk menemukan dasar-dasar dan langkah-langkah perbaikan bagi suatu aspek kehidupan yang dipandang perlu untuk diperbaiki melalui pengembangan proses pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan tujuannya, penelitian terapan sendiri meliputi 3 macam yaitu penelitian evaluasi, penelitian kebijakan, dan penelitian tindakan (*action research*) atau penelitian pengembangan (Sutopo, 2002 : 113) penelitian ini dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu program, dalam rangka mengembangkan, memberikan saran perbaikan, karena jenis penelitian ini termasuk penelitian evaluasi.

Penelitian ini menghasilkan efektifitas pencapaian tujuan, hasil atau dampak suatu kegiatan/ program dan juga mengenai proses pelaksanaan suatu kebijakan telah direncanakan dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan yang disampaikan (Sutopo, 2002 : 113).

Teknik pelaksanaan yang digunakan adalah studi kasus. Laporan model kasus lebih sesuai bagi penyajian realitas *multiperspektif* dengan kekayaan deskripsinya (Sutopo, 2002 : 43). Studi kasus dalam penelitian ini adalah studi kasus terpancang (*embedded case study*), artinya sebelum penelitian dilaksanakan peneliti sudah memilih dan menentukan variabel-variabel yang akan menjadi fokus dalam penelitian (Sutopo, 2002 : 111)

Oleh karena desain penelitian kualitatif bersifat lentur dan terbuka, meskipun penelitian ini menggunakan strategi studi kasus terpancang dengan kegiatan penelitian yang dipusatkan pada tujuan dan pertanyaan yang telah jelas dirumuskan, namun proposal ini tetap bersifat terbuka karena semuanya secara pasti akan ditentukan kemudian oleh keadaan yang sebenarnya yang dijumpai di lokasi penelitian.

Dalam melakukan penelitian evaluasi juga terdapat pendekatan yang didasari pada pola pikir keberkaitan semua variabel pokok yang terlibat. Evaluasi bertujuan untuk menggali, menemukan, dan memahami baik kekuatan dan kelemahan dari semua variabel pokok yang terlibat dalam suatu kegiatan peristiwa atau pelaksanaan program. Pendekatan ini terutama mengarah pada cara pandang dan struktur proses analisis dari semua informasi mengenai beragam variabel pokok yang terlibat, sehingga bisa menemukan kekuatan dan kelemahannya, serta menghasilkan suatu simpulan yang mantap dari perspektif pandangan konsep pendekatan tersebut (Sutopo 2002 : 114). Dalam penelitian ini pendekatan model yang digunakan adalah CIPP (*Context, Input, Process, Product*).

Menurut Sutopo (2002 : 115), pendekatan CIPP pada dasarnya merupakan pendekatan yang digunakan dalam pengembangan program, yang secara keseluruhan memperhitungkan keterkaitan antarfaktornya (*Context, Input, Process, Product*). Melalui pendekatan ini akan diperoleh informasi dari beberapa faktor mengenai kondisi dan karakteristik masyarakat (*context*) sebelum P2KP dilaksanakan, masukan (*input*) yang diberikan sebagai pendukung pelaksanaan P2KP, bagaimana proses (*process*) P2KP dilaksanakan dari awal dengan pendekatannya apakah sudah sesuai dengan konteksnya dan merupakan proses yang tepat untuk mencapai tujuan program, dan akhirnya bagaimana kualitas hasil yang telah dicapai (*product*) selama pelaksanaan P2KP. Dari kumpulan informasi lengkap yang meliputi empat faktor tersebut peneliti bisa menganalisis kesesuaian antarfaktornya. Selanjutnya dari analisis tersebut bisa dijadikan dasar untuk menyusun saran secara operasional untuk perbaikan program kedepan.

C. Jenis Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan di sini tidak mewakili populasinya tetapi lebih cenderung mewakili informasinya (Sutopo, 2002 : 51). Data atau informasi yang paling penting untuk dikumpulkan dan dikaji dalam penelitian ini sebagian merupakan data kualitatif yang akan digali dari beberapa sumber data. Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2006 : 157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Jenis data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini yaitu:

- 1 *Context* : - Data demografi dan topografi, sumberdatanya dari data sekunder yang ada di kelurahan Tegalrejo antara lain: monografi desa/kelurahan dan buku Salatiga Dalam Angka (BPS, 2005).
 - Kondisi sosial ekonomi dan budaya, sumberdatanya pengamatan dari masyarakat/tokoh masyarakat yang sudah lama tinggal (*informan*), arsip dan dokumen lain yang ada di kelurahan setempat.
- 2 *Input* : - Pengembangan kapasitas melalui pelatihan dan coaching pemahaman konsep P2KP, sumber datanya adalah Modul Pelatihan, TOR dan KAK pelatihan.
 - Pendamping Masyarakat (Fasilitator), adalah orang luar yang dutugaskan oleh pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan P2KP.
 - Konsep Siklus P2KP, berupa desain Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang merupakan desain penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan pendidikan kritis di masyarakat dalam sebuah negara, kepemimpinan dan organisasi masyarakat warga, sumberdatanya adalah Pedoman Umum dan Pedoman Teknis pelaksanaan P2KP beserta dengan buku-buku pendukung lainnya.

- Dana stimulan berupa Biaya Langsung Masyarakat (BLM) yang digunakan sebagai alat untuk belajar di masyarakat, data sekunder, masyarakat, dan perintah.

3 *Process* : - Penyampaian dan Pengenalan Konsep Program melalui kegiatan Sosialisasi Awal dan Rembug Warga untuk menerima atau menolak program P2KP, sumberdatanya adalah masyarakat dan aparat pemerintahan kelurahan.

- Kajian masyarakat/warga, kajian kepemimpinan dan kajian kelembagaan, sumberdatanya adalah masyarakat, relawan dan aparat pemerintahan kelurahan.

- Rembug Warga pengambilan keputusan bersama masyarakat, sumberdatanya adalah relawan dan aparat pemerintahan kelurahan.

- Pembangunan lembaga masyarakat warga (BKM), sumberdatanya adalah masyarakat, Relawan dan aparat pemerintahan kelurahan.

- Struktur Organisasi dan mekanisme kerja lembaga masyarakat (BKM), sumberdatanya adalah masyarakat, relawan anggota BKM dan aparat pemerintahan kelurahan.

Kegiatan kerjasama antar lembaga, sumber datanya adalah masyarakat, relawan anggota BKM dan aparat pemerintahan kelurahan.

- 4 *Product* : - *Output*, yaitu masyarakat memahami apa dan bagaimana kedudukan/posisi masyarakat/warga, pemimpin, dan lembaga masyarakat dalam suatu Negara.
- *Outcome*, adalah manfaat yang diperoleh dari berkembangnya persepsi positif yang berupa kesadaran kritis dalam memahami dan mengimplementasikan hak dan kewajiban masyarakat/warga, sehingga akan memiliki kemampuan untuk memilih pemimpin yang baik sesuai dengan kehendak masyarakat dan terbangun lembaga masyarakat yang bisa dipercaya, representative yang mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat secara partisipatif.

Sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Narasumber (*informan*), terdiri dari masyarakat umum yang terlibat dalam kegiatan P2KP, anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), tokoh masyarakat, perangkat kelurahan dan perwakilan lembaga-lembaga tingkat kelurahan lokasi penelitian.
2. Peristiwa atau aktivitas, yaitu kegiatan P2KP yang telah dan sedang dilakukan di lokasi penelitian.
3. Tempat atau lokasi, terdiri dari lingkungan kerja dan lingkungan sosial penduduk serta kondisi pemerintahan di lokasi penelitian.

4. Arsip dan dokumen resmi mengenai pelaksanaan P2KP dan monografi kelurahan lokasi penelitian.

D. Teknik Sampling

Teknik cuplikan merupakan suatu bentuk khusus atau proses bagi pemusatan atau pemilihan dalam penelitian yang mengarah pada seleksi. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menggunakan cuplikan statistik atau *probability sampling* sebagai teknik cuplikan, dalam penelitian kualitatif cuplikan diambil untuk mewakili informasinya, dengan kedalaman yang tidak perlu ditentukan oleh jumlah sumber datanya. Dengan demikian cuplikan yang diambil lebih bersifat selektif karena penelitian berdasarkan pada landasan kaitan teori yang digunakan, keingintahuan pribadi, karakteristik empiris yang dihadapi.

Peneliti memilih informan yang mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya sebagai sumber data yang valid sehingga cuplikan dalam penelitian ini lebih bersifat *purposive sampling* atau *criterion-based selection* (Sutopo, 2002 : 56). Informan yang mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dianggap sebagai sumber data yang valid adalah anggota BKM, relawan, aparat kelurahan, tokoh masyarakat yang ikut terlibat langsung sebagai pelaku dalam kegiatan P2KP di lokasi penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk penelitian kualitatif dan jenis sumber data yang dimanfaatkan, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara mendalam (*in-depth interview*)

Tujuan utama melakukan wawancara adalah untuk menyajikan konstruksi saat sekarang dalam suatu konteks mengenai para pribadi, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, tanggapan atau persepsi, tingkat dan bentuk keterlibatan secara mendalam untuk merekonstruksi beragam hal sebagai bagian dari pengalaman masa lampau, dan memproyeksikan hal tersebut untuk dikaitkan dengan harapan yang bisa terjadi di masa mendatang (Sutopo, 2002: 58). Oleh karena itu untuk memperoleh informasi yang mendalam, maka teknik wawancara dalam penelitian kualitatif ini lebih bersifat terbuka (*open-ended*), informal dan bisa dilakukan lebih dari sekali pada informan yang sama.

Teknik wawancara ini dilakukan pada semua informan untuk menggali apa yang mereka ketahui tentang P2KP, pengalaman yang dialami oleh informan sebelum dan setelah mereka terlibat dalam kegiatan P2KP, manfaat yang mereka peroleh setelah mereka terlibat dalam kegiatan P2KP, gambaran mereka tentang program yang sebenarnya mereka butuhkan, harapan mereka untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik.

Untuk itu peneliti melakukan wawancara kepada kelompok penerima manfaat program P2KP yang tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), aparat kelurahan atau tokoh masyarakat serta beberapa informan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam pengumpulan data melalui wawancara ini penulis melakukannya sendiri dengan alat bantu *tape recorder* dan alat tulis. Profil informan yang telah diwawancarai oleh penulis adalah sebagai berikut :

Tabel : 3.1
Profil Informan dalam Wawancara Penelitian

No	Nama	L/P	Alamat (dukuh)	Pekerjaan	Posisi
1	Suwarto, HK	L	Nggarjo	Pensiunan Dinas Perhubungan	Koordinator BKM Wijayakusuma
2	Mamiek Suyahmi	P	RT 01/ IV	PNS	Anggota BKM Wijayakusuma
3	Bp. Gunanto	L	RT 03 / IV	PNS	Ketua LPMK Kelurahan Tegalrejo
4	Sumartinah	P	RT 04 / V	PNS	Seksi Kesra Kelurahan Tegalrejo
5	Suyanti, SH	P	RT 03 / IV	PNS	Wakil Ketua PKK Kel. Tegalrejo
6	Ibu suginiwati	P	RT 05 / VI	Jual Sayur	KSM Srikandi I
7	Ibu Handayani	P	RT 07 / VII	Jual Kelontong	KSM Pergiwo I

2. *Focus Group Discussion* (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) pada dasarnya merupakan kelompok fokus sebagai diskusi yang dirancang dengan baik untuk memperoleh persepsi dalam bidang perhatiannya pada lingkungan yang permisif dan

yang tidak menekan, Kreuger dalam Moleong, (2006 : 227). Teknik FGD ini peneliti lakukan untuk mengkalifikasi dan menguatkan data maupun informasi yang telah didapatkan pada teknik wawancara mendalam (*indept interview*). Teknik ini sangat bermanfaat untuk mengkalifikasi dan menguatkan data terutama mengenai sikap, minat, latar belakang mengenai sesuatu kondisi dan untuk menggali keinginan serta kebutuhan suatu kelompok masyarakat (Sutopo 2002 : 63).

Focus Group Discussion (FGD) memberikan kesempatan kepada peserta diskusi untuk memberikan pandangannya tentang suatu topik dan memungkinkan setiap peserta diskusi menyumbangkan perspektif yang berbeda satu sama lain. Untuk menjaga agar teknik FGD ini sesuai dengan teorinya maka peneliti mengelompokkan peserta FGD ini pada kelompok penerima manfaat program P2KP, kelompok aparat kelurahan dan tokoh masyarakat. Dalam memandu FGD penulis dibantu oleh seorang fasilitator yang bertugas di kelurahan Tegalrejo sebagai notulensi proses FGD.

a). Kelompok Umum, terdiri dari 10 orang dengan profil sebagai berikut:

Tabel : 3.2
Profil Peserta FGD Kelompok Umum

No	Nama	L/P	Alamat (dukuh)	Pekerjaan	Posisi
1	Ibu Suryati	P	RT. 01 / II	Dagang	Ketua KSM Delima I
2	Ibu tugiyo	P	RT. 04/ II	Jual Nasi	Ketua KSM Kenanga I
3	Ibu Ngatonah	P	RT. 01/ IV	Jual sayur	Ketua KSM Mawar
4	Bp Susanto	L	RT. 02/ V	Warung Kelontong	Ketua KSM Melati
5	Ibu Suginiwati	L	RT. 03/ VI	Jual Kue	Ketua KSM Srikandi I
6	Ibu Handayani	L	RT.02/ III	Jual Gorengan	Ketua KSM Pergiwo I
7	Bp Drs. Sutaji	L	RT 01 / VI	PNS	LPMK
8	Bp. Surisih	L	RT 06 / VII	Swasta	LPMK
9	Sumartinah	P	RT.01 RW.VI	PNS	Pemerintah Kelurahan
10	Sutoyo, BcKn	L	RT.03 RW.I	PNS	Pmerintah Kelurahan

b). Kelompok BKM dengan profil sebagai berikut :

Tabel : 3.3
Profil Peserta FGD Anggota BKM

No	Nama	L/P	Alamat (dukuh)	Pekerjaan	Posisi
1	Suwarto AK.BE	L	RT.01 RW.VI	Pensiunan	Koordinator
2	Agus Puji Raharjo	L	RT.03 RW.I	Guru	Anggota
3	Suwarni	P	RT.02 RW.I	Ibu Rumah Tangga	Anggota
4	Astuti	P	RT.02 RW.II	Ibu Rumah Tangga	Anggota
5	Eko Putro Basuki	L	RT.04 RW.III	Swasta	Anggota
6	Mamiek Suyahmi	P	RT.01 RW.IV	Guru	Anggota
7	Ngadiono	L	RT.05 RW.V	Swasta	Anggota
8	Ragil Tukiman	L	RT.01 RW.V	Guru	Anggota
9	Retno Widayatsih	P	RT.04 RW.VI	PNS	Anggota
10	Beni Dwi Listyowati	L	RT.06 RW.VII	Swasta	Anggota
11	Winarni, SPd	P	RT.01 RW.IX	Guru	Anggota

3. Observasi berperan penuh

Teknik ini digunakan peneliti sebagai langkah untuk menguatkan data yang telah didapatkan melalui wawancara dan di klarifikasi melalui FGD yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi dan benda serta rekaman gambar. Spradley dalam Sutopo (2002 : 65) menjelaskan bahwa pelaksanaan teknik dalam observasi dapat dibagi menjadi: (1) observasi tak berperan sama sekali, (2) observasi berperan, yang terdiri dari observasi berperan pasif dan observasi berperan aktif, dan observasi berperan penuh. Dalam hal ini karena peneliti sebelumnya sebagai fasilitator (Koordinator Kota Salatiga) yang mendampingi di kelurahan Tegalrejo, namun pada saat penelitian ini dilakukan sudah tidak lagi menjalani secara intens karena beralih tugas menjadi Tenaga Ahli Kebijakan Publik di KMW PNPM Mandiri Perkotaan Provinsi Jawa Tengah maka teknik observasi yang digunakan adalah observasi berperan aktif.

4. Mencatat dokumen (*content analysis*)

Dokumen tertulis dan arsip merupakan sumber data yang juga memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif ini. Kedua jenis sumber data tersebut sangat mendukung bagi peneliti terutama bila peristiwa atau kejadian yang diteliti sudah terjadi di masa lalu namun masih berkaitan dengan peristiwa dan kejadian saat ini. Yin (1987) menyebutkan kegiatan mencatat buku ini sebagai *content analysis*, artinya bukan sekedar mencatat isi penting yang tersurat dalam dokumen atau arsip, tetapi juga

mencatat makna yang tersirat di dalamnya. Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen dan arsip yang terdapat di Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) PNPM-P2KP Provinsi Jawa Tengah, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Wijaya Kusuma dan kelurahan Tegalrejo.

F. Pengembangan Validitas

Validitas data merupakan usaha untuk memperoleh data yang valid atau sahih. Validasi data diperlukan untuk menjamin kemantapan dan kebenaran data yang sudah digali, dikumpulkan dan dicatat. Dalam penelitian kualitatif, cara yang umumnya untuk dikembangkan bagi peningkatan validitas data adalah *triangulasi*. Menurut Patton dalam Sutopo (2002 : 78) ada 4 (empat) macam teknik *triangulasi* Yaitu :

1. Triangulasi Data (Sumber)

Cara ini mengarahkan pada peneliti agar dalam mengumpulkan data, ia wajib menggunakan beragam sumber data yang tersedia. Artinya data yang sama atau sejenis, akan lebih valid kebenarannya bila digali dari beberapa sumber data yang berbeda. Dengan demikian apa yang diperoleh dari sumber yang satu, bisa lebih teruji kebenarannya bilamana dibandingkan dengan data sejenis yang diperoleh dari sumber lain yang berbeda, baik kelompok sumber sejenis maupun sumber yang berbeda jenisnya.

2. Triangulasi Metode

Jenis triangulasi ini bisa dilakukan oleh seorang peneliti dengan mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik atau mengumpulkan metode pengumpulan data yang berbeda, yaitu melalui : *indepth interview, observasi, focus group discussion* dan *content analysis*. Misalnya data yang dikumpulkan melalui wawancara dicocokkan dengan data yang diperoleh melalui observasi. Data tersebut akan lebih meyakinkan, jika dicocokkan dengan data yang diperoleh melalui focus group discussion, juga dibandingkan dengan dokumen dan arsip yang telah diperoleh.

Di sini yang ditekankan adalah penggunaan metode pengumpulan data yang berbeda, dan bahkan lebih jelas untuk diusahakan mengarah pada sumber data yang sama untuk menguji kebenaran informasinya (Sutopo, 2002 : 80).

3. Triangulasi Peneliti

Yang dimaksud dari triangulasi ini adalah hasil penelitian baik data ataupun simpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhan diuji validitasnya dengan beberapa peneliti lain, sehingga terjadi pertemuan pendapat yang akhirnya bisa lebih menguji kebenaran hasil penelitian.

4. Triangulasi Teori

Triangulasi ini digunakan oleh peneliti dengan menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji. Dari beberapa perspektif teori tersebut akan diperoleh pandangan yang

lebih lengkap, tidak hanya sepihak sehingga bisa dianalisis dan ditarik simpulan yang lebih utuh dan menyeluruh (Sutopo, 2002 : 82).

Dari keempat teknik tersebut, yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Triangulasi data atau sumber data yang berbeda, di sini tekanannya pada perbedaan sumber data, bukan pada teknik pengumpulan data atau yang lain. Misalnya untuk menggali proses pelaksanaan kegiatan P2KP, peneliti menggunakan kelompok narasumber yang berbeda-beda antara lain kelompok penerima manfaat, kelompok relawan yang terdiri dari warga masyarakat umum dan tokoh masyarakat, para anggota BKM atau lembaga yang mengelola dan mengawal P2KP sebagai proses belajar bagi masyarakat dan kelompok aparat kelurahan. Selain itu juga sumber data yang berupa dokumen dan arsip yang dimiliki oleh BKM, kelurahan maupun KMW.
2. Triangulasi peneliti dimana hasil penelitian baik data ataupun simpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhan peneliti menguji validitasnya dari beberapa peneliti baik secara langsung, yaitu rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana program studi penyuluhan pembangunan, maupun melalui hasil penelitian yang sudah ada yang dilaksanakan oleh peneliti terdahulu.

Selain itu, untuk lebih memantapkan validitas data dalam penelitian ini review informan. Pada waktu peneliti sudah mendapatkan data yang cukup lengkap dan berusaha menyusun sajian data walaupun mungkin masih belum utuh dan menyeluruh, maka unit-unit laporan yang telah disusun dikomunikasikan dengan informan, khususnya yang dipandang sebagai

informan pokok (*key informan*). Hal ini penulis lakukan untuk mengetahui apakah laporan yang ditulis tersebut merupakan pernyataan atau deskripsi sajian yang bisa disetujui mereka (Sutopo, 2002 : 83).

G. Teknik Analisis

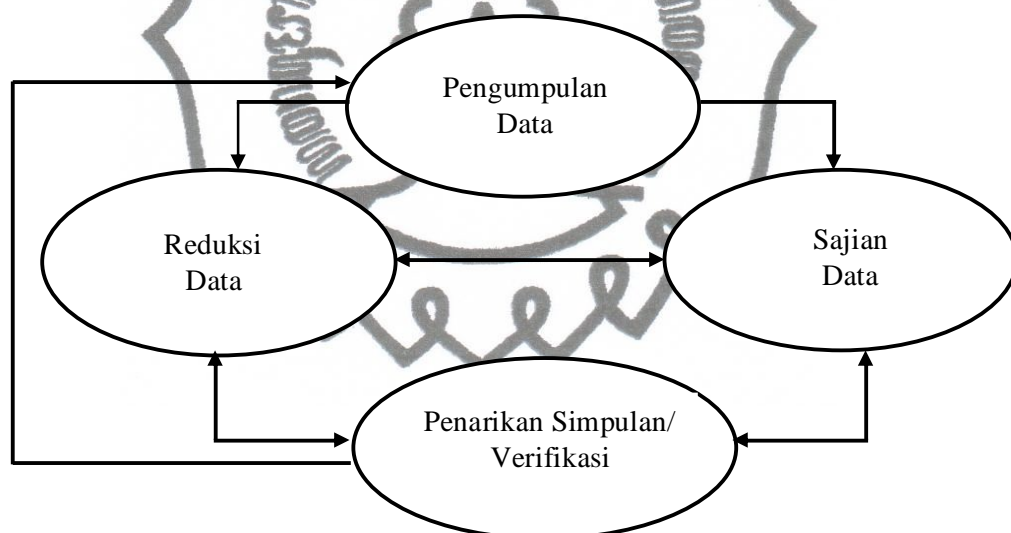
Penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada analisis induktif sehingga data yang dikumpulkan dalam penelitian bukan dimaksudkan untuk mendukung atau menolak hipotesis yang telah disusun sebelum penelitian dimulai, tetapi abstraksi disusun sebagai kekhususan yang telah terkumpul dan dikelompokkan bersama lewat proses pengumpulan data yang dilaksanakan secara teliti (Sutopo, 2002 : 39).

Sesuai dengan karakteristiknya yang menekankan pada proses analisis induktif, maka penelitian kualitatif juga disebut sebagai "*empirico inductive research*" yang bertentangan dengan penelitian kuantitatif yang bersifat "*hypothetico deductive method*", Kirk & Miller dalam Sutopo (2002 : 39 - 40). Karena sifatnya yang induktif ini, maka data di lapangan merupakan sumber utama bagi penyusunan simpulan sebagai hasil akhir penelitian. Dalam penelitian kuantitatif proses pengumpulan data dan analisisnya terpisah secara jelas, dan analisisnya dilakukan pada tahap akhir setelah pengumpulan data selesai. Sebaliknya, dalam penelitian kualitatif melakukan proses analisis di lapangan dilakukan secara bersamaan dengan proses pelaksanaan pengumpulan data (Sutopo, 2002 : 94).

Secara umum, proses analisis dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga komponen pokok (Miles dan Huberman, 1984 : 2) yaitu :

1. Reduksi data (*data reduction*) adalah proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data dari catatan lapangan (*fieldnotes*). Reduksi data merupakan proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan. Proses ini berlangsung terus menerus sepanjang pelaksanaan penelitian.
2. Sajian data (*data display*) adalah sekumpulan data yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Sajian data ini harus mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian, sehingga narasi yang tersaji merupakan deskripsi mengenai kondisi yang rinci untuk menceritakan dan menjawab setiap permasalahan yang ada.
3. Penarikan simpulan (*conclusion drawing/ verification*), sejak awal pengumpulan data, peneliti sudah harus memahami apa arti dari berbagai hal yang ia temui, pola-pola, pernyataan-pernyataan konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan berbagai proposisi. Simpulan-simpulan dibiarkan tetap di situ, yang pada waktu awalnya mungkin kurang jelas, kemudian semakin meningkat secara eksplisit, dan juga memiliki landasan yang semakin kuat. Dengan demikian, simpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.

Berkaitan dengan proses analisis tersebut, teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan menggunakan model interaktif. Menurut Miles dan Huberman (1984 : 22 – 23). Dalam model analisis interaktif, ketiga proses analisis dan pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara interaksi. Dalam bentuk ini penelitian tetap bergerak di antara tiga komponen analisisnya dengan menggunakan waktu yang masih tersisa dalam penelitian ini. Untuk lebih jelasnya, secara sederhana model analisis interaktif dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut :



Sumber : Miles dan Huberman (1984 : 22 – 23).

Gamabr : 3.1
Model Analisis Interaktif

Dengan memperhatikan gambar di atas, peneliti selalu membuat reduksi data dan sajian data sampai penarikan simpulan pada saat pengumpulan data. Artinya, berdasarkan data yang ada pada catatan lapangan (*fieldnotes*) peneliti menyusun pemahaman arti dari segala peristiwa melalui reduksi data yang *commit to user*

kemudian diikuti dengan penyusunan data dalam bentuk cerita secara sistematis. Reduksi dan sajian data ini disusun pada waktu peneliti sudah mendapatkan unit data dari sejumlah unit yang diperlukan dalam penelitian.

Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, peneliti mulai melakukan usaha untuk menarik simpulan dan verifikasinya berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi maupun sajian datanya. Bila simpulan dirasakan kurang mantap, peneliti wajib kembali melakukan kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus untuk mencari pendukung simpulan dan juga pendalaman data. Berdasarkan uraian tersebut maka, maka proses analisis interaktif ini bersifat siklus.

Selanjutnya model yang digunakan dalam penelitian ini adalah evaluasi dengan pendekatan CIPP (*context, input, process, product*). Bagian-bagian tersebut saling mempengaruhi, saling membentuk dan menentukan, yang terpadu menjalin kesatuan yang utuh dan membangun kualitas dan maknanya yang menyeluruh (Sutopo, 2003 : 3). Menurut Rutman dalam Sutopo, (2003 : 3), kerangka pikir CIPP membentuk cara memandang kegiatan-kegiatan yang bersifat menyeluruh dan lengkap sehingga bisa memahami baik kekuatan maupun kelemahan suatu program. Melalui pendekatan ini, akan diperoleh informasi dari beberapa faktor mengenai kondisi, karakteristik dan kebutuhan masyarakat (*context*) di kelurahan Tegalrejo, *input* yang diberikan sebagai bentuk intervensi P2KP dalam upaya penanggulangan kemiskinan, *process* bagaimana P2KP dilakukan dari awalnya sebagai suatu proses pembelajaran

kritis dan bagaimana kualitas hasil (*product*) yang telah dicapai selama pelaksanaan P2KP di kelurahan Tegalrejo.

Selanjutnya dari kumpulan informasi lengkap yang meliputi empat faktor tersebut peneliti bisa menganalisis keterkaitan antarfaktornya. Keberhasilan atau efektivitas suatu program ditentukan oleh sejauh mana hasil (*product*) mengarah pada tujuan yang hendak dicapai. Apabila hasil (*product*) yang dicapai tidak mengarah pada tujuan, maka perlu dianalisis apakah hasil tersebut sudah sesuai dengan kondisi, karakteristik dan kebutuhan masyarakat (*context*) dan apakah hasil yang dicapai (*product*) itu telah sesuai dengan kegiatan atau implementasi program (*process*). Kemudian, dilakukan analisis apakah kegiatan atau implementasi program (*process*) yang dilaksanakan telah sesuai dengan kondisi, karakteristik dan kebutuhan masyarakat (*context*). Selain itu perlu juga dianalisis apakah masukan (*input*) yang diberikan telah sesuai dengan kondisi, karakteristik dan kebutuhan masyarakat (*context*).

Dengan demikian, dari analisis mengenai keterkaitan antarfaktor tersebut bisa diketahui di mana kelemahan dan kekuatan pendidikan kritis dalam penanggulangan kemiskinan di P2KP, yang selanjutnya dijadikan dasar untuk menyusun saran secara operasional untuk memperbaikinya. Selain itu, dalam penelitian ini unit analisisnya adalah kelurahan, karena penelitian ini akan dilakukan di kelurahan Tegalrejo.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Latar Belakang dan Kebutuhan Masyarakat (*Factor Context*)

a. Karakteristik Geografis

Kelurahan Tegalrejo merupakan salah satu dari 5 kelurahan yang ada di Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah yang terletak di ujung timur. Jarak kelurahan Tegalrejo ke ibukota kecamatan sejauh 2,3 kilometer. Jarak tersebut bisa ditempuh dengan menggunakan sepeda motor maupun angkutan umum selama kurang lebih 10 menit, sementara itu jarak ke ibukota Salatiga adalah 5 kilometer, dapat ditempuh pulang pergi dalam waktu 20 menit dengan menggunakan angkutan umum (angkutan kota).

Batas-batas geografis wilayah kelurahan Tegalrejo di sebelah utara adalah kelurahan Kalicacing, sebelah timur dengan kelurahan Ledok, sebelah barat dengan Kampung Rejo/ kelurahan Mangunsari dan sebelah selatan adalah kelurahan Randuacir. Letak kelurahan Tegalrejo yang berada di jalan Veteran dan jalan Tegalrejo Raya adalah lokasi yang sangat strategis secara ekonomi karena merupakan jalur utama Semarang-Solo.

Secara administratif kelurahan Tegalrejo terbagi menjadi 4 dusun (Karangkepoh, Bulu, Kenteng, Tegalrejo/Nggarjo) dan sebagian wilayah perumahan, Wilayah perumahan ada 3 yaitu 2 perumahan (Perumahan Magersari dan Tegalrejo Permai), satu perumahan Tentara (Asrama Tentara

Yonif 411 Kostrad), sudah tidak ada wilayah dusun lagi yang di pimpin oleh kepala dusun yang ada adalah wilayah RW dan RT terbagi menjadi 9 RW dan 56 RT. Banyak tanah kosong yang kemudian dikapling menjadi perumahan yang kemudian menjadi wilayah permukiman baru.

Luas kelurahan Tegalrejo 188.430 Ha terdiri dari wilayah lahan kering 178.424 ha dan lahan lainnya 10.006 Ha. Topografi kelurahan ini bergelombang dan berbukit dengan struktur tanah didominasi tanah kering yang berupa tegalan dan sebagian perumahan. Kelurahan Tegalrejo merupakan daerah yang termasuk dataran sedang karena berada pada ketinggian ± 680 meter di atas permukaan air laut dengan suhu rata-rata 23°C. Musim hujan biasanya berlangsung antara bulan Oktober sampai dengan bulan Maret, sedangkan musim kemarau berlangsung dari bulan April sampai bulan September. (Salatiga dalam Angka, 2010)

b. Sejarah Kelurahan Tegalrejo.

Banyak orang yang tidak mengetahui tentang sejarah Kelurahan Tegalrejo sebelum penjajahan Belanda. Untuk menelusuri sejarah Kelurahan Tegalrejo ini peneliti menemui Mbah Cokro yang tinggal di dukuh Bulu (umur 80 tahun) seorang tokoh masyarakat yang pernah mengalami masa kepemimpinan lurah pertama. Menurut penuturan beliau Kelurahan Tegalrejo sering disebut dengan istilah *ramah Nggarjo*. Dahulu pemerintahan Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan yang dipilih oleh masyarakat langsung secara demokrasi yang sekarang sudah berubah menjadi pemerintah kelurahan. Dengan berbagai ragam perubahan sesuai dengan

perubahan jaman, seiring dengan pesatnya pembangunan dan kemajuan teknologi. Banyaknya pendatang sebagai penduduk yang berasal dari luar kelurahan Tegalrejo menambah semakin beragamnya karakteristik penduduk yang bertempat tinggal di kelurahan Tegalrejo.

Kelurahan Tegalrejo memiliki sejarah yang unik yang perlu diketahui oleh semua warga kelurahan Tegalrejo dengan harapan :

- Meningkatkan atau menimbulkan *roso handarbeni* seluruh warga kelurahan Tegalrejo terhadap kelurahan Tegalrejo.
- Meningkatkan atau menumbuhkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di segala aspek.

Konon ceritanya kelurahan tegalrejo yang bersumber dari *getok tular* pewarisan kelestarian budaya mertu kelurahan dan dawuh-dawuh dari para sesepuh penduduk asli kelurahan Tegalrejo adalah sebagai berikut : Tegalrejo semula sebuah Kelurahan yang bernama Selo, nama ini diberikan oleh seseorang yang pada saat itu sangat disegani oleh masyarakat jadi seorang pepunden KYAI SHUFI namanya. Beliau berasal dari Kelurahan Ngawonggo Klaten. Dia seorang prajurit dari Kartosuro, yang namanya prajurit pada waktu itu dengan berbagai kelebihan khususnya kesaktiannya sehingga menjadi tempat berlindung dan pusat curahan keluhan kesah masyarakat sekitarnya yang kemudian lazim disebut sebagai seorang pepunden. Sekitar abad ke 18 kerajaan Kartosuro terjadi perpecahan, Kyai Shufi keluar dari wilayah Kartosuro berjalan menjauh dari Kartosuro untuk menghindari gejolak perpecahan tersebut. Pada saat melakukan perjalanan tersebut sampailah

disuatu tempat yang kami tempati sekarang ini yang pada waktu itu masih brupa oro-oro/ tegalan. Kita tidak tahu apakah nama Tegalrejo sekarang ini diilhami tegal/ oro-oro yang akhirnya jadi ramah/ rejo.

Karena perjalanan yang cukup jauh Kyai Shufi kelelahan dan akhirnya jatuh sakit, beliau duduk dibawah pohon beringin. Karena situasi kesehatan dan sebagainya dia menetapkan tinggal disitu dan diberi nama Kelurahan **Seloro** yang diambil dari keadaan mereka yang *kesal* dan *loro* (lelah dan sakit). Waktu terus berjalan hari terus berganti, bulan berganti bulan dan tahun terus bertambah Kelurahan Seloro makin banyak penghuninya. Kurang lebih pada tahun 1830-an terbentuk suatu pemerintahan resmi dipimpin oleh seorang lurah bernama *Singo Yudho*, beliau adalah cucu dari Kyai Shufi. Sebagai seorang lurah Singo Yudho melanjutkan kegiatan pendahulunya menjalankan roda pemerintahan, menjaga keamanan, melestarikan budaya termasuk merti kelurahan/ saparan yang sampai sekarang dilestarikan oleh penduduk kelurahan Tegalrejo. (RPJM kelurahan Tegalrejo, 2005-2010)

Adapun silsilah kepala kelurahan yang pernah menjabat di kelurahan Tegalrejo adalah sebagai berikut :

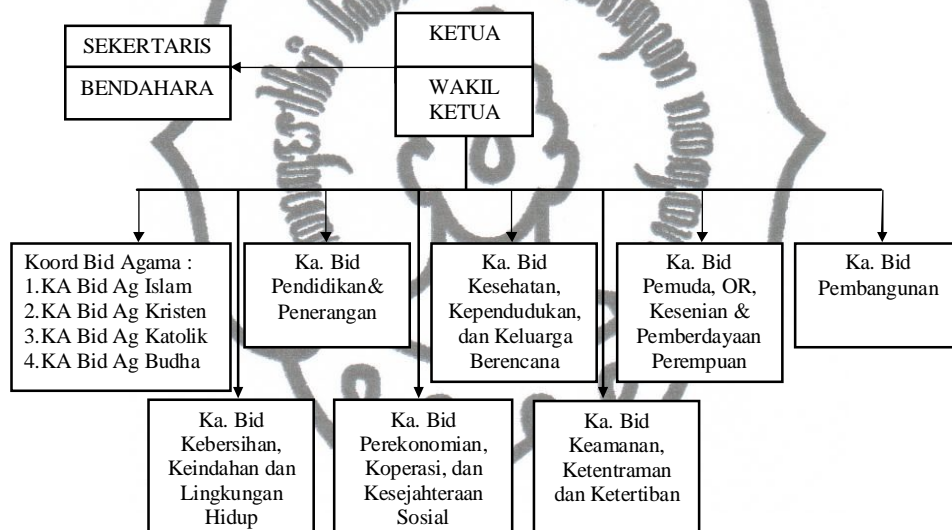
Tabel : 4.1
Silsilah Kepala Kelurahan Tegalrejo

NO	Nama Pejabat	Lama Menjabat
1	Kyai Shufi	Pendiri
2	Singo Yudho	s/d tahun 1865
3	Eyang Yoso	1866 s/d 1869
4	Suro Dimejo	1870 s/d 1910
5	Pawiro Setiko	1911 s/d 1920
6	Haryo Sukarto	1021 s/d 1943
7	Sudjud	1944 s/d 1947
8	Karso Dinomo	1947 s/d 1948
9	Rustamadji	1949 s/d 1950
10	Muslimin	1950 s/d 1965
11	Hardjo Oetomo Mardi	1966 s/d 1967
12	Ninong Soejitno	1967 s/d 1968
13	Koentoro	1969 s/d 1973
14	Soegijat	1074 s/d 1989
15	Ngadino	1990 s/d 1991
16	Sugalipno	1992 s/d 1996
17	Dra. Siti Nur Solikhah	1997 s/d 1999
18	Jumiarto AP	2000 s/d 2003
19	Dra. Erwati	2003 s/d 2005
20	Agung Pitoyo	2004 s/d sekarang

Sumber : Data Monografi Kelurahan Tegalrejo Tahun 2010

Sejarah singkat ini dikutip dari sesepuh/ Moncokaki kelurahan Tegalrejo, juga para pelaku sejarah dan data-data yang ada di kelurahan. Perubahan dari desa menjadi kelurahan terjadi pada tahun sekitar 1976 pada jaman kepemimpinan bapak Sugiat, Bapak Sugiat pada mulanya adalah kepala desa yang dipilih oleh warga dan kemudian diangkat jadi lurah setelah berubah menjadi kelurahan. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), juga berubah menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Anggota LPMK terdiri dari Ketua, Sekretaris Bendahara dan anggota, anggota terbagi kedalam kelompok kerja (pokja). Secara rinci anggota LPMK Kelurahan Tegalrejo adalah sebagai berikut:

Bagan : 4.1
Struktur Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Tegalrejo
Tahun 2010



Sumber : Data Monografi Kelurahan Tegalrejo Tahun 2010

Tabel : 4.2
Susunan Pengurus LPMK Kelurahan Tegalarjo Tahun 2010

NO	JABATAN	NAMA	ALAMAT
1	Ketua	Bp. Gunanto	RT 03 / IV
2	Wakil Ketua	Bp. Tugiman Cokrousodo, SPd	RT 04 / VII
3	Sekretaris I	Bp. Amrih Wiyono	RT 06 / VII
	Sekretaris II	Bp. Suparno HP	RT 02 / VII
4	Bendahara I	Bp. Sri Raharjo	RT 02 / VII
	Bendahara II	Bp. Sulardi	RT 03 / IV
5	Ketua Bid :		
	a. Kord Bid Agama	Bp. Drs. Mubasirun	RT 02 / IV
	Ka. Bid Agama Islam	Bp. Drs. Syariful Hadi	RT 02 / IX
	Ka. Bid Agama Kristen	Bp. Daniel Suharto	RT 03 / VI
	Ka. Bid Agama Katolik	Bp. Ign. Ari Sudarsono	RT 03 / III
	Ka. Bid Agama Budha	Bp. Sukarlan	RT 05 / III
	b. Ka. Bid Pendidikan & Penerangan	Bp. Ganjar Widarso	RT 01 / II
		Bp. Puji Santosa, S.Pd	RT 03 / IV
	c. Ka. Bid Kesehatan, kependudukan, dan keluarga berencana	Ibu Ani Yuli Marfuah	RT 01 / II
		Ibu Sri Rukini Suroto	RT 04 / III
	d. Ka. Bid Pemuda, OR, Kesenian & Pemberdayaan Perempuan	Bp Eri Budiono	RT 02 / V
		Ibu Ning Yuliati	RT 03 / III
		Bp. Subur Wahono	RT 02 / IV
	e. Ka. Bid Pembangunan	Bp. Warsito	RT 06 / IV
		Bp. Winarno	RT 05 / VII
		Bp. Surisih	RT 06 / VII
	f. Ka. Bid Kebersihan, keindahan dan lingkungan hidup	Bp. Bambang Sri Wahyanto	RT 03 / VI
		Bp. Suyadi	RT 05 / III
	g. Ka. Bid Perekonomian, Koperasi, dan kesejahteraan Sosial	Bp. Drs. Sutaji	RT 01 / VI
		Bp. Suwanto Ak	RT 01 / VI
	h. Ka. Bid Keamanan, Ketentraman dan ketertiban	Bp. Sahmadi Widodo	RT 03 / IV
		Bp. Joko Wahyudi	RT 02 / I

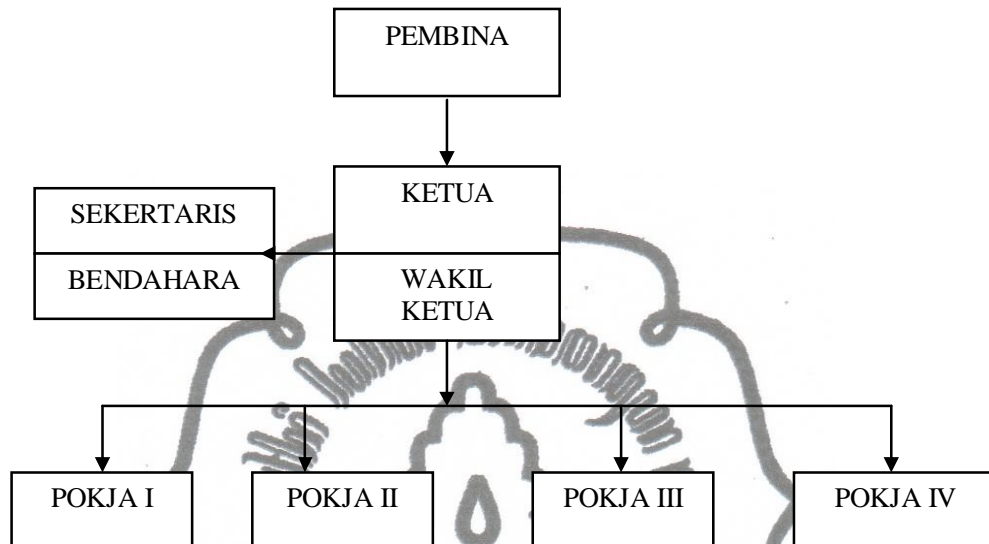
Sumber : Data Monografi Kelurahan Tegalarjo Tahun 2010

Peran perempuan di kelurahan Tegalarjo sudah cukup bagus, di mana masyarakat dalam memahami perbedaan laki-laki dan perempuan hanya dibedakan sebatas jenis kelamin saja sedangkan dalam pembagian tugas dan wewenang dalam urusan rumah tangga sudah dibagi atas dasar saling membantu dan mendukung guna mencapai keluarga yang bahagia dan

sejahtera. Banyak kaum perempuan yang ikut bekerja diluar rumah untuk menopang kebutuhan keluarga. Dalam hal pendidikan juga demikian, masyarakat tidak lagi membedakan bahwa laki-laki kelak akan mempunyai tanggungjawab yang lebih besar dari perempuan sehingga laki-laki diberikan kesempatan yang lebih luas untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi tetapi antara laki-laki dan perempuan diberikan kesempatan yang sama.

Untuk membangun silaturahmi, saling berinteraksi dan belajar diantara mereka telah banyak wadah dibangun. Wadah yang telah dibangun bagi kaum perempuan diantaranya adalah kelompok Dasawisma, PKK tingkat RT, PKK Tingkat RW sampai ke Tingkat Kelurahan, ada juga kelompok yang dibangun melalui jalur keagamaan misalnya kelompok pengajian, yasin&tahlil bagi yang beragama Islam dan juga Non Islam dimana masyarakat Kelurahan Tegalrejo selain orang muslim juga banyak yang non muslim dengan perbandingan yang hampir sama besar. PKK adalah wadah untuk melakukan kegiatan bagi kaum perempuan yang tergolong besar dan semua warga bisa masuk menjadi anggota tanpa didasarkan kepada agama maupun golongan tertentu.

Bagan : 4.2
Struktur Organisasi PKK Kelurahan Tegalrejo Tahun 2010



Sumber : Data Monografi Kelurahan Tegalrejo Tahun 2010

Tabel : 4.3
Susunan Pengurus PKK Kelurahan Tegalrejo Tahun 2010

NO	NAMA	JABATAN
1	Agung Pitoyo, AP	Pelindung (Lurah)
2	Ny. Agung Pitoyo	Ketua
	Ny. Sudiono	Wakil Ketua I
	Ny. Suyanti, SH	Wakil Ketua II
3	Ny. Etik Setiati, SH	Sekretaris I
	Ny. A. Ngatidjo	Sekretaris II
	Ny. Sumartinah	Sekretaris III
4	Ny. Jayus	Bendahara I
	Ny. Parito	Bendahara II
	Ny. Suprapti	Bendahara III
5	Kelompok Kerja	
	a. Pokja I	
	Ny. Patmi Bajuri	Ketua
	Ny. Prihastomo	Anggota
	Ny. Mubasirun	Anggota
	b. Pokja II	
	Ny. Ning Yulianti	Ketua
	Ny. Sri Raharjo	Anggota
	Ny. Tri Endah Lestari	Anggota

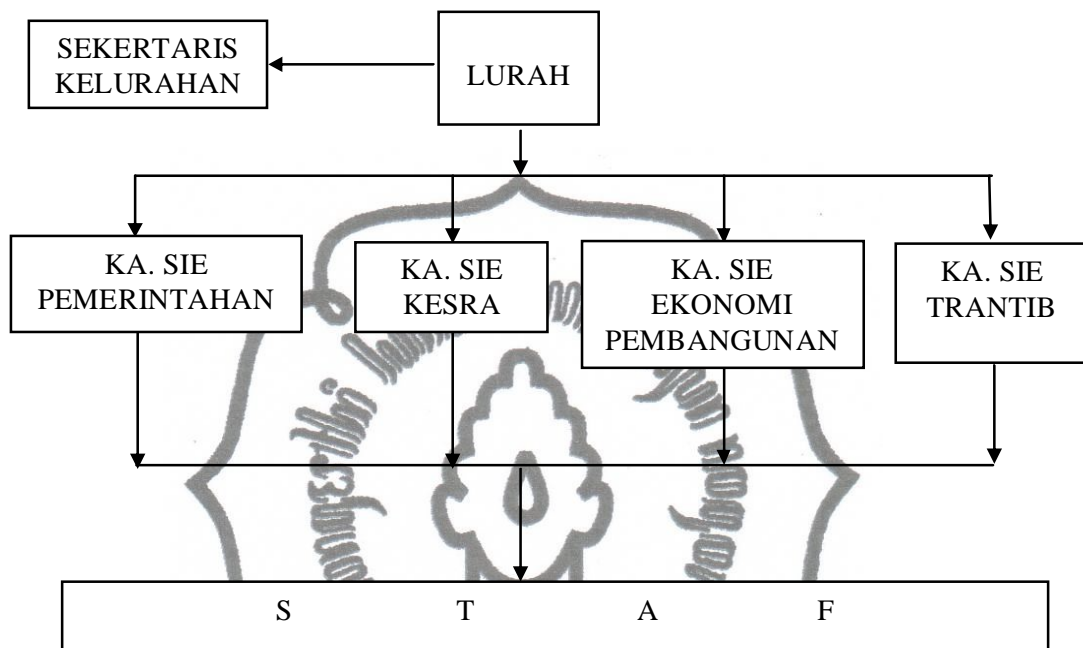
NO	NAMA	JABATAN
c. Pokja III		
	Ny. Rofi'i	Ketua
	Ny. Nur Arie	Anggota
	Ny. Sarwono	Anggota
d. Pokja IV		
	Ny. Wasito	Ketua
	Ny. Ani Yuli Marfuah	Anggota
	Ny. Budi Lestari	Anggota

Sumber : Data Monografi Kelurahan Tegalrejo Tahun 2010

Bapak Sugiat adalah orang lokal yang awalnya dipilih oleh warga dan kemudian diangkat menjadi lurah pada tahun 1976. Beliau adalah salah satu lurah yang dianggap serius dalam memperjuangkan kemajuan masyarakat kelurahan Tegalrejo diantaranya adalah berjuang dalam masalah pendidikan hal ini terbukti pada masa pemerintahannya beliau bisa memperjuangkan masuknya SMP 6 Kota Salatiga dan SMA Negeri 2 Kota Salatiga berlokasi di kelurahan Tegalrejo. Setelah itu kemudian perkembangan kelurahan Tegalrejo terbilang pesat karena kemudian akses ditindaklanjuti dengan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yaitu pengaspalan jalan yang akhirnya menunjang akses perekonomian.

Perangkat kelurahan yang dimiliki kelurahan Tegalrejo terdiri dari Kepala Kelurahan (Kalur), Sekretaris Kelurahan (Seklur), Kepala Seksi (Kasi) pemerintahan, Kepala Seksi (Kasi) Kesejahteraan Rakyat, Kepala Seksi (Kasi) Pembangunan, Kepala Seksi (Kasi) Ketentraman dan Ketertiban, yang dibantu oleh Staf yang berjumlah 5 orang.

Bagan : 4.3
Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Tegalrejo Tahun 2010



Sumber : Data Monografi Kelurahan Tegalrejo Tahun 2010

Tabel : 4.4

Susunan Perangkat Kelurahan Tegalrejo Tahun 2010

NO	NAMA	JABATAN
1	Agung Pitoyo, AP	Lurah
2	Suyanti, SH	Sekretaris Kelurahan
3	Etik Setiati, SH	Ka. Sie. Pemerintahan
4	Sumartinah	Ka. Sie Kesra
5	Sutoyo, BcKn	Ka. Sie. Ekonomi Pembangunan
6	S. Winarno	Ka. Sie Trantib
7	Suprpti	Staf
	Budi Lestari	
	Tri Endah Lestari	
	Karyadi Dwi Purwanto	
	Bambang Sapto Aji	

Sumber : Data Monografi Kelurahan Tegalrejo Tahun 2010

Bedasarkan pengamatan langsung dilapangan, masyarakat masih terbiasa menggunakan istilah lama untuk menyebut jabatan perangkat kelurahan seperti *Lurah, Carik, Bayan, Modin (Kesra)*. Dengan demikian pemahaman masyarakat kelurahan terhadap posisi masyarakat kelurahan dan hubungan sosial antara keduanya masih didasarkan pada struktur lama meskipun secara formal struktur pemerintahan tersebut telah mengalami perubahan.

Dalam aspek pengambilan keputusan, khususnya yang menyangkut kepentingan masyarakat, pemerintah kelurahan tidak lagi menjadi satu-satunya penentu dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Penentuan suatu kebijakan dilakukan atas hasil musyawarah bersama seluruh komponen masyarakat, yaitu Pemerintah Kelurahan, Lembaga-Lembaga Kelurahan yang ada, serta pemuka-pemuka masyarakat, seperti dalam Musyawarah Pembangunan Kelurahan (Musbangkel) dan lainnya yang kemudian dituangkan dalam keputusan kelurahan. Komunikasi Pemerintah kelurahan dengan masyarakat juga dilakukan melalui pertemuan dengan RW dan RT. Secara umum mulai masa pemerintahan lurah Singo Yudho hingga sekarang tidak pernah terjadi peristiwa yang menimbulkan gejolak di masyarakat baik yang disebabkan oleh persoalan politik, ekonomi maupun bencana alam/sosial, dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kelurahan Tegalrejo aman dan tentram.

c. Kondisi Sosial Ekonomi

1) Penduduk dan Mata Pencarian

Jumlah penduduk kelurahan Tegalrejo pada tahun 2008 sebanyak 7.252 jiwa yang terdiri atas laki-laki 3.466 jiwa dan perempuan 3.786 jiwa yang terbagi dalam 1.874 KK (Kepala Keluarga). Luas lahan yang digunakan untuk permukiman adalah 60.000 m² sehingga tingkat kepadatan penduduk 1 jiwa/ 8,3 m². Jumlah penduduk usia produktif (15 – 59) 5.728 jiwa atau 78,9% dari jumlah penduduk, diantaranya 2.174 jiwa masih duduk dibangku sekolah sehingga tenaga kerja yang ada adalah 3.554 jiwa sementara secara aktual penduduk yang bekerja 3.015 jiwa.

Sesuai dengan kondisi geografisnya kelurahan Tegalrejo yang bergelombang dan berbukit dengan struktur tanah didominasi tanah kering yang berupa tegalan dan sebagian perumahan, maka sebagian besar warganya tidak bergantung pada pertanian, lahan kering atau yang disebut dengan tegalan hanya ditanami dengan tanaman keras kayu-kayuan dan ubi-ubian. Mata pencarian masyarakat kelurahan Tegalrejo adalah buruh, swasta, home industri, berdagang dan sebagian pegawai negeri dan pensiunan.

Tabel : 4.5
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian Tahun 2004

No	Mata Pencapaian	Jumlah	%
1	a. Pegawai Negeri Sipil :		
	1) Pegawai Kelurahan	10	0,43
	2) Guru	147	6,88
	3) PNS/ABRI	526	22,84
	4) Mantri Kesehatan/Perawat	5	0,22
	5) Bidan	3	0,13
	6) Dokter	3	0,13
	7) PNS Lainnya	124	5,38
	b. Pegawai Swasta	513	22,27
	c. Pegawai BUMN/BUMD	254	11,03
	d. Pensiunan ABRI/ PNS	487	21,15
	e. Pensiunan Swasta	132	5,73
2	Jasa Perdagangan :		
	a. Warung	23	1,00
	b. Kios	15	0,65
	c. Toko	11	0,48
3	Jasa Pelayanan Hukum/ Pengacara	2	0,09
4	Jasa Angkutan Tak Bermotor	17	0,74
5	Jasa Angkutan Sepeda Motor	15	0,65
6	Jasa Ketrampilan/ Tukang Cukur	3	0,13
7	Jasa Bengkel/ Pengecatan/ Pengelasan	4	0,17
8	Jasa Persewaan	2	0,09
9	Jasa Tukang Jahit/ Konveksi	7	0,30
10	Lainnya	0	0
	Jumlah	2303	100

Sumber : Data Monografi Kelurahan Tegalrejo Tahun 2010

2) Aktivitas Produksi Masyarakat

Sebelum ada perubahan pemanfaatan lahan, yaitu tanah pertanian berubah menjadi permukiman oleh para pendatang masyarakat di kelurahan Tegalrejo banyak yang bergantung kepada pertanian, melihat kondisi tanah yang berbukit dan ketersediaan air yang terbatas maka pertanian yang diandalkan di kelurahan Tegalrejo adalah palawija, yaitu : jagung, ketelapohon, kedelai, dan kacang-kacangan praktis tanaman yang tidak

commit to user

membutuhkan air yang banyak. Sese kali pada musim penghujan petani menanam padi gogorancan yaitu jenis padi yang bisa ditanam di daerah yang sulit air dan hanya mengandalkan air tadah hujan.

Secara berangsur-angsur tanah pertanian banyak berkurang yaitu sejak sarana dan prasarana transportasi semakin baik dan semakin mudah tanah tegalan berubah menjadi tanah permukiman maka sekarang, banyak pendatang dan kemudian bermukim sehingga menjadi permukiman, petani tinggal yang tua-tua sedangkan generasi muda banyak yang mencari kerja menjadi buruh, wiraswasta, bubut bambu, kerajinan dari bambu, kayu, penghasil makanan kecil dan lain-lain. Keterlibatan para pendatang sangat kurang dalam kegiatan menjadi pelopor gerakan dimasyarakat, mereka kebanyakan hanya aktif pada kegiatan di RT nya saja.

3) Pembagian Peran Laki-laki dan Perempuan dalam Aktivitas Produksi

Perempuan asli kebanyakan berusaha untuk menopang kehidupan RT nya, jual gorengan. Produksi makanan ringan, jual makanan di pagi hari dan kegiatan lain yang bisa mendapatkan penghasilan untuk menopang kebutuhan hidup keluarganya. Perkembangan pendidikan bagi anak-anak sudah cukup baik, bagi perempuan dalam pendidikan mempunyai peluang yang sama dengan laki-laki, sampai kepada tingkatan yang dianggap mampu.

4) Pemasaran Hasil Produksi

Pemasaran kerajinan bambu, diambil oleh para penjual dari berbagai penjuru sampai ke luar negeri, sementara untuk hasil produksi seperti makanan kecil dijual atau dititipkan di toko-toko di kota Salatiga yang

dijajakan kepada para pelancong atau orang yang bepergian dan sekedar singgah di kota Salatiga.

d. Kondisi Sosial Budaya

Hubungan sosial masyarakat kelurahan Tegalrejo dapat dilihat melalui pranata-pranata yang masih bertahan di kelurahan ini melalui kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan yang kemudian mereka sebut dengan gotongroyong. Dalam hal ini gotongroyong memiliki pengertian yang lebih luas dalam berbagai kegiatan baik untuk kepentingan umum maupun individu.

Pertama gotongroyong atau kerja bakti yang dilakukan untuk membangun, memperbaiki, atau membersihkan sarana dan prasarana lingkungan seperti jalan, talud, gorong-gorong, saluran irigasi dan yang lain. Dalam kegiatan ini sumbangan yang bisa diberikan bisa berupa uang, tenaga, material, makanan dan pemikiran.

Kedua sambatan dan *rewang* adalah gotongroyong pada saat ada salah satu warga yang membangun, memperbaiki rumah, *rewang* dilakukan saat hajatan misalnya upacara perkawinan, kelahiran, sunatan, dan lain-lain.

Ketiga, gotongroyong pada saat ada kesripahan (kematian), warga membantu persiapan penguburan, perawatan jenazah sampai kepada penguburan jenazah dan memberi sumbangan berupa uang maupun sembako. Ada sebagian wilayah di kelurahan Tegalrejo yang membentuk paguyuban/seksi sosial (kematian) penghimpunan dana secara rutin dimana dana yang terkumpul dimanfaatkan untuk keperluan perawatan jenazah dan penguburan,

uang tersebut akan dikembalikan ke kas kematian setelah seluruh prosesi pemakaman selesai atau sampai pada waktu pengembalian yang telah disepakati bersama.

Selain itu, ketika ada warga yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit seluruh warga akan menjenguk dan memberikan bantuan berupa uang baik dari masing-masing maupun dengan dana yang diambil dari kas RT maupun RW. Dana kas RT/RW yang dipergunakan untuk gotongroyong tersebut diperoleh dari jimpitan (pengumpulan dana yang ditaruh di depan rumah dan akan diambil oleh petugas ronda setiap malam atau iuran yang ditarik setiap bulan pada pertemuan rutin RT/RW atau satu lapan (35 hari). Kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang lain adalah sinoman, paguyuban RW, arisan, simpan pinjam dan PKK baik RT maupun RW.

Kegiatan keagamaan, seperti yasinan, tarjih, mujahadah, dan tahlilan, merupakan pranata sosial yang masih berjalan cukup baik di kelurahan Tegalrejo. Melalui kegiatan ini para ustad dan ustadzah, tokoh-tokoh agama menyampaikan berbagai informasi tentang keagamaan dan kegiatan kemasyarakatan lainnya.. Dari sisi agama kelurahan Tegalrejo adalah termasuk wilayah yang penduduknya beragam dalam memeluk agama, 50% beragama Islam, 40% beragama nasrani sedangkan sisanya sekitar 10% beragama yang lain (Hindu dan Budha). Bagi masyarakat kelurahan Tegalrejo, kepemimpinan agama tersebut juga memiliki peran yang penting dalam kehidupan sehari-hari.

Ikatan sosial masyarakat juga diimplementasikan melalui kegiatan keagamaan menurut tradisi Jawa seperti Suroan dan Nyadran. Tradisi Nyadran sudah dilakukan sejak nenek moyang sebelumnya biasanya dilakukan oleh warga asli yang sudah tergolong sepuh dengan cara mengundang tetangga untuk makan bersama apem, pasung, dan ada tumpeng, biasanya juga dilakukan bersih kali (dukuh Tegalrejo). dan makam (dukuh kebulu dan kenteng). Suroan merupakan upacara tahunan dalam rangka memperingati tahun baru Islam (Hijriyah), Suroan di kelurahan Tegalrejo sudah tidak berjalan kuat, hanya perorangan yang masih meyakini untuk memperingati suroan dengan membuat selamatan dan upacara adat, Kebanyakan warga hanya melakukan dengan cara melekan bersama di kampungnya.

Sedangkan Nyadran, adalah upacara yang diselenggarakan setiap bulan ruwah untuk menyambut bulan Ramadhan (bulan puasa dalam kalender Islam). Tujuannya untuk mendoakan arwah para leluhur serta membersihkan diri dan hati sebelum melaksanakan puasa sebulan penuh. Tradisi nyadran dimasing-masing RW/dukuh berbeda-beda, membuat makanan dan dikirimkan kepada tetangga dan sanaka saudara yang dekat, ada yang membuat nasi tumpeng dibawa ke Surau/langgar untuk dimakan bersama dan doa bersama berupa yasin dan tahlil, ada juga yang menggelar pertunjukan wayang, namun sekarang sudah jarang dilakukan karena kegiatan tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

e. Potensi Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum

Sarana dan prasarana yang ada di kelurahan Tegalrejo sudah cukup memadai dan representatif karena termasuk di wilayah perkotaan terutama yang berupa jalan baik jalan poros di kelurahan sampai pada jalan lingkungan sudah di aspal, rabat beton maupun paving block. Sebagian masih berupa jalan tanah yaitu jalan yang menuju tegalan. Dalam kehidupan sehari-hari mobilitas penduduk kelurahan Tegalrejo ditunjang dengan sarana transportasi sepeda, becak, dan angkutan umum. Sedangkan sebagian kecil menggunakan sepeda motor dan mobil pribadi.

Sarana pendidikan yang terdapat di kelurahan Tegalrejo TK, SD/MI, SLTP, SMU. Walaupun untuk melanjutkan sekolah SLTP dan SMU harus ke kelurahan tetangga atau ke pusat kota Salatiga dengan jarak yang cukup jauh dan harus ditempuh dengan angkutan umum maupun bersepeda, namun kesadaran wajib belajar 9 tahun sudah cukup tinggi sehingga jumlah lulusan SLTP dan SMU juga cukup banyak. Sedangkan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Diploma, S-1, S-2, maupun S-3) juga sudah tersedia tidak begitu jauh dari kelurahan Tegalrejo yaitu di pusat kota Salatiga yang hanya sekitar + 6 km yaitu di STAIN, dan UKSW atau harus keluar kota seperti ke Surakarta, Semarang maupun ke Yogyakarta.

Kebutuhan Air bersih bagi warga sebagian besar sudah terfasilitasi dari PDAM. Fasilitasi dari PDAM terbagi menjadi dua wilayah pelayanan yaitu 1. wilayah RW 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 8 dari PDAM Kota Salatiga yaitu wilayah yang berada di dataran rendah (Tegalrejo bagian Utara, kemudian RW 7)

sedangkan wilayah yang berada dilokasi atas mengambil air dari PDAM kabupaten Semarang (Getasan). Sebagian kecil di masing-masing RW masih menggunakan air dari sumur (biasanya adalah KK yang tergolong miskin (sekitar 15 % dari KK yang ada.). Untuk sementara inipada musim kemarau sekitar bulan Juli-Agustus karena debit air berkurang terutama diwilayah bagian atas biasanya mengalirnya dijadwal dengan sistem bergantian siang dan malam hari. Untuk mengatasi hal tersebut kebanyakan warga menandu air di malam hari dan dipergunakan untuk kebutuhan air di siang. Air di tandu di bak mandi dan menggunakan gentong besar, ada beberapa warga yang mampu memiliki tandon air yang cukup besar. Kualitas air dari sumur sementara ini masih dianggap sehat karena wilayah kelurahan tegalrejo masih banyak tumbuh pepohonan dan belum ada industri yang mengakibatkan pencemaran air dan lingkungan. Untuk sanitasi dari 2.941 KK yang memiliki WC sendiri sekitar 80% sedangkan sisanya menggunakan fasilitas MCK umum, kebanyakan warga untuk mebuang hajat sudah memiliki MCK pribadi dengan sistem sapiteng. Sebagian masyarakat di dukuh Kenteng MCK masih bersifat semipermanen karena MCK masih setengah badan. Sedangkan prasarana kesehatan di kelurahan Tegalrejo sudah ada 2 bidan yang membuka praktek dirumahnya. Ada 2 (tingkat kecamatan) puskesmas besar dan ada 1 puskesmas pembantu (relatif ketersediaan peralatan dan dokter yang ada kurang bila dibandingkan dengan puskesmas besar) Sedangkan Dokter praktek di rumah ada 2 orang, diantaranya adalah dr. Haryoko yang mempunyai tempat pengobatan yang cukup representatif (rawat Inap). Jarak antara

Kelurahan Tegalrejo dengan Rumah Sakit Umum Pemda sekitar 5 Km dan Rumah Sakit Aryowirawan yang khusus penyakit paru-paru/pernafasan. Artinya dari segi sarana-prasarana kesehatan sudah cukup baik bagi masyarakat kelurahan Tegalrejo.

Untuk kebutuhan komunikasi sudah terfasilitasi dengan baik bagi mereka yang tidak memiliki jaringan telpon sendiri dan sebagian besar sudah menggunakan telpon selular karena sekarang fasilitas tersebut sudah bukan barang mewah lagi. Kebutuhan informasi dan hiburan diperoleh dari radio, televisi dan tempat hiburan berupa cafe dan musik yang ada di pusat kota.

Untuk menambah modal atau memenuhi kebutuhan mendadak yang harus di penuhi, warga memperoleh pinjaman dari simpan pinjam yang ada dimasing-masing RT, RW maupun pengajian. Selain itu ada Koperasi Unit Desa "RUKUN" yang memfasilitasi permodalan dan Toserba, Koperasi yang sedang dirintis oleh BKM dan mendapat fasilitasi pinjaman lunak dari dinas Koperasi Kota Salatiga. Bagi yang membutuhkan pinjaman besar mereka dapat mengakses ke berbagai lembaga kredit atau lembaga perbankan yang ada di pusat kota Salatiga dengan jaminan dan aturan main yang telah ditentukan oleh pihak perbankan. Sementara itu bagi warga yang mempunyai usaha kecil dan tidak memiliki barang/ surat berharga yang bisa dijaminkan maka mereka bisa di fasilitasi dengan koperasi RT/RW yang cukup kuat hal ini berdampak pada tidak adanya lagi masyarakat yang mengakses rentenir rentenir, sejak berdiri BKM Wijayakusuma dan koperasi di kelurahan Tegalrejo.

Beberapa program pembangunan yang masuk ke kelurahan Tegalrejo antara lain bantuan beras murah untuk warga miskin (raskin) senilai 20 kg/KK, Usaha Ekonomi Kelurahan – Simpan Pinjam (UED-SP) yang dikelola oleh PKK/ Dasawisma. Pemberdayaan daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE) dikelola oleh kader PKK dimasing-masing RW. Program tersebut masih berjalan semua namun di beberapa tempat ada yang sudah berhenti karena macet di masyarakat dan pengurus yang tidak berperilaku baik.

Berdasarkan uraian latar belakang dan kebutuhan masyarakat diatas dari letak geografisnya kelurahan Tegalrejo merupakan daerah lahan kering (tegalan), dan lahan sudah banyak berkurang menjadi perumahan yang dihuni oleh pendatang maupun para pensiunan tentara yang bergeser dari perumahan dinas. Maka sebagian besar penduduknya adalah pegawai, pensiunan dan buruh, yang menjadi karyawan di Perusahaan Tekstil PT Damatek dan PT. Timatek.

Bagaimana masalah dan kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat kelurahan Tegalrejo antara lain kurangnya air bersih pada musim kemarau, Pada musim penghujan karena berbukit, air menuju ke wilayah bawah dan menggenangi jalan-jalan. Hal ini terjadi karena sistem pembuangan air (drainase tidak tertata dengan baik), masalah transportasi sebelum tahun 2006 masyarakat kesulitan karena jalur angkot yang tidak melewati kelurahan Tegalrejo (baru tahun 2006 ada 2 jalur angkot yaitu no 7 dan no 10) yang beroperasi, kurangnya pengetahuan tentang pengolahan lahan kering,

terbatasnya lapangan kerja, terbatasnya warga kepada kredit dan belum optimalnya fungsi kelembagaan ekonomi dan sosial yang ada di kelurahan Tegalorejo.

2. Jenis dan Kualitas Input Pendidikan Kritis dalam Pelaksanaan P2KP

(Factor Input)

Input yang diberikan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan kritis dalam program P2KP di kelurahan Tegalorejo adalah berbagai pelatihan dan coaching sebagai upaya pengembangan kapasitas, pelaksanaan siklus P2KP, pendanaan berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), serta sarana prasarana yang menunjang pelaksanaan program.

a. Pengembangan Kapasitas Masyarakat

Proses pengembangan masyarakat tidaklah mungkin meninggalkan satu indikator ini yaitu bagaimana masyarakat bisa belajar yang pada akhirnya bisa meningkatkan baik pengetahuan, ketrampilan dan perilaku masyarakat atau yang sering disebut dengan pengembangan kapasitas. Dalam rangka pengembangan kapasitas di kelurahan Tegalorejo, maka selama pendampingan P2KP diberikan beberapa pelatihan bagi masyarakat, yang meliputi:

1) Pelatihan Relawan

Relawan P2KP adalah warga masyarakat dengan niat yang tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membantu merubah kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu. Tugas seorang relawan adalah

melakukan proses tahapan siklus P2KP bersama-sama dengan masyarakat dimana siklus tersebut merupakan proses pendidikan kritis dalam rangka mengenali diri dan lingkungannya kemudian membuat gagasan program untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi secara bersama-sama. Dengan demikian pelatihan relawan P2KP menjadi penting agar memahami substansi dan tata cara pelaksanaan tahapan siklus dan pada akhirnya mampu memfasilitasi pelaksanaan kegiatan P2KP di masyarakat. Adapaun materi-materi yang diberikan dalam pelatihan relawan ini sebanyak 33 JPL, yang meliputi :

Tabel : 4.6
Uraian Topik-Topik Pelatihan Relawan Di Kelurahan Tegalrejo
Tahun 2004

Tema	Topik	Tujuan	Bahan	Metoda	Durasi
Belajar Bersama	Mitra belajar	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta saling mengenal, saling memahami perbedaan, saling menghargai - Peserta mampu menciptakan keakraban 	<ul style="list-style-type: none"> - Biodata peserta - Format permainan 	Permainan/ dinamika kelompok	1 Jpl
	Orientasi belajar	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta memahami tujuan pelatihan - Peserta memahami apa yg akan diperoleh dan bagaimana pelatihan dilakukan 	<ul style="list-style-type: none"> - GBPP Pelatihan Relawan - Buku peserta 	Ceramah	1 Jpl
	Kontrak belajar	Peserta mampu : <ul style="list-style-type: none"> - merumuskan harapan bersama - memahami hubungan antara harapan dan silabus - membangun kesepakatan utk mencapai harapan bersama - membangun kesepakatan tatib pelatihan 	Format isian harapan dan kecemasan/ kekhawatiran	Diskusi kelompok & kelas	1 Jpl

Tema	Topik	Tujuan	Bahan	Metoda	Durasi
Tantangan	Paradigma Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta memahami apakah paradigma & implikasinya thd pembangunan pada umumnya - Peserta menyadari pergeseran paradigma pembangunan di Indonesia & implikasinya thd kemiskinan 	<ul style="list-style-type: none"> - Hand-out - Bahan bacaan 	Diskusi kelompok Ceramah Tanya jawab	2 Jpl
	Masalah kemiskinan	Peserta memahami & yakin: <ul style="list-style-type: none"> - faktor-faktor penyebab kemiskinan - hubungan sebab-akibat antar faktor penyebab kemiskinan - akar persoalan kemiskinan 	<ul style="list-style-type: none"> - Handout - Bahan Bacaan - Lembar Kasus 	Diskusi kelompok/ DPT	3 Jpl
Konsep P2KP	Penanggulangan Kemiskinan	Peserta memahami : <ul style="list-style-type: none"> - dasar pemikiran yg melandasi konsep P2KP - bidang garapan utama P2KP - Strategi intervensi P2KP - Proses pembelajaran dalam P2KP 	<ul style="list-style-type: none"> - Handout - Bahan Bacaan 	Pemutaran & analisis VCD DPT Presentasi Pencerahan	1 Jpl
Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan sejati	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta memahami konsep pemberdayaan sejati - Peserta mampu melakukan pemberdayaan sejati dalam tugasnya sebagai Relawan 	<ul style="list-style-type: none"> - Handout - Bahan bacaan 	Diskusi kelas Presentasi/ceramah Tanya jwb	2 Jpl
	Kepemimpinan masyarakat manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta memahami ciri khas seorang pemimpin masyarakat manusia - Peserta menyadari bahwa pemimpin masyarakat manusia haruslah seorang manusia sejati sesuai dengan martabatnya sebagai mahluk ciptaan yang paling luhur. 	<ul style="list-style-type: none"> - Handout - Bahan bacaan 	Simulasi Diskusi kelompok Diskusi kelas	2 Jpl
	Pengorganisasian	1) Peserta memahami : <ul style="list-style-type: none"> - Konsep 	Handout Bahan bacaan	- Permainan (buldoser)	2 Jpl

Tema	Topik	Tujuan	Bahan	Metoda	Durasi
	masyarakat	<p>pengorganisasian masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prinsip-prinsip dan pentingnya pengorganisasian masyarakat - Pengertian dan ciri-ciri organisasi masyarakat warga <p>2) Peserta menyadari pengorganisasian masyarakat sebagai proses penyadaran kritis masyarakat</p> <p>3) Peserta mampu memfasilitasi proses pengorganisasian masyarakat</p>		<p>dan dinding,te puk tangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peragaan dengan analogi fungsi jari - Diskusi kelompok - Diskusi pleno 	
Peran Relawan	Citra diri	<p>Peserta menyadari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - citra dirinya sebagai Manusia - bahwa seorang manusia mempunyai panggilan tugas sebagai agen pembaruan 	<p>Pedoman umum P2KP</p> <p>Gambar Handout</p> <p>Bahan bacaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Permainan Kerja kelompok - Pencerahan 	2 Jpl
	Peran dan fungsi Relawan	Peserta memahami peran dan fungsi Relawan sebagai dalam upaya penanggulangan kemiskinan	<p>Pedoman umum P2KP</p> <p>Handout</p> <p>Bahan bacaan</p>	<p>Diskusi kelompok</p> <p>Diskusi kelas</p>	2 Jpl
Siklus P2KP dan Refleksi Kemiskinan	Siklus P2KP	<p>Peserta memahami keseluruhan siklus P2KP</p> <p>Peserta memahami tahapan penyelenggaraan siklus secara umum</p>	Pedoman Umum P2KP	<p>Analisa tayangan VCD</p> <p>Diskusi kelompok dan pleno</p>	2 JPL
	Refleksi Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta memahami bedanya memfasilitasi suatu rembug/rapat dgn FGD - Peserta mampu memfasilitasi FGD Refleksi kemiskinan 	<p>Pedoman Umum</p> <p>Bahan bacaan</p> <p>Panduan FGD RK</p>	<p>Presentasi</p> <p>Simulasi</p>	5 Jpl
Total JPL					33 JPL

Sumber : Diolah dari *Standart Operasional Prosedur (SOP)* Pelatihan Relawan.

Masing-masing JPL waktunya 45 menit sehingga total waktu yang dibutuhkan 1.485 menit. Apabila dalam sehari efektif waktu yang dibutuhkan 8 jam (pukul 08.00 – 17.00 WIB), maka pelatihan tersebut harus dilakukan selama kurang lebih 3 hari. Pada implementasinya pelatihan tersebut dilaksanakan selama 3 hari, namun setiap harinya hanya dimulai pukul 13.00 – 17.00 WIB). Pelatihan tidak dilakukan sesuai jadwal karena jika pagi hingga sore hari umumnya para relawan bekerja di tempat bekerjanya masing-masing. Akibatnya materi diberikan tidak penuh, waktu diskusi dan praktekpun sangat kurang karena berkurangnya JPL dan banyak jam yang digunakan pada materi konsep P2KP. Apabila dilaksanakan dalam waktu lebih lama kendalanya adalah keterbatasan waktu dan akan sangat mengganggu aktifitas pokok para relawan. Selain itu Tim fasilitator juga tidak hanya memfasilitasi di satu kelurahan/desa saja tetapi antara 7 – 9 kelurahan/desa, sementara kerangka waktu yang diberikan sekitar 1 bulan.

2) Pelatihan Anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

Anggota BKM adalah orang/individu yang terpilih melalui pemilihan umum seluruh warga dewasa mulai dari tingkat RT, RW dan kelurahan, dengan kriteria yang telah disepakati bersama di masyarakat. Pelatihan ini dilaksanakan agar anggota BKM memahami hakikat, latar belakang dan tujuan keberadaan BKM serta memahami

dan mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi lembaga BKM.

Pelatihan ini diperuntukan kepada anggota BKM .

Secara umum materi yang diberikan tidak jauh berbeda dengan materi yang diberikan kepada relawan karena pada dasarnya anggota BKM adalah juga para relawan yang dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin dan mengelola penyelesaian permasalahan yang dihadapi di wilayahnya. Materi-materi yang diberikan meliputi :

Tabe; : 4.7
Uraian Topik-topik Pelatihan Anggota BKM Di Kelurahan Tegalrejo
Tahun 2004

Tema	Topik	Tujuan	Bahan	Metoda	Durasi
Belajar Bersama	Mitra belajar	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta saling mengenal, saling memahami perbedaan, saling menghargai - Peserta mampu menciptakan keakraban 	<ul style="list-style-type: none"> - Bio data peserta - Format permainan 	Permainan / dinamika kelompok	1 Jpl
	Orientasi belajar	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta memahami tujuan pelatihan - Peserta memahami apa yg akan diperoleh dan bagaimana pelatihan dilakukan 	<ul style="list-style-type: none"> - GBPP Pelatihan Fasilitator - Buku peserta 	Ceramah	1 Jpl
	Kontrak belajar	Peserta mampu : <ul style="list-style-type: none"> - merumuskan harapan bersama - memahami hubungan antara harapan dan silabus - membangun kesepakatan utk mencapai harapan bersama - membangun kesepakatan tatib pelatihan 	Format isian harapan dan kecemasan/ kekhawatiran	Diskusi kelompok & kelas	1 Jpl
Tantangan	Paradigma pembangunan	Peserta memahami : <ul style="list-style-type: none"> - Tujuan Pembangunan - Pengertian paradigma dan implikasinya terhadap kebijakan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Hand-out - Bahan bacaan 	Diskusi kelompok Curah pendapat Penjelasan Tanya	2 Jpl

Tema	Topik	Tujuan	Bahan	Metoda	Durasi
		- Terjadinya pergeseran paradigma pembangunan di Indonesia dan implikasinya terhadap kemiskinan		jawab	
	Masalah Kemiskinan	Peserta memahami & yakin: - faktor-faktor penyebab kemiskinan - dimensi – dimensi kemiskinan - akar persoalan kemiskinan	- Handout - Bahan Bacaan - Lembar Kasus	Diskusi pohon persoalan kemiskinan	3 Jpl
Penanggulangan Kemiskinan	Penanggulangan Kemiskinan	Peserta memahami dan yakin : - Tujuan penanggulangan kemiskinan dan transformasi sosial - Intervensi utama penanggulangan kemiskinan untuk membangun nilai - Strategi dan tahapan kegiatan pemecahan masalah kemiskinan	- Handout - Bahan Bacaan	Pemutaran & analisis VCD Curah pendapat dan tanya jawab Penjelasan	3 Jpl
Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan sejati	- Peserta memahami konsep pemberdayaan sejati - Peserta mampu melakukan pemberdayaan sejati dalam tugasnya sebagai fasilitator	- Handout - Bahan bacaan	Diskusi kelas Presentasi/ ceramah Tanya jwb	3 Jpl
	Kepemimpinan masyarakat manusia	- Peserta memahami ciri khas seorang pemimpin masyarakat manusia - Peserta menyadari bahwa pemimpin masyarakat manusia haruslah seorang manusia sejati sesuai dengan martabatnya sebagai mahluk ciptaan yang paling luhur.	- Handout - Bahan bacaan	Simulasi Diskusi kelompok Diskusi kelas	3 Jpl
	Pengorganisasian masyarakat	4) Peserta memahami : - Konsep pengorganisasian masyarakat - Prinsip-prinsip dan pentingnya pengorganisasian	Handout Bahan bacaan	- Permainan (buldoser dan dinding, tepuk tangan) - Peragaan dengan	2 Jpl

Tema	Topik	Tujuan	Bahan	Metoda	Durasi
		masyarakat - Pengertian dan ciri-ciri organisasi masyarakat warga 5) Peserta menyadari pengorganisasian masyarakat sebagai proses penyadaran kritis masyarakat 6) Peserta mampu memfasilitasi proses pengorganisasian masyarakat		analogi fungsi jari - Diskusi kelompok - Diskusi pleno	
BKM	BKM dan Modal Sosial	Peserta memahami dan meyakini : - Pengertian BKM - Fungsi BKM dalam membangun modal sosial - Pengertian modal sosial - Kepercayaan sebagai dasar modal sosial - Modal sosial sebagai modal penanggulangan kemiskinan	Bahan Bacaan : OMW BKM dan Modal Sosial Buku Petunjuk pelaksana : Badan Keswadayaan Masyarakat VCD siklus : Mengenal dan Membangun BKM	Analisa VCD Diskusi Kelompok Permainan Analisa Kasus	4Jpl
	Tugas BKM	Peserta memahami : Tugas – tugas BKM Anggaran Dasar BKM Anggaran Rumah Tangga	Buku Petunjuk pelaksana : Badan Keswadayaan Masyarakat Anggaran Dasar BKM	Diskusi kelompok Diskusi kelas	3 Jpl
	Perangkat Organisasi BKM	Peserta memahami : Perangkat Organisasi BKM Peserta memahami hubungan BKM dengan UP – UP Peserta memahami tugas dan fungsi UP – UP	Buku Petunjuk pelaksana : Badan Keswadayaan Masyarakat	Penjelasan dan Tanya jawab	2 Jpl
Jumlah					30 JPL

Sumber : Diolah dari *Standart Operasional Prosedur (SOP)* Pelatihan BKM.

Untuk menyelesaikan materi diatas maka membutuhkan waktu 30 JPL sehingga pelatihan dilaksanakan dalam waktu 3 hari, tetapi seperti

commit to user

halnya pelatihan relawan setiap harinya pelatihan dilakukan mulai pukul 13.00 – 17.00 WIB. Secara umum permasalahan yang dihadapi hampir sama dengan pelaksanaan pelatihan relawan.

3) Pelatihan Sekretaris dan Unit Pengelola BKM (UP-BKM)

BKM adalah sebagai lembaga pengambil keputusan dan membuat kebijakan tidak sebagai eksekuting, sehingga untuk melaksanakan seluruh kebijakan dan keputusan yang telah dibuat lembaga BKM mempunyai 1 unit kesekretariatan dan 3 unit pengelola yaitu : 1). Sekretariat BKM 2). Unit Pengelola Lingkungan (UPL), 3). Unit Pengelola Sosial (UPS), 4). Unit Pengelola Keuangan (UPK). Agar unit pengelola sebagai gugus tugas BKM ini memiliki pemahaman substansi dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya maka pelatihan terhadap sekretariat dan unit pengelola ini perlu dilakukan. Selain itu pelatihan ini bertujuan agar unit pengelola mampu menilai kelayakan usulan/proposal Panitia/KSM, serta mampu mengelola dana secara sehat, transparan dan bertanggungjawab. Pelatihan dilaksanakan 2 tahap yaitu pelatihan dasar bagi Sekretaris dan UP-UP BKM, pelatihan ini dilaksanakan sebelum Bantuan Langsung Masyarakat Tahap I dicairkan dan Pelatihan lanjutan yang materinya lebih khusus kepada bidang tugasnya masing-masing yaitu Sekretariat, UPL, UPS dan UPK.

Tabel : 4.8
Uraian Topik-Topik Pelatihan Sekretaris dan Unit-Unit Pengelola BKM
Di Kelurahan Tegalrejo Tahun 2004

Tema	Topik	Tujuan	Bahan	Metoda	Durasi
Belajar Bersama	Mitra belajar	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta saling mengenal, saling memahami perbedaan, saling menghargai - Peserta mampu menciptakan keakraban 	<ul style="list-style-type: none"> - Bio data peserta - Format permainan 	Permainan / dinamika kelompok	1 Jpl
	Orientasi belajar	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta memahami tujuan pelatihan - Peserta memahami apa yg akan diperoleh dan bagaimana pelatihan dilakukan 	<ul style="list-style-type: none"> - GBPP Pelatihan - Fasilitator - Buku peserta 	Ceramah	1 Jpl
	Kontrak belajar	Peserta mampu : <ul style="list-style-type: none"> - merumuskan harapan bersama - memahami hubungan antara harapan dan silabus - membangun kesepakatan utk mencapai harapan bersama - membangun kesepakatan tatib pelatihan 	Format isian harapan dan kecemasan/kekhawatiran	Diskusi kelompok & kelas	1 Jpl
Tantangan	Paradigma pembangunan	Peserta memahami : <ul style="list-style-type: none"> - Tujuan Pembangunan - Pengertian paradigma dan implikasinya terhadap kebijakan pembangunan - Terjadinya pergeseran paradigma pembangunan di Indonesia dan implikasinya terhadap kemiskinan 	<ul style="list-style-type: none"> - Hand-out - Bahan bacaan 	Diskusi kelompok Curah pendapat Penjelasan Tanya jawab	2 Jpl
	Masalah Kemiskinan	Peserta memahami & yakin: <ul style="list-style-type: none"> - faktor-faktor penyebab kemiskinan - dimensi – dimensi kemiskinan - akar persoalan kemiskinan 	<ul style="list-style-type: none"> - Handout - Bahan Bacaan - Lembar Kasus 	Diskusi pohon persoalan kemiskinan	2 Jpl
Penanggulangan Kemiskinan	Penanggulangan Kemiskinan	Peserta memahami dan yakin : <ul style="list-style-type: none"> - Tujuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Handout - Bahan Bacaan 	Pemutaran & analisis VCD	2Jpl

Tema	Topik	Tujuan	Bahan	Metoda	Durasi
		<p>penanggulangan kemiskinan dan transformasi sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intervensi utama penanggulangan kemiskinan untuk membangun nilai - Strategi dan tahapan kegiatan pemecahan masalah kemiskinan 		<p>Curah pendapat dan tanya jawab</p> <p>Penjelasan</p>	
Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan sejati	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta memahami konsep pemberdayaan sejati. - Peserta mampu melakukan pemberdayaan sejati dalam tugasnya sebagai fasilitator 	<ul style="list-style-type: none"> - Handout - Bahan bacaan 	<p>Diskusi kelas</p> <p>Presentasi/ ceramah</p> <p>Tanya jwb</p>	2 Jpl
	Kepemimpinan masyarakat manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta memahami ciri khas seorang pemimpin masyarakat manusia - Peserta menyadari bahwa pemimpin masyarakat manusia haruslah seorang manusia sejati sesuai dengan martabatnya sebagai makhluk ciptaan yang paling luhur. 	<ul style="list-style-type: none"> - Handout - Bahan bacaan 	<p>Simulasi</p> <p>Diskusi kelompok</p> <p>Diskusi kelas</p>	2 Jpl
	Pengorganisasian masyarakat	<p>Peserta memahami :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konsep pengorganisasian masyarakat - Prinsip-prinsip dan pentingnya pengorganisasian masyarakat - Pengertian dan ciri-ciri organisasi masyarakat warga. - Peserta menyadari pengorganisasian masyarakat sebagai proses penyadaran kritis masyarakat. - Peserta mampu memfasilitasi proses pengorganisasian masyarakat 	<p>Handout</p> <p>Bahan bacaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Permainan (bulldoser dan dinding, tepuk tangan) - Peragaan dengan analogi fungsi jari - Diskusi kelompok - Diskusi pleno 	2 Jpl
BKM	BKM dan Modal Sosial	<p>Peserta memahami dan meyakini :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian BKM - Fungsi BKM dalam membangun modal 	<p>Bahan Bacaan :</p> <p>OMW</p> <p>BKM dan Modal Sosial</p>	<p>Analisa VCD</p> <p>Diskusi Kelompok</p> <p>Permainan</p>	2 Jpl

Tema	Topik	Tujuan	Bahan	Metoda	Durasi
		sosial - Pengertian modal sosial - Kepercayaan sebagai dasar modal sosial - Modal sosial sebagai modal penanggulangan kemiskinan	Buku Petunjuk pelaksana : Badan Keswadayaan Masyarakat VCD siklus : Mengenal dan Membangun BKM	Analisa Kasus	
	Tugas BKM	Peserta memahami : - Tugas – tugas BKM. - Anggaran Dasar BKM. - Anggaran Rumah Tangga	Buku Petunjuk pelaksana : Badan Keswadayaan Masyarakat Anggaran Dasar BKM	Diskusi kelompok Diskusi kelas	2 Jpl
	Perangkat Organisasi BKM	Peserta memahami : - Perangkat Organisasi BKM. - Peserta memahami hubungan BKM dengan UP – UP. - Peserta memahami tugas dan fungsi UP – UP.	- Buku Petunjuk pelaksana : Badan Keswadayaan Masyarakat. - MB Tupoksi UP BKM	Penjelasan dan Tanya jawab	2 Jpl
Jumlah					21 JPL

Sumber : Diolah dari *Standart Operasional Prosedur* (SOP) Pelatihan Sekretariat dan UP.

Topik-Topik Materi Pelatihan Lanjutan :

Tabel : 4.9
Unit Pengelola Lingkungan (UPL)

No	Materi	Durasi
1	Peran dan Fungsi UPL	2 JPL
2	Praktek Penyusunan proposal dan pembuatan RAB & Penyusunan LPJ.	6 JPL
3	Teknik Penilaian Proposal Lingkungan	3 JPL
4	Monitoring dan Evaluasi kegiatan	2 JPL
	Total JPL	13 JPL

Sumber : Diolah dari *Standart Operasional Prosedur* (SOP) Pelatihan Sekretariat dan UP.

Tabel : 4.10
Unit Pengelola Sosial (UPS)

No	Materi	Durasi
1	Peran dan Fungsi UPS	2 JPL
2	Praktek Penyusunan Proposal Kegiatan Sosial & Penyusunan LPJ.	6 JPL
3	Teknik Penilaian Proposal Kegiatan Sosial.	3 JPL
4	Monitoring dan Evaluasi kegiatan Sosial.	2 JPL
	Total JPL	13 JPL

Sumber : Diolah dari *Standart Operasional Prosedur* (SOP) kegiatan P2KP per siklus.

Tabel : 4.11
Unit Pengelola Keuangan (UPK)

No	Materi	Durasi
1	Peran dan Fungsi UPK-BKM	2 JPL
2	Teori dan Praktek Pembukuan UPK- BKM	6 JPL
3	Pengelolaan Kas	2 JPL
4	Pengelolaan Dana Bergulir	2 JPL
5	Wawasan Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga	2 JPL
6	Teori dan Praktek Pembentukan KSM dan Penyusunan proposal Usaha KSM.	3 JPL
7	Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Kegiatan KSM	2 JPL
	Total JPL	13 JPL

Sumber : Diolah dari *Standart Operasional Prosedur* (SOP) Pelatihan Sekretariat dan UP.

4) Pengembangan kapasitas di masyarakat umum :

Pengembangan kapasitas bagi masyarakat umum dilakukan dengan cara keterlibatan langsung dari masyarakat pada setiap kegiatan tahapan siklus P2KP yang berupa :

commit to user

Tabel : 4.12
Tabel Siklus P2KP dan Capaian Hasil
Di Kelurahan Tegalrejo Tahun 2004

No	Kegiatan	Tujuan	Capaian Hasil
1	Sosialisasi Awal Program P2KP	Agar seluruh masyarakat mengetahui dan memahami program P2KP secara Utuh.	Sosialisasi telah dilakukan sampai di tingkat basis (RT, RW, kelompok pengajian, PKK, dasawisma dan lainnya) namun demikian masih banyak masyarakat yang tidak terlibat secara aktif dalam kelompok diatas. Bagi mereka yang telah mendapatkan sosialisasi juga masih dalam tataran mengetahui belum sampai paham bahkan masih jauh dari proses penyadaran.
2	Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM)	Masyarakat menentukan pilihan secara sadar apakah mau menerima atau menolak program P2KP.	Rembug kesiapan masyarakat untuk menerima atau menolak P2KP dilakukan berjenjang mulai dari tingkat basis (RT, RW, kelompok pengajian, PKK, dasawisma dan lainnya), dari sekian banyak pertemuan basis dan kelurahan P2KP diterima di kelurahan Tegalrejo, namun demikian penerimaan ini belum sepenuhnya diterima dengan tingkat kesadaran yang tinggi.
3	Refleksi Kemiskinan (RK)	Masyarakat melakukan serangkaian diskusi tentang masalah kemiskinan dan berbagai macam penyebab dan akibat dari kemiskinan.	Serangkaian FGD Refleksi Kemiskinan telah dilakukan mulai dari tingkat basis (RT, RW, kelompok pengajian, PKK, dasawisma dan lainnya) dan telah disepakati ciri-ciri dan penyebab kemiskinan. Refleksi kemiskinan belum menjadi proses penyadaran dari masing-masing pihak.
4	Pemetaan Swadaya (PS)	Masyarakat melakukan kajian-kajian terhadap masalah dan potensi yang ada sampai kepada	Serangkaian kajian terhadap potensi dan masalah kemiskinan telah dilakukan dengan hasil data-data tentang potensi dan masalah kemiskinan di kelurahan Tegalrejo. Sebagian

No	Kegiatan	Tujuan	Capaian Hasil
		pendataan kemiskinan sesuai kondisi nyata di wilayahnya.	warga masyarakat belum memahamai secara utuh terhadap keterlibatnya dalam berbagai kegiatan pemetaan swadaya yang diikuti.
5	Pembangunan Lembaga BKM	Adalah proses membangun lembaga yang bertugas menanggulangi kemiskinan dan menentukan siapa yang akan memimpin sebagai pembelajaran proses demokrasi.	Proses pemilihan anggota BKM telah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat basis dengan cara memilih langsung tanpa calon, tanpa kampanye, semua warga mempunyai hak untuk memilih dan dipilih. Dalam proses pemilihan anggota BKM masyarakat masih sulit menerapkan mekanisme pemilihan sesuai dengan SOP, sehingga masih melaksanakan pemilihan anggota BKM dengan sistem aklamasi dan penunjukan.
6	Penyusunan PJM Pronangkis	Proses menyusun dokumen perencana-an dalam rangka me-nyelesaikan permasalahan - permasalahan kemiskinan yang telah teridentifikasi pada saat pemetaan swadaya.	Dokumen PJM Pronangkis telah disusun secara partisipatif yang didasarkan pada hasil pemetaan swadaya, namun ego kewilayahan masih sangat kuat sehingga muncul kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan hasil kajian pemetaan sawadaya, artinya masih terjadi penyusunan rencana didasarkan atas keinginan dan bukan kebutuhan masyarakat.
7	Pembentukan KSM	Proses pengelompok-an masyarakat sesuai dengan ikatan-ikatan sosial yang ada di masyarakat sebagai sasaran kegiatan program.	Pembentukan KSM masih banyak yang dibangun baru dan bukan mengoptimalkan lembaga yang sudah ada karena untuk mengoptimalkan kelompok yang sudah ada menurut mereka menjadi lebih rumit untuk menyesuaikan dengan aturan dan ketentuan yang ditetapkan.
8	Pemanfaatan BLM	Masyarakat/ KSM belajar memanfaatkan dana milik bersama sebagai	BLM masih dipahami sebagai tujuan akhir dari suatu proyek/program untuk melaksanakan kegiatan

No	Kegiatan	Tujuan	Capaian Hasil
		alat untuk mereka keluar dari berbagai masalah dan belenggu kemiskinan.	pembangunan yang telah diusulkan, tidak dijadikan sebagai alat untuk membangun kemandirian masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan.
9	Keberlanjutan Kegiatan	Kegiatan tersebut terus berulang sampai pada batasan waktu yang telah disepakati antara 2 – 3 tahun.	Kegiatan siklus telah diulang 3 kali sesuai dengan masa bakti kepengurusan BKM dan masa berlaku PJM Pronangkis yaitu 3 tahun. Namun demikian masyarakat masih terkesan terpaksa, belum sadar betul melakukan siklus P2KP sebagai kebutuhan dalam penanggulangan kemiskinan.

Sumber : Diolah dari *Standart Operasional Prosedur* (SOP) kegiatan P2KP per siklus.

Selain pelatihan-pelatihan tersebut diatas, pengembangan kapasitas juga dilakukan melalui *coaching* yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan siklus P2KP. Pelaksanaan *coaching* pada setiap siklus biasanya dilakukan dalam waktu 1 hari. Beberapa *coaching* yang diberikan kepada masyarakat (relawan) adalah sebagai berikut:

Tabel : 4.13
Jenis *Coaching*, Pelaksanaan dan Peserta dalam P2KP

No	Jenis <i>Coaching</i>	Pelaksanaan	Peserta
1	Refleksi Kemiskinan (RK)	Sebelum Siklus Refleksi Kemiskinan	Relawan yang sudah mengikuti pelatihan dasar.
2	Pemetaan Swadaya (PS)	Sebelum siklus Pemetaan swadaya	Tim pemetaan Swadaya yang terbentuk melalui rembug warga
3	Pembangunan Lembaga BKM	Sebelum siklus pembangunan BKM	Panitia pembangunan BKM yang terpilih melalui rembug warga.
4	Penyusunan PJM Pronangkis	Sebelum siklus penyusunan PJM Pronangkis.	Tim Perencanaan partisipatif (BKM, relawan, dan perwakilan masyarakat).
5	Pembentukan KSM	Sebelum siklus Pembentukan KSM.	BKM, UP-UP BKM, Relawan
6	Pemanfaatan BLM	Sebelum BLM dicalirkan.	BKM, UP-UP BKM, Relawan, panitia/KSM yang akan menjadi sasaran program.

Sumber : Diolah dari *Standart Operasional Prosedur* (SOP) kegiatan P2KP per siklus.

Semua materi pelatihan dan *coaching* tersebut difasilitasi oleh Tim Fasililitator yang sebelum pelaksanaannya mendapatkan pembekalan melalui *Training of Trainer* (TOT) terlebih dahulu. Pendekatan yang digunakan dalam pelatihan maupun *coaching* adalah pendekatan partisipatif yang mengacu kepada metode Pendidikan Orang Dewasa (POD). Adapun beberapa metode yang digunakan adalah, diskusi, curah pendapat, ceramah, penugasan dan praktek. Metode tersebut suatu ketika bisa digabungkan antara metode satu dengan yang lainnya pada beberapa materi tertentu.

Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelatihan maupun *coaching* ini antara lain; pelatihan tidak dilaksanakan sesuai dengan jadwal
commit to user

yang telah ditentukan karena keterbatasan waktu, latar belakang pendidikan peserta yang berbeda, status sosial dan keterbatasan pemandu (fasilitator) yang kurang memadai.

Bapak Suwarto, Koordinator BKM menuturkan bahwa :

”beberapa pemandu kurang memahami materi dan tidak mampu memberikan materi secara baik, sementara bahasa yang digunakan dalam setiap modul menggunakan bahasa akademis yang sulit dipahami oleh warga belajar”.

Artinya peran pemandu sangat penting dalam menterjemahkan konsep P2KP agar dapat diterima dengan mudah oleh warga belajar yang memiliki latar belakang pendidikan dan status sosial yang berbeda-beda.

Selain itu, menurut Ibu Puspaning Utamie seorang relawan yang sekarang menjadi UPK,

”selama ini pelatihan UPK hanya ditekankan pada aspek pembukuan saja, padahal UPK juga mengalami kesulitan dalam memfasilitasi penyusunan proposal KSM karena didalamnya perlu analisis usaha KSM. Anggota KSM yang rata-rata berpendidikan rendah mengalami kesulitan dalam pengisian proposal, bisanya mereka meminta bantuan kepada UPK untuk membuat. Selain itu UPK juga tidak diberikan kemampuan untuk melakukan tata cara menyelesaikan kredit macet”.

Hal yang sama juga dialami oleh UPL. Menurut bapak Winarno selaku petugas UPL,

”proposal kegiatan lingkungan sulit dipahami oleh masyarakat yang biasanya dalam melakukan kegiatan pembangunan tidak menggunakan hitungan secara teknis seperti dalam proyek, sehingga apa kejadiannya, panitia meminta kepada UPL/fasilitator untuk membuat proposal kegiatan”.

b. Pendanaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) P2KP

Proses pembelajaran masyarakat juga dilakukan melalui pemanfaatan dana BLM yang dikucurkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka menyelesaikan permasalahan kemiskinan di masyarakat. Pengelolaan operasional dana BLM dilakukan oleh unit pelaksana teknis dalam BKM yang sekurang-kurangnya terdiri dari UPL, UPS dan UPK. Dengan dana stimulan tersebut, diharapkan mampu menumbuhkembangkan keberdayaan masyarakat dalam tiga aspek, yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi.

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam buku pedoman P2KP, kelurahan Tegalsrejo mendapatkan alokasi dana BLM P2KP sebesar Rp 100 Juta. Untuk membangun transparansi dan akuntabilitas khususnya dana BLM, P2KP mempunyai mekanisme penyaluran dana yang menjamin dana BLM utuh sampai kepada masyarakat dengan cara BLM langsung dimasukan melalui rekening Bank yang telah ditunjuk oleh BKM. Pencairan BLM dilakukan dalam 3 tahap Tahap I sebesar 20% digunakan untuk kegiatan yang sifat kemanfaatannya untuk kepentingan umum dan pengelolaan kegiatannya juga dilakukan secara kolektif seperti pembangunan sarana prasarana lingkungan, kegiatan pelatihan dan sosial. Pencairan BLM tahap ke II sebesar 50% digunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat kolektif maupun individu dalam bidang ekonomi seperti usaha kelompok maupun usaha individu namun cara pengajuannya tetap melalui mekanisme Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Proses

pencairan pada masing-masing tahapan dapat dilakukan setelah LPJ dibuat. Pembuatan LPJ ini selain sebagai syarat untuk pencairan BLM tahap selanjutnya yang lebih penting adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus baik BKM maupun KSM kepada masyarakat. Dalam konteks ini masyarakat akan belajar bagaimana mengelola uang masyarakat dengan jujur, penuh keterbukaan (*transparan*) dan dapat dipertanggungjawabkan (*akuntable*) sehingga akan terbangun kepercayaan (*trust*) dari masyarakat.

Khusus pada pemanfaatan dana untuk pinjaman bergulir nilai maksimal usulan per KSM Rp 30.000.000,- sedangkan minimal jumlah anggota KSM 5 orang, dengan nilai maksimal pinjaman per anggota Rp 500.000,- dan pinjaman berikutnya maksimal Rp 2.000.000,- per anggota. Pembatasan ini diberlakukan agar BKM tetap memiliki komitmen untuk berpihak kepada warga miskin. Selanjutnya setelah anggota KSM mampu mengembangkan usahanya dan membutuhkan modal yang lebih besar diharapkan BKM bisa memfasilitasi untuk bisa mengakses atau memitrakan kepada lembaga keuangan formal yang ada diwilayah tersebut. Mekanisme ini disatu sisi BKM mampu memfasilitasi usaha kecil dengan berbagai kemudahannya disisi lain BKM tidak akan merusak mekanisme perputaran dana pada cakupan yang lebih tinggi dan lebih luas.

Tabel : 4.14
Ketentuan dan Sifat Penggunaan Dana BLM

No	Sifat Kemanfaatan Kegiatan	Contoh Jenis Kegiatan	Status Pemanfaatan Dana BLM
1	Kegiatan yang secara langsung memberikan manfaat pada sebagian besar warga masyarakat terutama warga miskin.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, baik kepentingan masyarakat umum dan atau warga miskin (rumah tidak layak huni). • Penciptaan peluang usaha melalui pelatihan ketrampilan 	Sebagai dana stimulan/ diharapkan dana ini dapat menggugah swadaya masyarakat dalam setiap kegiatan penanggulangan kemiskinan, selain itu juga menyadrkan semua pihak agar ikut bertanggungjawab dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan.
2	Kegiatan Sosial yang bersifat santunan. Hal ini harus sesuai dengan kesepakatan warga dan kebijakan BKM agar tidak terjadi gejolak di masyarakat tetapi juga tidak salah sasaran.	<ul style="list-style-type: none"> • Santunan jompo, anak yatim piatu, korban bencana, anak putus sekolah karena alasan ekonomi, dsb • Beasiswa bagi warga miskin. 	Sebagai dana stimulan/ hibah, diharapkan dapat menggugah partisipasi warga lainnya untuk ikut dalam gerakan amal bagi kaum miskin.
3	Kegiatan yang secara langsung memberikan manfaat hanya kepada perorangan atau sekelompok orang saja.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan modal ekonomi keluarga-keluarga miskin • Perbaikan rumah/ sarana individu • Pelatihan individu dll 	Sebagai dana pinjaman kepada KSM dan harus dikembalikan kepada UPK secara berkelanjutan

Sumber : Pedoman Umum P2KP 1-2, Dirjen Perumahan dan Permukiman Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, September 2002. hal. 43.

Sebagai stimulan, BLM yang dikelola dengan mekanisme yang dipersiapkan lebih baik dan menerus lebih transparan dan langsung diterima oleh masyarakat berdampak pada meningkatkan kepercayaan

commit to user

masyarakat terhadap program. Namun demikian, adanya pembatasan pemanfaatan dana menunjukkan bahwa masyarakat masih belum memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri alokasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

c. Pendamping Masyarakat (Fasilitator P2KP)

Pendamping masyarakat (fasilitator) adalah orang-orang yang memiliki keahlian dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan keahlian kebidangan ilmu yang dibutuhkan dalam pendampingan masyarakat. Fasilitator P2KP bukan Boneka.....! Tampak bagus dan indah dari luar, namun senantiasa terdiam dan tidak mampu berbuat apapun ! Fasilitator P2KP adalah agen perubahan masyarakat, yang mendampingi masyarakat untuk menemukan dan memulihkan kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan dan prinsip prinsip dasar kemasyarakatan yang hakiki menuju pintu gerbang kesejahteraan mereka...! Fasilitator yang dimaksud dalam P2KP terbagi kedalam 4 tingkatan yaitu :

1. Tim fasilitator yang terdiri dari 5 orang mendampingi 9 desa/kelurahan. Tim fasilitator tersebut terdiri dari : 1 orang Senior Fasilitator, 2 orang Fasilitator Sosial, 1 orang Fasilitator Teknik, dan 1 Orang Fasilitator Ekonomi.
2. Tim Koordinator Kota (Korkot) yang mendampingi di tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh seorang korkot dibantu oleh beberapa asisten korkot yaitu : Askot CD, Askot Ekonomi, Askot Infrastruktur, dan Askot Manajemen Data.

3. Tim Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) yang mendampingi beberapa kabupaten/kota, dipimpin oleh seorang Team Leader (TL) dibantu oleh Tenaga Ahli Monev, Tenaga Ahli Pelatihan, Tenaga Ahli Sosialisasi, Tenaga Ahli Infrastruktur, Tenaga Ahli Manajemen Keuangan, Tenaga Ahli Manajemen Data dan Tenaga Ahli Kebijakan Publik.
4. Tim Konsultan Manajemen Pusat (KMP) yang mendampingi di tingkat pusat, dipimpin oleh seorang Team Leader (TL) dibantu oleh Tenaga Ahli Monev, Tenaga Ahli Pelatihan, Tenaga Ahli Sosialisasi, Tenaga Ahli Infrastruktur, Tenaga Ahli Manajemen Keuangan, dan Tenaga Ahli Manajemen Data.

Dalam hal ini kami akan membahas lebih fokus kepada pendamping (Fasilitator) di tingkat kelurahan yang secara langsung mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan program. Tugas fasilitator P2KP bagai dua sisi Mata Uang yaitu : Sebagai **Pelaksana Proyek** dan Sebagai **Agen Pemberdayaan Masyarakat**.

1. sebagai pelaksana proyek, termasuk mencatat setiap perkembangan proyek dan melaporkannya ke KMW sebagai masukan untuk data SIM (Sistem Informasi Manajemen); dan
2. sebagai agen pemberdayaan dan perubahan masyarakat, termasuk mensosialisasikan nilai-nilai P2KP kepada masyarakat, intervensi perubahan perilaku dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan

membantu masyarakat merumuskan serta melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Fasilitator P2KP yang bertugas di kelurahan Tegalrejo telah melakukan tugas-tugas sebagai pelaksana proyek di tingkat masyarakat sebagai berikut :

1. Melaksanakan P2KP sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Umum (Pedum) P2KP, Pedoman Teknis dan Buku Petunjuk Teknis Pelaksana-Fasilitator;
2. Menjaga proyek dari terjadinya salah sasaran dan salah penanganan;
3. Mencatat semua kemajuan proyek di lapangan sesuai dengan format Sistim Informasi Manajemen (SIM) P2KP yang disediakan KMW; dan
4. Melaporkan kemajuan proyek kepada KMW melalui koordinator Kota/ Kab. sebagai input Sistim Informasi Manajemen (SIM) P2KP.

Tim Fasilitator juga telah menjalankan tugasnya sebagai agen pemberdayaan masyarakat antara lain sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi, termasuk di dalamnya adalah:
 - a) Menyebarkan informasi mengenai P2KP sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan kepada seluruh lapisan masyarakat.
 - b) Menyebarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Prinsip dan Nilai-nilai yang dijunjung P2KP.
 - c) Bersama Relawan Masyarakat, melalui serangkaian FGD, membangun kesadaran kritis masyarakat agar mampu mengidentifikasi

persoalan kemiskinan di kelurahan/ desa yang bersangkutan dan perlunya menanggulangi kemiskinan secara terorganisasi dan sistematis.

- d) Mendorong peran serta dan keterlibatan seluruh komponen masyarakat umumnya dan masyarakat miskin khususnya, di seluruh kegiatan P2KP.
 - e) Membangkitkan tumbuhberkembangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan sosial kontrol pelaksanaan P2KP di kelurahan.
 - f) Memfasilitasi pembangunan dan pengembangan sosial kapital (nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan) sebagai kondisi yang dibutuhkan bagi upaya penanggulangan kemiskinan.
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan (*training*), termasuk didalamnya adalah:
- a) Memperkuat dan mengembangkan kapasitas relawa masyarakat sebagai agen pemberdayaan masyarakat. Termasuk diantaranya pelatihan dasar dan lanjutan dalam bentuk pelatihan kelas, praktek atau *on the job training* dan bimbingan intensif.
 - b) Memperkuat dan mengembangkan kapasitas BKM sebagai lembaga pimpinan kolektif masyarakat yang terpilih. Dalam hal ini difokuskan pada pelatihan dasar serta pendampingan dan *on the job training*, *bimbingan intensif*; dan
 - c) Memperkuat dan mengembangkan kapasitas KSM sebagai kelompok dinamik. Termasuk diantaranya membangun tim, mengenali peluang

usaha atau mengembangkan usaha yang ada, menyusun proposal usaha, dan pengelolaan keuangan secara sederhana. Pelatihan dilaksanakan dalam bentuk pelatihan kelas maupun praktek dalam kelompok.

3. Melaksanakan kegiatan-kegiatan umum pemberdayaan masyarakat, termasuk didalamnya adalah :

- a) Memfasilitasi proses penyiapan masyarakat pada tahap awal dengan menumbuhkembangkan kesadaran kritis masyarakat melalui proses refleksi kemiskinan dan pemetaan swadaya.
- b) Memfasilitasi refleksi kepemimpinan masyarakat untuk mendorong kesadaran kritis masyarakat dalam memilih pemimpin-pemimpinnya yang berbasis pada nilai-nilai moral yang luhur.
- c) Pengorganisasian Masyarakat. Bersama Relawan Masyarakat, memfasilitasi proses penilaian organisasi dan lembaga masyarakat yang ada dan/ atau membentuk baru organisasi masyarakat warga dan lembaga pimpinannya (BKM), sesuai kesepakatan bersama masyarakat. BKM harus merupakan lembaga pimpinan kolektif yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif dan demokratis. Demikian pula halnya dalam pembentukan Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan unit-unit lain/gugus tugas BKM lainnya. Termasuk fasilitasi pengorganisasian masyarakat adalah pengorganisasian kelompok masyarakat melalui pembentukan KSM-KSM dalam rangka

menggalang potensi masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan dengan dukungan P2KP.

- d) Memfasilitasi penyusunan PJM Pronangkis (perencanaan partisipatif dalam penanggulangan kemiskinan). Bersama dengan relawan masyarakat, memfasilitasi BKM untuk mengkoordinasi pelaksanaan perencanaan partisipatif dengan masyarakat untuk menyusun Program Jangka Menengah Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis).
- e) Bersama dengan relawan masyarakat, memfasilitasi KSM untuk mengidentifikasi peluang usaha, kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pelayanan lingkungan dasar, serta menyiapkan mereka agar mampu memformulasikannya dalam bentuk proposal yang layak.
- f) Memperkenalkan berbagai inovasi sederhana dalam manajemen organisasi dan lembaga kredit mikro, termasuk sistem audit, transparansi, proses pengambilan keputusan yang demokratis, tata buku, dan sebagainya.
- g) Memfasilitasi dan membimbing masyarakat secara intensif agar mampu mengikuti ketentuan Pedoman P2KP dalam seluruh tahapan kegiatan pelaksanaan P2KP.
- h) Memfasilitasi penanganan pengaduan dan penyelesaian konflik yang mungkin muncul di masyarakat.
- i) Advokasi, mediasi dan membangun jalinan kemitraan strategis (*networking*) antar semua pelaku yang bermanfaat bagi kemajuan bersama utamanya masyarakat miskin.

Untuk dapat menjalankan tugas pokok tersebut di atas maka Fasilitator memiliki tiga fungsi utama sebagai berikut :

1. **Fasilitasi**; yang pada intinya membuat sesuatu berjalan dengan baik dan dilakukan dengan kesadaran penuh
2. **Mediasi**, yang pada intinya menjembatani beberapa pihak untuk dapat bekerjasama secara sinergis
3. **Advokasi**, yang pada intinya mengajak orang yang diadvokasi untuk berpikir seperti dia yang mengadvokasi

Ketiga fungsi tersebut dalam prakteknya berbaur dan berjalan paralel, misalnya pada saat mediasi juga akan terjadi proses fasilitasi, ketika beberapa pihak bertemu dan advokasi ketika ada hal-hal yang masih perlu disepahamkan.

Keberadaan fasilitator pendamping masyarakat sangat dibutuhkan dilapangan untuk memfasilitasi, mediasi dan advokasi masyarakat terutama dalam melaksanakan program P2KP. Melihat dari tugas dan fungsi yang telah penulis ungkapkan diatas menggambarkan bahwa seorang fasilitator harus memiliki kapasitas yang cukup dalam menganalisa, mengkomunikasikan suatu masalah, sehingga terampil dalam memfasilitasi, memediasi dan mengadvokasi di masyarakat. Namun demikian di kelurahan Tegalrejo masih terjadi beberapa permasalahan dan kendala terkait dengan pendamping diantaranya adalah : fasilitator yang ditempatkan belum memiliki pengalaman (*fress graduate*), fasilitator yang sudah cukup kemampuan sering dipindah tempat dengan berbagai alasan,

misalnya ingin dekat dengan keluarga, untuk memperkuat tim di wilayah lain dan sebagainya. Selain itu juga ada beberapa fasilitator yang tidak *live in* (tinggal) dilokasi tugasnya hal ini berdampak pada intensitas pendampingan yang tidak maksimal dan tidak bisa membaur dengan masyarakat. Semua hal yang kami sampaikan ini berdampak pada proses pelaksanaan siklus P2KP sebagai proses pendidikan kritis di masyarakat.

d. Sarana dan Prasarana yang Mendukung Pelaksanaan Program

Selain pengembangan kapasitas dan pendanaan untuk menunjang pelaksanaan program Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) memberikan sarana dan prasarana berupa :

- 1) Buku pedoman umum dan pedoman teknis pelaksanaan program.
- 2) Berbagai macam bentuk poster, leaflet, booklet, sepanduk dan media lain sebagai alat pendukung dalam melakukan sosialisasi.
- 3) Buku pengaduan, Kotak saran, papan informasi sebagai alat bantu untuk membangun transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program.
- 4) Seperangkat pembukuan bagi sekretariat BKM.
- 5) Seperangkat Buku petunjuk Teknis Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan bagi UPL.
- 6) Buku Stadart Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan pinjaman bergulir bagi UPK-BKM.

Dalam kaitannya dengan sarana dan prasarana penunjang tersebut terdapat beberapa permasalahan seperti keterlamabatan *Standart Opersional Procedure* (SOP) dan aturan-aturan yang dibuat oleh KMP.

Menurut bapak Suwanto Koordinator BKM,

"kegiatan berhenti cukup lama hanya melakukan penguatan-penguatan siklus yang sudah dilaksanakan, hal ini terjadi karena SOP seringkali turun terlambat sementara di lapangan sudah harus berjalan mengingat kerangka waktu yang telah ditetapkan sehingga kegiatan seolah terputus."

Sementara aturan pembukuan yang berubah-ubah sehingga membingungkan sekretaris maupun UPK dalam melaksanakan tugasnya.

Puspaning Utamie UPK BKM Wijayakusuma mengungkapkan bahwa :

"pembukuan di P2KP sangat banyak jenisnya dan terasa lebih sulit bila dibandingkan dengan pembukuan lembaga lain terutama laporan keuangan, harus ada buku besar, neraca saldo, buku pendapatan dan biaya, neraca dan rugi laba, selain itu juga aturannya juga berubah-ubah."

Dalam melaksanakan kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat, BKM meminjam/sewa rumah dari salah satu pengurus BKM karena kantor pemerintah kelurahan Tegalrejo sempit dan sudah penuh dengan penataan ruang kerja bagi seluruh perangkat kelurahan yang ada. Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan rapat dan pertemuan yang melibatkan masyarakat baru memanfaatkan balai kelurahan. Walaupun tempat/kantor sekretariat BKM tidak berada di kantor kelurahan namun hubungan dan kerjasama terjalin baik dengan pemerintahan kelurahan. Keberadaan kantor yang tidak

berada di balai kelurahan hanya karena situasi dan kondisi gedung kantor kelurahan yang tidak memungkinkan untuk berada di sana.

Berbagai jenis input yang diberikan tersebut merupakan komponen yang menunjang pelaksanaan P2KP di kelurahan Tegalrejo. Sebagai input program kualitas hasil pelatihan dan coaching yang baik akan menentukan kelancaran proses pelaksanaan P2KP, Karena masyarakatlah yang akan melaksanakan semua kegiatan mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan. Berdasarkan uraian diatas pelatihan dan coaching belum sepenuhnya mampu meningkatkan kapasitas masyarakat. Sedangkan dukungan dana BLM senilai Rp 100 juta rupiah bagi masyarakat cukup membantu proses pembelajaran prinsip pembangunan berkelanjutan dalam aspek tridaya. Selain itu dukungan sarana prasarana yang diberikan oleh KMW maupun pemerintah kelurahan juga menunjang keberlanjutan kegiatan P2KP di kelurahan Tegalrejo.

3. Pelaksanaan Kegiatan P2KP (*Factor Process*)

Faktor proses merupakan rangkaian kegiatan dan mekanisme kerja program dalam mencapai tujuannya. Uraian yang disampaikan dalam proses ini meliputi bentuk kegiatan P2KP termasuk didalamnya partisipasi masyarakat sebagai bentuk keterlibatan secara langsung dalam program. Uraian bentuk kegiatan P2KP yang penulis sampaikan sesuai dengan yang terjadi di lapangan bisa dibagi menjadi 2 yaitu : pertama tahap persiapan di tingkat pusat dan daerah dan yang kedua tahap pelaksanaan P2KP di

masyarakat. Kegiatan P2KP yang merupakan serangkaian kegiatan dimana masyarakat diberikan peluang untuk ikut terlibat secara aktif sebagai proses pendidikan kritis.

1. Tahap Persiapan P2KP di Tingkat Pusat dan Daerah

Tahap ini adalah persiapan yang dilakukan agar para pelaku yang terkait baik di tingkat pusat dan daerah untuk memahami substansi, tata cara dan peran masing-masing dalam kegiatan P2KP. Selain itu juga agar terjadi integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan antara pusat dan daerah. Kegiatan persiapan ini berupa Lokalahir Orientasi P2KP untuk internal Ditjen Perumahan dan Permukiman Departemen Kimpraswil, Pelatihan Dasar P2KP bagi KMP dan KMW, Lokakarya Orientasi P2KP di tingkat Nasional dan Lokakarya Orientasi di tingkat Provinsi.

Persiapan di tingkat daerah kota/kabupaten diawali dengan Pelatihan Dasar P2KP bagi Pemerintah Daerah tingkat Kota/Kabupaten, TKPP, PJOK dan TKPK-D yang dilaksanakan sebelum perekrutan Fasilitator Kelurahan. Setelah dilakukan pelatihan dasar bagi para pelaku, kegiatan dilanjutkan dengan Lokakarya Orientasi P2KP di tingkat Kota/Kabupaten, dimana di kota Salatiga dilaksanakan pada tanggal 14 September 2002. Dalam kesempatan ini KMW juga sekaligus memperkenalkan Fasilitator Kelurahan yang akan bertugas di masing-masing wilayah lokasi sasaran P2KP.

Mekanisme kerja Tim Fasilitator dalam bentuk Tim yang terdiri dari 4 – 5 orang mendampingi 7 – 9 Kelurahan/desa. Lokakarya dan

Orientasi P2KP kemudian dilanjutkan di tingkat Kecamatan, namun karena di kota Salatiga pada pelaksanaan P2KP 1-2 hanya 5 kelurahan maka untuk kegiatan Lokakarya Orientasi P2KP di tingkat kecamatan dianggap tidak perlu untuk dilaksanakan. Lokakarya Orientasi ini langsung ditindaklanjuti di tingkat kelurahan dimana pelaksanaan di kelurahan Tegalsrejo pada tanggal 4 Desember 2002.

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan P2KP di Tingkat Masyarakat

Kegiatan yang paling awal dilakukan di tingkat kelurahan adalah Lokakarya Orientasi P2KP yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2002. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan P2KP disesuaikan dengan strategi P2KP yang akan dicapai yaitu mendorong proses transformasi sosial dari masyarakat tidak berdaya (miskin), menuju masyarakat berdaya pada strategi ini intervensi yang dilakukan meliputi : (1) Internalisasi nilai-nilai universal dan prinsip-prinsip kemasyarakatan, (2) Penguatan lembaga masyarakat melalui pendekatan pembangunan bertumpu pada kelompok (*community based development*), (3) Pembelajaran penerapan konsep TRIDAYA dalam penanggulangan kemiskinan, dan (4) Penguatan akuntabilitas masyarakat. Keempat bentuk intervensi tersebut diimplementasikan melalui serangkaian siklus P2KP sebagai proses pembelajaran kritis masyarakat yang merupakan aktualisasi dari daur pembangunan partisipatif. Tahap pelaksanaan kegiatan P2KP di masyarakat terdiri dari Persiapan Masyarakat, Identifikasi Masalah dan

Kebutuhan, Perencanaan Kegiatan, pelaksanaan Kegiatan, dan Pengawasan Kegiatan.

a. Persiapan Masyarakat

Persiapan di masyarakat meliputi kegiatan sosialisasi, Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM) dan Pendaftaran Relawan Masyarakat.

1) Sosialisasi Awal dan Lobby-Lobby Kelompok Strategis.

Setelah pelaksanaan Lokakarya Orientasi P2KP tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan dianggap tidak perlu selanjutnya Tim Fasilitator melakukan kegiatan Pemetaan Sosial atau sering disebut dengan *Sosial Mapping*. Pemetaan Sosial merupakan kegiatan dari Tim Fasilitator untuk mengetahui kondisi awal suatu wilayah kelurahan berdasarkan karakteristik geografis, demografis dan psikografis.

Karakteristik geografis menggambarkan tentang kondisi wilayah, dimana kelurahan Tegalrejo sebagian besar merupakan tanah tegalan, berbukit dan sebagian lagi merupakan wilayah permukiman. Karakteristik demografis menggambarkan tentang populasi penduduk (Jumlah penduduk laki-laki, jumlah penduduk perempuan, mata pencaharian, tingkat pendidikan, KK miskin, dan lainnya), Sedangkan karakteristik psikografis memberikan informasi tentang pola kehidupan sehari-hari yang tampak pada kegiatan rutin masyarakat, keyakinan yang dianut, gaya hidup, adat istiadat yang masih berjalan serta sejarah/ kejadian-kejadian penting yang pernah terjadi di kelurahan Tegalrejo.

Selain itu melalui kegiatan ini juga dilakukan analisis dengan metode sosiometri dan *matrik afinitty* yaitu untuk mengetahui siapa tokoh-tokoh berpengaruh dan bagaimana hubungan maupun pengaruhnya terhadap masyarakat.

Metode yang diterapkan dalam pemetaan sosial ini antara lain: wawancara, *Daily Routine*, *Focus Group Discussion* (FGD), *Diagram Venn*, Alur Sejarah, *Sosiometri*, Pemetaan, dan *observasi*. Dengan data-data yang didapatkan melalui kegiatan Pemetaan Sosial ini kemudian Tim Fasilitator menyusun strategi-strategi yang akan digunakan untuk membantu, mempermudah dan memperlancar kegiatan Sosialisasi awal, misal (media sosialisasi yang akan digunakan, bahasa yang mudah diterima oleh warga, serta kapan sosialisasi itu harus dilakukan). Hasil pemetaan sosial ini juga digunakan sebagai acuan untuk membuat strategi pendampingan selanjutnya.

Waktu yang diberikan dalam kegiatan Pemetaan Sosial ini sekitar 15 hari untuk 5 kelurahan, praktis di kelurahan Tegalrejo hanya teralokasikan sekitar 3 hari, kerangka waktu yang sangat minim untuk bisa melakukan pemetaan sosial ini secara optimal, akhirnya metode yang digunakan penggalan data-data sekunder, wawancara dengan perangkat kelurahan dan beberapa tokoh masyarakat yang bisa ditemui. Walaupun tidak optimal hasil kegiatan Pemetaan Sosial ini bisa memberikan arah untuk menyusun strategi sosialisasi maupun strategi pendampingan.

Sebagaimana disebutkan diawal bahwa salah satu agenda pada saat Lokakarya orientasi P2KP tingkat kecamatan atau tingkat kota di kota Salatiga adalah disepakatinya jadwal Lokakarya Orientasi P2KP di tingkat Kelurahan. Dalam Lokakarya di tingkat kelurahan ini yang hadir adalah perangkat kelurahan, perwakilan lembaga-lembaga kelurahan, Tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua RT dan ketua RW yang ada di kelurahan Tegalrejo. Materi yang disampaikan dalam lokakarya ini adalah tentang konsep-konsep dan tata cara pelaksanaan kegiatan P2KP secara singkat. Sosialisasi/lokakarya ini memberikan pemahaman yang benar tentang substansi dan makna dari serangkaian kegiatan yang panjang dari P2KP baik oleh masyarakat maupun perangkat kelurahan dan seluruh perwakilan warga yang hadir pada saat itu. Sosialisasi tingkat kelurahan ini salah satu agendanya juga menyepakati jadwal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM) di tingkat basis RT, RW, maupun pedukuhan.

Salah satu pendapat ketua RT 01/05 Bapak Miarto adalah sebagai berikut :

"Program P2KP sebenarnya bagus karena didalam setiap kegiatannya selalu melibatkan masyarakat mulai dari tingkatan paling bawah yaitu RT,RW dan pedukuhan, namun demikian kegiatan yang sangat rumit dan panjang terkesan bertele-tele membuat masyarakat jenuh dan pada akhirnya keterlibatan masyarakat semakin lama semakin berkurang".

Ketika sosialisasi dijelaskan tentang : visi, misi, tujuan, nilai-nilai universal dan prinsip-prinsip kemasyarakatan sampai kepada tahapan

commit to user

siklus P2KP dan pentingnya relawan dalam penanggulangan kemiskinan, tanggapan dari masyarakat sangat beragam, ada yang optimis, namun ada juga yang pesimis terhadap keberlanjutan dan keberhasilan P2KP. Kekhawatiran ini karena pengalaman yang ada di masyarakat menyatakan bahwa program-program pemerintah sebelumnya tidak ada yang berhasil, setelah program selesai maka selesai juga kegiatan di masyarakat. Selama ini masyarakat juga memiliki pemahaman bahwa setiap program bantuan dari pemerintah tidak perlu dikembalikan, mereka juga tidak yakin apakah ada di jaman sekarang ini dimana semua hal diperhitungkan dengan uang, sementara P2KP memiliki konsep kerelawanan dalam penanggulangan kemiskinan (bekerja tanpa mendapatkan imbalan apapun/ mengabdikan tanpa pamrih) kecuali hanya imbalan dari sang Pencipta.

Dengan berbagai keraguan dan optimisme yang ada masyarakat tetap menyambut niat baik pemerintah melalui P2KP ini. Adanya tata cara dan mekanisme yang lain dari program-program sebelumnya membuat masyarakat menjadi penasaran seperti jumlah dana yang cukup besar dan mekanisme pencairan yang dipastikan tidak ada kebocoran sampai ditangan masyarakat. Selain itu juga masyarakat merasa betul-betul dilibatkan pada setiap kegiatan maupun dalam pengambilan keputusan serta menentukan sendiri kegiatan-kegiatan yang akan mereka lakukan sesuai dengan kebutuhannya.

2) Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM).

Kegiatan RKM ini dimulai dari tingkat basis (RT/RW) dan dilanjutkan di tingkat kelurahan. Karena jumlah RW cukup banyak yaitu 9 RW, maka sosialisasi dan RKM dilakukan di masing-masing RW dan ada beberapa yang pelaksanaannya digabung menjadi satu, serta ada juga yang dilaksanakan di tingkat RT karena pada saat bersamaan ada kegiatan pertemuan rutin RT. Pada kegiatan ini juga dilakukan penjangkaran dan pendaftaran relawan warga. Keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan P2KP sangat ditentukan oleh masyarakat sendiri sebagai pelaku utama, namun pada teknis pelaksanaannya tidak mungkin melibatkan masyarakat secara keseluruhan dalam waktu yang relatif pendek dan dalam waktu yang hampir bersamaan, sehingga dibutuhkan orang-orang yang akan memelopori pelaksanaan P2KP di wilayah-wilayah basis (RT/RW). Dalam P2KP orang-orang ini disebut dengan relawan warga. Relawan warga adalah individu-individu di wilayah kelurahan Tegalrejo yang tergerak secara ikhlas dan memiliki motivasi untuk secara aktif ambil bagian dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan di wilayahnya yang di implementasikan melalui pendampingan masyarakat dalam pelaksanaan P2KP bersama-sama dengan Tim Fasilitator. Dalam alur siklus P2KP pendaftaran relawan warga seharusnya dilakukan setelah RKM tingkat kelurahan, tetapi agar lebih efektif penjangkaran dan pendaftaran warga sudah dilakukan sejak RKM tingkat RW maupun RT.

RKM adalah kegiatan dimana pada saat masyarakat telah mengetahui P2KP secara utuh, masyarakat mengetahui tata cara dan manfaat P2KP maka masyarakat diberikan proses pendidikan kritis yang pertama kali yaitu mengambil keputusan secara sadar untuk menerima atau menolak P2KP dengan segala konsekuensinya atau sering disebut dengan kontrak sosial. Respon masyarakat kelurahan Tegalrejo dalam RKM cukup tinggi, dimana dari 9 RW semuanya menyatakan siap menerima P2KP dengan segala konsekuensinya, namun ada juga beberapa warga yang hadir saat RKM menyatakan ragu akan keberhasilan P2KP.

Walaupun ada beberapa masyarakat yang ragu dengan keberlanjutan P2KP dan ada orang yang mau menjadi relawan, akhirnya terjawab dimana jumlah orang yang terdaftar menjadi relawan cukup banyak yaitu 47 orang. Mekanisme perekrutan relawan ini seharusnya dengan cara mendaftarkan diri, namun karena adanya rasa sungkan dan dianggap sok jadi pahlawan maka yang mendaftar atas inisiatif sendiri hanya sebagian kecil, sementara yang lainnya diusulkan oleh warga di masing-masing wilayah RT maupun RW nya. Biasanya warga mengusulkan orang-orang yang sudah terbiasa aktif dalam kegiatan kemasyarakatan di wilayahnya namun demikian juga banyak relawan adalah orang-orang baru yang belum pernah muncul dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan dikelurahannya.

Mendorong keterlibatan perempuan di beberapa wilayah dampingan dirasa cukup berat dan kebanyakan hasilnya kurang dari target

30%, tetapi di kelurahan Tegalrejo melebihi target yaitu dari 47 relawan ada 18 relawan perempuan atau 38%, hal ini disebabkan karena banyak penduduk pendatang di kelurahan Tegalrejo yang tergolong berlatar belakang pendidikan dan berkehidupan cukup maju.

3) Sosialisasi Intensif dan Pendaftaran Relawan Warga.

Sosialisasi intensif atau sosialisasi lanjutan dimaksudkan agar masyarakat lebih memahami substansi P2KP sebagai proses pembelajaran kritis dan pelebagaan prinsip dan nilai-nilai universal. Namun waktu sosialisasi sangat singkat sehingga tidak menjangkau kelompok-kelompok masyarakat yang lebih kecil. Media sosialisasi juga sangat terbatas, Apalagi media media poster, leaflet dan vcd yang memang difasilitasi oleh program untuk bisa dipergunakan sebagai alat dalam sosialisasi kepada masyarakat secara visual juga dikirim terlambat.

Tabel : 4.15
Keterlibatan Masyarakat dalam Siklus Sosialisasi P2KP
di Kelurahan Tegalrejo Tahun 2003

Sosialisasi P2KP						
Tanggal		Jml. Keg	Jml Peserta Pertemuan			
Mulai	Akhir		Lk	Pr	M/R	Total
10/1/2003	11/3/2003	24	504	688	697	1,192
Jumlah Relawan Mendaftar		-	29	18	8	47

Sumber : Data SIM KMW Provinsi Jawa Tengah

Seperti telah disampaikan sebelumnya bahwa RKM tingkat RT dan RW sudah dimulai identifikasi dan pendaftaran relawan sehingga pada saat RKM tingkat kelurahan menyepakati siapa saja relawan yang terjaring, dibaca satu per satu dari masing-masing RT sekaligus dipastikan

kesiapannya untuk menjadi relawan. Kemudian tahap selanjutnya relawan warga tersebut di berikan pelatihan dasar relawan warga yang penjelasannya telah penulis sampaikan di *input* (pengembangan kapasitas masyarakat). Pelatihan relawan kelurahan Tegalrejo dilaksanakan pada tanggal 23 – 26 Maret 2003, yang diikuti oleh 30 orang peserta dan 30% lebih adalah perempuan. Tidak semua relawan bisa mengikuti pelatihan dikarenakan pembatasan sebuah proses pelatihan agar hasilnya optimal maka tidak boleh lebih dari 30 orang, begitu juga dana yang disediakan oleh program juga hanya bisa memfasilitasi untuk 30 orang kali 3 hari. Dengan adanya mekanisme ini maka diharapkan semua relawan yang sudah dilatih bisa *mentransfer* ilmunya kepada relawan lain yang tidak mengikuti pelatihan. Namun apa yang kita harapkan tidak berjalan baik, karena banyak relawan yang tidak/belum mempunyai kemampuan yang cukup, selain itu juga banyak yang mundur dan tidak aktif. Sampai pada proses ini waktu yang dibutuhkan sekitar \pm 4 bulan.

b. Identifikasi Masalah dan Kebutuhan

Proses selanjutnya setelah masyarakat menyatakan kesiapan untuk melaksanakan kegiatan P2KP dalam RKM dan munculnya relawan-relawan yang telah direkrut dan dilatih adalah identifikasi masalah dan kebutuhan melalui siklus Refleksi Kemiskinan (RK) dan Pemetaan Swadaya (PS).

1) Refleksi Kemiskinan (RK)

Siklus Refleksi Kemiskinan ini adalah bertujuan untuk menemukan ciri-ciri, penyebab dan akibat kemiskinan sampai hal-hal yang paling mendalam sehingga dapat ditemukan akar dari persoalan kemiskinan di wilayahnya. Selain itu kegiatan Refleksi juga bertujuan untuk belajar secara kritis melihat, mengetahui dan bahkan mengalami sekaligus mengungkapkan persoalan baik penyebab maupun ciri-ciri dari kemiskinan.

Metode yang digunakan adalah Diskusi Kelompok Terarah (DKT) atau *Focus Group Discussion* (FGD). Refleksi ini dilakukan di tingkat RW dengan mekanisme masing-masing RW membentuk 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari 10 – 12 orang yaitu kelompok non miskin (biasanya terdiri dari tokoh masyarakat dan perangkat kelurahan), kelompok orang miskin, kelompok pemuda, dan kelompok perempuan.

Tabel : 4.16
Keterlibatan Masyarakat dalam Siklus Refleksi Kemiskinan
Di Kelurahan Tegalorejo Tahun 2003

Kegiatan Siklus RK					
Tingkat Kegiatan	Jml. Keg	Jml Peserta			
		Lk	Prp	Miskin /renta	Total
Kegiatan RK Basis	9	121	118	160	239
Kegiatan RK Kelurahan	1	45	12	12	57
Uji Publik Hasil RK	1	45	12	12	57

Sumber : Data SIM KMW Provinsi Jawa Tengah

Tingkat partisipasi warga dalam kegiatan siklus FGD RK cukup tinggi dan partisipasi perempuan juga mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan kegiatan sebelumnya. Dengan metode kelompok

commit to user

kecil ini sangat efektif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan, ini terbukti dari 239 peserta FGD, perempuan yang ikut sebanyak 118 orang (49 %). Selain itu keterlibatan orang miskin juga cukup banyak dibandingkan dengan kegiatan kelurahan lain, yang biasanya dalam rembug yang terlibat hanya orang-orang tertentu dan itu-itu saja.

Kendala yang terjadi pada kegiatan Refleksi Kemiskinan ini adalah pada tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah dan belum terbiasa mengungkapkan pendapat secara terbuka di depan orang banyak apalagi dalam sebuah forum diskusi. Walaupun pemandu diskusi sudah menyampaikan bahwa diskusi ini santai tidak perlu takut, seperti ngobrol biasa namun pada prakteknya tetap saja ada kekakuan dalam setiap ucapan dan pendapat yang dilontarkan. Begitu juga dengan kemampuan pemandu diskusi yang kurang bisa membangun suasana dan melontarkan kata-kata kunci untuk menggerakkan diskusi, dimana pada tahapan kegiatan ini yang memfasilitasi dalam FGD RK adalah relawan, sedangkan posisi fasilitator dalam rangka mendampingi dan meluruskan topik diskusi apabila ada yang tidak sesuai dengan tujuan. Dalam praktek dan hasil kegiatan FGD RK belum optimal karena banyak relawan yang masih belum menguasai teknik dan strategi dalam memfasilitasi FGD dengan baik. Dengan demikian diskusi FGD RK ditargetkan minimal untuk bisa mengisi format FGD RK basis (Tingkat RW).

Hasil FGD RK dari masing-masing RW selanjutnya di musyawarahkan di tingkat kelurahan diikuti oleh perwakilan utusan RW yang berjumlah 5 orang mewakili masing-masing unsur ditambah dengan ketua RT. Dalam FGD tingkat kelurahan ini utusan dari masing-masing RW menyampaikan hasil FGD RK di wilayahnya kemudian didiskusikan bersama tentang persamaan dan perbedaan. Selain itu juga mendiskusikan dan mengevaluasi program-program penanggulangan kemiskinan sebelum P2KP dengan hasil ditemukannya kelemahan dan kelebihan sebagai rekomendasi dan harapan terhadap pelaksanaan P2KP agar lebih baik dari program sebelumnya.

Diskusi yang dilakukan dari tingkat RT/RW sampai tingkat kelurahan merupakan kesempatan strategis untuk menemukan bagaimana kemiskinan itu terjadi di kelurahan Tegalrejo. Dalam diskusi tersebut munculah berbagai macam permasalahan kemiskinan yang dialami oleh masyarakat lokal, termasuk faktor penyebab terjadinya masalah tersebut. Dari diskusi yang dilaksanakan bersama-sama dengan warga khususnya warga miskin dapat diketahui beberapa macam faktor penyebab terjadinya masalah kemiskinan sebagai berikut:

Hasil FGD Refleksi Kemiskinan (RK) kelurahan Tegalrejo :

1. Kurang tersedianya sarana dan prasarana lingkungan dan perumahan yang memadai. Sarana dan prasarana yang memadai merupakan kebutuhan bagi masyarakat untuk dapat menunjang kegiatannya

commit to user

kearah kehidupan yang berkualitas. Sarana dan prasarana yang belum memadai seperti belum tersedianya jalan lingkungan, drainase/saluran pembuangan air limbah (SPAL) dan tempat pembuangan sampah. Apabila hal tersebut tidak mendapatkan penanganan yang serius maka hal tersebut dapat menyebabkan permasalahan yang berkepanjangan.

Sarana dan prasarana permukiman juga menjadikan masalah yang serius bagi masyarakat miskin, seperti tidak memiliki rumah, memiliki rumah tetapi tidak layak huni, tidak tersedianya sarana perumahan seperti MCK, jendela udara dan sinar, tidak adanya pembatas kamar/ruang, sempitnya rumah jika dibandingkan dengan jumlah penghuninya. Faktor penerangan listrik merupakan sarana dasar perumahan yang juga masih menjadi kendala bagi beberapa keluarga miskin.

Berbagai penyebab terjadinya permasalahan sarana dan prasarana lingkungan dan perumahan yang memadai antara lain :

- a. Belum optimalnya kebijakan pemerintah dalam usaha penanganan lingkungan tersebut baik pembangunan maupun pemeliharaan.
 - b. Rendahnya kepedulian masyarakat untuk menjaga dan memelihara sarana-prasarana lingkungan yang sudah tersedia.
 - c. Belum ada koordinasi dan kerjasama antar lingkungan dan masyarakat.
 - d. Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat (tidak menabung) untuk berkontribusi dalam menjaga dan memelihara lingkungan.
 - e. Pola pikir dan pola hidup yang konsumtif.
2. Rendahnya tingkat pengetahuan dan ketrampilan warga miskin.

Salah satu faktor yang menjadikan permasalahan kemiskinan adalah faktor

pendidikan dan pengetahuan, faktor ini akan membawa pengaruh yang sangat berarti bagi kehidupan mereka.

3. Kepemilikan aset dan modal usaha.

4. Tidak tersedianya aset permodalan yang mudah dijangkau masyarakat miskin.
5. Tidak tersedianya sarana kesehatan yang mudah dijangkau masyarakat miskin
6. Pola hidup yang konsumtif dan rendahnya manajemen rumah tangga.

Sumber : Data BKM Wijaya Kusuma kelurahan Tegalrejo Tahun 2006

Rumusan kemiskinan tersebut dituangkan dalam format yang telah disediakan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Refleksi Kemiskinan (RK). Sesuai dengan kerangka waktu kegiatan ini dilaksanakan dalam waktu ± 2 bulan agar masyarakat betul-betul dapat mengenali diri dan lingkungannya dengan cermat sehingga rumusan permasalahan kemiskinan yang dihasilkan akurat, namun dalam prakteknya kegiatan ini dilaksanakan dalam waktu ± 20 hari.

2) Pemetaan Swadaya (PS)

Siklus Pemetaan Swadaya merupakan kegiatan tindak lanjut setelah masyarakat mengenali tentang dirinya dan lingkungannya terkait dengan persoalan kemiskinan di wilayahnya melalui kegiatan Refleksi Kemiskinan. Sebelum melakukan kegiatan PS, masyarakat membentuk Tim PS yang terdiri dari relawan yang sudah dilatih dan unsur masyarakat lainnya melalui rembug warga. Tim PS kemudian mendapatkan pembekalan (*coaching*) tentang Pemetaan Swadaya.

Dalam siklus ini masyarakat melakukan kurang lebih sekitar 7 kajian yang sudah ditargetkan dalam *Standart Operasional Prosedur* (SOP) pelaksanaan kegiatan Pemetaan Swadaya (PS). Kajian tersebut meliputi :

- a) **Kajian Kepemimpinan**, hasil dari kajian kepemimpinan ini adalah disepakatinya syarat/kriteria untuk menjadi seorang pemimpin yang baik yaitu : jujur, adil, tegas, bijaksana, mengayomi, dan ada syarat tambahan yang merupakan kearifan lokal yaitu 3 er : *pinter, bener, kober* (seorang pemimpin harus pandai, benar, dan punya waktu)
- b) **Kajian Kelembagaan dan Kebijakan Lokal**, hasil dari kajian kelembagaan dan kebijakan lokal ini adalah : melakukan penilaian terhadap lembaga-lembaga yang sudah ada dengan cara diskusi bersama meliputi : proses pembentukan, cara pembentukan, cara pengambilan keputusan, tingkat pengakaran lembaga di masyarakat, tingkat aspiratifnya, tingkat reperesentatifnya, tingkat kepercayaan masyarakat, tugas fungsinya, tingkat kemanfaatan khususnya bagi masyarakat miskin, apa saja kritik dan komentar warga terhadap keberadaan lembaga tersebut dan lain-lain.
- c) **Kajian Pendidikan**, menghasilkan data bahwa dengan adanya program Biaya Operasional Sekolah (BOS) sekolah sudah gratis, hal ini sudah berjalan cukup baik karena hampir semua anak usia sekolah bisa bersekolah sampai tingkat Sekolah Dasar (SD). Untuk pendidikan tingkat SLTP masih banyak warga yang tidak mampu karena biaya sekolah tidak cukup hanya SPP yang gratis tetapi juga alat tulis, seragam, transportasi dan biaya-biaya lain yang tidak bisa di angkat oleh warga miskin, praktis warga miskin hanya mampu

menyekolahkan anaknya hanya sampai pada tingkat SD, sedangkan untuk tingkatan yang lebih tinggi semakin berkurang.

- d) **Kajian Kesehatan**, menghasilkan data bahwa untuk kesehatan yang bisa diobati di puskesmas setempat semua warga sudah merasa tidak kesulitan karena gratis dengan adanya program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Persoalan kesehatan muncul di kelurahan Tegalrejo manakala warga sakit yang cukup berat yaitu harus dirujuk ke rumah sakit besar, rawat inap, operasi ataupun berobat yang berlanjut misalnya sakit ginjal, paru-paru, jantung. Bagi mereka yang memiliki Jamkesmas dan Jamkesda masih harus menambah biaya obat yang tidak terbiayai oleh Jamkesmas dan Jamkesda. Pelayanan yang kurang baik dari petugas kesehatan maupun fasilitas lainnya. Pengobatan yang kategorinya berat seperti ini banyak memakan biaya sehingga warga yang tadinya hidup berkecukupan bisa menjadi jatuh miskin. Hal seperti ini banyak dari mereka yang minta keringanan biaya dengan cara minta Surat Keterangan Tidak Manpu dari RT, RW dan mengetahui pihak kelurahan walaupun sebenarnya tidak termasuk warga miskin. Kondisi ini dirasakan oleh pemerintah Kota Salatiga dimana setiap tahunnya terjadi pembengkakan anggaran untuk jaminan kesehatan masyarakat.
- e) **Kajian Penggunaan Air Bersih**, hasilnya menunjukkan bahwa hampir semua warga telah menggunakan air dari Perusahaan Daerah Air

Minum (PDAM), dan sebagian kecil masih menggunakan sumur. Pada saat musim kemarau debit air turun seringkali kebutuhan air bersih sedikit bermasalah terutama bagi warga yang tinggal di wilayah dataran tinggi. Biasanya pada musim kemarau seperti ini warga mencari air bersih ke tempat yang lebih rendah dan telah disediakan tangki-tangki air yang disediakan oleh pemerintah kota Salatiga.

- f) **Kajian Mata Pencarian**, Sesuai dengan kondisi geografisnya kelurahan Tegalorejo yang bergelombang dan berbukit dengan struktur tanah didominasi tanah kering yang berupa tegalan dan sebagian perumahan, maka sebagian besar warganya tidak bergantung pada pertanian, lahan kering atau yang disebut dengan tegalan hanya ditanami dengan tanaman keras kayu-kayuan dan ubi-ubian. Sebelum ada perubahan alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman oleh para pendatang, masyarakat di kelurahan Tegalorejo banyak yang bergantung kepada pertanian yang cocok dengan kondisi geografisnya yaitu palawija; jagung, ketelapohon, kedelai, dan kacang-kacangan praktis tanaman yang tidak membutuhkan air yang banyak. Sesekali pada musim penghujan petani menanam padi gogorancak yaitu jenis padi yang bisa ditanam di daerah yang sulit air dan hanya mengandalkan air tadah hujan. Petani yang masih bertahan hanya yang tua-tua sedangkan generasi muda banyak yang merantau keluar

kota, menjadi buruh pabrik, wiraswasta, kerajinan bubut bambu, kayu, *home industry* makanan kecil dan lain-lain.

g) **Kajian Profil Masyarakat miskin dan penyebarannya**, profil keluarga miskin dikelurahan tegalrejo adalah sebagai berikut :

- ✓ Rendahnya tingkat pengetahuan dan ketrampilan warga miskin.
- ✓ Salah satu faktor yang menjadikan permasalahan kemiskinan adalah faktor pendidikan dan pengetahuan, faktor ini akan membawa pengaruh yang sangat berarti bagi kehidupan mereka.
- ✓ Kepemilikan aset dan modal usaha, seringkali masyarakat tidak memiliki aset dan modal usaha sehingga tidak punya kekuatan untuk keluar dari kemiskinan.
- ✓ Tidak tersedianya aset permodalan yang mudah dijangkau masyarakat miskin.
- ✓ Tidak tersedianya sarana kesehatan yang mudah dijangkau masyarakat miskin.
- ✓ Rendahnya etos kerja, kedisiplinan dan kemauan yang keras untuk berusaha.
- ✓ Pola hidup yang konsumtif dan rendahnya manajemen rumah tangga.

Kebanyakan dari mereka adalah yang bermatapencaharian sebagai buruh pabrik, pekerja serabutan, karyawan toko dan petani tanah tegalan. Wilayah yang menjadi kantong kemiskinan dikelurahan Tegalrejo adalah RW 04, RW 05, dan RW 06.

h) **Kajian sarana dan prasarana lingkungan**, kurang tersedianya sarana dan prasarana lingkungan dan perumahan yang memadai. Sarana dan prasarana tersebut meliputi belum tersedianya jalan lingkungan, drainase/saluran pembuangan air limbah (SPAL) dan tempat pembuangan sampah. Sarana dan prasarana permukiman juga menjadikan masalah yang serius bagi masyarakat miskin, seperti tidak memiliki rumah, memiliki rumah tetapi tidak layak huni, tidak tersedianya sarana perumahan seperti MCK, jendela udara dan sinar, tidak adanya pembatas kamar/ ruang, sempitnya rumah jika dibandingkan dengan jumlah penghuninya. Faktor penerangan listrik merupakan sarana dasar perumahan yang juga masih menjadi kendala bagi beberapa keluarga miskin.

Berbagai penyebab terjadinya permasalahan sarana dan prasarana lingkungan dan perumahan yang memadai antara lain :

- ✓ Belum optimalnya kebijakan pemerintah dalam usaha penanganan lingkungan baik pembangunan maupun pemeliharaan.
- ✓ Rendahnya kepedulian masyarakat untuk menjaga dan memelihara sarana-prasarana lingkungan yang sudah tersedia.
- ✓ Belum ada koordinasi dan kerjasama antar lingkungan dan masyarakat untuk menjaga dan memelihara sarana-prasarana lingkungan.
- ✓ Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat (tidak menabung) untuk berkontribusi dalam menjaga dan memelihara lingkungan.

i) **Kajian lokal**, adalah kajian yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi lokal kelurahan Tegalrejo meliputi :

- ✓ Perlindungan dan perlakuan asosiasi buruh perusahaan kepada karyawan. Di kota Salatiga ada beberapa pabrik tekstil dan pabrik-pabrik lain yang bisa memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Guncangan nilai tukar mata uang dan kondisi ekonomi global sangat berpengaruh terhadap kondisi perusahaan yang memiliki produk dipasarkan ke luar negeri. Kondisi ini mengharuskan perusahaan melakukan PHK secara sepihak dengan alasan perusahaan mengalami pailit, atau istilah lain dengan dirumahkan (sewaktu-waktu dipanggil kembali manakala perusahaan membutuhkan), atau merekrut karyawan dengan sistem kontrak atau sering disebut dengan *outsourcing*. Kondisi ini sangat tidak menguntungkan bagi karyawan/buruh pabrik karena bekerja dengan dihantui perasaan yang tidak nyaman dan tertekan
- ✓ Pengelolaan tanah tegalan menjadi lebih produktif dan menjanjikan. Salah satu potensi adalah tanah tegalan yang sulit untuk ditanami padi, maupun pertanian lainnya sehingga usaha pertanian yang digeluti oleh sebagian warga miskin tidak memberikan hasil yang memadai. Pada masalah ini perlu ada pembinaan dan kerjasama untuk menemukan jenis tanaman apa yang bisa tumbuh subur di kelurahan Tegalrejo sampai kepada

pemasaran hasil panen yang akhirnya bisa memberikan kehidupan yang layak bagi mereka.

Tabel : 4.17
Keterlibatan Masyarakat dalam Siklus Pemetaan Swadaya
Di Kelurahan Tegalsejo Tahun 2003

Kegiatan Siklus Pemetaan Sawadaya					
Tingkat Kegiatan	Jml. Keg	Jml Peserta			
		Lk	Pr	Miskin /renta	Total
Kegiatan PS Basis	21	424	213	160	637
Kegiatan PS Kelurahan	1	45	12	12	57
Uji Publik Hasil PS	1	45	12	12	57

Sumber : Data SIM KMW Provinsi Jawa Tengah

Seperti FGD RK, kegiatan PS juga dilaksanakan dari tingkat RW/ Dusun yang dilaksanakan selama 30 hari untuk 7 kelurahan. Pelaksanaan Pemetaan Swadaya yang ideal sesuai dengan kerangka waktu yang ditetapkan dalam Master Shedule adalah 60 hari atau 3 bulan. Sehingga dapat dilakukan kajian-kajian secara lebih detail dan mendalam serta hasil yang lebih akurat. Karena waktu yang terbatas strategi yang dilakukan oleh fasilitator dalam melakukan kajian PS di setiap RW dilaksanakan dalam satu waktu dengan cara membagi warga yang hadir menjadi beberapa kelompok kecil untuk membahas masing-masing kajian. Kelemahan strategi ini adalah tidak semua warga yang hadir pada saat kajian bisa mengikuti seluruh kajian yang dilakukan. Kajian juga sangat terpancang pada format yang telah disediakan. Lepas dari itu semua juga dipengaruhi oleh kemampuan relawan yang berbeda-beda dimana ada banyak relawan yang kemampuannya sangat terbatas sehingga penggalan data tidak maksimal dan banyak data yang

tidak sesuai pengisiannya sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya tim PS menindaklanjuti kegiatan dengan melakukan pendataan profil warga miskin di masing-masing RW sesuai dengan kesepakatan kriteria yang telah ditetapkan.

Setelah kegiatan PS tingkat RW selesai dilaksanakan, selanjutnya dilakukan pembahasan PS di tingkat kelurahan. Pada kegiatan ini masing-masing peserta tim PS dari RW mempresentasikan dan menempelkan hasilnya, yang kemudian diolah dan dikompilasi menjadi data Pemetaan Swadaya kelurahan Tegalorejo. Ada beberapa kajian di tingkat RW yang tidak dibahas karena terbatasnya waktu, sehingga kajian-kajian yang dibahas adalah kajian yang dianggap penting dan menjadi prioritas dalam pembahasan.

Kendala yang dihadapi dalam kegiatan PS ini antara lain waktu pelaksanaan yang terbatas, sementara kajian yang harus dibahas banyak, hal ini mengakibatkan hasil kajian tidak detail dan mendalam, terbatasnya kemampuan relawan dalam memandu kajian serta kurang mahir dalam menerapkan teknik-teknik penggalian informasi secara partisipatif. Begitu juga masyarakat yang masih menganggap bahwa kegiatan PS ini tidak penting dan buang-buang waktu saja. Namun demikian dengan berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada, kegiatan ini tetap berjalan dan hasilnya bisa dipergunakan untuk kegiatan selanjutnya.

c. Perencanaan Kegiatan

1) Pembangunan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

Sesuai dengan asumsi dasar dan cara pandang P2KP terhadap kemiskinan bahwa akar dari kemiskinan adalah karena kebijakan yang tidak berpihak kepada orang miskin (*pro poor*) dan kebijakan tersebut dihasilkan oleh lembaga atau institusi yang tidak *pro poor* juga, maka dalam upaya penanggulangan kemiskinan, masyarakat mutlak untuk dilibatkan, selain itu juga diperlukan sebuah lembaga yang *pro poor* dimana didalamnya berkumpul orang-orang baik (kaya dengan nilai kebaikan). Sehingga masyarakat dalam hal ini sepakat untuk membangun organisasi masyarakat warga atau yang sering disebut dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

1). Kajian kelembagaan dan Kepemimpinan Moral

Kajian ini sebenarnya merupakan penguatan dan penguasaan kembali terhadap kegiatan yang telah dilakukan dalam kajian kepemimpinan, kelembagaan dan kebijakan lokal dalam membangun wadah dalam melakukan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan siklus Refleksi Kemiskinan (RK). Dalam kegiatan ini lebih jauh lagi masyarakat bersepakat untuk mengambil sebuah keputusan apakah bisa memampukan lembaga yang sudah ada di masyarakat sebagai BKM ataukah harus membangun lembaga baru. Beberapa hal yang dikaji adalah meliputi : proses pembentukan, tingkat pengakaran lembaga di masyarakat, tingkat aspiratifnya, tingkat reperesentatifnya, tingkat kepercayaan masyarakat,

tugas fungsinya, tingkat kemanfaatan khususnya bagi masyarakat miskin, cara pengambilan keputusan, tingkat transparansinya, secara lebih rinci, berdasarkan buku Petunjuk pelaksanaan BKM 2 Tahap 1, lembaga-lembaga yang layak menjadi BKM harus memenuhi kriteria-kriteria :

- Bukan lembaga yang dibentuk karena perundang-undangan dan peraturan pemerintah.
- Kekuasaan/kewenangan dan legitimasinya berasal dari warga masyarakat setempat.
- Berkedudukan sebagai lembaga kepemimpinan kolektif, demokratis, partisipatif, transparan dan akuntabel.
- Diterima dan mengakar keberadaannya di seluruh lapisan masyarakat (inklusif).
- Keanggotaan BKM merupakan perwujudan dari nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan yang disepakati masyarakat setempat.
- Mekanisme pemilihan anggota BKM melalui proses pemilihan secara langsung oleh warga masyarakat, tertulis, rahasia, tanpa pencalonan, dan tanpa kampanye maupun rekayasa dari siapapun.
- Dibentuk secara bertingkat mulai dari tingkat RT/RW sampai ke tingkat kelurahan secara partisipatif dan demokratis.
- Bekerja secara kolektif, transparan, partisipatif, demokratis dan akuntabel.
- Mampu mempertahankan sifat independen dan otonom terhadap institusi pemerintah, militer, agama, usaha dan keluarga.

Pada umumnya lembaga-lembaga yang terdapat di kelurahan Tegalrejo adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah dan undang-undang seperti LPMK, PKK, Karangtaruna, Paguyuban RT dan RW, sehingga lembaga-lembaga tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai lembaga BKM. Selain itu juga masih ada beberapa kriteria yang bisa dipenuhi oleh lembaga yang sudah ada seperti model kepemimpinan kolektif, cara pemilihan dan pembentukan serta kefungsian lembaga yang fokus terhadap upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. Lembaga-lembaga yang dibentuk oleh masyarakat juga tidak memenuhi kriteria sebagai BKM karena biasanya lembaga-lembaga bentukan masyarakat ini bersifat lokal hanya mewakili kelompok-kelompok tertentu saja, misalnya kelompok pengajian, kelompok tani, kelompok simpan-pinjam RT/RW. Oleh karena itu kemudian masyarakat memutuskan untuk membentuk lembaga baru yang bernama Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Wijayakusuma yang dituangkan dalam sebuah berita acara rembug warga.

2). Pemilihan Anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Setelah masyarakat mengambil keputusan untuk membentuk lembaga baru sebagai BKM maka proses selanjutnya adalah pembentukan BKM yang diawali dengan membentuk Panitia Pembentukan BKM. Panitia berasal dari relawan atau masyarakat lain yang dibentuk melalui suatu rembug warga. Panitia kemudian dibagi menjadi 3 kelompok kerja (Pokja) yaitu: Pokja Anggaran Dasar (AD) BKM, Pokja Pemilihan Anggota BKM, dan Pokja Pemantau Partisipatif. Tugas Pokja Anggaran Dasar adalah

mempersiapkan dan menyusun draft Anggaran Dasar BKM, draft secara umum sudah dikonsepskan dari program sehingga pembahasan sudah lebih fokus terhadap diskusi-diskusi yang dianggap penting dan hal-hal yang bersifat lokal sesuai dengan kondisi setempat.

Pokja Pemilihan Anggota BKM bertugas mempersiapkan proses pemilihan mulai dari mempersiapkan Tata Tertib Pemilihan, kartu suara, kotak suara, papan penghitungan perolehan suara, dan tempat pemilihan baik pemilihan di tingkat basis/RT maupun pemilihan di tingkat kelurahan. Pokja Pemantauan Partisipatif bertugas mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembentukan BKM agar semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SOP pembangunan BKM. Hasil pengawasan ditulis dalam format yang telah disediakan dan ditentukan dalam pedoman.

Proses pemilihan BKM dilakukan berjenjang mulai dari tingkat RT/RW untuk memilih utusan/ calon anggota BKM di wilayahnya yang akan mengikuti pemilihan di tingkat kelurahan. Cara ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa untuk memilih itu tidak ada calon, sedangkan calonnya adalah seluruh warga dewasa dan syaratnya adalah orang baik sehingga orang memilih didasarkan atas *trackrecord* (rekam jejak) sehari-hari bukan kampanye dan janji-janji sesaat. Jumlah utusan ditetapkan melalui 2% dari jumlah penduduk dewasa dibagi dengan jumlah RT sehingga ketemu jumlah orang yang harus dipilih menjadi utusan dari masing-masing RT. Dikelurahan Tegalrejo bisa dihitung sebagai berikut :

- $2\% \times 6.354 \text{ jiwa (Penduduk Dewasa)} = 127,88/128 \text{ orang.}$
 $128 \text{ orang} : 56 \text{ RT} = 2,28/ 2 \text{ orang}$
 $128 : 9 \text{ RW} = 14,22/ 14 \text{ orang.}$
- Di kelurahan Tegljrejo disepakati sebagai berikut :
Wakil dari masing-masing RT : 3 orang
Jumlah calon pemilih dan dipilih di tingkat keluraahan sebanyak 167 orang utusan (laki-laki : 110 orang dan perempuan : 57 orang).
- Anggota BKM terpilih : 11 orang.

Menurut penuturan beberapa anggota BKM dalam FGD, pada saat itu mereka dan juga masyarakat pada umumnya tidak mengetahui apa itu BKM dan apa tugas-tugasnya, karena sosialisasinya kurang, sedangkan prosesnya sangat banyak dan dilaksanakan dengan cepat. Pemilihan dilakukan secara bebas dan rahasia, namun secara umum masyarakat memilih orang-orang yang selama ini aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, walaupun ada juga wajah-wajah baru yang juga terpilih baik dalam utusan maupun sebagai anggota BKM terpilih.

Dalam hal ini masyarakat masih memegang nilai-nilai lokal yang sering disebut "*bener, pinter, kober*" artinya memilih pemimpin itu yang pertama harus *bener* yaitu syarat utama karena menyangkut tentang perilaku kebaikan, kejujuran, kedailan dan yang lainnya, yang kedua carilah yang punya kemampuan atau *pinter* karena kalau pinter nanti akan bisa memimpin dengan baik dan membawa ke kondisi yang lebih baik, yang ketiga, *kober* karena menjadi anggota BKM adalah relawan untuk melaksanakan kegiatan sosial di masyarakat, bukan pekerjaan yang akan

menghasilkan honor atau gaji sehingga walaupun bener dan pinter tetapi tidak punya waktu luang maka dipastikan kegiatan BKM tidak akan berjalan dengan baik. Dengan berpegang teguh kepada prinsip lokal tersebut maka diharapkan walaupun proses sosialisasinya dilaksanakan dengan cepat, mereka tetap yakin dengan prinsip tersebut maka tidak akan salah memilih anggota BKM.

Setelah dilakukan pemilihan di tingkat RT, panitia kemudian mengundang calon utusan dari 54 RT untuk mengikuti pemilihan anggota BKM di tingkat kelurahan. Sebelum dilakukan pemungutan suara peserta membahas draft AD BKM dan menyepakati nama BKM yaitu "Wijayakumsua" serta jumlah anggota BKM yang akan dipilih yaitu 11 orang. Pemilihan di tingkat kelurahan bebas memilih, masing-masing calon memilih 3 nama dengan cara menulis di kartu suara yang telah dipersiapkan. Semua utusan dari RT adalah mempunyai hak untuk memilih dan dipilih, sehingga utusan dari suatu RT bisa saja memilih calon dari lain RT atau RW yang penting mempunyai persyaratan yang telah diyakininya seperti tersebut diatas. Setelah semua utusan saling memilih maka hasil pemungutan suara dihitung untuk menetapkan 11 orang terbaik untuk menjadi anggota BKM definitif. Anggota BKM terpilih kemudian melakukan rapat tertutup untuk menentukan siapa yang akan menjadi koordinator secara musyawarah mufakat dan kemudian diumumkan kepada peserta rembug warga, yang selanjutnya ditetapkan dan disahkan oleh kepala kelurahan sebagai anggota BKM masa bakti 2003 – 2006.

Tabel : 4.18
Hasil Pemilihan Anggota BKM Wijayakusuma
Kelurahan Tegalrejo Masa Bakti 2003-2006

No	Nama	L/P	Alamat (dukuh)	Hasil Perolehan Suara
1	Suwarto AK.BE	L	RT.01 RW.VI	58
2	Agus Puji Raharjo	L	RT.03 RW.I	38
3	Suwarni	P	RT.02 RW.I	37
4	Astuti	P	RT.02 RW.II	33
5	Eko Putro Basuki	L	RT.04 RW.III	44
6	Mamiek Suyahmi	P	RT.01 RW.IV	54
7	Ngadiono	L	RT.05 RW.V	41
8	Ragil Tukiman	L	RT.01 RW.V	32
9	Retno Widayatsih	P	RT.04 RW.VI	39
10	Beni Dwi Listyowati	L	RT.06 RW.VII	35
11	Winarni, SPd	P	RT.01 RW.IX	22

Sumber : Administrasi Sekretariat BKM Wijayakusuma kelurahan Tegalrejo tahun 2003.

Anggota BKM terpilih kemudian berkumpul untuk memutuskan satu dari mereka untuk menjadi koordinator BKM, dengan cara pemilihan tertutup terpilihlah Bapak Suwarto AK, BE sebagai koordinator BKM untuk periode tahun 2003 – 2006. Seluruh anggota BKM selanjutnya dilatih selama 3 hari dengan materi dan metode seperti yang telah penulis sampaikan pada *input* pengembangan kapasitas. Anggota BKM terpilih ternyata sebagian perempuan dengan jumlah sudah memenuhi kuota minimal 30% adalah perempuan yaitu 7 orang dari 11 anggota BKM atau 63% wakil perempuan. Hal ini dikarenakan banyak penduduk pendatang yang mempunyai cukup kemampuan dan memiliki pemikiran antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama menjadi pemimpin.

commit to user

Untuk mendukung dan memperlancar kegiatan-kegiatan BKM maka selanjutnya organisasi BKM membentuk unit-unit pengelola BKM sebagai gugus tugas dari lembaga BKM yang akan melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan bidangnya yang terdiri dari Unit Pengelola Lingkungan (UPL), Unit Pengelola Sosial, (UPS), dan Unit Pengelola Keuangan (UPK). Selain itu BKM juga membentuk kesekretariatan BKM dengan mengangkat 1 orang sebagai sekretaris BKM. Proses perekrutan sekretaris dan UP-UP BKM dilakukan dengan cara terbuka melalui lowongan kerja dan BKM melakukan penilaian berdasarkan bidang kemampuan dimasing-masing UP, selain itu juga latar belakang tentang kerelawanan karena pada prinsipnya kegiatan ini untuk mengabdikan kepada masyarakat walaupun diperkenankan UP-UP BKM ini diberi honor sesuai dengan kemampuan keuangan BKM. UP-UP BKM yang telah terpilih dan lolos seleksi kemudian diberi pelatihan selama 3 hari yang dilakukan bersama-sama dengan UP-UP BKM dari kelurahan lain di tingkat kecamatan.

2) Penyusunan PJM Pronangkis (Perencanaan Jangka Menengah Program penanggulangan Kemiskinan).

Kegiatan penyusunan PJM Pronangkis adalah proses menyusun rencana kegiatan masyarakat yang akan dimotori oleh BKM selama 3 tahun. Bahan/data yang dipergunakan untuk menyusun PJM Pronangkis adalah hasil rumusan Refleksi Kemiskinan (RK) dan Pemetaan Swadaya (PS) yang telah disepakati oleh warga. Kegiatan ini baru dilanjutkan lagi setelah proses pemilihan BKM karena dasar pemikirannya adalah bahwa BKM yang

akan mengambil keputusan dan memprioritaskan program-program apa saja dan dimana saja akan diselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun kedepan.

Tahapan dari proses penyusunan dokumen PJM Pronangkis ini adalah:

- 1) Rembug warga pembentukan Tim Perencanaan Partisipatif yang terdiri dari anggota BKM, Tim PS, dan relawan.
- 2) Pembekalan atau *coaching* Penyusunan PJM pronangkis.
- 3) Proses penyusunan PJM pronangkis yang diawali dari pembahasan latar belakang masalah, gambaran geografis kelurahan Tegalrejo dengan berbagai macam potensi dan permasalahannya, kemudian disepakati Visi dan Misi, strategi dan mekanisme dalam melakukan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan serta susunan berbagai macam rencana aksi berupa program/kegiatan yang akan dilaksanakan selama 3 tahun, disajikan dalam bentuk matrik dan penutup serta lampiran-pampiran yang dianggap perlu untuk mendukung dokumen PJM pronangkis tersebut. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan PJM Pronangkis memperlihatkan bahwa antusias masyarakat masih bertahan walaupun pelaksanaan siklus P2KP sudah berjalan sekitar 6 – 7 bulan, peserta perempuan dan warga miskin masih tetap diperhatikan walaupun memerlukan kerja keras dari fasilitator untuk memotivasi kelompok tersebut.

Tabel : 4.19
Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan PJM Pronangkis
Di Kelurahan Tegalrejo Periode 2003 - 2006

Kegiatan Siklus Pemetaan Sawadaya					
Tingkat Kegiatan	Jml. Keg	Jml Peserta			
		Lk	Pr	Miskin /renta	Total
Kegiatan Penyusunan PJM Pronangkis (Basis)	9	178	85	63	263
Kegiatan Penyusunan PJM Pronangkis (Kel)	1	38	12	20	50
Uji Publik Hasil PJM Pronangkis	1	38	12	20	50

Sumber : Data SIM KMW Provinsi Jawa Tengah

Dokumen PJM Pronangkis selanjutnya diuji publikan dengan cara ditempel di papan pengumuman untuk bisa dikritisi oleh seluruh masyarakat yang kemudian disyahkan menjadi dokumen resmi kelurahan dan ditandatangani oleh seluruh lembaga kelurahan yang ada di kelurahan Tegalrejo dalam arti dokumen tersebut bukan hanya milik BKM dan menjadi tanggungjawab BKM tetapi dokumen PJM Pronangkis tersebut adalah milik masyarakat kelurahan Tegalrejo dan semua pihak mempunyai tanggungjawab yang sama untuk mensukseskan terlaksananya kegiatan yang telah direncanakan guna mencapai visi dan misi yang telah disepakati.

Dalam kaitannya dengan bagaimana dokumen PJM pronagkis bisa di ketahui oleh semua pihak maka ada tahapan yang disebut dengan “Bazar Program dan Lelang Amal”. Pada kegiatan ini yang dilakukan adalah mengadakan semacam pameran/bazar tetapi yang ditawarkan adalah berupa persoalan-persoalan yang ada di setiap kelurahan/kelurahan yang akan diselesaikan yang dituangkan dalam dokumen, leaflet, brosur, dan tulisan-

tulisan yang di dukung dengan foto-foto. Kegiatan ini diharapkan dapat menggugah kepedulian kepada semua pihak yang punya potensi untuk berkontribusi terhadap penyelesaian persoalan kemiskinan yang telah dituangkan dalam dokumen PJM Pronangkis kelurahan.

3) **Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)**

Kelompok Sawadaya Masyarakat (KSM) adalah suatu wadah yang dibentuk oleh masyarakat membangun kepedulian antar anggotanya untuk saling asah asih dan asuh dalam rangka menyelesaikan permasalahan bersama dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Pada awalnya di kelurahan Tegalrejo terbentuk KSM yang terdiri dari berbagai macam bidang usaha. KSM minimal berjumlah 5 orang dan diantaranya harus menjadi ketua, sekretaris dan bendahara sementara yang lain menjadi anggota. UPK kemudian memfasilitasi KSM-KSM dalam pembuatan usulan kegiatan atau proposal yang selanjutnya proposal yang telah diajukan oleh KSM di verifikasi kelayakannya. Proposal yang telah diverifikasi tersebut selanjutnya direkomendasi untuk dilakukan penetapan prioritas oleh BKM. KSM-KSM yang masuk dalam daftar prioritas inilah yang akan diberi pinjaman dengan dana BLM tahap II dan III serta dana-dana yang telah kembali ke kas UPK-BKM yang terus menerus digulirkan kepada KSM yang menjadi daftar tunggu.

Dalam kegiatan pembangunan KSM ini, kemampuan UPK masih terbatas pada memfasilitasi pembentukan kelompok, pembuatan proposal, dan verifikasi proposal KSM. Hal ini dikarenakan pelatihan dan coaching

yang diberikan kepada UPK masih sangat terbatas dan difokuskan kepada aspek pembukuannya saja, sedangkan materi tentang bagaimana merawat KSM dan mendampingi agar KSM terus bisa berkembang dan mandiri belum pernah didapatkan. Akibatnya pembentukan kelompok masih sekedar untuk mengakses dana BLM P2KP saja, setelah mendapat pinjaman hal yang mereka lakukan adalah membayar angsuran pokok dan jasanya. Sementara untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi bersama dan akan diselesaikan bersama seolah menjadi tidak penting dan diabaikan. Tingkat pengembalian pinjaman KSM di kelurahan Tegalrejo memang cukup bagus, rata-rata pengembalian setiap bulan mencapai 80% - 90% tetapi pendampingan UPK yang lemah terhadap KSM mengakibatkan UPK tidak mampu memantau perkembangan KSM, termasuk apakah pemanfaatan dana pinjaman digunakan sesuai dengan kegiatan usaha yang disulkan dalam proposal atau tidak.

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Kristina salah satu peserta FGD yang juga kebetulan sebagai pengelola simpan pinjam di RW-nya :

"bahwa sebenarnya di masyarakat banyak akses modal baik simpan pinjam RT/RW maupun dana P2KP yang dikelola oleh UPK BKM, tetapi sampai sekarang belum terlihat perkembangan yang jelas terkait dengan peningkatan kesejahteraan keluarga. Kemanfaatan dana pinjaman sebagian belum dimanfaatkan sesuai dengan rencana kegiatan yang dituangkan dalam proposal, tetapi kebanyakan digunakan yang sifatnya konsumtif karena mereka tidak memiliki ketrampilan dan semangat wirausaha yang tinggi".

Menurut beliau seandainya masyarakat yang pinjam untuk usaha atau mengembangkan usahanya yang sudah ada, maka perputaran uang di kelurahan Tegalrejo akan terus berkembang, baik yang digalang oleh warga sendiri di masing-masing RT atau RW maupun dana yang dikelola oleh UPK-BKM. Penggunaan dana pinjaman yang tidak sesuai tersebut juga diakui oleh beberapa anggota KSM "Melati" yang memiliki usaha pembuatan krupuk.

Selain pemanfaatan dana pinjaman yang tidak tepat oleh masyarakat juga karena pendampingan kelompok yang lemah, hal ini juga menyebabkan ikatan kelompok menjadi rapuh, tidak ada pertemuan rutin, arah dan tujuan kelompok juga tidak jelas sehingga kelompok menjadi bubar dan tidak berkelanjutan. Makna tanggungrenteng juga dipahami sebagai sesuatu yang membebani karena tidak dipahami secara utuh. Anggota kelompok ada yang menunggak angsuran alasan menunggak juga tidak jelas yang kemudian anggota kelompok yang lain juga enggan membantu dan akhirnya justru saling curiga dan saling tidak percaya. Dengan adanya kejadian yang demikian maka sebagian besar anggota KSM merasa banyak yang dirugikan dan akhirnya mereka berkeinginan agar pinjaman diberikan secara individu, yang sebenarnya hal ini sudah sangat jauh menyimpang dari konsep P2KP yang bertujuan untuk membangun sosial kapital melalui kelompok-kelompok masyarakat.

d. Pelaksanaan Kegiatan

Setelah melalui identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan, berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan dengan dukungan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) P2KP. BLM adalah dana stimulan yang dimaksudkan sebagai media atau alat pembelajaran bagi masyarakat untuk terus membangun kapital sosial dan melembagakan nilai-nilai universal dan prinsip-prinsip kemasyarakatan secara berkelanjutan sehingga secara bertahap akan mampu menyelesaikan persoalan sosial, ekonomi dan lingkungan mereka. Dalam tahapan ini ada dua kegiatan yaitu penyusunan proposal dan pelaksanaan kegiatan.

Tahap penyusunan proposal merupakan pembelajaran masyarakat dalam membuat usulan kegiatan Tridaya berdasarkan kebutuhan mereka melalui KSM atau panitia. Kegiatan penyusunan proposal ini difasilitasi oleh BKM, UP-UP BKM yang didampingi oleh fasilitator dan dinas terkait. Jenis-jenis kegiatan adalah mengacu kepada PJM Pronangkis yang telah disusun sebelumnya. Sesuai dengan mekanisme yang telah disosialisasikan dari awal setelah masyarakat selesai menyusun proposal maka diajukan kepada UP-UP BKM sesuai dengan bidangnya yang akan ditindaklanjuti untuk diverifikasi baik secara administratif maupun survey ke lapangan untuk memastikan lokasi dan besaran volumenya.

Setelah verifikasi dilaksanakan maka akan dimusyawarahkan oleh anggota BKM untuk dibuat persetujuan prioritas kegiatan yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan (BAPPUK).

Pembuatan proposal mengacu kepada format-format yang telah ditetapkan dalam program namun masyarakat bisa memodifikasi dengan catatan tidak mengurangi makna dan substansinya. Menurut UPL dan UPK, masyarakat mengalami kesulitan membuat proposal sehingga panitia atau KSM biasanya meminta UPL atau UPK untuk tidak memfasilitasi tetapi membuatkan proposal tersebut. Sampai saat ini BLM P2KP di kelurahan Tegalrejo sudah masuk tahun ke 8 yang pada tahun 2003 mendapatkan dana BLM P2KP sebesar Rp 100.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- a. Untuk kegiatan Sosial, Lingkungan dan Pelatihan : Rp 19.000.000,-
- b. Untuk kegiatan Ekonomi : Rp 76.000.000,-
- c. Untuk BOP BKM : Rp 5.000.000,-

1) Pemanfaatan BLM Termin I (20%)

Kegiatan Fisik didanai dengan BLM P2KP termin 1 sebanyak Rp. 20 juta (20 % dari pagu), masuk ke dalam rekening Bank BKM Wijayakusuma tanggal 29 Agustus 2003. Dana Itu disalurkan kepada masyarakat secara hibah (tidak mengembalikan) melalui 5 Panitia :

Tabel : 4.20
Pemanfaatan BLM P2KP Termin I Kelurahan Tegalrejo
Tahun 2003

NO	KSM	UNTUK	JUMLAH
1	Pembangunan Talud (Sumur Bandung)	RW V	1,5 juta
2	Bantuan Dana Pendidikan	44 Siswa SD, 13 Siswa SLTP dan 16 Siswa SLTA.	10,5 juta
3	Bantuan Dana Kesehatan	7 orang miskin/Jompo	1,4 juta
4	Bantuan Sosial Miskin/Jompo	7 orang miskin sakit-sakitan	5 juta
5	BOP BKM	Operasional BKM	1 juta

Sumber : Data Sekretariat BKM Wijayakusuma Kelurahan Tegalrejo Tahun 2003

Penangnggungjawab dari kegiatan tersebut adalah :

- a. Panitia pembangunan fisik (ketua Bpk. Eri Budiono) untuk membangun talud di RW V (dekat sumur bandung).
- b. Panitia penyaluran bantuan dana pendidikan (Ketua Ibu Dra. Puspaning Utamie) untuk 44 siswa SD, 13 Siswa SMP dan 11 siswa SMA dan 5 siswa SMK.
- c. Panitia penyaluran bantuan dana kesehatan (ketua ibu Astuti Sukarno) untuk membantu 7 orang.
- d. Panitia penyaluran bantuan keluarga miskin/jompo (ketua Bp. Daniel suharto) dan panitia pembekalan KSM-KSM untuk memberikan pengetahuan dan penguatan organisasi KSM (ketua Bp. Winarno, S.Pd).
- e. BOP BKM sejumlah 1 juta (5 % dari BLM)

2) Pemanfaatan BLM Termin II (50%)

Dana BLM P2KP termin 2 sebanyak Rp. 50 juta (50 % dari pagu), masuk ke dalam Bank BKM Wijyakusuma tanggal 21 Mei 2004. Disalurkan kepada masyarakat tanggal 31 Mei 2004 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel : 4.21
Pemanfaatan BLM P2KP Termin II Kelurahan Tegalrejo
Tahun 2004

NO	KSM	UNTUK	JUMLAH
1	Srikandi – I / 01	PKK RW I	5 juta
2	Delima – II / 01	Usaha Kecil RW II	5 juta
3	Anggrek – III / 01	PKK RW III	5 juta
4	Mawar – IV / 01	PKK RW IV	5 juta
5	Melati – V / 01	Usaha Kecil RW V	5 juta
6	Srikandi – VI / 01	PKK RW VI	5 juta
7	Makmur Jaya – VII / 01	PKK RW VII	5 juta
8	Anggrek – IX	PKK RW IX	2,5 juta
9	Srikandi – VI / 02	PKK RT 01 / RW VI	5 juta
10	Anggrek – IX / 02	Kop simpan pinjam RW IX	2,5 juta
11	BOP BKM	5 % dr BLM	2,5 juta

Sumber : Data Sekretariat BKM Wijayakusuma Kelurahan Tegalrejo Tahun 2004

3) Pemanfaatan BLM Termin III (30%)

Dana BLM P2KP termin 3 sebanyak Rp. 30 juta (30 % dari pagu), masuk ke dalam Bank BKM Wijayakusuma tanggal 29 Mei 2004. Disalurkan kepada masyarakat tanggal 10 Juli 2004 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel : 4.22
Pemanfaatan BLM P2KP Termin III Kelurahan Tegalrejo
Tahun 2004

NO	KSM	UNTUK	JUMLAH
1	Delima – II / 02	Usaha mikro RW II	5 juta
2	Anggrek – III / 02	Usaha mikro RW III	5 juta
3	Mawar – IV / 02	Usaha Batako RW IV	5 juta
4	Melati – V / 02	Usaha mikro RW V	5 juta
5	Srikandi – VI / 03	Usaha mikro RW VI	3,5 Juta
6	Anggrek – IX / 03	Usaha mikro RW IX	5 juta
7	BKM wijayakusuma	5 % dr BLM	1,5 juta

Sumber : Data Sekretariat BKM Wijayakusuma Kelurahan Tegalrejo Tahun 2004

Selain dana BLM yang dikucurkan oleh pemerintah sebagai wujud komitmen masyarakat, maka masyarakat juga mengeluarkan dana swadaya. Dengan kegiatan lingkungan, masyarakat sudah terbiasa melakukan gotongroyong baik tenaga, pikiran maupun materi yang dimiliki oleh masing-masing warga sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan swadaya dalam ekonomi pinjaman bergulir merupakan besar modal usaha yang dimiliki anggota KSM baik berupa barang dagangan, uang tunai maupun berupa alat usaha yang biasa digunakan untuk berusaha. Dalam kegiatan Sosial hampir tidak ada swadaya walaupun ada hanya swadaya dari panitia yang tidak dibayar karena dianggap sebagai relawan. Selain itu juga biasanya mereka memberi santunan secara individu, atau kalau ada warga yang sakit atau meninggal.

Biaya Operasional (BOP) BKM sebesar Rp 5.000.000,- merupakan dana yang khusus dan secara resmi disediakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BKM. Sebelum BKM produktif bisa mendapatkan dana secara mandiri melalui kegiatan simpan pinjam. Kegiatan yang dilaksanakan oleh BKM antara lain : rapat BKM, pertemuan warga, pembelian ATK, dan intensif UP-UP. Kegiatan BKM selanjutnya dibiayai dari sebagian jasa angsuran KSM ekonomi bergulir yang dikelola oleh UPK. Dengan demikian kegiatan dan keberlanjutan BKM sangat tergantung dari tingkat pengembalian angsuran KSM.

e. Pengawasan Kegiatan (Monitoring dan Evaluasi)

Mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara partisipatif pada prinsipnya adalah kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh masyarakat dan hasilnya digunakan sendiri oleh masyarakat dalam rangka perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Pada tataran UP-UP pengawasan dilakukan oleh BKM, sedangkan BKM akan dikontrol oleh masyarakat, pemerintah Kelurahan/desa, lembaga-lembaga kelurahan yang lain.

1) Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh BKM

BKM Wijayakusuma melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan internal BKM maupun di tataran masyarakat melalui berbagai metode dan pendekatan yaitu:

- Rapat Koordinasi Rutin (sebulan 1X), adalah kegiatan yang dilakukan oleh BKM Wijayakusuma untuk bisa melihat kemajuan kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh sekretaris dan UP-UP sampai kepada administrasi dan keuangan. UPK melaporkan secara lebih rinci terkait dengan posisi keuangan yang berupa neraca, laporan rugi/laba, tingkat pengembalian dan tingkat tunggakan KSM. Laporan UPK tidak hanya terbatas pada laporan keuangan saja tetapi juga mengenai perkembangan KSM dan dinamikanya.
- Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BLM P2KP, Laporan ini disusun pada setiap kegiatan yang dilaksanakan dengan memanfaatkan dana BLM P2KP yang disusun setelah kegiatan selesai. LPJ disusun oleh

panitia atau KSM dikelurahan Tegalorejo sebagai pelaksana kegiatan, yang selanjutnya diserahkan kepada BKM. BKM akan melihat kebenarannya sebagai salah satu bahan untuk disampaikan kepada masyarakat secara luas melalui acara rembug warga maupun ditempelkan di papan informasi yang telah disediakan.

- Papan Pengumuman di 5 titik strategis, adalah merupakan media yang cukup efektif bagi BKM Wijayakusuma untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, karena media ini tidak mahal dan bisa bertahan lama. Melalui pengumuman masyarakat bisa mengetahui dan menjadi alat komunikasi terkait dengan kegiatan P2KP maupun kegiatan BKM. Selain papan pengumuman di tempat-tempat lokasi kegiatan pembangunan dibuat papan proyek yang memuat jenis kegiatan, sumber dana, besarnya dana, volume kegiatan dan lokasi kegiatan.
- Rembug Warga Tahunan (RWT) BKM Wijayakusuma, adalah rembug warga yang dilaksanakan oleh BKM Wijayakusuma setiap tahun, dengan mengundang seluruh perwakilan KSM dan perwakilan elemen masyarakat untuk mendengarkan laporan pertanggungjawaban BKM selama satu tahun. Laporan yang disampaikan oleh BKM Wijayakusuma biasanya meliputi : perkembangan KSM, laporan keuangan dan perkembangannya, capaian kegiatan secara keseluruhan dan menyusun rencana tahun berikutnya.

- Audit Independen, merupakan bagian dari prinsip akuntabilitas yang juga dilakukan oleh BKM Wijayakusuma setiap satu tahun sekali. Biasanya audit BKM oleh auditor independen ini dilaksanakan sebelum dilakukan RWT dengan tujuan sebelum disampaikan kepada masyarakat BKM melegalkan dulu secara hukum. Audit oleh auditor independen ini dilakukan terhadap BKM difokuskan pada administrasi pembukuan dan keuangan yang dikelola oleh masing-masing UP. Sampai saat ini BKM Wijayakusuma telah melakukan audit independen sebanyak 4 kali yaitu pada tahun 2004, 2005, 2006, dan 2007. Auditor yang digunakan adalah Kosultan Akuntan Publik (KAP) TARMIZI dan di tahun 2007 Lembaga akuntan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW). Biaya untuk audit selama ini dibiayai oleh pemerintah kota Salatiga yang dialokasikan melalui APBD kota Salatiga. BKM Wijayakusuma masih merasa keberatan untuk mengeluarkan biaya audit, karena jasa yang diterima dari kegiatan ekonomi bergulir masih sangat minim.
- Tinjauan Partisipatif, adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh BKM Wiayakusuma bersama dengan masyarakat untuk melakukan peninjauan secara partisipatif terhadap seluruh siklus kegiatan P2KP di kelurahan Tegalrejo, kinerja BKM, capaian program (kuaalitas dan kuantitas) dan kinerja pengelolaan keuangan yang difasilitasi oleh BKM Wijayakusuma bersama para relawan. Tinjauan Partisipatif biasanya dilaksanakan setiap tahun paling lambat 3 bulan

sebelum dilaksanakan Rembug Warga Tahunan (RWT) di bulan Desember tahun bersangkutan. Tujuan dilaksanakannya Tinjauan Partisipatif adalah Menumbuhkan semangat dan proses pembelajaran bagi BKM dan masyarakat melalui pengalaman kinerja BKM baik dari sisi organisasi, mendorong terbangunnya kontrol sosial terhadap program pembangunan, menilai capaian Rencana Tahunan (Renta) maupun Program Jangka Menengah (apa yang telah dilaksanakan & apa yang belum dilaksanakan) dan menilai hasil kinerja keuangan sekretariat BKM, UPK sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan.

2) Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Masyarakat

Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh masyarakat kelurahan Tegalrejo dengan cara mengawasi secara langsung berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM, yang bisa dikelompokkan menjadi kegiatan TRIDAYA (Ekonomi, Sosial dan Lingkungan) atau menanggapi secara tertulis maupun lisan terhadap laporan kegiatan P2KP oleh KSM atau BKM yang disampaikan dalam forum pertemuan maupun yang melalui papan informasi. BKM Wijayakusuma juga telah menyiapkan kotak pengaduan di depan kantor sekretariat BKM. Kotak pengaduan untuk sementara ini masih belum bisa berjalan efektif karena tingkat keinginan dan kepedulian melalui media tertulis dari masyarakat kelurahan Tegalrejo masih sangat rendah dan belum terbiasa sehingga selama kurun waktu 6 tahun belum pernah ada pengaduan tertulis yang dimasukan melalui kotak pengaduan yang telah disediakan.

Berdasarkan uraian proses diatas masih jelas terlihat kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan P2KP. Tahap persiapan tidak dilaksanakan dengan cukup waktu sehingga fasilitator tidak mengetahui kondisi wilayah maupun kondisi masyarakat secara utuh, pendekatan dan strategi dalam melakukan pendampingan kurang tepat, yang pada akhirnya dalam menemukan permasalahan dan kebutuhan juga tidak tergali secara sempurna di masyarakat. Beberapa siklus dilakukan secara cepat dan tergesa-gesa sehingga proses pembelajaran di masyarakat kurang optimal. Kondisi ini menyebabkan proses penyadaran untuk membangun kesadaran kritis masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan belum tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Mekanisme monitoring dan evaluasi juga cenderung dilakukan untuk memenuhi kebutuhan informasi data, sementara proses umpan balik dari masyarakat mengenai pelaksanaan program belum diperhatikan sebagai pelaku utama atau subyek pembangunan.

4. Capaian Pelaksanaan P2KP (*Factor Product*)

Saat ini Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di kelurahan Tegalorejo masih berjalan yaitu implementasi BLM P2KP yang telah diterima pada tahun 2003. Implementasi ini sudah menjadi kewenangan BKM Wijayakusuma untuk digunakan sebagai proses pembelajaran kritis berkelanjutan melalui pelaksanaan kegiatan Tridaya (Lingkungan, Sosial dan Ekonomi). Walaupun penggunaanya sudah diserahkan kepada BKM namun masih didampingi oleh fasilitator agar pemanfaatannya tidak menyimpang dari

tujuan awal yaitu penanggulangan kemiskinan. Capaian dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) selama ini bisa penulis kelompokkan menjadi : *output dan outcome*.

a. Output

Pelaksanaan kegiatan P2KP di kelurahan Tegalrejo telah menghasilkan keluaran (*output*) antara lain :

1) Munculnya relawan masyarakat sebagai pelaku pembangunan di kelurahan Tegalrejo yang terlatih

Relawan (masyarakat yang telah mendapat pelatihan P2KP) memang sangat dibutuhkan dalam proses penanggulangan kemiskinan yang menggunakan pendekatan pemberdayaan secara keberlanjutan. Untuk mengawal proses kegiatan P2KP akan sangat sulit apabila kegiatan tersebut langsung diserahkan kepada masyarakat secara langsung tanpa dikawal dan dibimbing oleh para relawan. Apabila mekanisme pengawalan kegiatan hanya dibebankan kepada fasilitator tidak mungkin berjalan efektif karena antara jumlah personil fasilitator dengan jumlah kegiatan tingkat basis kelurahan dampingan tidak sebanding. Menciptakan fasilitator lokal melalui proses transfer kemampuan kepada relawan juga tidak mudah karena berbagai kendala baik dari sisi SDM dan waktu luang relawan untuk mengabdikan sebagai pendamping masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Untuk meningkatkan kapasitas para pelaku P2KP maka telah dilakukan pelatihan-pelatihan yang melibatkan relawan warga yang diantaranya adalah ; anggota BKM, Sekrteriat BKM dan UP-UP BKM. Selain pelatihan pada saat

memasuki siklus P2KP juga telah dilakukan *coaching* terkait dengan pemahaman substansi siklus dan tata cara pelaksanaannya.

Jumlah relawan di kelurahan Tegalrejo yang terdaftar sebanyak 56 orang sebenarnya sudah cukup apabila dibandingkan dengan jumlah wilayah RT sebanyak 56 artinya ada perwakilan 1 orang dimasing-masing RT. Proses ini merupakan pembelajaran kritis kepada masyarakat untuk membangun kepedulian membantu warga yang belum beruntung/miskin. Jumlah relawan dari 56 dikelurahan Tegalrejo yang mendapat pelatihan hanya 25 orang. Sebagian relawan terpilih sebagai anggota BKM dan hingga saat ini jumlah relawan yang masih aktif mengikuti kegiatan P2KP sebanyak 21 orang. Jumlah relawan aktif semakin berkurang, hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain : a). Tidak mengikuti pelatihan sehingga motivasi mereka lemah. b). Relawan tidak mendapatkan imbalan/honor sehingga kalau menjadi relawan tidak didasari niat yang tulus (tanpa pamrih) maka jiwa kerelawanan tersebut akan berkurang dan akhirnya tidak aktif lagi dalam kegiatan P2KP. c). Pemahaman yang keliru terhadap tugas fungsi keberadaan relawan akan selesai setelah BKM terbentuk. d). Setelah BKM terbentuk relawan akan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan tertentu saja, terutama pada saat ada kegiatan ditingkat basis.

2) Tersusunnya data-data kemiskinan dan potensi kelurahan Tegalrejo (data Pemetaan Swadaya)

Data-data tentang kriteria dan penyebab kemiskinan di kelurahan Tegalrejo dihasilkan dengan metode partisipatif melalui kegiatan Refleksi

Kemiskinan (RK). Pada kegiatan siklus Pemetaan Swadaya (PS) data-data yang didapatkan adalah data permasalahan tridaya, potensi kelurahan dan data warga miskin lokal yang bisa dimanfaatkan untuk modal (data) awal menyelesaikan berbagai persoalan kemiskinan yang dihadapi. Data-data tentang kelembagaan beserta dengan harapan-harapan yang diinginkan oleh masyarakat terkait dengan kriteria kelembagaan dan kepemimpinan yang akan menjadi wadah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Keseluruhan data dihasilkan dengan melakukan berbagai kajian mendalam dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat termasuk didalamnya adalah warga miskin.

3) Terbentuknya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai motor penggerak proses pembangunan partisipatif

Kelembagaan BKM dibentuk sebagai wadah dan motor penggerak dalam upaya penanggulangan kemiskinan. BKM di kelurahan Tegalrejo dibentuk melalui serangkaian Rembug Warga pemilihan BKM tingkat basis dan diakhiri dengan Rembug Warga di tingkat kelurahan pada tanggal 11 Juni 2003 yang diberi nama BKM Wijayakusuma. Karena masa jabatan BKM 3 tahun maka telah mengalami pemilihan ulang sekali pada tanggal 23 Juli 2006. BKM Wijayakusuma yang beranggota 13 orang telah diakta notariskan pada tanggal 19 Agustus 2003 no. 34 di Notaris Muhamad Fauzan, SH. Koordinator BKM dipilih dari salah satu anggota BKM yaitu Bapak Suwanto AK,BE, anggota BKM yang berjumlah 11 orang tersebut terdiri dari 4 orang laki-laki dan 7 orang perempuan, hingga saat ini semua anggota masih aktif. Semenjak adanya P2KP dan kemudian terbentuk BKM, masyarakat selalu

dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pelaksanaan program, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Menurut Bapak Ragil Tukiman, salah satu anggota BKM Wijayakusuma dalam FGD dengan menyampaikan bahwa :

”Kegiatan P2KP mendorong partisipasi masyarakat semakin meningkat dan banyak warga yang berani dan aktif memberikan pendapat, hal ini dikarenakan setiap ada kegiatan masyarakat selalu diberi kesempatan dan dilibatkan dalam musyawarah untuk menentukan prioritas kegiatan”.

Proses seperti tersebut diatas memberikan ruang belajar bagi masyarakat untuk berpendapat menentukan nasibnya sendiri dimasa yang akan datang.

4) Terbentuknya UPL, UPS, UPK dan Sekretariat BKM sebagai gugus tugas BKM dalam menjalankan tugas dan fungsinya

Untuk melaksanakan semua kebijakan dan keputusan yang telah dibuat oleh BKM Wijayakusuma, tidak dikerjakan sendiri oleh BKM tetapi oleh UP-UP BKM sebagai gugus tugas BKM yang terdiri dari Sekretariat BKM, UPS, UPL dan UPK. UP-UP BKM dibentuk oleh BKM dengan surat perjanjian kerja yang harus di patuhi oleh UP-UP BKM, apabila UP-UP BKM melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap surat perjanjian kerja tersebut maka BKM berhak untuk memberhentikan dan mengganti sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam AD/ART BKM Wijayakusuma. Pelatihan dan *coaching* yang diberikan kepada UP-UP BKM dapat meningkatkan kemampuannya, seperti sekretaris dan UPK-BKM mampu menerapkan berbagai perangkat administrasi dan pembukuan pengelolaan keuangan di BKM. Setiap bulan sekretaris dapat menyajikan Laporan

Pemasukan dan Pengeluaran Keuangan BKM secara rutin, demikian pula UPK mampu membuat Neraca, Laporan Laba-Rugi dan Kolektibilitas (Tingkat Pengembalian dan Tingkat Tunggakan).

5) Tersusunnya Dokumen PJM Pronangkis dan Implementasinya

BKM Wijayakusuma bersama-sama dengan masyarakat kelurahan Tegalorejo telah berhasil menyusun rencana penanggulangan kemiskinan selama 3 tahun pertama periode 2003-2006 dan 3 tahun kedua periode 2006-2009 yang disebut dengan PJM Pronangkis. PJM dan Renta Pronangkis tersebut dibuat dengan mengacu pada data pemetaan swadaya yang telah dilakukan dalam siklus sebelumnya. PJM dan Renta Pronangkis memuat tentang visi, misi, tujuan BKM, serta kegiatan masyarakat yang mencakup lingkungan, ekonomi dan sosial ((Tridaya) beserta dengan sumber pendanaannya. Masyarakat dapat melaksanakan kegiatan di bidang tridaya yang telah mereka rencanakan dalam PJM dan Renta Pronangkis dengan dukungan dana BLM P2KP dan swadaya masyarakat. Pelaksanaan kegiatan tersebut dapat memenuhi sebagian kebutuhan masyarakat, seperti sarana pengairan, jalan lingkungan, pelatihan ketrampilan maupun peningkatan usaha melalui pinjaman bergulir.

6) Terbentuknya Panitia dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

Sebagai penerima sasaran program adalah masyarakat yang berkelompok yang disebut dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Untuk kelompok yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang sifatnya untuk kepentingan umum KSM ini sering disebut dengan kepanitiaan,

misal kepanitiaan santunan baik santunan yatim maupun santunan jompo atau kegiatan pembangunan jalan, jembatan, saluran dan yang lain. Sedangkan untuk kegiatan yang sifatnya individu biasanya berupa pinjaman bergulir untuk modal usaha yang sering di sebut dengan KSM. KSM dikelurahan Teglarajo pada awalnya terbentuk 3 kepanitiaan dan 21 KSM, sampai sekarang telah berkembang menjadi 43 KSM yang menyebar diseluruh wilayah RW.

7) Berkembangnya dana perguliran dan jumlah KSM yang difasilitasi

Meskipun dana BLM telah diterima semuanya pada tahun 2004 oleh BKM Wijayakusuma kelurahan Teglarajo, namun kegiatan pinjaman bergulir belum banyak berkembang karena terbatasnya dana yang digulirkan yaitu sekitar Rp 76.000.000,- sementara beban biaya operasioanl yang harus dikeluarkan oleh BKM cukup besar. Perkembangan dana bergulir dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 4.23
Perkembangan Modal Pinjaman Bergulir
BKM Wijayakusuma Kelurahan Teglarajo Tahun 2003 -2009

NO	Tahun Kegiatan	Perkembangan Modal	Jumlah Modal Pada Akhir Tahun
1	2003	Rp 76.000.000,-	Rp 77.000.000,-
2	2004	Rp 77.000.000,-	Rp 82.500.000,-
3	2005	Rp 82.500.000,-	Rp 90.500.000,-
4	2006	Rp 90.500.000,-	Rp 97.000.000,-
5	2007	Rp 97.000.000,-	Rp 112.000.000,-
6	2008	Rp 112.000.000,-	Rp 117.500.000,-
7	2009	Rp 117.500.000,-	

Sumber : Data UPK BKM Wijayakusuma Kelurahan Teglarajo Tahun 2009

Seiring dengan berkembangnya dana bergulir, KSM Ekonomi Bergulir juga mengalami perkembangan yaitu dari 21 KSM pada tahun 2004 menjadi 43 KSM di tahun 2009. Dari 43 KSM tersebut masing-masing ada yang telah memperoleh pinjaman sekali, dua kali, tiga kali dan paling banyak empat kali. Rata-rata KSM tersebut pada awalnya merupakan KSM yang baru dibentuk, dan beberapa KSM merupakan upaya mengoptimalkan kelompok yang sudah ada dimasyarakat.

8) Terbatasnya Kapasitas dan Pelayanan UPK

Meskipun jumlah KSM semakin meningkat dan berkembang tetapi kondisi ini tidak diiringi dengan kemampuan UPK dalam mendampingi KSM, baik dalam penyusunan proposal, kewirausahaan, pendampingan manajemen usaha, maupun pelatihan motivasional KSM. Keberadaan pinjaman bergulir yang di fasilitasi oleh BKM melalui UPK ini memberi alternatif akses kredit bagi masyarakat dengan kelebihan bunga/jasa yang ringan (1,5%) dan persyaratan yang mudah karena tanpa jaminan serta kemanfaatan dari jasa yang dikumpulkan akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk program-program yang telah direncanakan. Namun demikian pelayanan UPK masih terbatas, karena jumlah dana BLM yang diterima sekitar Rp 76.000.000,-. Sementara untuk penambahan dana dari pihak ketiga baru didapatkan dari dinas koperasi kota Salatiga pada tahun 2006 sebesar Rp. 21.000.000,- sebagai pinjaman lunak, dimana BKM Wijayakusuma harus mengembalikan dana tersebut kepada dinas koperasi dengan bunga 6% per tahun.

b. Outcome

Dengan adanya pelaksanaan P2KP dan terbentuknya BKM Wijayakusuma, manfaat tambahan yang dirasakan oleh masyarakat kelurahan Tegalrejo dari hasil yang dicapai (*outcome*) antara lain:

- 1) BKM Wijayakusuma yang terus berkembang secara perlahan tapi pasti semakin mendapatkan tempat dihati masyarakat, menjadi lembaga yang terpercaya yang pada akhirnya lembaga/instansi yang ada di kota Salatiga juga terbawa arus kepercayaan terhadap keberadaan BKM Wijayakusuma. Hal ini terbukti dimana BKM Wijayakusuma telah mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak antara lain :

Tabel : 4.24
Chaneling dan Kemitraan BKM Wijayakusuma
Kelurahan Tegalrejo Tahun 2009

NO	INSTANSI MITRA	JENIS KEMITRAAN	MANFAAT
1	Dinas Koperasi	Pinjaman lunak untuk menambah permodalan di UPK	Tambahan Modal
2	BRI	Penyaluran KSM-KSM yang telah memiliki pinjaman yang sudah besar	Tambahan Modal
3	Disnaker	Pelatihan-pelatihan (Menjahit High Speed)	Pelatihan
4	SMK Bawen	Pelatihan Agrobisnis	Pelatihan

Sumber : Data Sekretariat BKM Wijayakusuma Kelurahan Tegalrejo Tahun 2009

- 2) Keberanian dari masyarakat kelurahan Tegalrejo (terutama warga miskin) untuk mengungkapkan pendapatnya dalam berbagai pengambilan keputusan/ musyawarah.

- 3) Perencanaan partisipatif telah dipahami secara mendasar oleh sebagian masyarakat kelurahan Tegalrejo sebagai sebuah proses belajar bagi masyarakat dalam rangka melaksanakan perencanaan pembangunan di wilayahnya.
- 4) Implementasi transparansi dan akuntabilitas banyak diterapkan di lembaga maupun perkumpulan warga non BKM dan KSM.

B. Pembahasan

Pada sub bab hasil penelitian peneliti telah sajikan berbagai hal yang terkait dengan latar belakang dan kebutuhan masyarakat, jenis dan kualitas input yang mendukung pelaksanaan P2KP, proses pelaksanaan P2KP dan capaian pelaksanaan P2KP di kelurahan Tegalrejo, kecamatan Argomulyo, kota Salatiga. Dalam pembahasan ini peneliti akan melakukan kajian mengenai keterkaitan antar faktor untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pelaksanaan P2KP di kelurahan tersebut. Sebelum melakukan pembahasan, terlebih dahulu akan disajikan pokok-pokok temuan dari hasil penelitian di atas.

1. Pokok-Pokok Temuan

a. Latar belakang dan kebutuhan masyarakat (*factor context*)

Kondisi dan karakteristik geografis yang merupakan wilayah permukiman dan pertanian lahan kering (tegalan), aktifitas pertaniannya tidak cukup mendukung dalam proses pendidikan kritis melalui siklus P2KP karena sebagian besar masyarakat tidak tertarik untuk mengikuti

bidang pertanian lahan kering dan memilih menjadi buruh, *home industry* dan pedagang. Alternatif atau jenis pekerjaan yang terbatas di Kelurahan Tegalrejo berakibat pada angka pengangguran yang cukup besar yaitu sekitar 31%. Sebagian penduduk kelurahan Tegalrejo yang merupakan Pensiunan, PNS dan buruh pabrik dimana mereka disibukan dengan tugas dan tanggungjawabnya di kantor/pabrik serta kondisi kenyamanan hidup sebagai pegawai dan pensiunan sehingga terkesan tidak mau disibukan dan direpotkan dengan urusan kemasyarakatan di lingkungannya, termasuk dalam pelaksanaan siklus P2KP.

Ikatan sosial masyarakat kelurahan Tegalrejo masih terpelihara dengan baik melalui pranata-pranata sosial seperti : kelompok arisan, pertemuan RT/RW, hajatan, gotong-royong dan kegiatan keagamaan. Hal ini akan berpengaruh terhadap proses pelaksanaan siklus P2KP, namun demikian di sebagian masyarakat sudah mulai kelihatan tumbuh sifat individualisme diantara masing-masing penduduk yang merupakan ciri masyarakat perkotaan. Perempuan terlibat aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan ekonomi, namun dalam kondisi dan hal tertentu pembagian peran di masyarakat peran laki-laki masih mendominasi. Untuk menjalankan roda pemerintahan, menjaga keamanan dan melestarikan budaya di kelurahan Tegalrejo telah banyak berdiri lembaga kemasyarakatan diantaranya adalah Pemerintahan Kelurahan, LPMK, PKK, dan Karangtaruna, lembaga ini telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya, walaupun belum berjalan optimal lembaga-lembaga ini telah

memberikan pendidikan kepada masyarakat kelurahan Tegalrejo untuk memilih pemimpin, mengambil keputusan, dan melaksanakan pembangunan. Akses permodalan selama ini warga memanfaatkan simpan pinjam RT/RW, BKK, dan perbankan yang ada di kota Salatiga walaupun warga miskin belum bisa mengakses lembaga keuangan secara optimal. Beberapa program peningkatan kesejahteraan masyarakat yang masuk di kelurahan Tegalrejo sudah tidak berjalan lagi kecuali raskin yang diberikan secara rutin oleh pemerintah. Semua latar belakang dan pengalaman yang peneliti bisa ungkapkan diatas sedikit banyak akan mempengaruhi proses pelaksanaan siklus P2KP di kelurahan Tegalrejo baik dari sisi kualitas, kelancaran, hambatan, dan dinamika di masyarakat.

b. Jenis dan kualitas input yang mendukung pelaksanaan P2KP (*Factor Input*)

Masukan atau *input* yang diberikan berupa pengembangan kapasitas, dana stimulan BLM dan sarana prasaran untuk kelancaran program, dapat disimpulkan bahwa pemberian *input* dalam pelaksanaan siklus P2KP baik strategi dan mekanisme berupa pengembangan kapasitas dalam bentuk pelatihan dan *coaching* tidak konsisten dijalankan sesuai dengan yang seharusnya/sesuai (SOP), ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan seperti buku pedoman, modul pelatihan, SOP tidak disampaikan tepat waktu dan kurang mengacu pada pemenuhan pemecahan masalah di masyarakat. Sementara BLM baru dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan KSM (fisik, ekonomi dan lingkungan), BLM

yang disediakan sebagai alat belajar untuk menuju kemandirian masyarakat justru dipahami sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan kritis yang memerlukan gerakan bersama dan keberlanjutan.

Pelaksanaan P2KP didukung oleh struktur organisasi pelaksanaan yang melibatkan pemerintah dan konsultan/fasilitator (agen perubahan) sebagai pendamping dan masyarakat. Sebagai agen perubahan peran yang paling dekat dengan masyarakat adalah tim fasilitator, sedangkan peran masyarakat yang sangat penting bagi keberlanjutan program adalah relawan masyarakat, BKM beserta dengan UP-UP dan KSM. Melihat dari tugas dan fungsi fasilitator dalam memfasilitasi, memediasi dan mengadvokasi dalam proses pemberdayaan masyarakat, maka fasilitator harus memiliki kapasitas yang cukup dalam menganalisa dan mengkomunikasikan program, sehingga terampil dalam melaksanakan tugas pendampingan masyarakat. Namun demikian di kelurahan Tegalrejo masih terjadi beberapa permasalahan dan kendala terkait dengan pendamping diantaranya adalah : fasilitator yang ditempatkan belum memiliki pengalaman (*fress graduate*), fasilitator yang sudah cukup kemampuan sering dipindah tempat dengan berbagai alasan, misalnya ingin dekat dengan keluarga, untuk memperkuat tim di wilayah lain dan sebagainya. Selain itu juga ada beberapa fasilitator yang tidak *live in* dilokasi tugasnya, hal ini berdampak pada intensitas pendampingan yang tidak maksimal dan tidak bisa membaur dengan masyarakat. Semua hal

yang kami sampaikan ini berdampak pada proses pelaksanaan siklus P2KP sebagai proses pendidikan kritis di masyarakat.

c. Pelaksanaan Kegiatan P2KP (*Factor Process*)

Pelaksanaan siklus P2KP dikelurahan Tegaltrejo sudah berjalan cukup baik namun dilihat dari kualitasnya proses penanggulangan kemiskinan dengan siklus P2KP sebagai proses pendidikan kritis, masih terdapat beberapa kekurangan sehingga belum mendorong kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi. Siklus P2KP di masyarakat meliputi tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi kegiatan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Kondisi tersebut karena : (1) Pada tahap persiapan tidak dilakukan *need assessment* secara baik, sosialisasi dan Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM) dilaksanakan dengan singkat; (2) Rangkaian kegiatan pembelajaran kritis dalam siklus P2KP belum dipahami sepenuhnya oleh sebagian besar masyarakat baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, sebagai proses penyadaran dan perubahan perilaku; (3) Refleksi Kemiskinan (RK) dan Pemetaan Swadaya (PS) sebagai langkah identifikasi masalah dan kebutuhan kurang berjalan efektif karena keterbatasan kemampuan relawan dalam melakukan fasilitasi; (4) Dalam menyusun PJM Pronangkis, masyarakat cenderung merencanakan kegiatan-kegiatan yang mengacu pada ketentuan P2KP sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan masyarakat; (5) Proses

pembangunan KSM dilakukan secara instan dan cenderung diarahkan untuk membentuk KSM baru sehingga terkesan hanya untuk mengakses dana BLM saja; (6) Pemanfaatan BLM P2KP dapat membantu masyarakat untuk melaksanakan kegiatan yang telah mereka rencanakan dalam PJM Pronangkis dan mampu mendorong swadaya masyarakat; dan (7) Mekanisme monitoring dan evaluasi cenderung dilakukan untuk memenuhi kebutuhan informasi data, sementara proses umpan balik dari masyarakat mengenai pelaksanaan program kurang diperhatikan.

Semua proses pelaksanaan siklus yang penuh dengan makna pembelajaran dan kesadaran dilewati begitu saja tanpa bekas, terkesan menggururkan kewajiban sebagai syarat menuju rangkaian kegiatan selanjutnya sampai pada pencairan BLM yang dipahami sebagai tujuan akhir. Disisi lain proses *adopsi inovasi* sudah berjalan cukup baik kepada sebagian masyarakat terutama mereka yang terlibat langsung dalam program, namun proses *difusi inovasi* berjalan sangat lambat bahkan bisa dikatakan *stagnan*. Peran masyarakat yang sangat penting bagi keberlanjutan program yang tergabung sebagai relawan masyarakat, BKM beserta dengan UP-UP dan KSM belum berjalan sebagai mana mestinya dalam proses *difusi inovasi* itu sendiri.

d. Capaian Pelaksanaan P2KP (*Factor Product*)

Capaian penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan siklus P2KP sebagai proses pendidikan kritis dengan berbagai kekurangan dan kelebihanannya telah memberikan manfaat bagi masyarakat kelurahan

Tegalrejo. Capaian hasil tersebut meliputi : keberadaan relawan masyarakat sebagai pelaku pembangunan partisipatif yang terlatih, terbentuknya lembaga BKM dan unit-unit pelaksanaanya yang telah mampu mewarnai dinamika masyarakat dalam menggerakkan berbagai program pembangunan di kelurahan Tegalrejo, tersusunya data potenis dan masalah yang dirumuskan dalam dokumen PJM Pronangkis, terjadinya peningkatan kemampuan masyarakat dalam identifikasi, perencanaan dan penyelesaian masalah kemiskinan melalui pengembangan kapasitas masyarakat, terlaksananya penyelesaian sebagian permasalahan kemiskinan melalui kegiatan tridaya (Lingkungan, Sosial dan Ekonomi), terjadinya perubahan pola pikir dan perilaku sebagian masyarakat tentang cara pandang dan cara penyelesaian kemiskinan melalui kepedulian, gerakan bersama untuk berbuat baik dan murni.

2. Pembahasan Kesesuaian antara Factor *context*, *input*, *process*, dan *product* dalam Pelaksanaan Siklus P2KP

Berangkat dari pokok-pokok temuan tersebut diatas, dalam pembahasan ini peneliti akan mengkaji kesesuaian antar faktor berdasarkan kerangka pikir CIPP (*context*, *input*, *process*, dan *product*). Pemahaman mengenai kesesuaian antar faktor tersebut diperlukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pelaksanaan P2KP di kelurahan Tegalrejo.

**1) Kesesuaian antara Latar Belakang dan Kebutuhan Masyarakat
(Factor Context) dengan pelaksanaan Kegiatan P2KP (Factor Process)**

Walaupun pelaksanaan P2KP dikelurahan Tegalrejo sudah berjalan cukup baik namun dilihat dari kualitasnya proses penanggulangan kemiskinan dengan siklus P2KP sebagai proses pendidikan kritis, masih terdapat beberapa kekurangan sehingga belum mendorong kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi. Kondisi tersebut karena rangkaian kegiatan pembelajaran kritis dalam siklus P2KP belum dipahami sepenuhnya oleh sebagian besar masyarakat baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung, sebagai proses penyadaran dan perubahan perilaku.

Semua proses pelaksanaan siklus yang penuh dengan makna pembelajaran dan penyadaran dilewati begitu saja tanpa bekas, terkesan menggururkan kewajiban sebagai syarat menuju rangkaian kegiatan selanjutnya sampai pada pencairan BLM yang dipahami sebagai tujuan akhir. Disisi lain proses *adopsi inovasi* sudah berjalan cukup baik kepada sebagian masyarakat terutama mereka yang terlibat langsung dalam program, namun proses *difusi inovasi* berjalan sangat lambat bahkan bisa dikatakan *stagnan*. Peran masyarakat yang sangat penting bagi keberlanjutan program yang tergabung sebagai relawan masyarakat, BKM beserta dengan UP-UP dan KSM belum berjalan sebagai mana mestinya dalam proses *difusi inovasi* itu sendiri.

Kualitas Pelaksanaan Siklus P2KP ini tidak terlepas dari latar belakang dan kebutuhan masyarakat (*faktor context*) dimana kondisi dan karakteristik geografis kelurahan Tegalrejo yang merupakan wilayah permukiman dan pertanian lahan kering (tegalan), Secara umum berbagai masalah yang dihadapi petani disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dalam bidang pertanian, sulitnya mereka mengadopsi *inovasi* baru, sarana dan prasarana yang kurang memadai, terbatasnya akses kredit bagi petani dan lemahnya pengorganisasian petani. Rendahnya pengetahuan dan sulitnya proses *adopsi-inovasi* dapat dilihat dari kebiasaan menggunakan ilmu yang mereka miliki tanpa pernah mencoba metode lain yang lebih modern dan lebih menjanjikan. Sementara itu terbatasnya akses kredit bagi petani bukan karena tidak ada lembaga ekonomi di kelurahan Tegalrejo, tetapi karena lembaga-lembaga tersebut menerapkan sistem angsuran yang tidak sesuai dengan usaha tani yang bersifat musiman.

Aktifitas pertanian tidak cukup mendukung dalam proses pendidikan kritis melalui siklus P2KP karena sebagian besar masyarakat tidak lagi tertarik untuk menggeluti bidang pertanian lahan kering dan memilih menjadi buruh, *home industry* dan pedagang. Alternatif atau jenis pekerjaan yang terbatas di kelurahan Tegalrejo berakibat pada angka pengangguran yang cukup besar yaitu sekitar 31%. Sebagian penduduk kelurahan Tegalrejo yang merupakan Pensiunan, PNS dan buruh pabrik dimana mereka disibukan dengan tugas dan tanggungjawabnya di kantor/pabrik serta kondisi kenyamanan hidup sebagai pegawai dan

pensiunan sehingga terkesan tidak mau disibukan dan direpotkan dengan urusan kemasyarakatan di lingkungannya termasuk dalam pelaksanaan siklus P2KP.

Ikatan sosial masyarakat kelurahan Tegalrejo masih terpelihara dengan baik melalui pranata-pranata sosial seperti : kelompok arisan, pertemuan RT/RW, hajatan, gotong-royong dan kegiatan keagamaan, namun demikian disebagian masyarakat sudah mulai kelihatan tumbuh sifat individualisme diantara masing-masing penduduk yang merupakan ciri masyarakat perkotaan. Perempuan terlibat aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan ekonomi, namun dalam kondisi dan hal tertentu pembagian peran dimasyarakat peran laki-laki masih mendominasi.

Untuk menjalankan roda pemerintahan, menjaga kemandirian dan melestarikan budaya di kelurahan Tegalrejo telah banyak berdiri lembaga kemasyarakatan diantaranya adalah Pemerintahan Kelurahan, LPMK, PKK, dan Karangtaruna, lembaga ini telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya, walaupun belum berjalan optimal lembaga-lembaga ini telah memberikan pendidikan kepada masyarakat kelurahan Tegalrejo untuk memilih pemimpin, mengambil keputusan, dan melaksanakan pembangunan. Akses permodalan selama ini warga memanfaatkan simpan pinjam RT/RW, BKK, dan perbankan yang ada di kota Salatiga walaupun warga miskin belum bisa mengakses lembaga keuangan secara optimal. Beberapa program peningkatan kesejahteraan masyarakat yang masuk ke Kelurahan Tegalrejo yaitu UEDSP, P2MPD dan KUT, namun karena tidak

dikelola dengan baik, program-program tersebut saat ini sudah tidak berjalan kecuali raskin. Hal ini menunjukkan lemahnya pengorganisasian masyarakat yang ditandai dengan tidak optimalnya fungsi kelembagaan ekonomi dan sosial yang ada di kelurahan. Peliknya permasalahan tersebut tentunya memerlukan pemecahan masalah yang tidak bisa dilakukan secara parsial tetapi harus integral dan sistematis. Berbagai masalah yang terkait satu sama lain tersebut menyebabkan proses penanggulangan kemiskinan (pembangunan) di kelurahan Tegalrejo cenderung berjalan lambat.

Penanggulangan kemiskinan dan kemampuan masyarakat dalam menyusun perencanaan program sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri merupakan langkah-langkah agar terjadi proses transformasi sosial menuju kemandirian yang ditempuh melalui pembelajaran kritis dalam siklus P2KP oleh masyarakat. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan melalui P2KP sangat tergantung pada partisipasi dan kapasitas masyarakat sebagai subyek pembangunan dan peran pemerintah untuk memberikan sebagian kewenangannya kepada masyarakat dalam menentukan keputusan terkait dengan masa depan dan kebutuhan mereka sendiri.

Tujuan dan strategi P2KP tersebut selaras dengan kosep *people centered development* yang menurut Korten (Moeljarto Tjokrowinoto, 1995 : 44) memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) keputusan dan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan rakyat dibuat di tingkat lokal; (2) fokus

utamanya adalah memperkuat kemampuan rakyat miskin dalam mengawasi dan mengarahkan aset-aset untuk memenuhi kebutuhan yang khas menurut daerah mereka sendiri; (3) mempunyai toleransi terhadap perbedaan dan karenanya mengakui arti penting pilihan nilai individual dan pembuatan keputusan yang terdistribusi; (4) mencapai tujuan pembangunan sosial melalui proses belajar sosial (*social learning*); (5) budaya kelembagaan ditandai adanya organisasi yang mengatur diri sendiri dan lebih terdistribusi yang menandai unit-unit lokal yang mengelola diri sendiri dan berinteraksi satu sama lain guna memberikan umpan balik yang membantu tindakan koreksi diri; dan (6) Jaringan koalisi dan komunikasi pelaku (aktor) lokal dan unit-unit lokal yang mengelola diri sendiri.

Berdasarkan paparan diatas, terlihat adanya kesesuaian antara kebutuhan masyarakat dan tujuan P2KP. Dalam hal ini, P2KP tidak langsung membidik pada permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat tapi lebih menekankan pada upaya mempersiapkan masyarakat untuk mandiri melalui pengembangan kelembagaan dan pengembangan kapasitas masyarakat melalui serangkaian kegiatan dalam proses pembelajaran kritis.

Kemandirian masyarakat ini akan membantu mereka dalam menghadapi berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi baik pada saat ini maupun pada masa-masa mendatang. Sebagaimana pendapat Isa Wahyudi (2006,33) bahwa hakekat dari pendekatan partisipatoris adalah

pengembangan kapasitas dan pengembangan kelembagaan komunitas lokal melalui "proses belajar berdasarkan pengalaman" sehingga pada gilirannya masyarakat akan tampil sebagai pelaku pembangunan yang mandiri.

2) Kesesuaian antara Jenis dan Kualitas Input Pelaksanaan P2KP (*Factor Input*) dengan Pelaksanaan Kegiatan P2KP (*Factor Process*)

Meskipun telah banyak aspek yang dicapai dalam pelaksanaan P2KP di kelurahan Tegalrejo namun capaian tersebut belum sepenuhnya menjawab masalah dan kebutuhan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan belum nampak perubahan yang cukup berarti di masyarakat khususnya dalam upaya peningkatan taraf hidup mereka. Tidak optimalnya pelaksanaan P2KP itu sendiri, karena bagaimanapun juga kualitas proses pelaksanaan suatu kegiatan akan dipengaruhi oleh jenis dan kualitas *input* dalam pelaksanaannya.

Masukan atau *input* yang diberikan berupa pengembangan kapasitas, dana stimulan BLM, eksistensi pendamping (fasilitator) dan sarana prasaran kelancaran program. Pemberian *input* dalam pelaksanaan siklus P2KP baik strategi dan mekanisme berupa pengembangan kapasitas dalam bentuk pelatihan dan *coaching* tidak konsisten dijalankan sesuai dengan yang seharusnya/ sesuai (SOP), ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan seperti buku pedoman, modul pelatihan, SOP tidak disampaikan tepat waktu dan kurang mengacu pada pemenuhan

pemecahan masalah di masyarakat. Sementara BLM baru dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan KSM (fisik, ekonomi dan lingkungan), belum dipahami sebagai alat belajar untuk menuju kemandirian masyarakat namun dipahami sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan kritis yang memerlukan gerakan bersama dan keberlanjutan.

Pelaksanaan P2KP didukung oleh struktur organisasi pelaksanaan yang melibatkan pemerintah dan konsultan/fasilitator (agen perubahan) sebagai pendamping dan masyarakat. Sebagai agen perubahan peran yang paling dekat dengan masyarakat adalah tim fasilitator, sedangkan peran masyarakat yang sangat penting bagi keberlanjutan program adalah relawan masyarakat, BKM beserta dengan UP-UP dan KSM. Melihat dari tugas dan fungsi fasilitator dalam memfasilitasi, memediasi dan mengadvokasi dalam proses pemberdayaan masyarakat, maka fasilitator harus memiliki kapasitas yang cukup dalam menganalisa dan mengkomunikasikan suatu masalah, sehingga terampil dalam melaksanakan tugas pendampingan masyarakat.

Namun demikian di kelurahan Tegalrejo masih terjadi beberapa permasalahan dan kendala terkait dengan pendamping diantaranya adalah : fasilitator yang ditempatkan belum memiliki pengalaman (*fress graduate*), fasilitator yang sudah cukup kemampuan sering dipindah tempat dengan berbagai alasan, misalnya ingin dekat dengan keluarga, untuk memperkuat tim di wilayah lain dan sebagainya. Selain itu juga ada beberapa fasilitator yang tidak *live in* dilokasi tugasnya, hal ini

berdampak pada intensitas pendampingan yang tidak maksimal dan tidak bisa membaur dengan masyarakat. Semua hal yang kami sampaikan ini berdampak pada proses pelaksanaan siklus P2KP sebagai proses pendidikan kritis di masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan P2KP di masyarakat yang dilaksanakan melalui siklus merupakan media untuk melibatkan masyarakat dan menjadi proses pembelajaran kritis bagi masyarakat menjadi tidak optimal, dimana tahapan kegiatan tersebut terdiri dari Sosial Mapping (Sosmap), Sosialisasi Awal, Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM), Refleksi Kemiskinan (RK), Pemetaan Swadaya (PS), Pembangunan BKM dan KSM, Penyusunan PJM Pronangkis, Pembelajaran Tridaya dan Pengawasan.

Tahapan melalui implementasi BLM tersebut mencerminkan tahapan dalam perencanaan sosial yang meliputi identifikasi masalah, penentuan tujuan, penyusunan dan pengembangan rencana program perencanaan, pelaksanaan program dan evaluasi program (Suharto, 2005 : 75-80). Lippit (Isbandi Rukminto Adi, 2001 : 179) juga mengemukakan pendapatnya bahwa tahapan pengembangan masyarakat meliputi persiapan, assesment, perencanaan alternatif program atau kegiatan, performulasian rencana aksi, pelaksanaan program atau kegiatan, evaluasi dan terminasi. Lebih lanjut Lippit menyampaikan jika tahapan tersebut merupakan tahapan siklikal (*ciclycal*) yang dapat berputar guna mencapai

perubahan yang lebih baik, terutama setelah dilakukan evaluasi proses terhadap pelaksanaan kegiatan yang ada.

Tahapan tersebut umumnya disebut sebagai daur program pembangunan partisipatif karena dalam pelaksanaannya melibatkan masyarakat secara luas. Keterlibatan tersebut semata-mata adalah untuk menumbuhkan pembangunan dari dalam (*development from within*) sehingga keberlanjutan (*sustainability*) program dapat terjamin karena masyarakat merasa ikut memiliki dan mengendalikan. Demikian halnya dengan siklus P2KP yang diharapkan bisa terejawantahkan dalam kehidupan dan pola pikir masyarakat. Terintegrasinya nilai-nilai pembangunan baru dalam pola pikir masyarakat akan mempengaruhi pranata pembangunan yang ada dalam masyarakat dan kemudian juga akan mempengaruhi tindakan-tindakan mereka dalam melaksanakan pembangunan tersebut. Akan tetapi, desain program yang menjadi panduan dalam pelaksanaan P2KP itu tidak di implementasikan secara konsisten oleh para pelaku program dilapangan, khususnya konsultan sebagai pendamping masyarakat. Dengan sendirinya, hal ini sangat mempengaruhi kualitas proses pelaksanaan P2KP di kelurahan Tegalrejo.

Dengan demikian, proses pelaksanaan P2KP belum sepenuhnya memenuhi harapan dari program dan masyarakat kelurahan Tegalrejo salah satunya disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan P2KP yang cenderung berorientasi hasil daripada proses itu sendiri. Implementasi siklus P2KP sebenarnya merupakan pengejawantahan daur pembangunan

partisipatif mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan, sehingga siklus tersebut saling terkait satu dengan yang lain. Artinya, efektifitas pencapaian salah satu siklus akan sangat berpengaruh terhadap siklus selanjutnya. Hal inilah yang kurang diperhatikan oleh pelaksana program terutama oleh konsultan pendamping. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa kualitas proses suatu program dipengaruhi oleh jenis dan kualitas input yang diberikan, termasuk komitmen para pelaku yang terlibat dalam proses tersebut.

3) Kesesuaian antara Pelaksanaan Kegiatan P2KP (*Factor Process*) dengan Hasil Pelaksanaan P2KP (*Factor Product*)

Seperti dikemukakan sebelumnya, pelaksanaan kegiatan siklus P2KP yang dilakukan melalui siklus P2KP pada dasarnya sudah mengejawantahkan daur pembangunan partisipatif. Daur tersebut meliputi identifikasi masalah (siklus RK dan PS), perencanaan (siklus pembentukan BKM, KSM dan penyusunan PJM), pelaksanaan (siklus pembelajaran BLM Tridaya) dan pengawasan (monev). Pelaksanaan siklus P2KP melibatkan secara optimal komponen masyarakat yang ada di kelurahan Tegalrejo dan untuk mendorong agar pembangunan dapat tumbuh dari dalam, maka yang mengawal atau memfasilitasi adalah masyarakat sendiri, dalam hal ini para relawan masyarakat yang direkrut pada tahap awal sosialisasi dan Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM)

belum berjalan optimal karena dipengaruhi oleh faktor *context* dan *input* yang kurang optimal.

Apabila dilihat dari partisipasinya, pelaksanaan kegiatan P2KP tersebut sudah cukup melibatkan masyarakat secara luas. Bentuk-bentuk partisipasinya pun sangat beragam, mulai dari menjadi relawan dan anggota BKM, menjadi anggota panitia/KSM, menjadi peserta dalam rembug atau pertemuan baik di tingkat basis maupun di tingkat kelurahan. Berbagai bentuk partisipasi tersebut seperti yang dikemukakan oleh Dusseldorf (Totok Mardikanto, 2003 : 88), bahwa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang lain dan menggerakkan sumber daya masyarakat seperti yang dilakukan oleh masyarakat kelurahan Tegalrejo, menjadi anggota-anggota kelompok, mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan hingga memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan.

Selain itu, sejak awal kegiatan P2KP pemerintah kelurahan Tegalrejo memberikan dukungan positif sehingga dapat berjalan lancar. Dalam hal ini, pemerintah kelurahan Tegalrejo memberikan ruang seluas-luasnya bagi terwujudnya partisipasi masyarakat dan memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengambil keputusan. Peran tersebut sejalan dengan pendapat Suparjan dan Hempri Suyatno (2003 : 50) yang menyampaikan bahwa proses pemberdayaan pada dasarnya tidak sekedar mengubah masyarakat dari objek menjadi subjek, akan tetapi di dalamnya juga menyiratkan perubahan dari sisi pemerintah itu sendiri.

Menurut Hetifah Sj. Soemarto (2003 : 1), di masa mendatang pemerintah diharapkan menjadi lebih demokratis, efisien dalam penggunaan sumber daya publik, efektif menjalankan fungsi pelayanan publik, lebih tanggap serta mampu menyusun kebijakan, program dan hukum yang dapat menjamin hak asasi dan keadilan sosial. Artinya, peran aparat pemerintah harus diarahkan sebagai alat pelayanan kepada masyarakat dibandingkan sebagai alat pelayanan kepada pemerintah.

Dalam hal akses pelayanan ekonomi (pinjaman bergulir), aturan yang ditetapkan oleh BKM Wijayakusuma juga belum mengakomodasi kebutuhan masyarakat, secara menyeluruh ada beberapa kendala bagi masyarakat yang sistem usahanya periodisasi atau musiman. Dalam hal ini aturan sistem angsuran yang ditetapkan adalah bulanan saja sehingga masyarakat yang pendapatannya tidak ditetapkan setiap bulan maka belum bisa mengakses dana pinjaman bergulir karena sistem tersebut tidak sesuai dengan siklus usaha mereka yang musiman. Kenyataannya, sebagian masyarakat di kelurahan Tegalrejo memiliki usaha dengan siklus usaha yang tidak bulanan dan selama ini lembaga-lembaga ekonomi yang ada juga tidak mengakomodasi kebutuhan mereka.

Keberadaan UPK untuk memiliki kapasitas dalam pendampingan KSM kurang diperhatikan, karena pengembangan kapasitas UPK lebih diarahkan pada aspek pembukuan saja. Tingkat pengembalian KSM di kelurahan Tegalrejo memang cukup baik yaitupada posisi 90%, tetapi hal ini lebih dikarenakan masyarakat kelurahan Tegalrejo yang masih

memiliki tanggung jawab dalam hal pinjaman. Sementara dalam kelompok itu sendiri belum terjadi proses pembelajaran yang mengarah pada peningkatan produktivitas dan menumbuhkan jiwa wirausaha di masyarakat yang rata-rata pengetahuan dan ketrampilannya masih rendah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan P2KP masih kurang optimal sehingga berdampak pada hasil capaian yang juga belum optimal. Jika dilihat dari jenjang partisipasi yang dikemukakan oleh Pretty (Allen, 2002: 28-29), maka partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P2KP di kelurahan Tegalrejo masih terletak pada jenjang ke-5 yaitu partisipasi fungsional, karena partisipasi tersebut masih dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan proyek oleh konsultan. Mereka berpartisipasi dengan melaksanakan siklus dan membentuk kelompok untuk tujuan-tujuan yang sudah ditentukan, dalam beberapa kegiatan masyarakat juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan tetapi setelah keputusan utama dibuat oleh konsultan.

Capaian penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan siklus P2KP sebagai proses pendidikan kritis dengan berbagai kekurangan dan kelebihan telah memberikan manfaat bagi masyarakat kelurahan Tegalrejo. Capaian hasil tersebut meliputi : keberadaan relawan masyarakat dan terbentuknya lembaga BKM yang telah mampu mewarnai dinamika masyarakat dalam menggerakkan roda pembangunan kelurahan Tegalrejo., tersusunya dokumen PJM Pronangkis, terjadinya peningkatan kemampuan masyarakat dalam identifikasi, perencanaan dan penyelesaian

masalah kemiskinan melalui pengembangan kapasitas masyarakat, terlaksananya penyelesaian sebagian permasalahan kemiskinan melalui kegiatan tridaya (Lingkungan, Sosial dan Ekonomi), terjadinya perubahan pola pikir dan perilaku sebagian masyarakat tentang cara pandang dan cara penyelesaian kemiskinan melalui kepedulian, gerakan bersama untuk berbuat baik dan murni.

4). Kesesuaian antara latar belakang dan kebutuhan masyarakat, jenis dan kualitas input, proses pelaksanaan kegiatan P2KP dan hasil capaian P2KP

Berbagai kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan P2KP di kelurahan Tegalrejo yang mengakibatkan tidak optimalnya capaian yang diharapkan sangat dipengaruhi oleh input. Input yang diberikan untuk menunjang pelaksanaan program antara lain pengembangan kapasitas, pendanaan (BLM) dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung lainnya. Menurut Suparjan dan Hempri Suyatno (2003:64), sebenarnya antara partisipasi masyarakat dengan kemampuannya untuk berkembang secara mandiri terdapat hubungan yang berkaitan satu sama lain.

Di satu sisi, kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri akan berpengaruh terhadap kemampuannya untuk berpartisipasi dan juga kemampuannya untuk meningkatkan taraf hidup. Sementara disisi lain, kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri

ditumbuhkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan di daerahnya.

Mengacu pada pendapat tersebut, setidaknya ada tiga unsur penting dalam masyarakat yang menentukan pelaksanaan dan keberlanjutan P2KP yaitu relawan, BKM dan KSM. Keberadaan relawan sangat menentukan pelaksanaan P2KP baik pada awal pelaksanaan program maupun untuk memelihara keberlanjutan program. Relawan inilah yang langsung mendampingi masyarakat dalam proses pembelajaran kritis melalui siklus P2KP sejak refleksi kemiskinan hingga pembentukan BKM. Setelah terbentuknya BKM, relawan juga diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program yang difasilitasi oleh BKM, dengan adanya relawan proses pertumbuhan organik akan terus berjalan.

Sedangkan keberadaan BKM termasuk unit-unit pelaksanaannya memegang peran utama dalam penyusunan program dan memberikan pelayanan TRIDAYA kepada masyarakat, khususnya warga miskin, BKM juga menjalankan fungsi pengorganisasian masyarakat sehingga upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah keberadaan KSM sebagai unsur penerima manfaat program yang mendukung keberlanjutan program. Keberadaan KSM diharapkan dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya *capital social* dimasyarakat.

Dengan demikian agar masyarakat memiliki kemampuan untuk berkembang secara mandiri maka diperlukan upaya untuk

mengembangkan kapasitas mereka. Pengembangan kapasitas yang optimal sangat menentukan efektifitas program. Dalam pelaksanaan P2KP, pengembangan kapasitas tersebut diantaranya dilakukan melalui pelatihan dan *coaching*.

Pelatihan diselenggarakan bagi relawan BKM beserta unit-unit pelaksanaanya, sedangkan *coaching* diperuntukkan bagi masyarakat khususnya yang terlibat dalam panitia pelaksana pada setiap tahap siklus P2KP. Namun, dalam implementasinya upaya pengembangan kapasitas tersebut hasilnya kurang efektif. Hal ini ditunjukkan dengan masih terbatasnya kemampuan relawan dalam memfasilitasi kegiatan P2KP, keberadaan relawan yang semakin berkurang dan UPK yang tidak memiliki kemampuan untuk mendampingi KSM, padahal pendamping ini sangat penting bagi keberlanjutan KSM dan kegiatan P2KP itu sendiri.

Beberapa kelemahan yang membuat upaya pengembangan kapasitas melalui pelatihan dan *coaching* tersebut kurang efektif antara lain :

- Materi pelatihan yang disampaikan lebih banyak bersifat teoritis dan bahasanya sulit dipahami oleh masyarakat;
- Terbatasnya materi tentang teknik-teknik perencanaan partisipatif yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam pelaksanaan siklus P2KP;
- Semua materi disampaikan dalam waktu yang sama padahal seharusnya disampaikan secara bertahap dimulai dari materi yang

mudah hingga materi yang sulit dan di sesuaikan dengan kemampuan peserta;

- Para peserta adalah warga masyarakat yang sehari-harinya bekerja sehingga waktu luang yang mereka miliki sangat terbatas, akibatnya materi tidak dapat disampaikan secara maksimal sesuai dengan alokasi waktu yang tercantum dalam TOR. Sebenarnya materi dapat disampaikan sedikit demi sedikit, tapi strategi ini sulit diterapkan karena keterbatasan waktu dan dana yang diberikan oleh project/program.
- Pelatihan maupun pendampingan UPK hanya difokuskan pada aspek administrasi dan pembukuan saja sementara materi pendampingan kelompok hanya sedikit diberikan pada awal pelatihan. Pemateri kurang menguasai materi dan kurang mampu membangun suasana dan dinamika yang nyaman didalam kelas.

Kurang optimalnya pelatihan dan coaching tersebut disebabkan rancangan dan pelaksanaanya yang tidak mengacu pada kebutuhan masyarakat dalam memecahkan masalah. Padahal menurut Hickerson (1975:4), pelatihan adalah pembelajaran yang dirancang untuk mengubah kinerja seseorang dalam melakukan pekerjaan. Dengan demikian, tujuan pelatihan adalah untuk mengatasi kesenjangan antara kinerja yang diharapkan dengan kinerja yang ada.

Dari pengertian tersebut, jelas sekali bahwa pelatihan bukan sekedar memindahkan pengetahuan atau ketrampilan tertentu tetapi pelatihan harus

dapat merubah perilaku dan meningkatkan kinerja seseorang dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Hal inilah yang tidak diterapkan pada pelatihan dan *coaching* P2KP.

Selain itu, materi, waktu, dan frekwensi pelatihan dalam P2KP sudah ditentukan oleh konsultan saja sehingga masyarakat tinggal mengikuti dan menerima saja. Mekanisme tersebut tidak sejalan dengan pendapat Hickerson (1975: 12) yang menyatakan bahwa ada enam fase dalam pelatihan yaitu analisis jabatan, pengambilan keputusan, menetapkan tujuan pelatihan mendisain pelatihan, pelaksanaan, serta dukungan dan evaluasi sumatif. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Suparjan dan Suyatno Hemri (2003: 87-88) yang menyebutkan langkah-langkah pelatihan bagi masyarakat meliputi beberapa rangkaian, yaitu: 1. perencanaan kelembagaan; 2. peluang-peluang ekonomi dan identifikasi kebutuhan pelatihan; 3. persiapan pelatihan dan pengorganisasian; 4. pemberian pelatihan; 5. bantuan pasca pelatihan; dan 6. pemantauan dan evaluasi.

Input lainnya dalam pelaksanaan P2KP adalah pendanaan atau bantuan langsung masyarakat (BLM). Pada dasarnya, besar kecilnya nilai dana BLM tidak memiliki pengaruh terhadap proses pelaksanaan program karena dana tersebut hanya bersifat stimulan, hal yang lebih penting adalah kemanfaatan dana tersebut dan mekanisme penyalurannya. Jumlah BLM P2KP di kelurahan Tegalrejo cukup besar bila dibandingkan dengan bantuan-bantuan sebelumnya dan secara umum pemanfaatannya dapat membantu masyarakat untuk mewujudkan rencana kegiatan mereka. Mekanisme

pencairan dana yang langsung ditransfer ke rekening BKM mengurangi peluang terjadinya kebocoran dana ditingkat birokrasi maupun instansi lain yang terlibat, seperti yang terjadi pada program-program sebelumnya.

Menurut Rendy R. Wrihatnolo (2006:6-7) mekanisme transfer langsung ke rekening kolektif milik kelompok masyarakat merupakan pilihan yang sampai sejauh ini dianggap paling baik dan mempermudah akses warga masyarakat kepada sumber pendanaan untuk penanggulangan kemiskinan. Akan tetapi, adanya ketentuan penggunaan dana BLM P2KP yang menyebutkan bahwa pemanfaatan untuk masing-masing aspek TRIDAYA untuk ekonomi dan sosial 20% dan untuk ekonomi bergulir sebesar 80% menunjukkan bahwa masyarakat belum memiliki kebebasan untuk menentukan alokasi dana sesuai dengan kebutuhan mereka. Ketentuan sifat penggunaan dana juga membatasi kreatifitas masyarakat dalam merumuskan kegiatan yang mengacu pada kebutuhan mereka.

Jenis input lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan P2KP adalah penyediaan sarana dan prasarana kegiatan. Dalam hal ini, selain fasilitas kegiatan pemerintah kelurahan Tegalorejo juga memberikan dukungan sarana kegiatan P2KP berupa tempat pertemuan namun karena gedung bale kelurahan yang kecil dan sempit maka fasilitasi untuk sekretariat BKM tidak bisa di sediakan sehingga untuk sementara ini sekretariat BKM bertempat di satu ruang rumah warga yang disewa dengan ukuran 4m x 5m . Dengan adanya sekretariat ini, BKM dapat menjalankan fungsi pelayanan bagi masyarakat.

Selain dari pemerintah Kelurahan, konsultan juga memberikan prasarana penunjang seperti media sosialisasi, buku-buku *Standard Operating Procedure* (SOP) kegiatan persiklus, media Bantu (format-format tertulis) dan aturan-aturan pembukuan. Berbagai prasarana tersebut secara umum memudahkan pelaksanaan dilapangan. Akan tetapi juga terdapat beberapa kelemahan seperti, bentuk media bantu atau format-format tertulis, aturan-aturan pembukuan yang sulit dipahami masyarakat, media sosialisasi dan buku SOP yang sering datang terlambat sehingga tidak sesuai dengan ketepatan waktu kebutuhan pemecahan masalah. Berubah-ubahnya aturan di P2KP, yang juga berakibat pada kelancaran proses pembelajaran dimasyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian *input* dalam pelaksanaan siklus P2KP strategi dan mekanismenya (terutama pada pelatihan dan *coaching* serta sarana dan prasarana kegiatan) tidak mengacu pada pemenuhan pemecahan masalah oleh masyarakat. Ketidaksesuaian *input* tersebut menyebabkan kurang optimalnya pengembangan kapasitas masyarakat sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan capaian pelaksanaan P2KP itu sendiri.

Hubungan antara *Factor Context, Input dan Product* terhadap *Process* Pelaksanaan Siklus P2KP di kelurahan Tegalrejo kecamatan Argomulyo kota Salatiga dapat pahami lebih singkat melalui Tabel 4.25 berikut ini :

Tabel : 4.25
Matrik Hubungan *Factor Context, Input dan Product* terhadap
***Process* Pelaksanaan Siklus P2KP**
Di Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga

No	ASPEK	PROCESS PELAKSANAAN SIKLUS P2KP
1	<i>Context</i>	
	a. Karakteristik Geografis	<ul style="list-style-type: none"> • Aktifitas masyarakat sebagai petani tanah kering (tegalan) tidak bisa digunakan sebagai media untuk proses pembelajaran siklus P2KP karena tidak menajikan dan banyak ditinggalkan oleh masyarakat. • Sebagian besar penduduk kelurahan Tegalrejo terdiri dari pensiunan, PNS dan buruh pabrik yang sibuk dalam bekerja, sudah terbiasa merasakan kenyamanan dalam menjalani hidupnya berdampak pada kurang berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan siklus P2KP.
	b. Sejarah Kelurahan Tegalrejo	<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Tegalrejo didirikan oleh seorang kyai sekaligus sebagai prajurit kerajaan Kartosuro yang bernama Kyai Shufi, melihat dari ketokohnya memberikan semangat dan motivasi yang positif serta tidak mudah menyerah pada keadaan, hal ini ditunjukan oleh sebagian masyarakat yang terus bertahan dan mengolah tanah pertanian di kelurahan Tegalrejo walaupun angkatan muda banyak yang mulai meninggalkan.
	c. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Aktifitas masyarakat sebagai buruh, pedagang dan pelaku industri rumah tangga sebagai alternatif kegiatan ekonomi dan sekaligus sebagai media hubungan sosial masyarakat menjadi memudahkan pelaksanaan siklus P2KP.
	d. Kondisi Sosial Budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Ikatan sosial yang terpelihara melalui kelompok arisan, pertemuan RT/RW, hajatan, gotong royong, dan kegiatan keagamaan merupakan nilai positif yang mendukung kualitas pelaksanaan siklus P2KP • Sebagian masyarakat sudah mulai muncul sifat individualisme yang berdampak negative terhadap kualitas pelaksanaan siklus

No	ASPEK	PROCESS PELAKSANAAN SIKLUS P2KP
		P2KP.
	e. Potensi dan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Walaupun kelurahan Tegalrejo tidak berada di pusat kota Salatiga tetapi jaringan jalan dan jembatan sudah cukup baik sampai ke perkampungan yang paling jauh, hal ini cukup mendukung dan mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan siklus P2KP. • Sarana dan prasarana lain seperti pendidikan dan kesehatan sudah baik dan cukup memberikan fasilitas pelayanannya kepada masyarakat, secara tidak langsung hal ini memberikan kenyamanan dan ketentraman hidup yang mendorong pada rasa ikut memiliki terhadap lingkungannya.
2	Input	
	a. Pengembangan Kapasitas Masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Dari sisi penyediaan sarana prasarana seperti : pendamping, buku panduan, dan biaya pelatihan sudah dipersiapkan dengan baik, namun pemandu/ pendamping yang kurang memiliki kapasitas, buku panduan yang dikirim tidak tepat waktu, biaya pelatihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan pelatihan/ pengembangan kapasitas.
	b. Dana BLM P2KP	<ul style="list-style-type: none"> • Dana BLM yang disediakan sebagai alat belajar dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan dipahami sebagai tujuan akhir dari pelaksanaan siklus P2KP. • Dana BLM yang seharusnya menjadi alat untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang didalamnya mengandung makna pembelajaran (demokrasi, partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan desentralisasi, kejujuran, keadilan, keikhlasan, kepedulian) untuk menuju kemandirian tidak berjalan dengan baik.
	c. Pendamping Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Pendamping masyarakat sangat berarti terhadap keberhasilan proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan siklus P2KP. • Keberadaan pendamping masyarakat/ fasilitator yang belum memiliki pengalaman

No	ASPEK	PROCESS PELAKSANAAN SIKLUS P2KP
		(fress graduate), roling tempat penugasan, fasilitator yang tidak tinggal ditempat tugas berdampak pada intensitas dan kualitas pendampingan pelaksanaan siklus P2KP yang tidak maksimal.
	d. Sarana dan Prasarana yang Mendukung Pelaksanaan Program.	<ul style="list-style-type: none"> • Buku pedoman, modul pelatihan, Standart Operasional Prosedur (SOP) tidak disampaikan tepat waktu dan kurang memperhatikan pada pemenuhan pemecahan masalah dimasyarakat.
3	Product	
	Terbangunnya Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan (BKM Wijayakusuma).	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga BKM Wijayakusuma beserta dengan unit pengelola (UPL, UPS, UPK) dan relawan yang masih dipercaya oleh masyarakat kelurahan Tegalrejo dan masih eksis menjalankan tugas fungsinya sampai saat ini, karena dukungan input dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan siklus P2KP.
	Terususunya <i>database</i> kemiskinan kelurahan Tegalrejo.	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Database</i> kemiskinan dihasilkan melalui rangkaian kajian mendalam bersama masyarakat termasuk warga miskin secara partisipatif. • Data-data yang didapatkan adalah : data potensi dan masalah Sosial, Ekonomi dan Lingkungan (SEL), data warga miskin lengkap dengan permasalahan yang dihadapi, serta data-data harapan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas hidupnya.
	Terusunnya Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) kelurahan Tegalrejo.	<ul style="list-style-type: none"> • Alternatif gagasan dan kegiatan untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan yang dihadapi dirumuskan dalam kegiatan-kegiatan dan program yang dituangkan dalam dokumen Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) selama periode 3 tahun. • Dokumen PJM Pronangkis yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat kelurahan Tegalrejo karena disusun bersama masyarakat secara partisipatif, melalui proses pemberdayaan masyarakat.

No	ASPEK	PROCESS PELAKSANAAN SIKLUS P2KP
<i>Outcome</i>		
1	Dari produk utama yang dihasilkan berupa lembaga penanggulangan kemiskinan atau BKM, database kemiskinan, dan dokumen PJM Pronangkis sebagai modal awal untuk melakukan upaya penanggulangan kemiskinan secara perlahan mendapatkan tempat dihati masyarakat kelurahan Tegalrejo. Kemitraan dengan beberapa pihak memberikan bukti sebagai dampak dari perjuangan BKM Wijayakusuma yang didukung oleh masyarakat kelurahan tegalrejo.	
2	Keterlibatan dan keberanian masyarakat terutama masyarakat miskin untuk ikut berpendapat dalam pengambilan keputusan penting di tingkat kelurahan berlangsung secara konstruktif.	
3	Perencanaan partisipatif dipahami secara mendasar oleh sebagian masyarakat kelurahan Tegalrejo sebagai proses belajar bagi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan partisipatif.	
4	Implementasi transparansi dan akuntabilitas mulai menular diterapkan pada kelompok masyarakat lain diluar BKM dan KSM.	

Sumber : Hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti di kelurahan Tegalrejo.

3. Kekuatan dan kelemahan pelaksanaan siklus P2KP sebagai proses pendidikan kritis di kelurahan Tegalrejo

Berdasarkan pembahasan kesesuaian antar faktor yang telah peneliti sampaikan di atas, maka kekuatan dan kelemahan pelaksanaan siklus P2KP sebagai proses pendidikan kritis di kelurahan Tegalrejo kecamatan Argomulyo kota Salatiga dapat diidentifikasi dalam matriks berikut ini:

Table : 4.26

**Matriks Kekuatan dan Kelemahan Pelaksanan Siklus P2KP
di Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga
Meliputi ; *Factor Context, Input, Process dan Product***

Kekuatan dan kelemahan Faktor evaluasi	Kekuatan	Kelemahan
Latar belakang dan kebutuhan masyarakat (<i>context</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Potensi lahan pertanian berupa tanah tegalan yang luas. • Dukungan pemerintah Kelurahan terhadap pelaksanaan program. • Keberadaan lembaga BKM yang cukup eksis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan lahan tidak optimal karena terbatasnya pengetahuan dan kemampuan pertanian maupun produksi lain. • Ikatan sosial masyarakat secara umum masih terpelihara dengan baik namun perkembangan kota berdampak pada sifat individualisme dimasyarakat yang akan merusak ikatan sosial. • Image kelurahan yang banyak pensiunan memberikan kesan santai dan kurang semangat bagi warga yang non pensiunan.
Jenis dan kualitas input dalam pelaksanaan P2KP (<i>input</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pelatihan bagi relawan, BKM, UP-UP dan coaching setiap siklus atau tahapan siklus P2KP. • Pendanaan BLM senilai Rp. 100 juta untuk mendukung pembelajaran BLM Tridaya. • Adanya sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan P2KP seperti buku petunjuk teknis, buku-buku administrasi dan keuangan sekretaris / UP 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan tidak dilaksanakan sesuai dengan alokasi waktu, materi lebih banyak tentang konsep dan filosofi P2KP sedangkan materi ketrampilan fasilitasi dan teknik-teknik partisipasi sangat kurang. • Pemandu/ fasilitator kurang menguasai materi dan kurang bisa menyampaikan materi dengan baik. • Buku-buku petunjuk teknik, format-format administrasi yang sulit dipahami dan sering turun terlambat, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam memecahkan masalah.
Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan P2KP 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan siklus P2KP

Kekuatan dan kelemahan Faktor evaluasi	Kekuatan	Kelemahan
kegiatan P2KP (<i>process</i>)	<p>didukung oleh struktur organisasi pelaksana yang melibatkan peran pemerintah, konsultan dan masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bentuk kegiatan siklus P2KP sebagai proses pembelajaran kritis, mencerminkan daur program pembangunan partisipatif memberikan ruang belajar bagi masyarakat dengan cara berpartisipasi • Partisipasi masyarakat meliputi beberapa bentuk antara lain sebagai relawan dan BKM, menjadi anggota KSM /panitia, terlibat dalam proses pengambilan keputusan, hingga memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan. 	<p>sebagai proses pembelajaran kritis yang harus dijalankan terus-menerus dan melembaga di masyarakat dengan harapan perubahan perilaku terjadi dan akan membawa perubahan kesejahteraan masyarakat belum dipahami secara optimal (<i>difusi inovasi</i>) tidak berjalan lancar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak dilakukan need assessment dengan baik dalam persiapan program, peningkatan kemampuan relawan yang tidak optimal dalam memfasilitasi siklus sehingga tidak dapat melakukan kajian secara mendalam (hanya difokuskan pada kebutuhan data sesuai format yang disediakan) • Partisipasi masyarakat masih pada tataran fungsional. Artinya partisipasi sebagai alat untuk mencapai tujuan proyek oleh konsultan atau dapat dikatakan partisipasi masih bersifat mobilisasi.
Capaian pelaksanaan P2KP (<i>product</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Munculnya relawan masyarakat yang memfasilitasi proses pelaksanaan siklus P2KP dalam penyelesaian permasalahan kemiskinan. • Tersedianya data-data dan informasi profil kelurahan yang cukup lengkap. • Terbentuknya lembaga 	<ul style="list-style-type: none"> • Relawan banyak yang mundur dan tidak aktif karena merasa jenuh dan terjadi dismotivasi. • Data dan profil kelurahan tidak dimanfaatkan secara optimal dan tidak dipelihara dengan baik sehingga tidak memberikan manfaat yang maksimal. • Dokumen PJM Pronangkis yang dihasilkan lebih berorientasi pada anggaran (BLM P2KP) daripada sebagai

Kekuatan dan kelemahan Faktor evaluasi	Kekuatan	Kelemahan
	<p>yaitu : BKM "Wijayakusuma" yang mampu menjadi motor penggerak penanggulangan kemiskinan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya dokumen PJM Pronangkis sebagai acuan dan pedoman bagi semua pihak dalam melakukan upaya penanggulangan kemiskinan di kelurahan Tegalrejo. • Mulai terjadi perubahan perilaku di masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan. 	<p>perencanaan strategis penanggulangan kemiskinan</p> <ul style="list-style-type: none"> • BKM belum bisa menjadi motor penggerak pemberdayaan yang maksimal di tataran akar rumput karena masih belum mendapat dukungan yang optimal dari semua komponen masyarakat. • KSM yang dibentuk secara instant cenderung berorientasi pada akses BLM sehingga ikatannya rapuh dan mudah bubar. • UPL / UPS / UPK belum dapat melakukan pendampingan KSM (memfasilitasi penyusunan usulan kegiatan dan manajemen usaha)

Sumber : Hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti di kelurahan Tegalrejo.

4. Keterbatasan penelitian

Pada hasil penelitian dan analisis data tersebut diatas tentunya masih terdapat kekurangan-kekurangan akibat keterbatasan penelitian sehingga perlu disempurnakan dan dikembangkan dalam penelitian yang lebih lanjut. Beberapa keterbatasan dalam penulisan ini antara lain:

1. Pelaksanaan siklus P2KP sebagai proses pendidikan kritis yang digambarkan bertumpu pada implementasi siklus P2KP yang terjadi sebelum dan pada saat penelitian berlangsung dan tidak menggunakan

laporan resmi P2KP sebagai pembanding karena terbatasnya ketersediaan data sekunder tentang laporan tersebut.

2. Penelitian ini merupakan studi kasus tunggal, dengan demikian penjelasannya hanya berlaku dalam konteks waktu, tempat dan pelaku-pelaku tertentu saja. Ada baiknya pada penelitian mendatang menggunakan bentuk kasus ganda sehingga dapat lebih menggambarkan keberagaman konteks pemberdayaan masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga telah mewarnai dinamika pembangunan khususnya dalam penanggulangan kemiskinan di kelurahan menjadi lebih realistis sesuai dengan masalah dan potensi yang memiliki karakteristik berupa pertanian lahan kering dan masyarakat perkotaan. Sebagai wilayah perkotaan, kelurahan Tegalrejo masih bergelut dengan berbagai permasalahan seperti lingkungan yang tidak tertata rapi, lapangan pekerjaan yang masih terbatas, penanganan hasil produksi rumah tangga sampai ke pemasaran yang belum optimal. Terbatasnya ketrampilan, terbatasnya pengusaha kecil terhadap akses kredit dan belum optimalnya fungsi kelembagaan ekonomi dan sosial yang ada di kelurahan. Yang tidak kalah penting adalah pola pikir terhadap hak-hak dan tanggungjawabnya dalam proses pembangunan. Disisi lain individualisme yang merupakan ciri masyarakat perkotaan sudah mulai menguat yang pada akhirnya memberikan andil terhadap kualitas partisipasi dalam proses pendidikan kritis.
2. Masukan/ *input* dalam pelaksanaan siklus P2KP, baik strategi dan mekanismenya. Pengembangan kapasitas yang berupa pelatihan dan *coaching* tidak konsisten dijalankan sesuai dengan yang seharusnya/ sesuai

(SOP), ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan seperti buku pedoman, modul pelatihan, SOP tidak disampaikan tepat waktu dan kurang mengacu pada pemenuhan pemecahan masalah di masyarakat. Keberadaan pendamping/ fasilitator yang belum/tidak memiliki kapasitas yang cukup, roling tempat tugas, dan kurang fokusnya pendampingan pemberdayaan masyarakat oleh fasilitator berdampak pada proses dan hasil pelaksanaan P2KP. Sementara BLM yang disediakan sebagai alat belajar untuk menuju kemandirian masyarakat justru dipahami sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan kritis yang memerlukan proses *difusi inovasi* yang berkelanjutan.

3. Dalam implementasi, P2KP tidak langsung menjawab masalah dan kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat, karena P2KP lebih menekankan pada kemandirian masyarakat agar dapat mengatasi sendiri masalah yang mereka hadapi. Proses tersebut dibangun melalui pengembangan kesadaran masyarakat tentang diri dan lingkungannya (kesadaran kritis) menuju peningkatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan dalam rangkaian siklus P2KP yang mencerminkan proses pendidikan kritis di masyarakat dalam daur pembangunan partisipatif. Siklus P2KP terdiri dari: refleksi kemiskinan, pemetaan swadaya, pembangunan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), penyusunan perencanaan jangka menengah program penanggulangan kemiskinan (PJM Pronangkis), dan pemanfaatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk melakukan kegiatan tridaya secara berkelanjutan. Rangkaian

kegiatan pembelajaran kritis dalam siklus P2KP belum dipahami sepenuhnya oleh sebagian besar masyarakat baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung sebagai proses penyadaran dan perubahan perilaku. Semua proses pelaksanaan siklus yang penuh dengan makna pembelajaran dan penyadaran dilewati begitu saja tanpa bekas, terkesan menggururkan kewajiban sebagai syarat menuju rangkaian kegiatan selanjutnya sampai pada pencairan BLM yang dipahami sebagai tujuan akhir kegiatan. Disisi lain proses *adopsi inovasi* sudah berjalan cukup baik kepada sebagian masyarakat terutama mereka yang terlibat langsung dalam program, namun proses *difusi inovasi* berjalan sangat lambat bahkan bisa dikatakan *stagnan*.

4. Capaian penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan siklus P2KP sebagai proses pendidikan kritis dengan berbagai dinamikanya telah memberikan manfaat bagi masyarakat kelurahan Tegalrejo. Capaian hasil tersebut meliputi : keberadaan relawan masyarakat, tersusunya dokumen PJM Pronangkis, terjadinya peningkatan kemampuan masyarakat dalam identifikasi, perencanaan dan penyelesaian masalah kemiskinan melalui pengembangan kapasitas masyarakat, terlaksananya sebagian permasalahan kemiskinan (kegiatan tridaya), terjadinya perubahan pola pikir dan perilaku sebagian masyarakat tentang cara pandang dan cara penyelesaian kemiskinan melalui kepedulian, gerakan bersama untuk berbuat baik dan murni. Namun demikian, capaian program pelaksanaan P2KP belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat Kelurahan

Tegalrejo. Beberapa kekurangan dalam capaian pelaksanaan P2KP tersebut antara lain: (a) Kegiatan Siklus P2KP masih dilaksanakan sebagai proses yang berorientasi pada BLM dan belum dilakukan secara sadar sebagai kebutuhan dalam proses perencanaan pembangunan, (b) perencanaan yang tersusun dalam PJM Pronangkis masih berorientasi pada anggaran dari pada perencanaan strategis dalam penanggulangan kemiskinan, (c) meskipun akses tridaya telah terbuka tetapi dalam kegiatan pembelajaran ekonomi, Masyarakat belum semua bisa menjangkau pelayanan kredit UPK-BKM karena terbatasnya dana yang dikelola, dan (d) pendekatan kelompok tidak berkembang dengan baik karena KSM dibentuk secara instant sehingga ikatan pemersatu rapuh dan mudah terciptanya konflik yang serius, UPK-BKM belum dapat melakukan pendampingan secara optimal kepada KSM.

5. Pelaksanaan P2KP di kelurahan Tegalrejo telah memenuhi faktor *context*, *input*, *process* dan *product*, karena keempat faktor tersebut merupakan komponen program yang saling mempengaruhi dan saling menentukan dalam pelaksanaan P2KP. Kualitas pelaksanaan siklus P2KP ini tidak terlepas dari latar belakang dan kebutuhan masyarakat (*faktor context*) yaitu sejarah kelurahan Tegalrejo karakteristik geografis dan sosial budaya, eksistensi lembaga dan pengalaman kegagalan program masa lalu. Kualitas pelaksanaan siklus P2KP juga dipengaruhi oleh kualitas jenis dan input (*faktor input*) yaitu pengembangan kapasitas pelaku, pendamping/fasilitator, dana BLM, dan sarana prasarana pendukung

lainnya. Hasil pelaksanaan siklus P2KP akan sangat dipengaruhi oleh kualitas pelaksanaan siklus P2KP itu sendiri yang merupakan pengejawantahan dari daur program pembangunan partisipatif. Dari analisa keterkaitan antar factor ini memudahkan bagi peneliti dalam mencermati kekuatan dan kelemahan dari masing-masing factor sebagai proses evaluasi sehingga dapat segera diambil tindakan untuk memperbaikinya.

6. Dengan berbagai dinamikanya program ini belum menjawab masalah dan kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat kelurahan Tegalrejo, karena P2KP lebih menekankan pada kemandirian masyarakat agar dapat mengatasi sendiri masalah yang mereka hadapi. Seharusnya proses tersebut dibangun melalui penyadaran masyarakat tentang diri dan lingkungannya (kesadaran kritis) menuju peningkatan kapasitas dan pengembangan kelembagaan dalam rangkaian siklus P2KP, namun hal ini tidak atau belum berjalan maksimal karena kekuatan mendukung berjalannya kegiatan dengan baik maupun kelemahan yang berupa kendala dan hambatan yang dihadapi mulai dari *factor context, input, procces, dan product*.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

- a) Belum optimalnya capaian pelaksanaan siklus P2KP sebagai proses pembelajaran kritis masyarakat salah satunya disebabkan oleh

commit to user

persiapan program yang kurang matang karena need assessment yang dilaksanakan belum optimal, hal ini terjadi karena jumlah SDM dengan wilayah dampingan serta kerangka waktu yang tidak seimbang sehingga dalam menentukan jenis program yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat masih belum tepat. Dengan demikian secara teoritis dalam konsep P2KP perlu ditingkatkan kualitas need assessment dalam persiapan program. Pentingnya persiapan program ini sejalan dengan pendapat Lippit (Rukminto Adi, 2001: 179) mengenai tahapan untuk menumbuhkan kemandirian masyarakat yang meliputi persiapan, *assessment*, pencapaian alternatif program atau kegiatan, penformulasian rencana aksi, pelaksanaan program atau kegiatan, evaluasi atau terminasi. Dengan adanya need assessment yang berkualitas dalam persiapan program maka agen perubahan dapat memahami karakteristik dan kebutuhan masyarakat secara utuh. Proses ini harus melibatkan aparat pemerintah desa/kelurahan, komunitas lokal sehingga program tersebut mampu memperoleh legitimasi kelompok sasaran.

- b) Konsep P2KP menitikberatkan pada proses pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan kapasitas dan pengembangan kelembagaan masyarakat. Salah satu upaya untuk mengembangkan kapasitas dalam P2KP dilakukan melalui pelatihan, *coaching* dan pelaksanaan siklus sebagai proses penyadaran/pembelajaran kritis masyarakat. Namun dalam implementasinya upaya tersebut belum berjalan efektif karena

tidak mengacu pada kebutuhan masyarakat dalam memecahkan masalah. Menurut Hickerson (1975:4) pelatihan adalah pembelajaran yang dirancang untuk mengubah kinerja seseorang dalam melakukan pekerjaan. Oleh karena itu dia menyatakan bahwa ada enam fase yang harus dilakukan dalam pelatihan yaitu analisis jabatan, pengambilan keputusan, menetapkan tujuan pelatihan, mendisain pelatihan, pelaksanaan serta dukungan dan evaluasi sumatif. Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh Suparjan dan Hemri (2003: 87-88) yang menyebutkan langkah-langkah pelatihan bagi masyarakat meliputi beberapa rangkaian yaitu: (1) perencanaan kelembagaan, (2) peluang-peluang ekonomi dan identifikasi kebutuhan pelatihan, (3) persiapan pelatihan dan pengorganisasian, (4) pemberian pelatihan, (5) bantuan pasca pelatihan, dan (6) pemantauan dan evaluasi. Oleh karena itu secara teoritis langkah-langkah tersebut relevan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan .

- c) Salah satu langkah intervensi dalam pemberdayaan masyarakat adalah pendekatan pembangunan bertumpu pada kelompok. Dalam konsepnya P2KP juga menggunakan pendekatan kelompok. Pendekatan ini diyakini menjadi sarana yang cukup efektif untuk mempercepat pengembangan dan penguatan kapasitas masyarakat daripada pendekatan individual. Namun demikian proses pembangunan KSM dalam pelaksanaan yang cenderung diarahkan hanya untuk mengakses BLM, membuat ikatan dalam kelompok rapuh sehingga tidak terjadi

proses saling belajar di KSM. Bambang Ismawan dalam Hagul (1985 :10) mengemukakan bahwa upaya pengembangan potensi perlu dilakukan dalam wadah KSM yang hidup sedemikian rupa sehingga interaksi diantara individu merupakan proses saling *asah, asih, asuh*. Dengan demikian pendekatan kelompok dalam P2KP perlu didukung dengan penguatan tentang pendampingan kelompok sehingga pendekatan kelompok tidak dimaknai sebagai kegiatan membentuk KSM tetapi juga memelihara dan mengembangkan kapasitas KSM.

2. Implikasi Praktis

- a) Tidak dilakukannya need assessment secara baik sehingga persiapan program oleh konsultan pendamping menyebabkan rendahnya pemahaman mereka tentang *context* masyarakat secara utuh. Hal ini berimplikasi pada kemampuan mereka dalam memfasilitasi relawan dan masyarakat kurang optimal, terutama ketika melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat.
- b) Tahapan siklus P2KP dilakukan dalam kerangka waktu yang relatif singkat berimplikasi terhadap kurangnya pemahaman masyarakat terhadap siklus P2KP sebagai proses pembelajaran kritis (penyadaran dan perubahan perilaku) di masyarakat yang harus dilakukan terus-menerus dalam proses *aksi-refleksi-aksi*.
- c) Pelatihan dan *coaching* yang tidak dilaksanakan sesuai jadwal dan kebutuhan masyarakat untuk memecahkan masalah juga berimplikasi pada terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan relawan dalam

menerapkan teknik-teknik perencanaan partisipatif, untuk memandu masyarakat mengidentifikasi masalah, potensi dan kebutuhan melalui siklus refleksi kemiskinan dan pemetaan swadaya sehingga hasilnya kurang optimal.

- d) Tidak optimalnya hasil refleksi kemiskinan dan pemetaan swadaya berimplikasi pada perencanaan program yang disusun oleh BKM dan masyarakat dalam PJM Pronangkis tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
- e) Proses pembangunan KSM yang dilakukan secara *instant* dan cenderung diarahkan untuk membentuk KSM baru, berimplikasi terhadap tidak berfungsinya KSM sebagai wahana belajar masyarakat, ikatan pemersatu dalam KSM yang kurang kokoh sehingga KSM dimaknai sebagai syarat untuk pencairan BLM saja.
- f) Pelatihan dan *coaching* untuk UPK yang hanya ditekankan pada aspek administrasi dan pembukuan berimplikasi pada rendahnya kemampuan UPK dalam mendampingi dan memotivasi KSM, sehingga perkembangan dan aktivitas KSM tidak terpantau dan terkawal dengan baik termasuk efektivitas pemanfaatan dana berbeda dengan proposal yang dibuat.
- g) Mekanisme monitoring dan evaluasi cenderung dilakukan untuk memenuhi kebutuhan informasi data bagi pihak luar (konsultan, pemma dan lainnya) bukan untuk kepentingan masyarakat, berimplikasi pada tidak diketahuinya kelemahan-kelemahan program oleh pelaku

utamanya yaitu masyarakat kelurahan Tegalrejo sehingga tidak bisa segera dilakukan upaya-upaya perbaikan, hal ini tentu saja bertentangan dengan tujuan monitoring dan evaluasi itu sendiri.

C. Rekomendasi

Berdasarkan pokok-pokok temuan dan implikasi pelaksanaan yang menunjukkan adanya kekuatan dan kelemahan pelaksanaan P2KP di kelurahan Tegalrejo, kecamatan Argomulyo, kota Salatiga, maka peneliti mengembangkan rekomendasi bagi perancang program sebagai berikut:

- a) Rancangan program harus memperhatikan factor-faktor *context*, *input*, *process* dan *product*, karena keempat factor tersebut merupakan komponen program yang saling mempengaruhi dan saling menentukan dalam pelaksanaan suatu program. Pendekatan yang hanya berorientasi pada salah satu factor saja akan menyebabkan proses pelaksanaan berjalan tidak seimbang dan tidak mengarah pada pencapaian tujuan. Rancangan-rancangan program yang menggunakan kerangka pikir CIPP juga akan memudahkan dalam melakukan evaluasi sehingga dapat segera diambil tindakan untuk memperbaikinya.
- b) Memahami *context* sasaran program secara utuh yang antara lain meliputi : karakteristik geografis, kondisi sosial budaya, potensi sarana dan prasarana wilayah yang kesemuanya itu akan mempengaruhi kebutuhan masyarakat. Pemahaman ini dapat dilakukan melalui proses *need assessment* yang baik dan tidak kehilangan tujuan utamanya sebagai persiapan program.

Dengan demikian fasilitator/ agen perubahan akan mudah dalam memfasilitasi masyarakat pada saat proses identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang tepat akan berpengaruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan program yang mengacu pada kebutuhan masyarakat.

- c) Hal yang harus diingat oleh perancang program adalah bahwa *input* tidak ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara langsung, namun *input* yang diberikan untuk mengembangkan kapasitas agar mereka mampu menyelesaikan masalah dan kebutuhan mereka secara mandiri. *Input* yang tepat dan sesuai dengan latar belakang dan kebutuhan masyarakat akan berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan program sehingga menghasilkan *product* yang mengarah pada pencapaian tujuan program. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian *input* adalah:

- Melakukan *need assessment* dengan baik tanpa harus dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang pada akhirnya *need assessment* tidak mampu menggali data secara riil, untuk menentukan materi-materi pelatihan dan coaching yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- Melaksanakan pelatihan dan coaching sesuai alokasi waktu, agar materi bisa dipahami secara utuh oleh peserta.
- Pelatihan UPK tidak hanya difokuskan pada aspek administrasi dan pembukuan saja tetapi juga dalam hal pengembangan dan pemeliharaan keberlangsungan KSM.

- Memperkuat kapasitas pemandu, sehingga para pemandu mempunyai kemampuan yang cukup baik (materi dan teknik memandu).
 - Pemberian buku-buku petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara tepat waktu dan tepat kebutuhan serta konsisten, khususnya dalam menyusun aturan administrasi dan pengelolaan keuangan. Teknik fasilitasi dalam memberikan pendampingan dan pembinaan KSM juga tidak kalah penting untuk diberikan kepada UPK.
 - Merancang pedoman dan format-format administrasi yang lebih baik sederhana mudah dipahami dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dalam memecahkan masalah, sehingga bisa menjadi media pembelajaran yang baik dan tepat sesuai dengan kondisi masyarakat. Dalam hal ini, KMP/PMT memang memiliki kewenangan mendesain berbagai panduan tersebut, namun sebaiknya KMW bisa diberi kewenangan yang cukup untuk menyederhanakan format tersebut tanpa mengurangi substansi yang ada.
- d) Dalam pelaksanaan kegiatan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh perancang program antara lain:
- Pada pembagian tata peran dalam struktur organisasi pelaksana. Hendaknya KMP memberikan kewenangan yang lebih luas kepada KMW untuk mengoperasikan pedoman dan aturan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan karakteristik wilayah kerja KMW, dengan

demikian setiap pelaksanaan kegiatan tidak perlu menunggu petunjuk teknis dari KMP sehingga kegiatan dapat berjalan lancar.

- Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan latar belakang dan kebutuhan masyarakat, khususnya kebiasaan pemanfaatan waktu dan kultur masyarakat sehingga semua unsur dapat dilibatkan baik laki-laki maupun perempuan, termasuk warga miskin sehingga proses pembelajaran bisa berjalan menyebar dan maksimal.
 - Konsisten dalam menerapkan prinsip pertumbuhan *organic* dalam pemberdayaan masyarakat sehingga partisipasi masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan proyek saja. Hal ini bisa terwujud dengan melaksanakan kegiatan program sesuai dengan kerangka waktu dan tahapan pembelajaran masyarakat.
 - Proses pembangunan KSM tidak hanya diarahkan pada pembentukan kelompok baru tetapi lebih ditekankan pada optimalisasi kelompok-kelompok yang ada di masyarakat seperti kelompok arisan, dasawisma atau kelompok lain yang sudah memiliki ikatan pemersatu yang cukup kuat.
- e) Merancang evaluasi program secara partisipatif berdasarkan factor-faktor *context, input, process dan product*, karena mereka yang mengalami dan merasakan sehingga bisa memberikan penilaian apakah program tersebut bermanfaat bagi mereka atau tidak.
- f) Rancangan program yang mengacu pada factor-faktor *context, process, input, dan product* akan berhasil apabila para pelaku dilapangan terutama

tenaga pendamping masyarakat memiliki kepekaan terhadap masalah dan kebutuhan masyarakat, menguasai teknik-teknik perencanaan partisipatif, memiliki kemampuan analisis permasalahan memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan komitmen yang tinggi.

